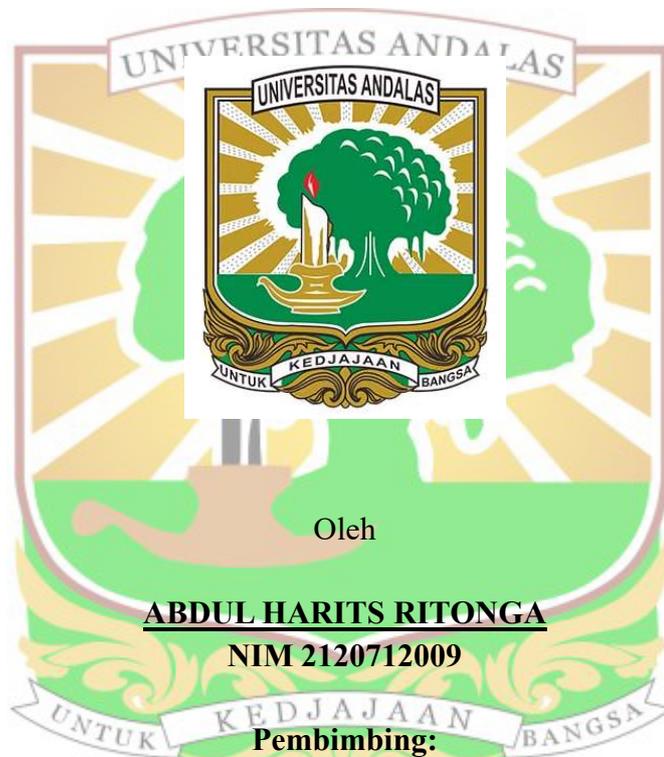


**IDENTITAS KESULTANAN SIAK SRI INDRAPURA  
SEPANJANG SEJARAH  
(1723-2023)**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar  
Magister Humaniora dalam Ilmu Sejarah



Oleh

**ABDUL HARITS RITONGA**

**NIM 2120712009**

**Pembimbing:**

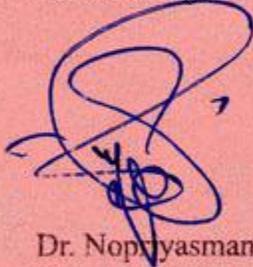
- 1. Dr. Nopriyasman, M.Hum.**
- 2. Yusmarni Djalius, M.A., Ph.D.**

**PROGRAM MAGISTER KAJIAN SEJARAH  
PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis ini telah diperbaiki sesuai dengan kritik dan saran Tim Penguji dan telah dikonstultasikan serta disetujui oleh Tim Pembimbing.

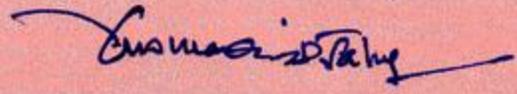
Pembimbing I



Dr. Nopriyasman, M.Hum.  
NIP. 196404021990031001

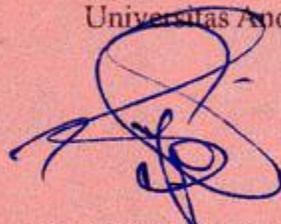
Pembimbing II

Yusmarni Djalius, M.A., Ph.D.  
NIP. 196304011988102001



Mengetahui:

Ketua Prodi Magister Kajian Sejarah  
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Andalas

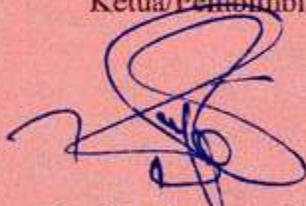


Dr. Nopriyasman, M.Hum.  
NIP. 196404021990031001

**HALAMAN PENGESAHAN**

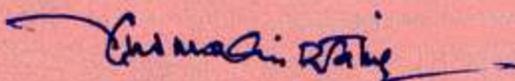
Tesis ini telah diuji dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Program Magister Kajian Sejarah Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas pada 20 Februari 2025

Ketua/Pembimbing I



Dr. Nopriyastaman, M.Hum.  
NIP. 196404021990031001

Sekretaris/Anggota/Pembimbing II



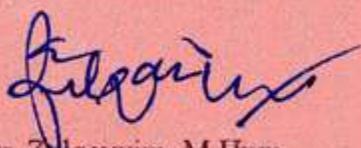
Yusmarni Djalius, M.A., Ph.D.  
NIP. 196304011988102001

Anggota



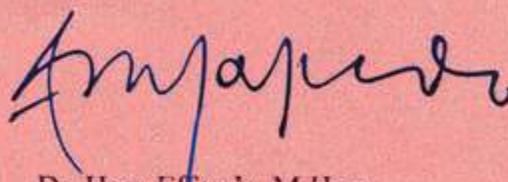
Prof. Dr. Gusti Asnan, M.A.  
NIP. 196208121988111002

Anggota



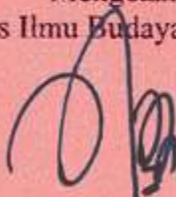
Dr. Zulfayyim, M.Hum.  
NIP. 196309111989011002

Anggota



Dr. Hary Effendy, M.Hum.  
NIP. 197608062005011001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas



Prof. Dr. Ike Revita, M. Hum  
NIP. 197309301999032001

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Harits Ritonga

NIM : 2120712009

Program Studi : Magister Kajian Sejarah  
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Andalas

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "Identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura dalam Sejarah (1723-2023)" ini bebas dari unsur plagiarisme dan belum diajukan untuk memperoleh derajat akademik di suatu perguruan tinggi. Tesis ini bukan merupakan karya atau pendapat yang pernah dituliskan oleh orang lain dan/atau diri saya sendiri, kecuali yang secara tertulis diacu dan dinyatakan dalam naskah ini dan/atau tercantum dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika di kemudian hari ditemukan bukti bahwa pernyataan ini tidak benar.

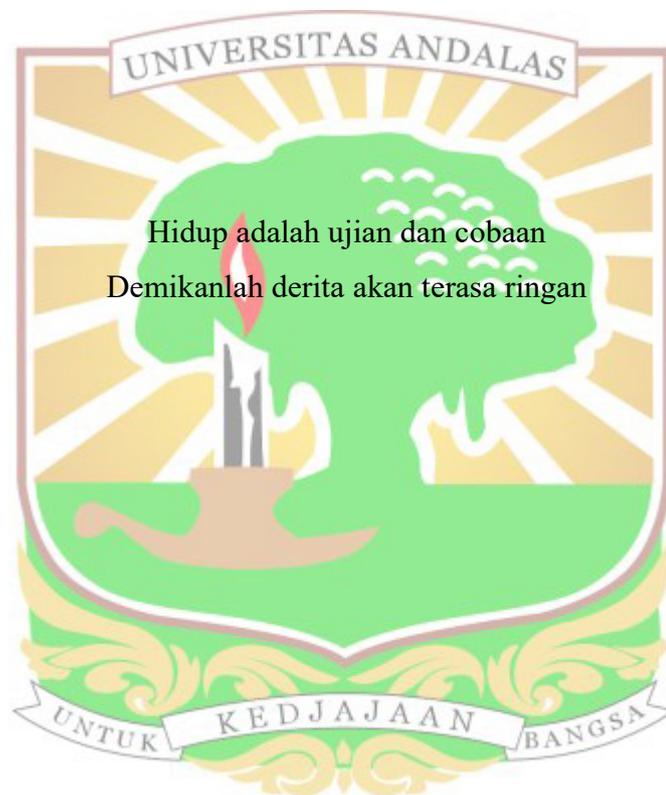
Padang, Februari 2025



Abdul Harits Ritonga

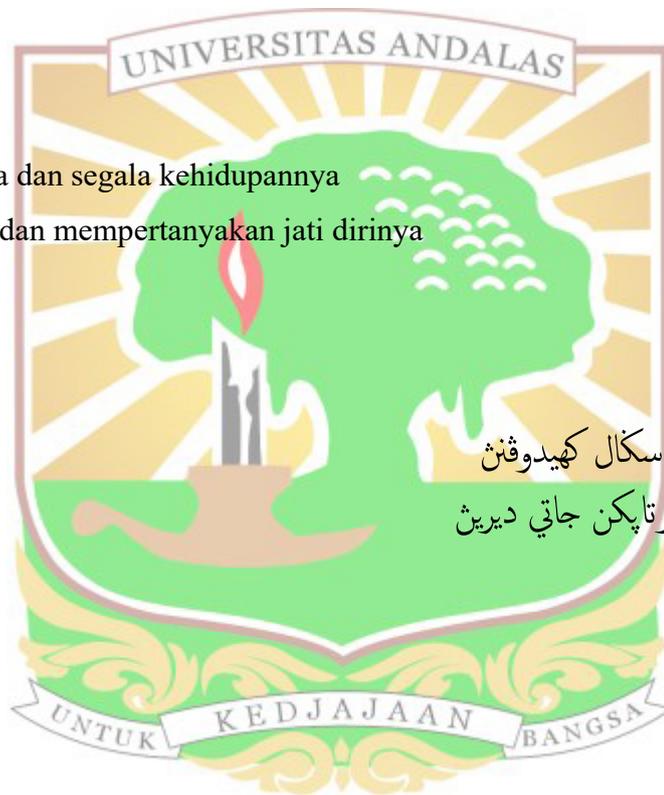
NIM. 2120712009

## HALAMAN MOTTO



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk manusia dan segala kehidupannya  
Yang mencari dan mempertanyakan jati dirinya



اوتق منوسيا دان سكال كهيدوفن  
يغ منچاري دان ممفرتا پكن جاتي ديريش

## KATA PENGANTAR

Atas berkat Rahmat Allah Ta'ala yang senantiasa dipuji dan disyukuri, penulis telah dapat menuntaskan karya ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh gelar Magister Humaniora Universitas Andalas ini. Topik ini terbit dari sebuah kejadian di Pekanbaru, ketika seseorang mengaku dan melantik dirinya sebagai sultan Siak dan membuat seisi kota itu heboh. Kejadian itu menyeret penulis untuk melihat kembali sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura dan bayang-bayangnya yang tampak sekarang.

Penulisan tesis ini tidak akan lancar tanpa adanya kontribusi banyak orang, individu maupun kelompok. Maka penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada semuanya. Pertama, kepada Bapak Dr. Nopriyasman, M.Hum. dan Ibu Dr. Yasmarni Djalius, M.A., Ph.D. yang telah membimbing penulisan sejak rancangan proposal hingga finalisasi tesis. Selanjutnya ialah kepada para penguji: Prof. Dr. Gusti Asnan, Dr. Zulqaiyyim, M.Hum., dan Dr. Hary Effendy, M.Hum., dengan segala masukan dan kritiknya telah membantu pembentukan tesis agar lebih bernas. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada semua dosen yang telah mengajar penulis selama kuliah di kampus ini.

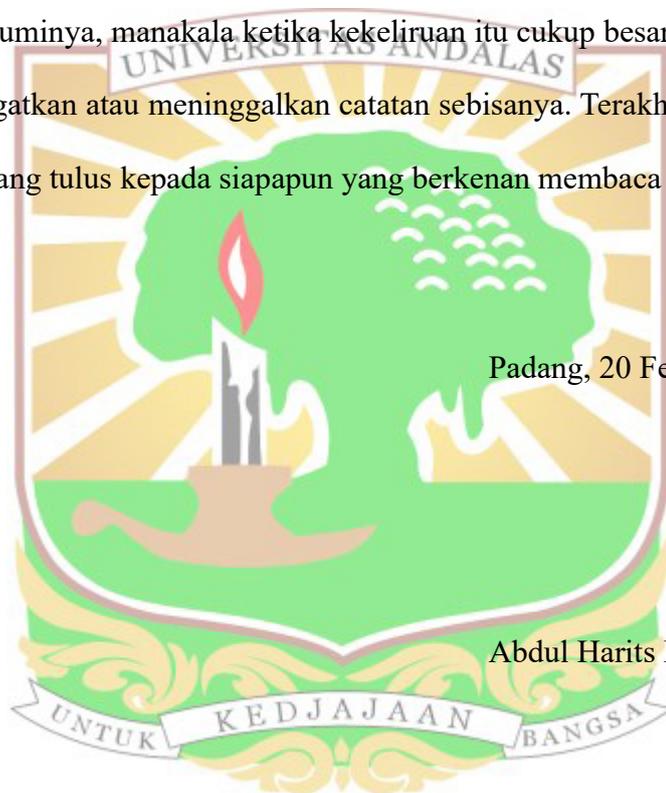
Dalam kesempatan ini, penulis juga berterima kasih kepada orang-orang sekitar hidup penulis, diantaranya—dengan tidak bermaksud tidak sopan karena tidak menyebut gelar—Vicky Kurniawan, Rahmat Irfan Denas, dan Ego Vinda A.P.Y. Arianto, sebagai teman setia, tempat bertukar pikiran, sesekali berkelakar, dan penyemangat dari luar. Ucapan terima kasih yang amat penting dan tak

terhingga dipersembahkan kepada orang-orang yang merupakan kehidupan penulis: Ayah dan Ibu tercinta, Agus Salim Ritonga dan Desmawati, kakak dan abang tercinta, Lily Devani br. Ritonga dan Ibrahim Risjad, serta kemenakan tersayang Maulana Maliq Alfariz.

Sebagus-bagusnya karya tulis ini pun juga masih ada kekeliruan. Sekiranya kekeliruan itu adalah masalah teknis dan hal-hal kecil lainnya, penulis memohon untuk memakluminya, manakala ketika kekeliruan itu cukup besar, penulis mohon untuk mengingatkan atau meninggalkan catatan sebisanya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada siapapun yang berkenan membaca karya ini.

Padang, 20 Februari 2025

Abdul Harits Ritonga



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR PETA .....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
GLOSARIUM.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
ABSTRAK .....	xviii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Pembatasan Masalah Penelitian .....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Tinjauan Pustaka .....	9
1.6. Kerangka Teoretis .....	13
1.7. Metode Penelitian dan Bahan Sumber .....	19
1.8. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II. IDENTITAS KESULTANAN SIAK BERDAULAT (1723-1858).....</b>	<b>22</b>
2.1. Awal Pembentukan Kesultanan Siak.....	22
2.2. Raja Melayu: Kesultanan Siak di bawah Wangsa Abdul Jalil .....	32
2.2.1. Kesultanan Siak di bawah Cabang Tengku Mahmud.....	40
2.2.2. Kesultanan Siak di bawah Cabang Raja Alam dan setelahnya .....	46
2.3. Syarif Arab-Melayu: Kesultanan Siak di Bawah Wangsa Syahabuddin.....	52

<b>BAB III. IDENTITAS KESULTANAN SIAK DARI ZELFBESTUUR</b>	
<b>HINGGA PEMERINTAHAN INDONESIA (1858-1968).....</b>	<b>63</b>
3.1. Awal <i>Zelfbestuur</i> Belanda hingga Syarif Kasim I.....	65
3.2. Syarif Hasyim (1890-1908) .....	68
3.2.1. Kenaikan Takhta dan Awal Pemerintahan.....	70
3.2.2. Kunjungan ke Belanda 1898 .....	74
3.2.3. Kekuasaan Berikutnya .....	87
3.3. Syarif Kasim II (1908-1968).....	94
3.3.1. Syarif Kasim II di bawah Belanda dan Jepang .....	95
3.3.2. Syarif Kasim II saat Kemerdekaan Indonesia.....	102
3.4. Geraka Swapraja Siak .....	106
3.5. Akhir Cerita Syarif Kasim II.....	113
<b>BAB IV. IDENTITAS KESULTANAN SIAK PASCA SYARIF KASIM II</b>	
<b>(1968-2023).....</b>	<b>118</b>
4.1. Menggali dan Menjaga Identitas Siak (1968-1999).....	118
4.2. Identitas Siak sebagai Kabupaten (1999-2023).....	125
4.3. Keekerabatan Resam Kesultanan Siak Sri Indrapura .....	130
4.4. Para Pengklaim Sultan Siak .....	137
4.4.1. Tengku Syatir .....	137
4.4.2. Tengku Ridwan .....	140
4.4.3. Tengku Nazir .....	143
4.5. Kontroversi Klaim Sultan Siak .....	149
<b>BAB V. KESIMPULAN .....</b>	<b>154</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>159</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>171</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penandatanganan Resolusi Pembentukan Swapraja Siak.....104



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gendang Nobat Siak.....	37
Gambar 2. Makam Raja Kecil di Buantan, Siak .....	39
Gambar 3. Suasana Setelah Penobatan Syarif Hasyim .....	72
Gambar 4. Istana Siak (kiri) dan Balai Kerapatan Tinggi (kanan).....	74
Gambar 5. Rekonstruksi Bendera Kesultanan Siak .....	79
Gambar 6. Hadiah Gading Berukir dari Syarif Hasyim kepada Wilhelmina.....	81
Gambar 7. Potret Sultan Syarif Hasyim, 25 Juni 1898 .....	83
Gambar 8. Syarif Hasyim Menghadiri Pelantikan Ratu Wilhelmina.....	85
Gambar 9. Salah Satu Sesi Majelis Kerajaan Siak Sri Indrapura .....	88
Gambar 10. Salah Satu Aktivitas Syarif Kasim II .....	97
Gambar 11. Perayaan Kenaikan Takhta Syarif Kasim II tahun 1940.....	100
Gambar 12. Syarif Kasim II Bekerja Sama dengan Jepang .....	102
Gambar 13. Syarif Kasim II Bersama Panitia Swapraja Siak .....	109
Gambar 14. Kunjungan Moh. Hatta ke Siak tahun 1953 .....	110
Gambar 15. Pemakaman Syarif Kasim II .....	116
Gambar 16. Balai Kerapatan Tinggi sebagai DPRD Kabupaten Siak .....	127
Gambar 17. Tampilan Lambang Kesultanan Siak di Ruang Publik.....	129
Gambar 18. Peresmian Keekerabatan Resam .....	134
Gambar 19. Sosok Syarif Syatir.....	138
Gambar 20. Sosok Syarif Ridwan.....	141
Gambar 21. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Raja dan Sultan se-Indonesia...	144
Gambar 22. Proses Penabalan Syarif Nazir .....	147
Gambar 23. Kunjungan Syarif Nazir ke Selatpanjang.....	148
Gambar 24. Syarif Nazir dalam Simposium LKPASI 2023.....	149

## DAFTAR PETA

Peta 1. Gambaran Lokasi Siak dalam Peta Sederhana.....	23
Peta 2. Wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura pada Tahun 1837.....	56



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Elemen-elemen Kunci yang Membentuk Sebuah Monarki .....	18
Bagan 2. Sistem Pemerintahan Kesultanan Siak Wangsa Abdul Jalil.....	35
Bagan 3. Sistem Pemerintahan Kesultanan Siak Wangsa Syahabuddin hingga 1898 .....	55
Bagan 4. Sistem Pemerintahan Kesultanan Siak masa Syarif Hasyim .....	90



## DAFTAR SINGKATAN

LAMR	: Lembaga Adat Melayu Riau
KKSSI	: Kekerabatan Kesultanan Siak Sri Indrapura
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
TKR	: Tentara Keamanan Rakyat
KNI	: Komite Nasional Indonesia
O.K.	: Orang Kaya (gelar Melayu)
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
WDI	: Wanita Demokrat Indonesia
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
PKI	: Partai Komunis Indonesia



## GLOSARIUM

Anak Gahara	:	Keturunan dari kedua orang tua yang merupakan keturunan raja Melayu
Asisten Residen	:	Pejabat yang mengepalai Afdeeling, tingkatannya di bawah Residen
Identitas	:	Konstruksi sosial yang terdiri dari kategori-kategori yang diberikan oleh masyarakat dan diterima oleh individu untuk memahami diri mereka sendiri
<i>Korte verklaring</i>	:	“Pernyataan Pendek”; pernyataan tunduk oleh sebuah kerajaan Nusantara kepada pemerintah Hindia Belanda
<i>Lange contract</i>	:	“Kontrak Panjang”; perjanjian antara sebuah kerajaan Nusantara dengan Hindia Belanda, yang mempertahankan beberapa kekuasaan kerajaan tersebut manakala dikuasai oleh Hindia Belanda
Monarki	:	Institusi politik yang mewarisi kekuasaannya secara turun temurun
Raja Tua	:	Raja/sultan yang mengundurkan diri dari jabatannya
Residen	:	Pejabat yang mengepalai wilayah Residensi, tingkatannya di bawah gubernur dan di atas Asisten Residen
Sayid	:	Gelar bagi seorang yang merupakan keturunan Ahlul Bait Nabi Muhammad secara patrilineal, seberapapun jauhnya garis keturunan tersebut
Simbol	:	Sistem makna yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan
Swapraja	:	Bentuk daerah khusus di dalam Republik Indonesia, dengan raja/sultan dsb. menjadi kepala daerah dan sistem pergantian kekuasaan secara turun temurun; turunan dari <i>zelfbestuur</i>
Syarif	:	Gelar bagi seorang raja Melayu yang juga merupakan Sayid
Tengku	:	Gelar bagi seseorang yang merupakan keturunan raja Melayu secara patrilineal, seberapapun jauhnya garis keturunan raja tersebut

- Wangsa : Dinasti; garis keturunan yang melanjutkan kekuasaan kerajaan
- Yang Dipertuan Muda : Putra mahkota, penerus raja/sultan ketika telah tiada
- Zelfbestuur* : Wilayah di Hindia Belanda yang kepala pemerintahannya (raja/sultan dsb.) mempertahankan hak dan wewenang sebagai pemimpin selama tidak bertentangan dengan kepentingan Hindia Belanda



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Dokumentasi kunjungan Syarif Hasyim ke Belanda tahun 1898 ....	171
Lampiran 2. Posisi tamu dalam Pelantikan Ratu Wilhelmina di Nieuwe Kerk ...	173
Lampiran 3. Surat Syarif Hasyim kepada Ratu Wilhelmina mengabarkan ketibaannya di Siak. ....	174
Lampiran 4. <i>Fanion</i> Muhammad Bertangkup di Istana Siak.....	176
Lampiran 5. Silsilah Sultan Siak hingga Syarif Kasim II .....	177
Lampiran 6. “Waris Kesultanan Siak Sri Indrapura, Malaysia” .....	178



## ABSTRAK

Kabupaten Siak adalah sebuah daerah muda yang melestarikan warisan sejarah Kesultanan Siak dan menjadi identitas yang paling dibanggakan. Identitas ini pernah tenggelam dalam beberapa dekade, tetapi mencuat kembali hingga berdirinya Kabupaten Siak dan setelahnya. “Efek samping” dari bangkitnya identitas Kesultanan Siak adalah klaim sultan baru. Penelitian dengan metode sejarah ini mengungkap dan menganalisis karakteristik identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura serta perubahannya dari masa ke masa.

Kesultanan Siak hadir sebagai sebuah kerajaan Melayu dengan karakteristik akulturasi kebudayaan Minang, Melayu, dan etnis lokal, dengan tradisi Melayu sebagai basis kerajaan. Ketika Belanda menguasai Siak, kekuasaan sultan dibatasi terus menerus, sehingga muncullah cara baru untuk menunjukkan identitas kesultanan, seperti Syarif Hasyim dengan “modernisasi” kerajaan serta Syarif Kasim II yang berfokus pada pendidikan dan adat sembari memantau perkembangan Hindia Belanda. Hal ini membentuk sikap sultan terakhir tersebut, yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Namun, ia masih berharap bertahannya Kesultanan Siak melalui Swapraja Siak, meskipun akhirnya pupus.

Identitas Kesultanan Siak menjadi salah satu faktor pembentukan Kabupaten Siak pada tahun 1999. Perkembangan ekonomi menyebabkan Siak dapat membina dan memanfaatkan warisan Kesultanan Siak sebagai aset budaya dan pariwisata kabupaten. Sementara itu, Kekebabatan Resam lahir pada tahun 2002 sebagai perwakilan kesultanan, dan beberapa pengklaim sultan baru bermunculan; sampai 2023 terdapat tiga pengklaim. Banyak faktor sulitnya restorasi Kesultanan Siak, termasuk nasab yang tidak dipastikan, kesepakatan keturunan sultan, hingga ada niatan lain di balik upaya tersebut.

**Kata Kunci** : *Identitas Budaya, Kesultanan Siak, Kerajaan Melayu, Kemunculan Sultan, Warisan Sejarah.*



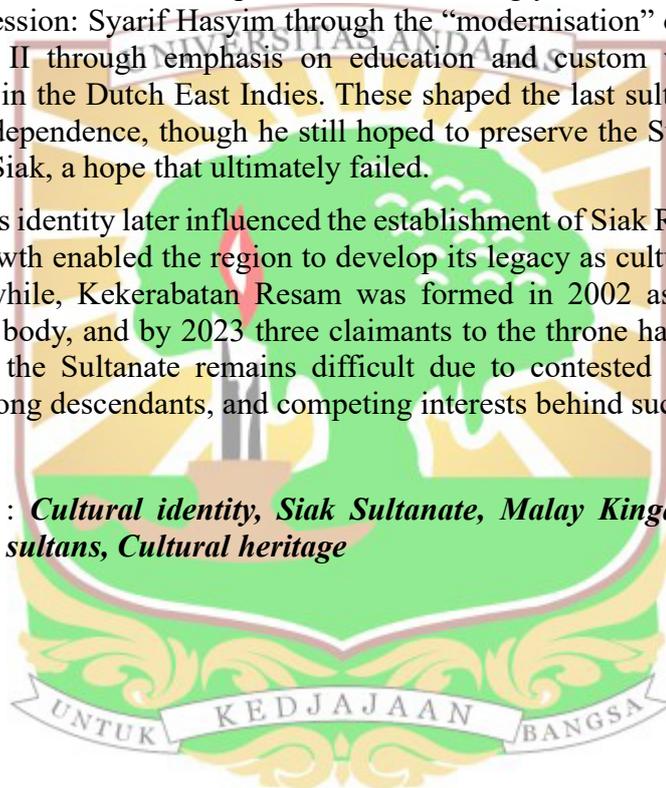
## ABSTRACT

Siak is a young region that preserves the historical legacy of the Siak Sultanate, which has become its most significant identity. This identity had disappeared for several decades but resurfaced with the establishment of Siak Regency. A side effect of this revival was the emergence of new sultan claimants. This study, using historical methods, examines the characteristics of the Siak Sri Indrapura Sultanate's identity and its transformations over time.

The Siak Sultanate arose as a Malay kingdom shaped by the acculturation of Minangkabau, Malay, and local cultures, with Malay tradition as its foundation. Under Dutch rule, the sultan's power was increasingly limited, prompting new forms of expression: Syarif Hasyim through the "modernisation" of the court, and Syarif Kasim II through emphasis on education and custom while following developments in the Dutch East Indies. These shaped the last sultan's support for Indonesian independence, though he still hoped to preserve the Sultanate through the Swapraja Siak, a hope that ultimately failed.

The Sultanate's identity later influenced the establishment of Siak Regency in 1999. Economic growth enabled the region to develop its legacy as cultural and tourism assets. Meanwhile, Kekerabatan Resam was formed in 2002 as the sultanate's representative body, and by 2023 three claimants to the throne had appeared. The restoration of the Sultanate remains difficult due to contested lineage, lack of agreement among descendants, and competing interests behind such claims.

**Keywords** : *Cultural identity, Siak Sultanate, Malay Kingdom, Return of sultans, Cultural heritage*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kabupaten Siak adalah sebuah daerah muda yang baru terbentuk pada tahun 1999. Segera setelah pemekarannya dari Kabupaten Bengkalis tersebut, Siak menjadi salah satu daerah yang produktif akan hasil minyak bumi dan manufakturnya di Provinsi Riau.<sup>1</sup> Namun, yang paling dikenal dari Siak adalah Istana Asserayah al-Hasyimiyah, atau sering disebut Istana Siak dan peninggalan sejarahnya. Apabila kita mengobservasi kecil-kecilan, misalnya mencari kata kunci Siak di *browser* internet ataupun media sosial lainnya, maka kita sering diarahkan kepada konten Istana Siak, atau lebih luasnya sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura. Pemerintah Kabupaten Siak, dengan anggaran yang melimpah, juga gencar melakukan pembangunan objek wisata beserta fasilitasnya di sekitar kawasan cagar budaya Kesultanan Siak Sri Indrapura, di mana Istana Siak menjadi *centrepiece*. Pariwisata yang dikembangkan pemerintah daerah juga mengukung

---

<sup>1</sup> Berdasarkan data *Siak dalam Angka*, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Siak sektor pertambangan, yang sebagian besar adalah minyak bumi dan gas, adalah sekitar Rp 21 triliun pada tahun 2010, melonjak hingga lebih dari Rp 40 triliun pada tahun 2012-2014, dan menurun seiring harga minyak bumi global sejak itu, yang pada tahun 2023 sekitar Rp 28 triliun. Sementara itu, PDRB sektor manufaktur (termasuk pengolahan *pulp*) naik secara konsisten, dari Rp 17 triliun pada tahun 2010, Rp 28 triliun pada tahun 2015, hingga Rp 43 triliun pada tahun 2023.

tema sejarah dan budaya.<sup>2</sup> Intinya, Kabupaten Siak sering diasosiasikan dengan Istana Siak, atau warisan sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura.

Hal ini bukannya tidak berdasar. Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah sebuah kerajaan besar yang pernah berdiri di pesisir timur Sumatera. Keberadaannya unik di antara kerajaan-kerajaan Melayu lainnya, karena masyarakatnya merupakan percampuran antara masyarakat lokal, perantau Minangkabau, dan orang Melayu; sebuah kombinasi masyarakat yang dalam bahasa Barnard disebut *kacu*.<sup>3</sup> Kekuatan angkatan lautnya membuat Kesultanan Siak ditakuti sepanjang Selat Malaka.<sup>4</sup> Dengan kekuasaannya yang mencapai wilayah pesisir timur Sumatera (termasuk Medan dan sekitarnya), Kesultanan Siak menjadi kerajaan yang disegani oleh takluk jajahannya seperti Kesultanan Deli dan Asahan bahkan beberapa masa setelah daerah tersebut bebas dari kekuasaan Siak.<sup>5</sup>

Penjajahan Belanda dan kemerdekaan Indonesia selanjutnya meredupkan identitas Siak, baik sebagai wilayah maupun sejarah kesultannya. Hal ini disebabkan selama zaman Kolonial Kesultanan Siak tidak dapat berkembang pesat sebagaimana kota-kota lainnya di Sumatera, meskipun masih bisa mengandalkan pelayaran yang lalu lalang sepanjang Sungai Siak. Setelah kemerdekaan Indonesia,

---

<sup>2</sup> Abdul Harits Ritonga dan Siti Fatimah, “Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Kesultanan Siak Sri Inderapura sebagai Objek Wisata (2006-2019)”, *Kronologi*, vol. 2 no. 4 tahun 2020, hlm. 124.

<sup>3</sup> Timothy P. Barnard, *Multiple Centres of Authority: Society and Environment in Siak and Eastern Sumatra, 1674-1827* (Leiden: KITLV Press, 2003), hlm. 1-2.

<sup>4</sup> John Anderson, *Mission to the east coast of Sumatra in 1823* (Edinburgh: William Blackwood, 1826), hlm. 342.

<sup>5</sup> “Een bladzijde geschiedenis” Het nieuws van den daag voor Nederlandsch-indie, 23 September 1924.

wilayahnya dimasukkan sebagai sebuah kecamatan dalam Kabupaten Bengkalis, Riau. Bila wilayah Riau sebagai bagian Sumatera Tengah pada tahun 1950-1957 dianggap tidak diperhatikan,<sup>6</sup> maka terlebih lagi Kecamatan Siak. Situasi ini tidak berubah ketika Provinsi Riau dibentuk, dan tidak pernah berubah sampai akhir periode Orde Baru.

Situasi ini diperparah dengan sentralisme Orde Baru, misalnya dalam hal politik dengan menolak aspirasi daerah mengenai kepala daerah mereka, atau dalam hal ekonomi dengan penguasaan sektor minyak bumi yang hasilnya tidak dinikmati oleh daerah,<sup>7</sup> dan lain sebagainya. Namun, hal ini tidak menghilangkan ingatan masyarakat Siak mengenai sejarah mereka. Perjuangan pembentukan Kabupaten Siak dengan wilayah hampir seluas wilayah Kesultanan Siak zaman kolonial dapat dianggap sebagai representasi ingatan sejarah tersebut.<sup>8</sup> Segera setelah pembentukan Kabupaten Siak, mereka memanfaatkan warisan sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura untuk membangun identitasnya, mulai dari Istana Siak sebagai fitur lambang Kabupaten Siak, hingga pemanfaatan cagar budaya Istana Siak dan sekitarnya sebagai objek wisata Kabupaten Siak.

Dengan latar belakang sejarahnya, pembentukan Kabupaten Siak dan penonjolan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura melahirkan fenomena lain. Beberapa orang yang mengaku sebagai keturunan sultan Siak mengklaim sebagai

---

<sup>6</sup> Gusti Asnan, *Memikir ulang regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an* (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 230.

<sup>7</sup> Destra Wati, Nopriyasan dan Wannofri Samry, "Riau Pascakeluar dari Sumatera Tengah 1957-1985", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 7 no. 1, tahun 2020, hlm. 41-49.

<sup>8</sup> Proses pembentukan Kabupaten Siak dapat dilihat lebih lanjut dalam *Sejarah Pembentukan Kabupaten Siak*.

sultan baru dan berupaya mendirikan kembali Kesultanan Siak Sri Indrapura. Meskipun mendapat dukungan dari beberapa pihak, banyak yang mengecam aksi ini. Dalam kasus terakhir di mana Tengku Nazir menabalkan diri sebagai sultan Siak, berbagai tokoh masyarakat menolaknya,<sup>9</sup> termasuk lembaga yang dianggap resmi mewakili Kesultanan Siak, Kekerabatan Resam Keluarga Kerajaan Siak.<sup>10</sup>

Klaim sultan Siak baru ini adalah bagian dari fenomena “kembalinya para sultan” pada masa setelah Reformasi. Fenomena ini telah dilihat oleh Van Klinken sebagai contoh gerakan identitas daerah masa Reformasi dan konsekuensi dari otonomi daerah. Beberapa institusi monarki (kesultanan, kerajaan, kedatuan dan sejenisnya) didirikan kembali, bukan untuk menegakkan kedaulatan politik mereka, melainkan atas nama pelestari adat dan budaya daerah.<sup>11</sup> Contoh gerakan pendirian kesultanan di Indonesia yang berhasil adalah Kesultanan Kutai Kartanegara pada tahun 2001 yang, bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, membentuk identitas kebudayaan daerah tersebut, seperti pembangunan Kedaton

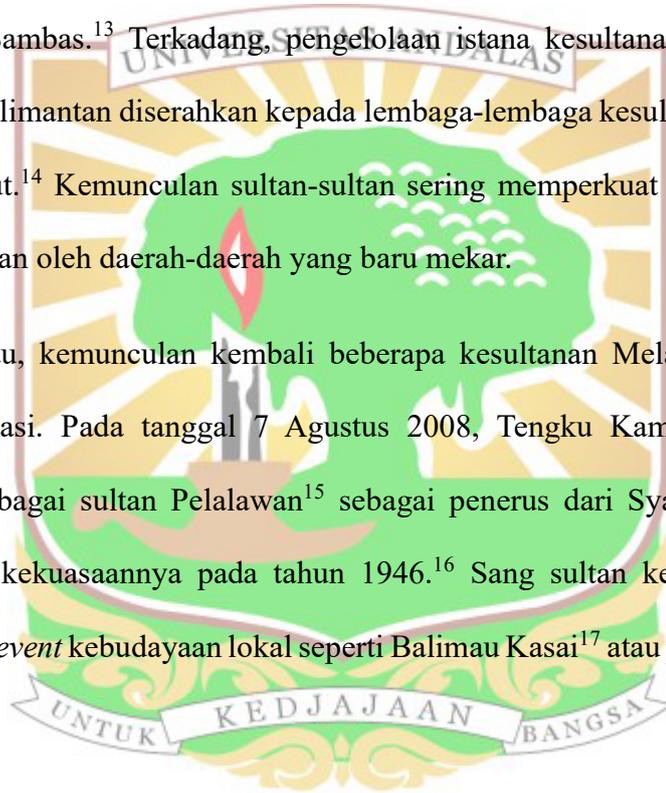
<sup>9</sup> “Penabalan Tengku Muhammad Nazir sebagai Sultan Siak XII Ditolak Zuriyat Syah” <https://potret24.com/artikel/penabalan-tengku-muhammad-nazir-sebagai-sultan-siak-xiii-ditolak-oleh-zuriyat-syah/>, diakses tanggal 7 Februari 2025.

<sup>10</sup> “PERNYATAAN LEMBAGA KEKERABATAN RESAM KELUARGA KERAJAAN SIAK TERKAIT PENOBATAN SULTAN SIAK KE-13”, <https://www.youtube.com/watch?v=thtR2bp11BI>, diakses tanggal 14 Juni 2023; lihat juga “Zuriyat Sah Kesultanan Siak Tolak Penabalan Tengku Muhammad Nazir sebagai Sultan Siak XIII”, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/85887/2022/06/15/zuriyat-sah-kesultanan-siak-tolak-penabalan-tengku-muhammad-nazir-sebagai-sultan-siak-xiii#sthash.yYG8Ip70.dpbs>, diakses tanggal 14 Juni 2023.

<sup>11</sup> Gerry van Klinken, “Return of The Sultans: the Communitarian Turn in Local Politics,” dalam *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: the Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism* (London: Routledge, 2007) hlm. 149-151.

Kutai Kartanegara hingga menyelenggarakan *event* tahunan Festival Erau.<sup>12</sup> Berbagai daerah di Kalimantan juga menghidupkan kesultannya kembali, seperti Landak dan Sambas.<sup>13</sup> Terkadang, pengelolaan istana kesultanan yang menjadi museum di Kalimantan diserahkan kepada lembaga-lembaga kesultanan yang telah berdiri tersebut.<sup>14</sup> Kemunculan sultan-sultan sering memperkuat identitas daerah yang dibutuhkan oleh daerah-daerah yang baru mekar.

Di Riau, kemunculan kembali beberapa kesultanan Melayu juga terjadi pasca Reformasi. Pada tanggal 7 Agustus 2008, Tengku Kamaruddin Harun, dinobatkan sebagai sultan Pelalawan<sup>15</sup> sebagai penerus dari Syarif Harun yang menyerahkan kekuasaannya pada tahun 1946.<sup>16</sup> Sang sultan kemudian banyak terlibat dalam *event* kebudayaan lokal seperti Balimau Kasai<sup>17</sup> atau penganugerahan



<sup>12</sup> Fadli Afriandi & Fachriza Ariyadi, “Efek Domino Pasca Dibangkitkannya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura”, *Reformasi* Vol. 10 No. 2, 2020, hlm. 127-139

<sup>13</sup> Gerry van Klinken, op. cit., hlm. 149

<sup>14</sup> Bernard Sellato, “Sultans’ Palaces and Museums in Indonesian Borneo: National Policies, Political Decentralization, Cultural Depatrimonization, Identity Relocalization, 1950-2010”, *Archipel* [Online] no. 89 tahun 2015, hlm. 143.

<sup>15</sup> Meskipun catatan dan dokumentasi peristiwa ini belum ditemukan, perwakilan Kesultanan Pelalawan menegaskan penobatan Syarif Kamaruddin pada tanggal tersebut saat membuat klarifikasi terkait sebuah insiden, “Pers Rilis Lembaga Perangkat Kesultanan Pelalawan” <https://radarpekanbaru.com/news/detail/19274/pers-rilis--lembaga-perangkat-kesultanan-pelalawan-lpkp>, diakses tanggal 31 Januari 2024.

<sup>16</sup> Desi Purnama Indah, Isjoni & Kamaruddin, “Pemerintahan Sultan Syarif Harun di Kerajaan Pelalawan Tahun 1940-1945”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan* Vol. 4 No. 2, 2017, hlm.

<sup>17</sup> “Mandi Balimau Sultan Tradisi Turun Temurun Menyambut Bulan Suci Ramadhan di Negeri Seiya Sekata”, <https://pelalawanpos.co/news/detail/1079/mandi-balimau-sultan-tradisi-turun-temurun-menyambut-bulan-suci-ramadhan-di-negeri-seiya-sekata>, diakses tanggal 31 Januari 2024.

gelar adat.<sup>18</sup> Kerajaan Gunung Sahilan didirikan kembali pada 22 Januari 2017.<sup>19</sup> Berbeda dengan fenomena “kembalnya para sultan” di Riau, klaim sultan Siak dan upaya mendirikan kembali Kesultanan Siak Sri Indrapura malah menimbulkan kontroversi.

Keberadaan Kesultanan Siak Sri Indrapura, kekhasan kebudayaan Siak dalam sejarahnya, redupnya identitas Siak semasa Kolonial Belanda hingga Orde Baru, kemunculan kembali identitas Siak yang melahirkan pembentukan Kabupaten Siak serta pemanfaatan identitas kesultanan, hingga munculnya fenomena klaim sultan Siak baru adalah menarik untuk dikaji. Oleh sebab itu, penulis menyelenggarakan penelitian dengan hasil sebuah tesis berjudul “Identitas Kesultanan Siak Sepanjang Sejarah (1723-2023).”

## 1.2. Perumusan Masalah

Masalah pokok pada penelitian ini adalah perkembangan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura, yang dibagi dalam tiga keadaan. Pertama, ketika Kesultanan Siak masih berdiri sebagai kerajaan merdeka dan memiliki kekuasaan yang luas. Kedua, ketika Kesultanan Siak berada di bawah kekuasaan yang lebih kuat darinya, yakni Belanda, dan kemudian Indonesia. Ketiga, ketika Kesultanan

<sup>18</sup> “Ketua DPD RI Menerima Penganugerahan Gelar Adat dari Kesultanan Pelalawan”, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/588511/ketua-dpd-ri-menerima-penganugerahan-gelar-adat-dari-kesultanan-pelalawan?show=>, diakses tanggal 31 Januari 2024.

<sup>19</sup> “Penobatan Pewaris Kerajaan Gunung Sahilan Kampar Dihadiri Raja Raja Se-Nusantara” <https://riaukarya.com/read/detail/714/regional/kampar/Dimulai%2018%20Desember%202024>, diakses tanggal 7 Februari 2025.

Siak sudah tidak ada lagi, yakni mereka yang masih hidup merekonstruksi identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura.

Dengan demikian, penulis mengajukan tiga rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses perkembangan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura pada masa kedaulatannya secara penuh (1723-1858), apa saja identifikasi pembentukannya dan mengapa proses tersebut terjadi?
- b. Bagaimana proses perkembangan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura pada masa dikuasai oleh Belanda dan Indonesia (1858-1968), apa saja identifikasi pembentukannya dan mengapa proses tersebut terjadi?
- c. Bagaimana proses perkembangan dan dinamika identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura dengan tidak adanya kesultanan tersebut (1968-2023), apa saja identifikasi pembentukannya, apa saja fenomena yang terjadi dan mengapa hal tersebut terjadi?

### 1.3. Pembatasan Masalah Penelitian

Penulis membatasi penelitian ini, dari segi spasial, di dalam ranah pembahasan Kesultanan Siak Sri Indrapura dan Kabupaten Siak. Kesultanan Siak merupakan objek kajian penelitian ini, dan Kabupaten Siak kurang lebih dapat dianggap sebagai penerus wilayah bekas Kesultanan Siak. yang dalam sejarah merupakan tempat berkembangnya Kesultanan Siak Sri Inderapura. Fokus penulis terpusat pada wilayah historis tersebut. Dari segi temporal, penulis mengambil titik kajian dari tahun 1723 hingga 2023. Tahun 1723 adalah berdirinya Kesultanan Siak

Sri Indrapura, meskipun latar belakangnya dapat ditarik sedikit jauh dari tahun 1699 yang diyakini tahun kelahiran Raja Kecil. Tahun 2023 adalah aktivitas terakhir Tengku Nazir, pengklaim sultan Siak, yang masih dapat dilacak. Panjangnya rentang waktu ini adalah untuk menunjukkan bahwa terjadi perubahan, kesinambungan, dan keterputusan pada identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura.

#### 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis bertujuan untuk:

1. Menganalisis pembentukan dan perkembangan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura pada masa kedaulatannya (1723-1858).
2. Menganalisis pembentukan dan perkembangan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura pada masa dikuasai hingga Syarif Kasim II meninggal (1858-1968).
3. Menganalisis pembentukan dan perkembangan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura setelah kesultanan tersebut tidak ada lagi (1968-2023), termasuk fenomena yang muncul dan analisisnya.

Penelitian ini bermanfaat dari segi teoretis dan praktis. Penelitian mengenai identitas daerah berdasarkan sejarah monarki dan kemunculan monarki di Indonesia pasca Reformasi masih sangat sedikit, sehingga penelitian ini akan membantu memperkaya literatur mengenai hal tersebut, begitu juga dengan ragam motif dan model kemunculan monarki yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini juga akan bermanfaat untuk memberi perspektif baru berkaitan dengan kebudayaan (*tamaddun*) Melayu dan unsur-unsurnya.

Segi praktis penelitian ini adalah memberikan pemahaman terhadap persoalan yang dihadapi pihak-pihak berkonflik terkait dengan pihak yang berupaya mendirikan kembali Kesultanan Siak Sri Inderapura, begitu juga dengan kasus yang sama di Indonesia.

### 1.5. Tinjauan Pustaka

Karya terbaik mengenai dinamika identitas Kesultanan Siak adalah *Multiple Centres of Authority: Society and Environment in Siak and Eastern Sumatra, 1674-1827*, ditulis oleh Timothy P. Barnard.<sup>20</sup> Karakteristik pesisir timur Sumatera menyebabkan corak Kesultanan Siak berbeda dengan negeri-negeri Semenanjung Melayu. Dari bentang alam, wilayah tersebut merupakan hutan tropis yang lebat di timur, memanjang hingga ke hamparan hutan bakau berawa, dan bermuara ke Selat Malaka yang ramai. Dari segi sosial, wilayah ini merupakan tempat tinggal berbagai macam suku bangsa, seperti perantauan Minangkabau, orang Melayu, masyarakat lokal, hingga pedagang India, Tionghoa, Arab, Jawa, Bugis, dan lain sebagainya. Kemampuan seorang raja dalam menghimpun masyarakat ini terbukti menentukan apakah kehidupan Kesultanan Siak berlangsung damai atau terjadi kekacauan.

Karya spesifik dan detail mengenai kerajaan-kerajaan Nusantara yang muncul pada masa Reformasi adalah karya Gerry van Klinken yang berjudul “Return of The Sultans: The Communitarian Turn in Local Politics”.<sup>21</sup> Van Klinken telah mengamati maraknya kemunculan sultan-sultan di berbagai daerah di

---

<sup>20</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*

<sup>21</sup> Gerry van Klinken, *op. cit.*, hlm. 149-169.

Indonesia sekitar era Reformasi dan setelahnya. Van Klinken mencatat 25 kerajaan yang ada di Indonesia—meski tidak mewakili daftar seluruh monarki se-Indonesia—16 di antaranya dimunculkan melalui pemulihan (*resurreciton*) dan pembentukan kembali (*reinvention*). Pemulihan terjadi pada kesultanan yang dihapuskan pada masa Republik Indonesia oleh kebijakan Sukarno, sedangkan pembentukan kembali terjadi pada kesultanan yang bubar jauh pada masa Hindia Belanda. Beberapa sultan yang masih bertahan meningkatkan citra mereka untuk mendapat simpati di hadapan publik. Ia mendiskusikan bagaimana memahami kemunculan ‘kesultanan’ di Indonesia kontemporer sebagai bentuk negosiasi republikanisme dengan kebudayaan lokal, bukan sebuah langkah kemunduran, melainkan sebagai “penawar dari perpecahan modernitas” dan membawa “keharmonisan sosial baru” dengan peran mereka sebagai pengayom budaya. Namun, ia tetap mewaspadaai sikap oportunistik feodalistik yang bisa muncul dan pengabaian peran baru mereka sendiri terhadap permasalahan daerah yang membutuhkan kharisma seorang tokoh lokal.

Mengenai kondisi kesultanan-kesultanan Melayu di Indonesia, Hakimul Ikhwan dan Fachry Aidulsyah menulis “Sultanates and the Making of Nationhood in Indonesia and Malaysia”.<sup>22</sup> Tulisan ini adalah perbandingan antara kesultanan di Malaysia dan Indonesia, mulai dari latar belakang perlakuan kolonial hingga situasi pascakolonial. Kolonialisme Inggris di Malaya menciptakan “pemerintahan kolonial tidak langsung” dengan memanfaatkan sultan yang berkuasa dalam

---

<sup>22</sup> Hakimul Ikhwan & Fachry Aidulsyah, “Sultanates and the Making of Nationhood in Indonesia and Malaysia”, dalam *Asian Journal of Social Science* no. 48 tahun 2020, hlm. 339-352

administrasi mereka. Kontras, pemerintahan Hindia Belanda selalu bersifat antagonis dengan otoritas lokal dan menciptakan sistem baru yang menumpangtindihkan sistem lama. Popularitas republikanisme di Indonesia telah mencoreng citra kesultanan yang dianggap feodal dan tidak mendukung Republik Indonesia, dan meskipun pemerintah memberi kesempatan eksistensi mereka dengan memberi status swapraja, peran politik mereka akhirnya lenyap oleh rezim Sukarno dan Suharto. Malaysia yang mengadopsi federalisme telah menjaga eksistensi kesultanan Melayu dengan memberi kuasa mereka sebagai kepala negara masing-masing negeri. Sementara perkembangan kesultanan di Indonesia kemudian diasosiasikan dengan pelestarian adat, institusi kesultanan di Malaysia semakin penting sebagai pelestari agama Islam dan bangsa Melayu di tengah multikulturalisme negara tersebut.

Salah satu kasus *resurrection* monarki yang juga termasuk dalam kasus kemunculan monarki di Indonesia pasca Reformasi adalah Kerajaan Pagaruyung. Meskipun baru direstorasi pada tahun 2004, ide dan faktor pencetusnya telah berkembang beberapa dekade sebelumnya, dengan Istana Basa Pagaruyung sebagai representasi. Nopriyasman dalam “Politik Representasi Istana Basa Pagaruyung sebagai Identitas Minangkabau di Sumatera Barat”<sup>23</sup> telah meneliti Istana Basa Pagaruyung sebagai pembangkit citra Minangkabau dan sejarahnya yang gemilang, di tengah hegemoni politik Orde Baru yang sentralistik dan menuntut keseragaman. Representasi istana monumental tersebut membawa dampak, salah satunya

---

<sup>23</sup> Nopriyasman, “Politik Representasi Istana Basa Pagaruyung sebagai Identitas Minangkabau di Sumatera Barat”, *disertasi* (Denpasar: Program Studi Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2011), *passim*.

dimanfaatkan oleh golongan keturunan raja Pagaruyung untuk merestorasi institusi Yang Dipertuan Rajo Alam beserta perangkat-perangkatnya, ditambah dengan relasi yang baik dengan institusi budaya lokal, sehingga restorasi itu terwujud secara resmi pada tahun 2004. Kasus lainnya adalah Kesultanan Jailolo di timur<sup>24</sup> dan Cirebon di Jawa Barat.<sup>25</sup>

Mengenai Kesultanan Siak Sri Inderapura, penulis mengambil sebuah karya sejarah yang menyinggung Sultan Syarif Kasim II dan kemungkinan suksesinya. *Sejarah Kerajaan Siak*, karya O.K. Nizami Jamil *et al.*<sup>26</sup> menceritakan sejarah Kesultanan Siak Sri Inderapura secara detail sejak pendiriannya oleh Raja Kecil pada akhir abad 18 hingga wafatnya sultan Siak terakhir pada 1969. Salah seorang penulisnya, Nizami Jamil, adalah anak dari seorang sekretaris Sultan Syarif Kasim II yang menjadi saksi sejarah Siak pada masa kemerdekaan Indonesia. Berbeda dengan sultan sebelumnya, tulisan mengenai sultan terakhir tersebut sangat bernuansa nasionalistik, mulai dari perlawanan diam-diam terhadap kolonial Belanda, perannya dalam masa pendudukan Jepang, hingga dukungannya terhadap Republik Indonesia, termasuk menyumbangkan 13 juta Gulden untuk pemerintahan republik. Dalam bab terakhir, mereka membahas kemungkinan penerus Sultan Syarif Kasim II, yang telah mengintegrasikan diri ke dalam Republik Indonesia dan tidak menghasilkan keturunan sebelum kesultanan itu

---

<sup>24</sup> Mustafa Mansur dan Rusli M. Said, *Dinamika Sosial-Politik Kesultanan Jailolo (2002-2017)*, *Jurnal Etnohistori*, Vol. V, No. 2, Tahun 2018 110-135.

<sup>25</sup> Shelvy Nujuliyani, "Suksesi dan Konflik (Studi atas Jumenengan Sultan Sepuh XV Keraaton Kasepuhan Cirebon pada Tahun 2020)", *skripsi* (Jakarta: Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), *passim*.

<sup>26</sup> O.K. Nizami Jamil *et al.*, *op. cit.*, hlm. 185-186.

berakhir. Sang sultan memiliki adik tiri yang bernama Tengku Long Putih. Sepertinya para penulis telah sadar bahwa ada beberapa pihak yang ingin mengklaim takhta—atau harta—Kesultanan Siak Sri Inderapura, sehingga mereka memberi contoh bahwa sang adik tiri sultan tidak dapat mengklaim takhta Siak karena telah menjadi warga negara Singapura dan menikahi seorang Belanda Kristen.

Dari segi peninggalan pada masa kontemporer, topik yang sering diusung berkaitan dengan sejarah Kesultanan Siak Sri Inderapura adalah bagaimana objek tersebut dipelihara dan dimanfaatkan sebagai cagar budaya. “Hubungan Perkembangan Kota Siak Sri Indrapura dengan Kawasan Cagar Budaya Istana Asserayah Al-Hasyimiah” karya Aidil Kurniawan<sup>27</sup> mengamati bagaimana pemerintah Kabupaten Siak mengatur pembangunan dan tata kota di sekitar kawasan cagar budaya Kesultanan Siak Sri Indrapura. Penulis sendiri juga telah meneliti bagaimana Kabupaten Siak merancang dan melaksanakan pariwisata sejarah dan budaya di kawasan cagar budaya tersebut sesuai dengan kriteria *sustainable tourism*.<sup>28</sup>

## 1.6. Kerangka Teoretis

Penelitian ini berfokus pada identitas yang berkembang pada Kesultanan Siak Sri Indrapura. Kwame Anthony Appiah berpendapat sebagai berikut. *Pertama,*

---

<sup>27</sup> Aidil Kurniawan, “Hubungan Perkembangan Kota Siak Sri Indrapura dengan Kawasan Cagar Budaya Istana Asserayah Al-Hasyimiah”, *skripsi* (Yogyakarta: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, 2017).

<sup>28</sup> Abdul Harits Ritonga & Siti Fatimah, *loc. cit.*

Setiap identitas datang dengan pelabelan, sehingga untuk memahami identitas seseorang harus memahami label tersebut. *Kedua*, identitas tersebut dianggap penting bagi pemegangnya. Hal ini karena identitas dapat memberikan gambaran bagaimana seseorang dapat cocok dengan dunianya. Selain itu, identitas membentuk pikiran dan tindakan pemegangnya, yakni alasan mengapa mereka berpikir atau bertindak dengan cara tertentu. *Ketiga*, identitas membentuk pikiran dan tindakan orang lain kepada pemegang identitasnya, baik terhadap sesama ataupun orang-orang yang berbeda identitas.<sup>29</sup>

Stuart Hall menjelaskan ada dua posisi berbeda dalam memahami identitas budaya. Posisi *pertama* menjelaskan konsep identitas budaya sebagai sebuah budaya bersama yang satu, berdasarkan kesamaan keturunan dan sejarah, yang semacam ‘jati diri’ yang kolektif, sebagai ‘sebuah bangsa’.<sup>30</sup> Konsepsi identitas budaya semacam ini memainkan peran penting dalam perjuangan bangsa yang terjajah, termasuk Indonesia dengan beribu latar sosial-budaya yang berbeda disatukan dengan penjajahan Belanda dan kesamaan rumpun. Pandangan kedua adalah bahwa sebagaimana banyak persamaan, ada titik kritis perbedaan yang mendalam dan signifikan, yang membentuk “apakah kita yang sebenarnya”, atau—karena keterlibatan sejarah—“kita telah menjadi apa”. Identitas budaya datang dengan sejarah, yang tentu mengalami perubahan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Kwame Anthony Appiah, *The Lies that Bind: Rethinking Identity: Creed, Country, Colour, Class, Culture* (London-New York: Liveright Publishing Corporation, 2018), hlm. 10-14.

<sup>30</sup> Stuart Hall, “Cultural Identity and Diaspora”, dalam Jonathan Rutherford, *Identity: Community, Culture, Difference* (London: Lawrence & Wishart), hlm. 223.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 225.

Setiap identitas kebudayaan dibentuk oleh suatu kelompok melalui penciptaan simbol-simbol budaya berikut makna dan gagasannya, yang kemudian memiliki sejarah dan dilestarikan turun temurun. Dari perspektif komunikasi, sebuah identitas budaya diciptakan, dinegosiasikan, diteguhkan, dan ditantang melalui komunikasi. Identitas tersebut muncul ketika terjadi pertukaran pikiran antar manusia. Persamaan dan perbedaan identitas bergantung pada posisi seseorang (kelompok) dengan orang (kelompok) lain, pentingnya identitas tersebut bagi mereka masing-masing, topik dan konteks, serta interpretasi dan atribusi. Karakteristik dari identitas budaya terdiri dari tujuh macam yaitu: sudut pandang pribadi, yakni *avowal* (pengakuan dari diri sendiri) dan *ascription* (pengakuan dari orang lain); cara mengekspresikan identitas tersebut, yakni melalui *core symbols* (simbol inti), *labels* (label) dan *norms* (norma); ruang lingkup identitas, baik secara individual, relasional, maupun komunal, sifat identitas antara bertahan (*enduring*) dan berubah (*changing*); komponen kognitif, afektif dan behavioral dari sebuah identitas; interpretasi dari kandungan dan relasinya, antar golongan yang saling berinteraksi; serta ciri khas (*salience*) dan ragamnya (*variation*).<sup>32</sup>

Manuel Castells membagi tiga macam pembentukan identitas. Pertama, *legitimizing identity*, yakni identitas yang terbentuk dari lembaga sosial terstruktur yang dominan beserta agennya (aktor sosial) untuk memperluas dan menjadikan identitas itu masuk akal dalam kehidupan masyarakat. Kedua, *resistance identity*, muncul dari kelompok/masyarakat yang berada di dalam kondisi tertekan

---

<sup>32</sup> Mary Jane Collier, "Cultural Identity and Intercultural Communication", dalam Larry A. Samovar, Richard E. Porter, Edwin R. McDaniel, Carolyn Sexton Roy, *Intercultural Communication: A Reader, 14th edition* (Boston: Cengage Learning, 2015), hlm. 56-59.

(direndahkan atau dilabeli stereotip) sehingga menegaskan diri dengan prinsip-prinsip, atau karakteristik, yang berbeda dengan masyarakat dominan. Ketiga, *project identity*, yakni ketika aktor sosial merangkai identitas baru berdasarkan modal budaya yang tersedia yang membentuk ulang posisi masyarakatnya dengan yang lain.<sup>33</sup>

Untuk memahami kerajaan dalam penelitian ini, kita harus mendudukan konsep dasarnya. Monarki dalam bentuk aslinya adalah “a state ruled by a single absolute hereditary ruler” (suatu negara yang diperintah oleh seorang penguasa turun temurun yang mutlak)<sup>34</sup> dan merupakan salah satu bentuk pemerintahan tertua di dunia. Monarkisme berarti “a belief in the necessity or desirability of monarchy” (keyakinan akan kemestian dan keinginan pada monarki).<sup>35</sup> Namun, makna monarkisme berbeda menurut pembahasan zamannya. Ketika berbicara dalam konteks sebelum abad ke-18, monarkisme berkaitan dengan sikap ideal seorang raja dalam pemerintahannya yang absolut, terutama pada abad ke-17 dan 18,<sup>36</sup> dan setelah Revolusi Prancis monarki selalu dipasangkan dengan rivalnya, republikanisme. Pada masa kontemporer, pendukung monarkisme mengukung monarki terbatas dan mendasari dukungan tersebut pada kegunaan institusi tersebut

<sup>33</sup> Manuel Castells, *The Power of Identity*, 2<sup>nd</sup> edition (West Sussex: John Wiley & Sons Ltd., 2010), hlm. 8.

<sup>34</sup> Vernon Borgdanon, *The Monarchy and the Constitution* (New York: Clarendon Press, 1995), hlm. 1.

<sup>35</sup> Lincoln Allison, “Monarchism”, dalam Garret W. Brown, Iain McLean & Alistair McMillan (editor), *The Concise Oxford Dictionary of Politics & International Relations* (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm. 857-858.

<sup>36</sup> Hans Blom, John Christian Laursen, dan Luisa Simonutti, “Introduction, dalam Hans Blom, John Christian Laursen, dan Luisa Simonutti (ed.), *Monarchisms in the Age of Enlightenment: Liberty, Patriotism, and the Common Good* (Toronto: University of Toronto Press, 2007), hlm. 3-15.

dalam konteks tertentu, termasuk perwujudan simbolis dari sejarah suatu negara.<sup>37</sup> Penelitian kontemporer mengenai monarkisme membahas beberapa negara bekas monarki yang rakyatnya masih memiliki dukungan terhadap restorasi monarki seperti di Serbia, Rumania dan Bulgaria.<sup>38</sup>

Namun, monarki sering dipahami dalam konteks politik skala besar, yaitu negara, baik absolut maupun konstitusional, dan sebagai lawan dari republikanisme. Membatasi konteks monarki sebagai institusi politik praktis akan menutupi diskusi dari aspek lain, seperti sosiologi dan antropologi. Secara khusus, kemunculan kembali monarki di Indonesia tidak membawa konsekuensi politik apapun. Untuk memahami monarki secara luas, Woodacre membuat konsepsi berdasarkan tiga area dengan masing-masing tiga komponen kunci.<sup>39</sup> Komponen penentu peran seorang raja terletak pada *power* (kekuasaan), *law* (hukum), dan *religion* (agama). Aspek ranah kekuasaan raja ialah *dynasty* (dinasti), *court* (“istana”, dapat juga bermakna “dewan”) dan *realm* (wilayah kekuasaan). *Ceremonial* (“upacara”, hal yang bersifat seremonial), *representation* (perwakilan) dan *display* (tampilan) berguna untuk menegaskan peran dan ranah kekuasaan raja tersebut.

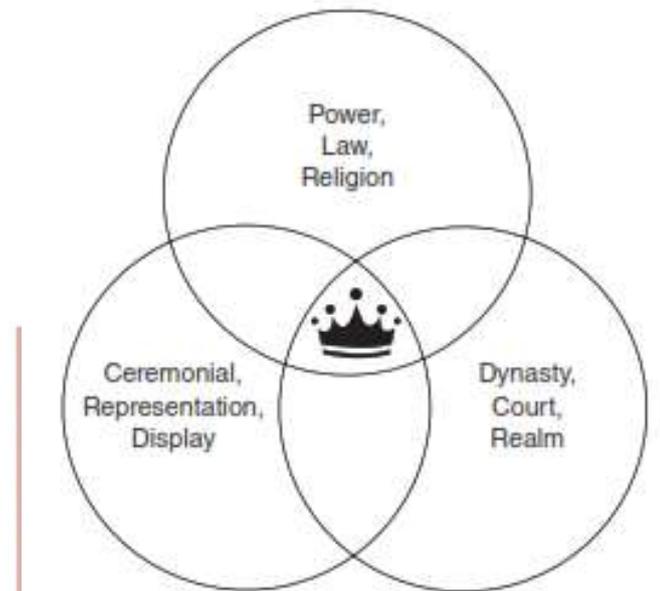
---

<sup>37</sup> Lincoln Allison, *loc. cit.*

<sup>38</sup> Peter Sundström, "Emergence of monarchies? A Comparative study of three East European countries", *tesis* (Örebro: School of Humanities, Education and Social Sciences Örebro University 2014), hlm. 50-51.

<sup>39</sup> Elena Woodacre, “Understanding the Mechanisms of Monarchy”, dalam Elena Woodacre *et al.* (ed.), *The Routledge History of Monarchy* (New York: Routledge, 2019), 2-3.

**Bagan 1**  
**Elemen-elemen Kunci yang Membentuk Sebuah Monarki**



- Keterangan : Bingkai teoritis berbentuk diagram venn yang berisi tiga aspek dalam kajian tentang monarki
- Sumber : Elena Woodacre, “Understanding the Mechanisms of Monarchy”, dalam Elena Woodacre *et al.* (editor), *The Routledge History of Monarchy* (New York: Routledge, 2019), hlm. 3.

Penulis menerapkan kerangka teoretis tersebut pada kasus identitas Siak Sri Indrapura sebagai sebuah monarki. Monarki (dalam berbagai nama seperti kerajaan, kesultanan, kadipaten dan sebagainya) memiliki sejarah panjang di Indonesia sejak kemunculan peradaban Hindu-Buddha, tetapi fokus penulis adalah identitas monarkinya, mulai dari masa kedaulatannya, masa kolonial Belanda hingga setelah kemerdekaan Indonesia. Belanda memberikan status *zelfbestuur* kepada berbagai monarki lokal di Hindia Belanda.<sup>40</sup> Dari status *zelfbestuur*, Pemerintah Republik

<sup>40</sup> Robert Cribb & Audrey Kahin, *Historical Dictionary of Indonesia*, (Oxford: Scarecrow Press, 2004), hlm. 462.

Indonesia membuka kesempatan pembentukan daerah istimewa<sup>41</sup> dan swapraja.<sup>42</sup> Daerah tersebut hanya dapat mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah yang berasal “dari keturunan keluarga yang berkuasa”<sup>43</sup> dan sisanya “tidak berbeda dengan pemerintahan di daerah biasa; kekuasaan pemerintahan ada ditangan rakyat”.<sup>44</sup> Hampir tidak ada lagi daerah istimewa sejak tahun 1959,<sup>45</sup> dan sistem swapraja sepenuhnya dihapus pada tahun 1965.<sup>46</sup> Status swapraja dan penghapusannya menjadi salah satu faktor historis kemunculan kembali monarki di Indonesia pasca Reformasi, yang akan penulis bahas dalam bab berikutnya.

### 1.7. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Tesis ini disusun sebagai sebuah penelitian sejarah, yang melewati empat tahap klasik dari metode sejarah: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi atau konstruksi sejarah.<sup>47</sup> Rincian metode penelitian tesis ini dipaparkan di bawah ini.

Penulis akan menelusuri sumber-sumber sejarah berkaitan dengan Kesultanan Siak Sri Inderapura. Sumber dokumen seperti arsip, silsilah keluarga

<sup>41</sup> Penetapan daerah istimewa didasari oleh UU no. 22 tahun 1948

<sup>42</sup> Penetapan daerah swapraja didasari oleh Konstitusi RIS pasal 64-67 dan UUDS 1950 pasal 132-133

<sup>43</sup> UU no. 22 Tahun 1948, pasal 18 ayat (5)

<sup>44</sup> UU no. 22 Tahun 1948, penjelasan nomor 22.

<sup>45</sup> Dengan penghapusan Daerah Istimewa Berau, Bulongan dan Kutai, melalui UU no. 27 Tahun 1959, maka hanya tersisa Daerah Istimewa Aceh dan Yogyakarta

<sup>46</sup> UU No. 18 Tahun 1965 pasal 88 ayat (3)

<sup>47</sup> Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method (2<sup>nd</sup> edition)* (New York: Alfred A. Knopf, 1969), hlm. 52; Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007, hlm. 13.

kerajaan, surat-surat kerajaan, berita koran dan media elektronik kebanyakan didapat dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak dan Provinsi Riau, serta berbagai *website* berita terkait. Sumber literatur berupa tulisan-tulisan ilmiah dan karya sejarah lainnya berkaitan dengan dua kesultanan tersebut, yang mudah didapat di Perpustakaan Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Siak.

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak terkait dengan Kekerabatan Resam berkaitan dengan upaya menghidupkan kembali Kesultanan Siak Sri Inderapura. Penulis juga mewawancarai beberapa pihak lain terkait dengan kasus ini, seperti Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Siak dan pegawai Istana Siak yang pernah berurusan dengan para pengklaim sultan Siak.

Sumber-sumber yang telah diperoleh akan melewati tahap kritik sumber dari segi eksternal (autentisitas) dan internal (kredibilitas). Kritik sumber ini sekaligus memilah sumber yang relevan bagi penulisan tesis. Interpretasi memperjelas konteks dan makna dari sumber-sumber yang didapat untuk kemudian disusun secara kronologis dan kritis. Dalam konstruksi ini, penulis memakai pendekatan multidisipliner dari segi budaya dan politik. Hasil konstruksi tersebut akan menjadi karya tesis dengan judul seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Susunan tesis ini terdiri atas lima bab yang dijabarkan sebagai berikut. Bab I menyajikan penyebab munculnya ide penulisan karya ilmiah ini dengan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah disertai batasan, tujuan dan manfaat.

Bab ini juga dilengkapi dengan tinjauan pustaka, kerangka teoretis, serta metode dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura pada masanya berdaulat, dimulai saat Raja Kecil mendirikan kerajaannya pada tahun 1723 hingga Sultan Syarif Ismail menyerahkan kedaulatan Siak melalui Kontrak 1858. Penulis memberikan gambaran geografis dan demografis sebelum menjabarkan identitas yang dibangun dalam Kesultanan Siak pada masa ini, yang dibagi dalam dua periode: Kesultanan Siak di bawah Wangsa Abdul Jalil dan Wangsa Syahabuddin

Bab III menjelaskan identitas Kesultanan Siak saat telah dikuasai Belanda di bawah sistem *zelfbestuur* hingga saat wilayah Siak berada di bawah pemerintah Indonesia. Identitas Kesultanan terbagi menurut masa awal *zelfbestuur* Siak hingga pemerintahan Syarif Kasim I, masa pemerintahan Syarif Hasyim, masa pemerintahan Syarif Kasim II, serta saat kemerdekaan hingga Gerakan Swapraja Siak.

Bab IV menjelaskan identitas Kesultanan Siak setelah mangkatnya Syarif Kasim II, yang terbagi atas masa menggali dan menjaga identitas (1968-1998) dan masa setelah pembentukan Kabupaten Siak (1998-2023). Pada periode terakhir, pembahasan juga mengarah pada pembentukan Kekerabatan Resam, klaim sultan Siak baru, dan penjelasan di balik kontroversi tersebut. Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan tesis ini.

## BAB II

### IDENTITAS KESULTANAN SIAK BERDAULAT (1723-1858)

#### 2.1. Awal Pembentukan Kesultanan Siak

Untuk memahami identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura, perlu dijabarkan bagaimana kondisi wilayah Siak itu sendiri, mulai dari kondisi geografis hingga aspek strategisnya di bidang ekonomi. Wilayah Siak terletak di pesisir timur Sumatera, dialiri oleh Sungai Siak, salah satu sungai besar di sana selain Sungai Kampar dan Rokan. Sungai Siak memiliki aliran yang tenang dan dalam, sehingga memudahkan kapal untuk berlayar. Sungai Rokan di utara di bagian hilir penuh dengan lumpur dan gundukan pasir, sementara Sungai Kampar di bagian hilir berkelok dan kadang memunculkan ombak pasang yang dapat menghantam kapal di sana,<sup>1</sup> sehingga pedagang yang berlayar dari Sungai Kampar biasanya akan berhenti di Teratak Buluh sebelum menyeberang ke Sungai Siak. Selain itu, bila melihat peta, muara Sungai Siak terletak lebih dekat dengan kota Melaka.

---

<sup>1</sup> Timothy P. Barnard, *Multiple Centres of Authority: Society and Environment in Siak and Eastern Sumatra, 1674-1827* (Leiden: KITLV Press, 2003), hlm. 20-21 Ombak pasang di hilir Sungai Kampar saat ini dikenal bagi masyarakat Pelalawan sebagai Ombak Bono dan malah menjadi objek wisata bagi peselancar.

**Peta 1**  
**Gambaran lokasi Siak dalam peta sederhana**



Keterangan : gambaran lokasi Siak di antara pesisir timur Sumatera dan Selat Melaka

Sumber : disederhanakan dari Timothy Barnard, *Multiple Centres of Authority: Society and Environment in Siak and Eastern Sumatra, 1674-1827* (Leiden: KITLV Press, 2003), hlm. xv.

Pesisir timur Sumatera yang dilewati Sungai Siak merupakan daerah strategis; sebelah barat daerah tersebut menghasilkan komoditas pertanian penting seperti beras dan lada, sedangkan sebelah timurnya, Selat Malaka, merupakan jalur lalu lintas perdagangan internasional. Komoditas asli adalah hasil hutan seperti kayu, madu sialang dan guliga. Penemuan timah di sekitar Tapung Kiri dan Kampar Kanan pada abad ke 17 menambah komoditas lokal bagi pesisir timur Sumatera,<sup>2</sup> yang kemudian diperdagangkan ke Selat Malaka. Sementara itu, agrikultur tidak pernah berkembang pesat di wilayah ini, karena sekalipun ekosistem hutannya

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 39

sangat beragam, unsur haranya tidak dapat mendukung aktivitas pertanian.<sup>3</sup> Dengan demikian, perkembangan ekonomi di sini bergantung pada aktifnya jalur lalu lintas antara hulu (Minangkabau) dan hilir (Selat Malaka).

Sungai Siak merupakan salah satu jalur perdagangan Minangkabau dari hulu, sehingga secara alami terdapat pengaruh perantau Minangkabau di sekitarnya. Di sisi lain, masyarakat lokal juga menetap di sana, dan terjadilah kawin campur dengan perantau tersebut. Apabila terjadi kawin campur dengan perempuan penduduk lokal, anak-anaknya cenderung mengikuti adat ibunya; walaupun kedua orang tuanya adalah orang Minangkabau, tidak ada sosok penjaga adat seperti mamak di Rantau. Kondisi seperti itu menyebabkan basis identitas keturunannya bergeser, dari sistem matrilineal (suku dalam terminologi Minangkabau) menjadi sistem kawasan atau etnik (suku dalam terminologi Siak).<sup>4</sup> Sistem suku di Siak ini bukanlah sistem yang termasuk ke dalam kebudayaan Minangkabau, melainkan hasil akulturasi antara perantau Minang dengan penduduk lokal pesisir timur Sumatera. Suku-suku tersebut baru terkodifikasi dalam catatan kerajaan Siak pada tahun 1901 melalui *Bab al-Qawaid*.

Sebagai salah satu wilayah yang dilewati jalur perdagangan internasional, masyarakat di pesisir timur Sumatera juga telah berinteraksi dengan orang-orang bukan Minang/Melayu seperti Bugis dan pedangang asing. Bengkalis telah dikenal

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16. Pertanian tidak pernah berkembang pesat di wilayah ini, kecuali setelah memasuki abad ke-20 dan terlihat sekarang ini dengan maraknya perkebunan sawit sepanjang Kabupaten Siak.

<sup>4</sup> Leonard Andaya, *Selat Malaka: Sejarah Perdagangan dan Etnisitas* (Depok: Komunitas Bambu, 2019) *op. cit.*, hlm. 96-97.

sebagai salah satu tempat berlabuh bagi pedagang Arab, Eropa, India, dan Tionghoa.<sup>5</sup> Orang India sering memperdagangkan lada dan emas di wilayah ini,<sup>6</sup> sementara orang Melayu tertarik dengan kain tenun dari India.<sup>7</sup> Mereka juga bersaing dengan orang Arab yang, selain memperdagangkan kain dan emas, ahli dalam pencatatan dan penanaman modal.<sup>8</sup> Orang Tionghoa biasa berdagang di kota-kota yang sudah ramai seperti Bengkalis dan kemudian Buntan serta membuka toko ketika prospeknya cukup menjanjikan.<sup>9</sup>

Secara politik, Siak bukanlah tanah tidak bertuan; beberapa kekuatan silih berganti menguasai wilayah ini. Bila ingin mengamini seluruh fakta dalam Sulalatus Salatin, maka “Kerajaan Siak” pernah berdiri, dengan Parameswara dari Pagaruyung sebagai rajanya. Parameswara akhirnya ditaklukkan oleh Melaka dan diangkatlah Megat Kudu sebagai raja baru dengan gelar Raja Ibrahim.<sup>10</sup> Hilman van Anrooij yang telah meneliti cerita rakyat dan peninggalan di Koto Gasib dan sekitarnya menyimpulkan bahwa kerajaan lokal pertama yang berdiri di Siak adalah Kerajaan Gasip. Kerajaan ini ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh, lalu perlahan menjadi bagian dari Johor.<sup>11</sup>

---

<sup>5</sup> Barnard, *op.cit.*, hlm. 30.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 36

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 50

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 89-90

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 83

<sup>10</sup> A. Samad Ahmad, *Sulalatus Salatin: Sejarah Melayu* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, 2008), hlm. 510-512. Catatan kaki *Sulalatus Salatin* merujuk kepada naskah ini.

<sup>11</sup> H.A. Hilman van Anrooij, *Het Rijk van Siak* (diterjemahkan oleh Wielala, Nur Aisya Zulkifli, dan Khaidir Alimin) (Pekanbaru: Asa Riau, 2016) hlm. 15-18.

Kesultanan Johor merupakan penerus dari Kesultanan Melaka, yang didirikan oleh salah satu putra Mahmud Syah, Alauddin Riayat Syah; putranya satu lagi, Muzaffar Syah, menjadi sultan Perak.<sup>12</sup> Pada akhir abad ke-17 garis keturunan dari raja-raja Melaka akan punah. Ujung garis keturunan itu adalah Sultan Mahmud Syah II. Ia dikatakan dalam sastra Melayu abad ke-19 sebagai seorang pemimpin Melayu yang zalim dan tidak masuk akal. Ia menghukum mati istri Megat Sri Rama dengan kejam, belum lagi hubungannya dengan peri. Ketika hari Jumat ia menuju masjid dengan dibopong (dijulang), Megat Sri Rama membunuh sang sultan, sehingga Mahmud Syah II digelari Marhum Mangkat Dijulang. Sesuai adat kerajaan, Mahmud Syah II digantikan oleh Tengku Bendahara dengan gelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah; sebenarnya Tengku Bendahara berkomplot dengan Megat Sri Rama untuk membunuh sang sultan.<sup>13</sup>

Delapan belas tahun kemudian, muncullah seorang yang mengaku sebagai putra Mahmud Syah II, yaitu Raja Kecil. Menurut *Hikayat Siak*, Raja Kecil, atau nama lahirnya disebut Tuan Bujang, adalah anak dari Mahmud Syah II dan Cik Apong. Beberapa hari sebelum kematiannya, sang sultan yang sedang berahi menyuruh Cik Apong mengumpulkan “air mahnikam” dan menelannya, dengan demikian Cik Apong mengandung. Setelah Mahmud Syah II mangkat, Cik Apong melarikan diri Johor dan ketika melahirkan, ia menitipkan anaknya untuk dibawa

<sup>12</sup> *Sulalatus Salatin*, hlm. 202-203.

<sup>13</sup> Virginia Matheson (editor), *Tuhfat al-Nafis: Raja Haji Ahmad dan Raja Ali Haji* (Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti, Sdn. Bhd., 1997), hlm. 39, catatan kaki *Tuhfat al-Nafis* merujuk kepada naskah ini; Muhammad Yusoff Hashim, *Hikayat Siak, Dirawikan oleh Tengku Said* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), hlm. 112, catatan kaki *Hikayat Siak* merujuk kepada naskah ini.

ke tempat lain. Akhirnya, Tuan Bujang dibawa ke Pagaruyung untuk diasuh keluarga Kerajaan Pagaruyung.<sup>14</sup>

Putri Jamilan, istri Yang Dipertuan Sakti raja Pagaruyung, mengasuhnya dengan sayang karena kasihan ayahnya tidak ada. Ia bahkan tidak melarang Tuan Bujang bermain bersama anak-anak raja lainnya, sekalipun di atas singgasana raja. Saat usia tiga belas tahun, ia berkelana ke Palembang dan menjadi pembawa tepak Sultan Lemah Abang. Saat Palembang dikuasai oleh Sultan Anum, Sultan Lemah Abang yang merupakan keponakannya melarikan diri, dan Tuan Bujang mengikuti rombongan tersebut hingga akhirnya Sultan Lemah Abang dapat merebut kembali takhtanya. Di sanalah banyak cerita yang membuktikan bahwa ia bukan anak sembarangan, melainkan bertuah.<sup>15</sup>

Sekembalinya dari Palembang, dimobatkan oleh Raja Pagaruyung, dengan dorongan Putri Jamilan untuk menuntut kematian ayahnya Mahmud Syah II. Segala upacara adat dilakukan untuk membuktikan dirinya anak raja: bunyi-bunyian nobat, bersandar di atas tiang kayu jelatang, pakaian dan mahkota kerajaan dan lain sebagainya. Setelah itu, Tuan Bujang digelari Raja Kecil. Dengan beberapa regalia, termasuk Pedang Sepurejab, potongan rambut Putri Jamilan, serta surat kerajaan dengan cap mohor Pagaruyung, Raja Kecil memulai jalannya menjadi raja Johor.<sup>16</sup>

Ia memulai mengumpulkan pengikut dari Bengkalis, tetapi sebelum mencapainya ia dihentikan oleh syahbandar Bukit Batu, yang masih berada di

---

<sup>14</sup> *Hikayat Siak*, hlm. 113-115.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 115-121.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 115-123.

bawah Johor. Di Bengkalis, ia mendapatkan banyak pengikut dari orang Minang, kemudian pergi ke Batubara dan juga mendapatkan banyak pengikut. Saat hendak mencapai Johor, ia juga mendapat pengikut dari Orang Laut, yang membuktikan dirinya sebagai anak sultan Johor dengan mengubah air asin menjadi tawar. Saat menyerang Johor, meriam-meriam Johor tidak bisa menembak, melainkan keluar air. Demikianlah Raja Kecil menaklukkan Johor, menurut *Hikayat Siak*.<sup>17</sup>

Kisah Raja Kecil dalam *Hikayat Siak* mengungkap banyak hal mengenai identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura. Tentu, dari segi logika banyak keraguan dalam Hikayat Siak mengenai munculnya Raja Kecil. Penulis Barat abad ke-18 seperti Netscher meragukan legitimasi Raja Kecil sebagai putra Mahmud Syah II, belum lagi kisah pembuahannya yang tidak logis. Dari perkiraan logisnya, Raja Kecil akan berusia terlalu muda untuk dapat menghimpun berbagai bangsa untuk merebut takhta Johor<sup>18</sup> (belasan tahun, atau 17 tahun bila dihitung dari wafatnya Mahmud Syah II tahun 1699 hingga penaklukan Johor tahun 1718). Penelitian-penelitian abad ke-20 menyatakan, untuk memahami fakta-fakta sastra Melayu maka tidak boleh ditelan begitu saja. Timothy Barnard menyebutkan bahwa pembuahan Raja Kecil adalah salah satu bentuk mitos paling tua dalam kebudayaan Nusantara, dapat ditarik dari peradaban Hindu-Buddha, dan masih dipakai dalam beberapa literatur seperti Babad Kraton tentang kerajaan Surakarta.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 124-126.

<sup>18</sup> Elisa Netscher, *Belanda di Johor dan Siak* (diterjemahkan oleh Wan Ghalib *et al.*) (Pekanbaru: Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan Yayasan Arkeologi dan Sejarah “Bina Pustaka”, 2002), hlm. 90.

<sup>19</sup> Timothy P. Barnard, *op.cit.*, hlm., 58-60.

Leonard Andaya menetapkan dua corak penanda kerajaan Melayu sejak masa Melaka hingga abad ke-18. *Pertama*, paduan “silsilah” tokoh Islam (Andaya menyebut Sulaiman, meskipun Iskandar Dzulkarnain lebih disukai) dengan asal usul mistisnya menciptakan membenaran seorang penguasa sebagai penengah bagi penguasa lain. *Kedua*, kuatnya hubungan penguasa dengan cabang keluarga yang lain, baik dari pernikahan maupun cara lain, yang dengan demikian meredam perpecahan yang mungkin akan terjadi.<sup>20</sup>

Berdasarkan legenda *Hikayat Siak*, maka Raja Kecil adalah kelanjutan sultan Johor yang sejati, dengan kekuatan berbagai bangsa merebut kembali takhta Johor. Hal ini penting dalam menegaskan dinastinya, baik dalam usahanya merebut takhta Johor maupun dalam mendirikan kerajaan baru di Siak. Pertama, asal-usul seorang raja Melayu sangat penting di dalam dunia Melayu. Sejarah Melayu menceritakan asal usul raja Melaka; keturunannya merupakan leluhur dari Iskandar Zulkarnain yang menetap di Palembang, tempat dahulunya berdiri Kerajaan Sriwijaya.<sup>21</sup> Johor sendiri adalah penerus dari Kerajaan Melaka. Dengan mengaku sebagai putra Mahmud Syah, Raja Kecil telah mendapat keramat keturunan Johor.

Keturunan yang agung dan suci tersebut berkaitan pula dengan konsep *daulat* dan *derhaka*. Daulat dan derhaka ini sangat dijunjung dalam kebudayaan Melayu, setidaknya pada masa lalu; seorang Melayu harus menjunjung kedaulatan

---

<sup>20</sup> Leonard B. Andaya, *op.cit.*, hlm. 69

<sup>21</sup> *Sulalatus Salatin*, hlm. 19.

raja dan pantang untuk durhaka padanya.<sup>22</sup> Kisah Hang Jebat yang mengamuk karena kematian Hang Tuah di *Sulalatus Salatin*,<sup>23</sup> serta Megat Sri Rama yang membunuh Mahmud Syah II untuk membalas dendam kematian istrinya dalam *Hikayat Siak* dan *Tuhfat al-Nafis* di atas memperlihatkan bahwa tindakan seseorang yang benar sekalipun tidak dapat menghalangi murka seorang raja, tetapi setiap orang mendapat akibat dari pekerjaannya.<sup>24</sup>

Hal ini berpengaruh pada poin kedua, yakni loyalitas pengikutnya. Ketika orang Melayu percaya bahwa Raja Kecil adalah putra sultan Johor yang terakhir, mereka akan setia padanya, manakala ketika orang Minangkabau tahu bahwa Raja Kecil mendapat titah dari Pagaruyung, mereka juga akan berhimpun kepadanya. Raja Kecil memberikan ‘solusi’ baru wangsa Melayu, melalui legitimasi dari Kerajaan Pagaruyung. Dengan demikian, ia mendapat jaminan pengakuan keramat, pertama melalui garis keturunan ‘ayah’, Mahmud Syah II, kedua melalui keramat Pagaruyung, yang dengannya kekuatan orang Minangkabau di pesisir Sumatera timur dapat dihimpun.

---

<sup>22</sup> “Daulat” dan “durhaka” telah dibahas secara ekstensif, misal dalam Mohammad Yusoff Hashim, ““Daulat” dalam Tradisi Budaya dan Politik Kesultanan Melayu Abad ke-15 dan Awal Abad ke-16: Antara Mitos dan Realiti”, *Sejarah*, Vol. 3 No.3, 1995.

<sup>23</sup> *Sulalatus Salatin*, 138-140.

<sup>24</sup> Kepercayaan ini masih penulis temui di masa sekarang. Ketika penulis mewawancarai beberapa keturunan Tengku perihal orang-orang yang mengklaim takhta Siak, mereka juga mengaitkan “darah keturunan sultan” dengan tulah yang mencoba mengklaimnya. Misalnya, Tengku Sufyan Tsauri, anggota Kekerabatan Resam, berpendapat bahwa klaim-klaim darah keturunan sultan yang tidak benar menyebabkan cepatnya orang menemui ‘akibatnya’, sebagaimana Tengku Syatir yang mengalami stroke setelah mengaku sebagai sultan Siak, atau Azis Zaenal, bupati Kampar, yang dinobatkan sebagai Raja Kampa pada April 2019 kemudian meninggal pada bulan Desember tahun yang sama.

Di samping semua itu, ada alasan praktis mengapa banyak orang mendukung Raja Kecil. Johor sebenarnya bertindak sewenang-wenang terhadap penduduk di pesisir timur Sumatera. Johor terus menikmati hasil lalu lintas perdagangan di Selat Malaka. Pada suatu waktu, laksamana Johor menuntut semua batu guliga dari Siak, Bengkalis dan sekitarnya harus diserahkan kepada Johor, belum lagi aksi pembajakan yang dilakukannya waktu itu. Dengan berkuasanya Johor pada kurun 1690-an, perdagangan semakin ketat.<sup>25</sup> raja Kecil dalam suratnya kepada VOC mengatakan bahwa penduduk tersebut telah muak diperlakukan bagai hamba sahaya.<sup>26</sup>

Namun, pada corak kedua, Raja Kecil tidak dapat mempertahankan aliansinya, baik dengan Tengku Bendahara maupun orang Bugis. Pertama, ia yang pada awalnya hendak menikahi Tengku Tengah justru menikahi adiknya, Tengku Kamariah, sehingga membuat malu Tengku Tengah, dengan demikian melukai aliansi dengan Tengku Bendahara. Kedua, Daeng Parani menuntut janji Raja Kecil untuk dijadikan Raja Muda karena telah menaklukkan Johor bersama-sama. Namun, pembesar kerajaan menolak dengan alasan Daeng Parani baru tiba ketika Johor telah ditaklukkan, dan Raja Kecil mengikuti pendapat tersebut. Sejak saat itu, Daeng Parani dan orang-orang Bugis beraliansi dengan Tengku Bendahara dan mulai merebut Johor lagi. Pertama, Tengku Tengah menikah dengan Daeng Parani dan menuntut balas malu melaluinya. Kedua, Raja Sulaiman, anak Tengku

---

<sup>25</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*, hlm. 50-53.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

Bendahara, menjanjikan jabatan Raja Muda kepada Daeng Parani kalau ia berhasil merebut Johor.<sup>27</sup>

Dalam Hikayat Siak dan Tuhfat al-Nafis, Kudeta dimulai dengan pihak Tengku Bendahara menculik Tengku Kamariah pada malam hari atas gagasan Tengku Tengah. Hal itu membangkitkan amarah Raja Kecil, yang menganggap kejadian ini didalangi oleh Tengku Bendahara kemudian mengirim orang menyerangnya. Tengku Bendahara melarikan diri ke berbagai tempat hingga sampai ke Kuala Pahang di mana ia tewas dan digelar Marhum Kuala Pahang. Kejadian ini menyebabkan Raja Kecil melarikan diri dari Johor, karena “negeri celaka”. Ia sempat berdiam di Riau (kepulauan Riau sekarang) dan membuat istananya, tetapi kemudian diserang Johor-Bugis sehingga keluar dari sana dan berpindah-pindah di sekitar kepulauan itu.<sup>28</sup> Setelah mendapatkan istrinya, Raja Kecil undur ke pesisir timur Sumatera.

## 2.2. Raja Melayu: Kesultanan Siak di bawah Wangsa Abdul Jalil

Raja Kecil mendirikan kerajaannya sendiri di Buantan. Dari situlah ia mendirikan tatanan pemerintahan baru yang cukup berbeda dari kerajaan-kerajaan Melayu lainnya. Dengan sebagian besar pengikutnya yang merupakan keturunan Minang, ia menegakkan sistem pemerintahan yang unik dan berbeda dari Johor. Dengan masyarakat lokal, ia mengintegrasikan sistem yang sudah ada ke dalam kerajaannya.

<sup>27</sup> *Hikayat Siak*, hlm. 127-128.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 128-130. *Tuhfat al-Nafis*, hlm. 55-62.

Buantan adalah sebuah tempat baru yang terletak agak menjauh dari muara sungai, sebagaimana pusat kerajaan lain di pesisir timur Sumatera. Jarak antara Buantan dengan hilir sungai Siak diperkirakan mencapai 85 km. Dengan perompakan yang marak di Selat Malaka seiring dengan ramainya lalu lintas perdagangan di sana, ditambah dengan saingan kerajaan lain, banyak pusat kerajaan berdiri menjauh dari pesisir timur. Nilai lebih lain selain terhindar dari serangan tersebut adalah mereka dapat memperkuat hubungan dengan kekuatan di hulu sungai.<sup>29</sup> Dalam hal ini, Raja Kecil menghindari Johor yang mungkin menyerang dari pesisir melalui Bengkalis, sekaligus dapat memegang kontrol atas lalu lintas dari hulu ke muara sungai Siak. Selain Buantan, pusat pemerintahan yang didirikan sultan-sultan Siak juga menjauh dari pesisir, seperti Mempura ( $\pm$  15 km dari Buantan), Senapelan (Pekanbaru sekarang,  $\pm$  100 km dari Buantan) dan terakhir Koto Tinggi (seberang Mempura).

Dalam sistem pemerintahannya, Raja Kecil membentuk pemerintahan dengan Orang Besar-besar sebagai semacam penasehatnya. Empat Orang Besar-besar yang berperan besar adalah Datuk Empat Suku. Sistem empat datuk ini telah disinggung dalam *Hikayat Siak* yang menandai adanya pengaruh Minangkabau. *Hikayat Siak* menyebut empat datuk dalam sistem pemerintahan Pagaruyung, sedangkan Raja Kecil setelah penobatannya diberikan empat orang hulubalang, yakni Datuk Lebai Tasi, Datuk Gergaji, Raja Mendeling dan Sutan Pendalihan. Di

---

<sup>29</sup> Gusti Asnan, *Sungai dan Sejarah Sumatera* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hlm. 84-86.

Bengkalis, ia juga menetapkan empat Penghulu, ditambah Tanah Putih dan Kubu.<sup>30</sup> Ketika ibukota Siak berpindah ke Senapelan, empat penghulu baru juga diangkat lagi. Jejak Empat Suku ini terlihat dalam sistem pemerintahan raja yang pernah berada di bawah taklukan Siak, seperti Kesultanan Deli, Serdang dan Langkat.<sup>31</sup>

Lama-kelamaan, para datuk ini disebut masing-masing sebagai Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Menurut Anrooij para datuk ini dapat ditelusuri dari tempat asalnya: Datuk Lima Puluh dari Geuting, Datuk Tanah Datar dari Sumanik, dan Datuk Pesisir dari Sianok Koto Gadang. Datuk Pesisir membawahi rakyatnya yang berasal dari Agam (yang *luhak*-nya mencapai pesisir barat Sumatra), Datuk Lima Puluh dari bagian timur dataran tinggi Minangkabau (Luhak Limo Puluh Kota) dan Datuk Tanah Datar dari wilayah selatan (Luhak Tanah Datar). Datuk Kampar, di sisi lain, muncul pada masa Sultan Ismail pada akhir abad ke-18. Rakyat yang berada di bawah Datuk Kampar adalah semua orang Melayu di Siak yang tidak termasuk ke dalam warga tiga datuk lainnya.<sup>32</sup> Tidak ada indikasi tempat asal mereka, baik dalam *Hikayat Siak* maupun dokumen-dokumen Belanda;<sup>33</sup> setidaknya, masyarakat Siak abad ke-19 telah menganggapnya sebagai fakta, dan hal itu dikodifikasikan di dalam *Bab al-Qawaid*.

Selain Datuk Empat Suku, pejabat istana lainnya adalah Tunggul Manah dan Orang Besar Kerajaan. Tunggul Manah adalah sekumpulan penghulu dan batin

---

<sup>30</sup> *Hikayat Siak*, hlm. 123.

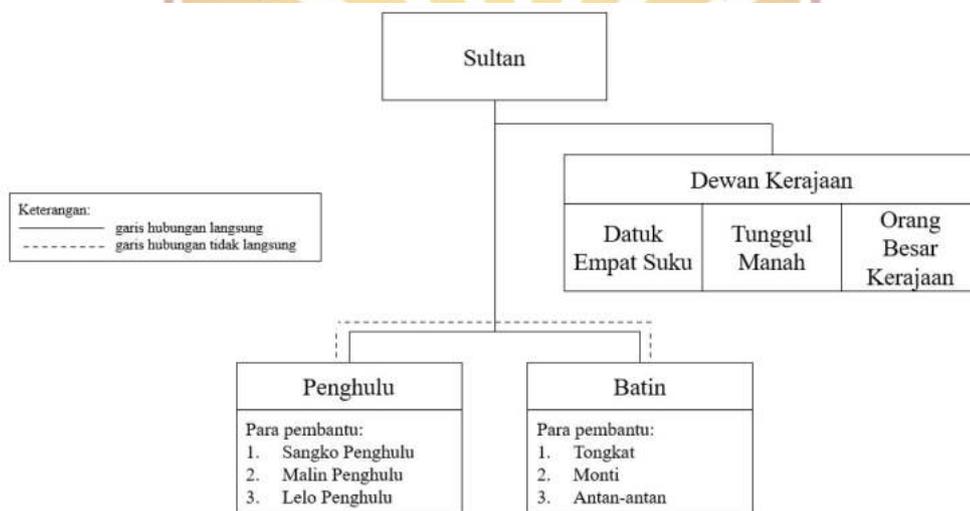
<sup>31</sup> Tengku H.M. Lah Husny, *Lintasan Sejarah Peradaban Sumatera Timur* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 245.

<sup>32</sup> H.A. Hijmans van Anrooij, *op. cit.*, hlm. 57

<sup>33</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*, hlm. 75

yang dituakan dan bertugas memberi nasehat tentang adat, sedangkan Orang Besar Kerajaan memberi nasehat di bidang pertahanan. Ketiga kelompok tersebut membentuk Dewan Kerajaan. Di bawahnya adalah para penghulu dan batin yang berkuasa di wilayahnya masing-masing. Dewan Kerajaan serta para penghulu dan batin bertanggung jawab langsung kepada sultan.<sup>34</sup>

**Bagan 2**  
**Sistem Pemerintahan Kesultanan Siak Wangsa Abdul Jalil**



Sumber : Ellya Roza, *Kerajaan Siak 1723-1908: Perspektif Sejarah dan Sosiobudaya* (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 128.

Corak atau kecenderungan pemerintahan raja-raja Siak dapat pula dibagi menjadi dua. Pertama, corak yang cenderung kepada sistem Melayu, yang dilakukan oleh Sultan Mahmud Syah, Sultan Ismail, dan Sultan Yahya. Mereka mempunyai pertalian keluarga dengan dinasti Johor dan Terengganu, yang menerapkan sistem Melayu. Corak yang cenderung kepada negosiasi lokal adalah

<sup>34</sup> Ellya Roza, *Kerajaan Siak 1723-1908: Perspektif Sejarah dan Sosiobudaya* (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 126-128.

Sultan Alamuddin, Sultan Muhammad Ali. Sebagai keturunan bukan bangsawan Melayu, mereka tidak terlalu terikat dengan sistem Melayu, serta lebih banyak mengandalkan dan memanfaatkan sistem lokal. Namun, unsur-unsur yang bersifat kehormatan tetap bernuansa Melayu, sebagaimana tampak dalam Nobat Siak dan makam para raja.

Nobat Kesultanan Siak setidaknya disinggung dalam Hikayat Siak perihal penobatan Raja Kecil. Nobat Siak terdiri atas sebuah serunai dan dua gendang kembar (gendang *menjejalu* dan *meningkah*). Sebagaimana adat Melayu umumnya, selama Nobat dimainkan, tidak ada yang boleh berjalan sehingga selesai bunyi Nobat tersebut; pelanggarnya biasanya akan didenda.<sup>35</sup> Berbeda dengan kelengkapan Nobat di dunia Melayu, tidak ada Gendang Nekara dalam Nobat Siak. Gendang Nekara biasanya merupakan gendang sakral dalam Nobat Melayu. Hal ini berarti dua kemungkinan: Nobat Siak mencerminkan tradisi Minangkabau, atau pada awalnya Gendang Nekara tidak begitu penting. Namun, dengan melihat bahwa hampir seluruh Nobat Melayu memakai Gendang Nekara, termasuk di Pelalawan, Indragiri dan Serdang, kemungkinan pertama lebih kuat.

---

<sup>35</sup> H.A. Hijmans van Anrooij, *op. cit.*, hlm. 63-64.

**Gambar 1**  
**Gendang Nobat Siak**



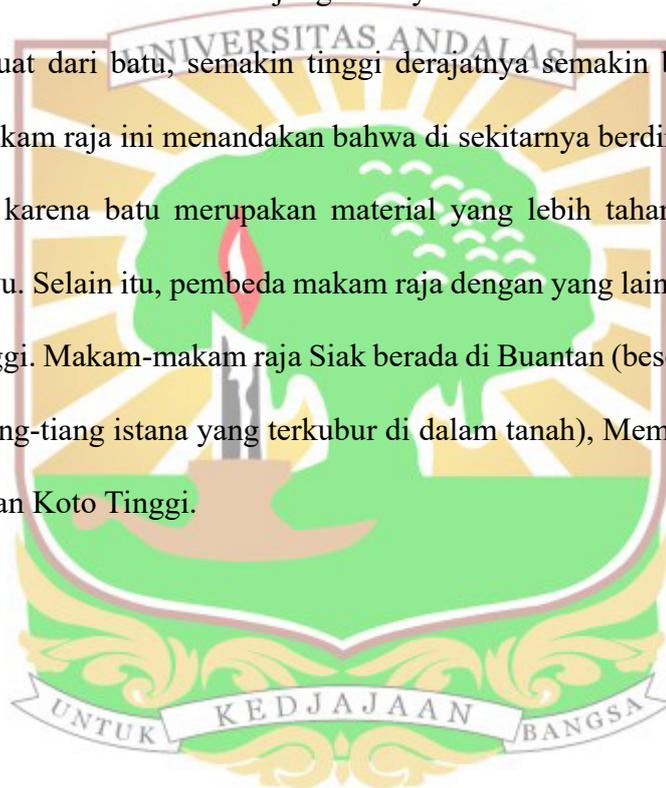
Keterangan : salah satu gendang Nobat Siak yang dipakai dalam pertabalalan sultan dan upacara-upacara kerajaan, kini tersimpan di Istana Siak

Sumber : <https://mehttravelwithme.blogspot.com/2016/07/istana-asserayah-hasyimiyah-istana-siak.html>, diakses tanggal 18 Februari 2025

Nobat, selain dalam pertabalalan, juga dimainkan saat upacara pemakaman. Pemakaman sultan seringkali diiringi dengan pengangkatan sultan baru. Sebagai contoh, *Syair Raja Siak* menceritakan bagaimana Sultan Mahmud Syah II dimakamkan. Setelah jenazah diselenggarakan oleh imam dan kadi kerajaan, Raja Ismail bersiap untuk diangkat menjadi sultan baru, yang disambut oleh seluruh pejabat istana. Jenazah sultan dimasukkan ke keranda, kemudian diletakkan di atas Raja Diraja, tandu jenazah yang dinaungi delapan payung. Raja Diraja diarak menuju makam beserta sultan baru, seluruh pembesar dan pegawai kerajaan, delapan di antaranya memakai kain tampan. Nobat dimainkan sepanjang

perjalanan. Jenazah diturunkan oleh imam dan kadi, lalu dikubur. Talqin oleh imam dan kadi menutup prosesi pemakaman.<sup>36</sup>

Seluruh makam sultan dapat dikenali melalui jirat makam mereka. Makam ini menunjukkan pengaruh Aceh yang pernah menguasai Siak serta beberapa daerah lainnya di Sumatera dan Semenanjung Malaya.<sup>37</sup> Makam-makam Melayu pada umumnya dibuat dari batu, semakin tinggi derajatnya semakin besar dan bagus ukirannya. Makam raja ini menandakan bahwa di sekitarnya berdiri pusat kerajaan Siak, terlebih karena batu merupakan material yang lebih tahan lama daripada konstruksi kayu. Selain itu, pembeda makam raja dengan yang lain adalah letaknya yang lebih tinggi. Makam-makam raja Siak berada di Buntan (beserta peninggalan berupa sisa tiang-tiang istana yang terkubur di dalam tanah), Mempura, Senapelan (Pekanbaru) dan Koto Tinggi.




---

<sup>36</sup> Donald J. Goudie, *A Critical Edition of The Syair Perang Siak, With a Consideration of its Literary and Historical Significance* (tesis Universitas London), hlm. 190 (Syair Perang Siak, bait 204-215).

<sup>37</sup> Suprayitno, "Acehnese Tombstones in Southeast Asia: Chronology and a Typology", *ISVS e-journal*, Vol. 10, Issue 11, hlm. 362.

**Gambar 2**  
**Makam Raja Kecil di Buntan, Siak**



**Keterangan** : Makam Raja Kecil di Buntan, Siak. Jiratnya menunjukkan budaya Aceh dan merupakan struktur asli makam, sedangkan bangunan yang menaunginya adalah hasil revitalisasi makam pada tahun 2008.

**Sumber** : dokumentasi pribadi, diperoleh tanggal 19 September 2024

*Hikayat Siak* memulai kisah pemerintahan Raja Kecil di Buntan dengan membalas dendam perbuatan Syahbandar Bukit Batu. Karena ia bersumpah akan meminum darahnya, ia penuhi tanpa harus membunuhnya, dengan melukai tangan syahbandar itu dan meminum tetesan darahnya, setelah itu orang Bukit Batu takluk padanya.<sup>38</sup> Belakangan, pemimpin Bukit Batu—yang kemudian bergelar Datuk Laksamana—menjadi bagian penting dari pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Namun, sebelum menjadi sebuah wilayah yang mapan, pemerintahan Raja Kecil di Siak lebih banyak diwarnai dengan peperangan antara Siak dengan

---

<sup>38</sup> *Hikayat Siak*, hlm. 135. Kisah ini merupakan prototipe—atau setidaknya contoh—dari tradisi Begito, di mana seseorang melakukan sumpah darah dengan orang lain sehingga menjadi saudaranya.

Johor. Konflik itu terjadi di kepulauan Riau, tetapi kadang meluas, mulai dari Bengkalis dan Kedah, dengan kemenangan silih berganti antara keduanya.<sup>39</sup>

Dinasti Raja Kecil yang mulai mapan tersebut akan penulis sebut sebagai sebagai Wangsa Abdul Jalil. Hal ini karena seluruh sultan Siak, termasuk Raja Kecil, menyematkan nama Abdul Jalil saat naik takhta, hingga sultan terakhir sekalipun. Namun, mereka yang merupakan keturunan patrilineal dari Raja Kecil adalah sultan kedua (Sultan Mahmud) hingga keenam (Sultan Yahya); sultan-sultan setelah itu merupakan keturunan Baalawi, setelah menyingkirkan keturunan patrilineal Raja Kecil. Meskipun sultan Siak dari Wangsa Abdul Jalil selesai pada Sultan Yahya, ada keturunan Tengku Buwang yang menjadi raja di negeri lain, yakni Tengku Akil gelar Abdul Jalil Yang Dipertuan Syah di Sukadana (Nieuwe Brussels); ini akan dijelaskan kemudian.

### 2.2.1. Kesultanan Siak di bawah Cabang Tengku Mahmud

Di antara banyaknya anak-anak Raja Kecil, dua orang yang dianggap penting, yakni Raja Alam dan Tengku Buwang. Raja Alam lahir ketika Raja Kecil masih berkelana di Palembang, hasil pernikahannya dengan putri seorang Dipati Batu Kucing di Rawas.<sup>40</sup> Saat Raja Kecil berpindah ke Siak, Raja Alam menghadapnya. Sementara para pembesar

<sup>39</sup> Masing-masing penulis *Hikayat Siak* dan *Tuhfat al-Nafis* menuliskan banyak kemenangan berada di pihak yang mereka dukung. Misalnya, dalam perebutan kuasa di Kedah, meskipun sama-sama menulis bahwa Daeng Parani tewas dalam peperangan ini, *Hikayat Siak* menyatakan Raja Kecil menewaskan Daeng Parani dan memenangkan pertempuran, lalu raja yang mereka dukung naik takhta, dan Siak undur diri, manakala *Tuhfat al-Nafis* menyatakan bahwa orang Bugis mengamuk sehingga Raja Kecil melarikan diri. *Hikayat Siak*, hlm. 138; *Tuhfat al-Nafis*, hlm. 77.

<sup>40</sup> *Hikayat Siak*, hlm. 121.

kerajaan tidak mengenalnya sama sekali, Raja Kecil mengakuinya sebagai putra sulungnya setelah menanyakan nama ibunya.<sup>41</sup> Raja Alam membuktikan kekuatannya dengan mengadakan serangan ke Johor pada tahun 1737 kemudian merompak beberapa wilayahnya.<sup>42</sup> Tengku Buwang, di sisi lain, adalah hasil pernikahan Raja Kecil dan Tengku Kamariah yang lahir saat diculik oleh pihak Tengku Bendahara, yang baru dilepas ketika Raja Kecil menyerang Riau.<sup>43</sup>

Pewarisan kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indrapura tidak mengikat hanya pada garis keturunan; pembesar kerajaan menentukan siapa yang layak di antara anak raja yang akan naik takhta. Hikayat Siak menceritakan bagaimana suksesi pemerintahan berjalan. Ketika Raja Kecil mulai hilang akal karena istrinya meninggal dan sering tidur di atas makamnya, pembesar kerajaan menanyakan perihal Tengku Buwang dan Raja Alam, karena “paduka anakanda perang, Tuanku”. Raja Kecil menjawab “siapa yang menang, dialah anak kita.” Dengan perkataan seperti ini, kedua putra Raja Kecil dapat merebut takhta dengan kekerasan. Di sinilah peranan Orang Besar-besar amat penting. Mereka sepakat memilih Tengku Buwang sebagai penerusnya. Hal ini disebabkan Tengku Buwang merupakan *anak gahara*, karena ibunya merupakan anak sultan, sedangkan ibu Raja Alam adalah

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 133.

<sup>42</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*, hlm. 81

<sup>43</sup> Hikayat Siak, *loc. cit.*

seorang kepala suku.<sup>44</sup> Masing-masing memegang kekuatannya: Tengku Buwang di Siak, sedangkan Raja Alam di Batubara.

Raja Kecil kemudian meninggal, antara tahun 1746, dan Tengku Buwang menggantikannya. Masa ini sebenarnya menandai krisis Siak. Menurut catatan Belanda, Sultan Sulaiman bersama orang Bugis telah bersiap menyerang Siak dengan armadanya yang sudah berlabuh di Johor. Sementara itu, Tengku Buwang telah bersiap pula untuk melarikan diri ke Pagaruyung dengan rombongan sebanyak 500-600 orang untuk menghadang Johor. Rencana pelarian ke Pagaruyung itu meningkatkan kemungkinan peperangan besar antara Minangkabau dengan Johor. Rencana itu tidak jadi, karena Sultan Sulaiman menarik diri dari Melaka pada tahun 1747, menghadapi ancaman lain. Raja Alam menduduki Siantan, salah satu wilayah tradisional Johor yang penting dan strategis. Dari sana, ia menghimpun banyak pengikut dan merompak kapal-kapal yang berlayar, termasuk kapal Inggris *Nancy*.<sup>45</sup>

Dengan kondisi seperti ini, Siak justru menjalin hubungan dengan Johor. Raja Mahmud dan Sultan Sulaiman bersama-sama mengepung Siantan. Aliansi ini perlu diperhatikan, mengingat bahwa Sultan Sulaiman telah bermusuhan dengan ayah Raja Mahmud, Raja Kecil, tetapi ibunya sendiri adalah saudari Sultan Sulaiman. Ancaman-ancaman yang terlihat

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

<sup>45</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*, 86-87

oleh Raja Mahmud, terutama dari VOC, membuatnya bekerja sama dengan pamannya itu. Sultan Sulaiman yang bukan orang Minang justru menjalani peran mamak kepada Raja Mahmud kemenakannya.<sup>46</sup> Bersama Sultan Sulaiman, Raja Mahmud kemudian mengepung Siantan pada tahun 1749, sehingga Raja Alam melarikan diri dari sana dan mengembara. Sebagai saudara, Raja Mahmud meminta Raja Alam melarikan diri sebelum benar-benar ditangkap oleh Johor.<sup>47</sup>

Interaksi pertama orang Arab dengan kerajaan Siak adalah pada masa ini, diawali oleh kemunculan Sayid Muhammad. Ia adalah seorang pedagang Ba'alawi bermarga Sagoff, yang kemudian diangkat sebagai syahbandar Senapelan, atau dahulu disebut Payung Sekaki. Selama Raja Mahmud berangkat ke Siantan, Sayid Muhammad ditunjuk sebagai wakilnya bersama tiga orang lainnya. Ternyata, perwakilan Sayid Muhammad yang merupakan orang asing mengundang amarah penduduk, apalagi ia tidak mempunyai rasa hormat kepada pemimpin lokal lainnya. Saat Raja Mahmud kembali, ia menghadapi 700-800 orang yang menghadang, dipimpin oleh Tengku Unus, salah seorang anak Raja Kecil. Pemberontakan itu dapat ditumpas pada tahun 1750, tetapi kekacauan masih melanda Siak hingga satu tahun kemudian.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, 88-89

<sup>47</sup> *Ibid.*, 87-88; *Hikayat Siak*, 144-145

<sup>48</sup> Timothy P. Banard, *op. cit.*, 90-91

Setelah pengepungan Siantan, Raja Mahmud memindahkan kerajaannya dari Buantan ke Mempura. Ia dengan orang-orangnya membuka tanah untuk membangun “kota, parit, dan istana balairung, dan balai gendang, dan masjid, pedapurannya, penanggah” dan menetap di sana beserta orang-orang kerajaannya. Ketika mendengar kabar bahwa raja Pagaruyung berangkat ke Petapahan, ia berangkat ke sana, dan raja Pagaruyung menabalkan sebagai Sultan Mahmud Syah.<sup>49</sup> Pemberontakan di Siak masih membekas, dan penabalnya tidak membuat para pembesar kerajaan puas, di tambah pemindahan kerajaan ke Mempura tidaklah begitu dibutuhkan. Sekarang, Raja Alam yang telah kembali dari Palembang dan Deli ke Batubara, bersiap-siap menduduki Siak. Pembesar kerajaan tampak membiarkan kedatangan Raja Alam begitu saja dan Sultan Mahmud Syah melarikan diri.<sup>50</sup>

Pendudukan Siak oleh Raja Alam berlangsung sebentar, karena Sultan Mahmud Syah kembali lagi, kali ini dengan bala bantuan dari Johor dan penduduk lokal lainnya. pada bulan Agustus 1754 Mereka dengan mudah menduduki Buantan, tempat kedudukan Raja Alam, yang ternyata lari ke Batubara, hanya untuk menyerang Sultan Mahmud Syah lagi tiga bulan kemudian, sehingga ia kembali ke Johor. Kali ini, Sultan Mahmud Syah bekerja sama juga dengan VOC, yang meminta akses ke Siak dengan membuka loji di Pulau Guntung. Dengan persiapan yang matang, pada

---

<sup>49</sup> *Hikayat Siak*, 145-146.

<sup>50</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*, hlm. 92-94

bulan Desember mereka menyerang Buantan kembali. Pasukan Sultan Mahmud Syah menang, dan Raja Alam menyingkir ke Batubara kembali.<sup>51</sup>

Aliansi Sultan Mahmud Syah dengan Sultan Sulaiman dan Raja Alam dengan penduduk lokal sebenarnya menggambarkan corak masing-masing pemerintahannya. Sultan Mahmud Syah, *anak gahara*, lebih dekat dengan sistem pemerintahan Melayu, manakala Raja Alam mendekati dengan sistem perantauan yang fleksibel. Hal inilah yang menyebabkan Raja Alam dapat menghimpun kekuatan dari berbagai bangsa. Sementara Sultan Mahmud Syah mengikat diri dengan keturunan Johor, Raja Alam menjalin hubungan dengan Bugis, yakni menikah dengan Daeng Khadijah, saudari Daeng Kamboja yang bersekutu dengan Johor. Ia juga menikahkan putrinya, Tengku Embung Badariyah, dengan Sayid Utsman, seorang Ba'alawi yang telah setia berperang bersamanya.<sup>52</sup> Dari Sayid Utsman, keturunan sultan Siak mendapatkan darah Arab dan gelar Syarif, yang akan dijelaskan kemudian.

VOC perlahan beralih kepada Raja Alam, setelah mendapati bahwa perdagangan di loji Pulau Guntung tidak begitu menguntungkan. Hal ini mencapai puncaknya pada peristiwa Pulau Guntung, di mana kemuakan Sultan Mahmud Syah atas VOC menyebabkannya menyerang loji Pulau Guntung. Sultan Mahmud Syah Mahmud datang bersama 40 kapal ke Pulau

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, 94-95

<sup>52</sup> Donald J. Goudie, *Syair Perang Siak: A Court Poem Presenting the State Policy of a Minangkabau Malay Royal Family in Exile* (Kuala Lumpur: Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 1996), hlm. 38.

Guntung dengan kedok ingin mengantar putri Sultan Sulaiman dan singgah ke loji VOC. Saat Hansen, kepala loji, mengizinkan masuk Sultan Mahmud Syah dan beberapa orang lainnya untuk berdiskusi, Hansen ditusuk keris oleh Said Umar, dan mulailah pasukan Sultan Mahmud Syah membantai seisi loji. Dari 72 orang Belanda di Pulau Guntung, 56 orang tewas, sementara yang lain lari atau diperbudak.<sup>53</sup>

### 2.2.2. Kesultanan Siak di bawah Cabang Raja Alam dan setelahnya

Masa-masa setelah Sultan Mahmud Syah masih diwarnai dengan konflik dan peperangan. Sultan Mahmud meninggal pada tahun 1760 dan digantikan Tengku Ismail dengan gelar Sultan Ismail Abdul Jalil Syah.<sup>54</sup> Dengan usianya yang muda dan kurang berpengalaman, Raja Alam menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Siak dan naik takhta. Raja Alam beserta VOC menyerbu Siak pada tahun 1761, sehingga Sultan Ismail melarikan diri.<sup>55</sup> Selama pelarian, Sultan Ismail menjadi perompak yang ditakuti di pesisir timur Sumatera, sama seperti Raja Alam dahulu. Sementara itu, Raja Alam memindahkan kerajaannya ke Senapelan dan menunjuk putranya, Raja Muhammad Ali, sebagai pewaris takhtanya. Dari Senapelan, Raja Alam perlahan menegakkan kekuasaannya di bagian hulu Siak, meluaskan aliansinya dengan Minangkabau, serta meluaskan kekuasaannya di pesisir timur Sumatera. Pada masa ini, pemimpin-

<sup>53</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*, 101-102; *Hikayat Siak*, hlm. 147-150

<sup>54</sup> Donald J. Goudie, *loc. cit.*

<sup>55</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*, hlm. 109

pemimpin Kubu, Rokan, Bila, Pane, Asahan, dan Batu Bahara berada di bawah kekuasaan Raja Alam.<sup>56</sup> Setelah sakit selama beberapa waktu, Raja Alam meninggal pada 18 September 1765.<sup>57</sup> Raja Alam juga dikenal dengan gelar Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah.<sup>58</sup>

Raja Muhammad Ali menggantikan Raja Alam sebagai Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah.<sup>59</sup> Pada masa ini pula, ia kehilangan dukungan dari pihak ibunya, orang Bugis Johor, tetapi ia tetap meneruskan aliansinya dengan Sayid Utsman dengan mengangkatnya sebagai panglima besar. Ia menguatkan kekuasaannya di pesisir dan hulu sungai Siak. Masa pemerintahannya menunjukkan kemajuan Siak sebagai wilayah lalu lintas perdagangan, yang menguasai aliran sungai dari Kampar hingga ke Kubu dan pulau-pulau di pesisirnya, belum lagi wilayah-wilayahnya di barat laut seperti Asahan dan Bila. Ia juga menjalin hubungan dengan VOC yang telah dilakukan pada masa pemerintahan ayahnya, malah lebih kuat dari sebelumnya.<sup>60</sup>

Sultan Ismail yang telah dilengserkan pada 1761 menjadi perompak ulung di Selat Malaka. sama seperti ayahnya, ia menjalin hubungan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 117-121

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 123

<sup>58</sup> O.K. Nizami Jamil et al., *Sejarah Kerajaan Siak* (Pekanbaru: Sukabina, 2011), hlm. 92. *Hikayat Siak* tidak terlalu banyak menceritakan pemerintahan Raja Alam karena keberpihakan naskah tersebut pada Tengku Mahmud dan keturunannya, seolah-olah terlewat sebuah episode dari sejarah Kesultanan Siak. Pemerintahan Raja Alam telah digali oleh Timothy P. Barnard dalam *Multiple Centres of Authority* berdasarkan catatan-catatan VOC mengenai Raja Alam.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 103.

<sup>60</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*, hlm. 124-126.

kekerabatan dengan raja Melayu, kali ini dengan menikahi Tengku Tipah, putri Sultan Mansyur Syah, Raja Terengganu. Aliansi Sultan Ismail membantu Sultan Mahmud membantu menghadang serangan dari Kedah. Hikayat Siak menggambarkan pernikahan dan tinggalnya selama di Terengganu penuh dengan adat Melayu. Misalnya ketika Raja Daud, saudara Sultan Ismail, dituduh berzina dengan Tengku Saliah, saudari tiri Raja Daud, maka Sultan Ismail menghukum mati Raja Daud secara adat. Ketika diketahui Tengku Abdullah, saudara Sultan Ismail yang lain, ia marah dan mempertanyakan 'daulat' Sultan Ismail atas keputusannya itu. Putra Sultan Ismail, Tengku Musa, menengahi mereka dan mengingatkan bahwa semua sepakat bahwa Sultan Ismail adalah raja, dan menentang keputusannya adalah 'durhaka'.<sup>61</sup>

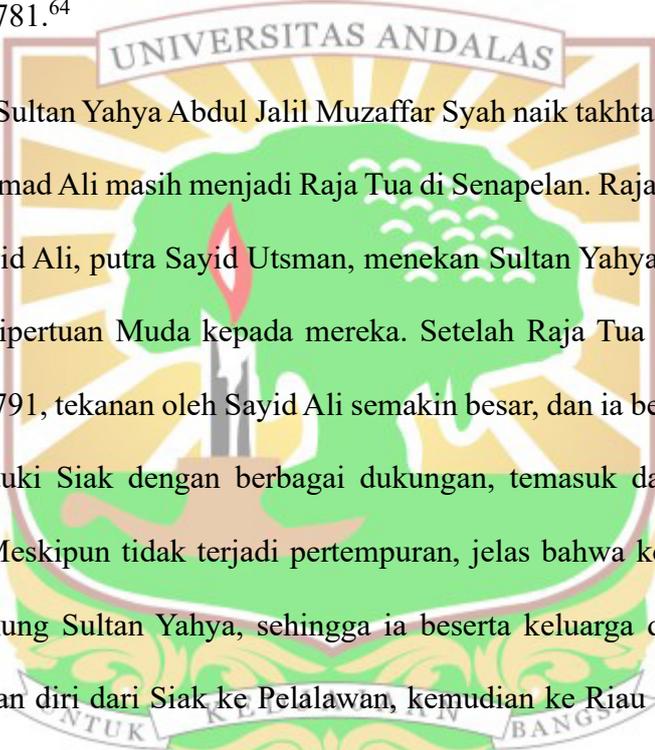
Kekuasaan Sultan Ismail di Selat Melaka semakin kuat, bahkan ia sempat menyerang Singapura pada tahun 1767, meskipun dikalahkan orang Bugis. Ia berkelana sebagai perompak, dari Pattani di Selatan Siam hingga Mempawah di Kalimantan.<sup>62</sup> Sejak 1773 Sultan Ismail berusaha untuk menembus Siak, dan setahun kemudian Sultan Muhammad Ali mengizinkan Sultan Ismail dan pengikutnya untuk menetap di Rokan. Dualisme kekuasaan Siak-Rokan ini berlangsung selama enam tahun, sampai Sultan Ismail memutuskan untuk menduduki Siak, sementara Sultan Muhammad Ali mulai sakit-sakitan. Akhirnya, pada tahun 1779 Siak jatuh ke dalam

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, 130-131.

<sup>62</sup> *Ibid.*, 134

kekuasaan Sultan Ismail. Sultan Muhammad Ali tidak dibunuh oleh Sultan Ismail; mereka berdamai, dan Sultan Muhammad Ali dijadikan Yang Dipertuan Muda.<sup>63</sup> Sultan Ismail mengalihkan Yang Dipertuan Muda kepada putranya, Tengku Yahya, sementara Raja Muhammad Ali menjadi Raja Tua di Senapelan. Sultan Ismail meninggal di dalam balairung pada tahun 1781.<sup>64</sup>



Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah naik takhta, sementara Raja Muhammad Ali masih menjadi Raja Tua di Senapelan. Raja Muhammad Ali dan Sayid Ali, putra Sayid Utsman, menekan Sultan Yahya agar kekuasaan Yang Dipertuan Muda kepada mereka. Setelah Raja Tua meninggal pada tahun 1791, tekanan oleh Sayid Ali semakin besar, dan ia bersiap-siap untuk menduduki Siak dengan berbagai dukungan, termasuk dari pihak Empat Suku. Meskipun tidak terjadi pertempuran, jelas bahwa kondisi tidak lagi mendukung Sultan Yahya, sehingga ia beserta keluarga dan pengikutnya melarikan diri dari Siak ke Pelalawan, kemudian ke Riau hingga akhirnya ke kampung ibunya, Terengganu.<sup>65</sup> Dengan demikian, berakhirilah pemerintahan Wangsa Abdul Jalil.

Wangsa Abdul Jalil tidak langsung punah sebagai sebuah dinasti, karena salah satu keturunannya, Tengku Akil, ternyata menjadi raja. Tengku Akil merupakan putra Raja Musa dan cucu dari Sultan Mahmud Syah. Lahir

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, 136-140

<sup>64</sup> *Ibid.*, 142-143

<sup>65</sup> *Ibid.*, 157-159

sekitar tahun 1775, ia dibesarkan di lingkungan istana Kesultanan Pontianak, tetapi saat kembali ke Siak ia tidak disambut hangat oleh ayahnya. Tengku Akil berkelana ke selatan Sumatera (Palembang dan sekitarnya) dengan membantu seorang pelaut Inggris, dan kemudian kepada Belanda. Saat di Kalimantan, ia membantu Belanda menenyahkan perompak di sana dan diberikan pangkat Mayor.<sup>66</sup> Saat Belanda menduduki Kesultanan Matan dan melengserkan sultannya pada tahun 1828, Tengku Akil diangkat sebagai pemimpin baru, dengan gelar Abdul Jalil Yang Dipertuan Syah, dan wilayah Matan dan sekitarnya (secara kolektif disebut Sukadana) diubah namanya menjadi Nieuw Brussel untuk mengenang kemenangan Jenderal Du Bus atas Sukadana.<sup>67</sup>

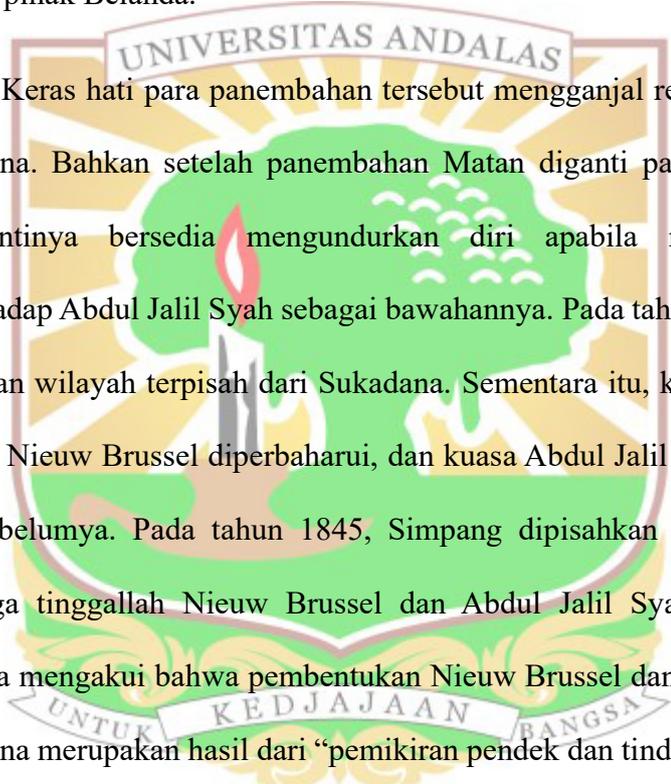
Pemerintahan Sultan Abdul Jalil Yang Dipertuan Syah di Sukadana tidak berjalan mulus. Ia dianggap kurang berpengalaman dalam memerintah Nieuw Brussel. Ia sendiri tidak memperhatikan keadaan rakyatnya dan memeras mereka dengan pekerjaan yang berat. Hubungannya dengan pemimpin lain juga tidak harmonis. Sementara Belanda menganggap Sultan Nieuw Brussel sebagai pemimpin tertinggi Sukadana dengan panembahan Matan dan Simpang sebagai bawahannya, pemimpin negeri-negeri tersebut tidak menganggapnya demikian. Saat Belanda memerintahkan panembahan Simpang untuk menghadap Abdul Jalil Syah, ia menolak. Hal ini

---

<sup>66</sup> Donald J. Goudie, *op. cit.*, 41

<sup>67</sup> Yusri Darmadi & Ika Rahmatika Chalimi, "Nieuw Brussel" di Kalimantan: Peran Strategis Sukadana pada Abad ke-19 (Yogyakarta: Kepel Press, 2017), hlm. 35.

menyebabkan Belanda merancang kontrak baru dengan Abdul Jalil Syah pada tahun 1831. Tetap saja, setiap kali Belanda mengundang panembahan Matan dan Simpang untuk bertemu sang sultan, mereka selalu menghindar dan menegaskan bahwa kedudukan mereka harus setara untuk dapat menjalin hubungan baik, sembari bertanggung jawab secara langsung kepada pihak Belanda.<sup>68</sup>



Keras hati para panembahan tersebut mengganjal relasi Belanda di Sukadana. Bahkan setelah panembahan Matan diganti pada tahun 1833, penggantinya bersedia mengundurkan diri apabila masih dipaksa menghadap Abdul Jalil Syah sebagai bawahannya. Pada tahun 1837, Matan dijadikan wilayah terpisah dari Sukadana. Sementara itu, kontrak Belanda dengan Nieuw Brussel diperbaharui, dan kuasa Abdul Jalil Syah dikurangi dari sebelumnya. Pada tahun 1845, Simpang dipisahkan dari Sukadana, sehingga tinggallah Nieuw Brussel dan Abdul Jalil Syah memerintah. Belanda mengakui bahwa pembentukan Nieuw Brussel dan penggabungan Sukadana merupakan hasil dari “pemikiran pendek dan tindakan yang tidak tuntas”. Pada 1 September 1845, Nieuw Brussel sebagai “kerajaan boneka Belanda” dibubarkan, dan Sultan Abdul Jalil Yang Dipertuan Syah meninggal empat tahun kemudian.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 37-40

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 42-49

Intinya secara keseluruhan, Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah sebuah kerajaan Melayu dengan gaya adaptasi, yang berbeda dengan kesultanan Melayu di Semenanjung Malaya. Meskipun tetap menalikan asal-usulnya dari Melaka melalui Johor, Siak membentuk corak lain dengan memadukan sistem dan tradisi Melayu dengan sistem lokal yang telah berdiri di pesisir timur Sumatera. Sistem pemerintahan tinggi cenderung meminjam dari tradisi Melayu, tetapi sistem Empat Penghulu yang kemudian menjadi Datuk Empat Suku menjadi pembesar-pembesar penting yang dapat menentukan keberlangsungan—atau jatuh banggunya—seorang sultan Siak. Tradisinya juga banyak dipengaruhi kebudayaan lokal, tetapi banyak memakai tradisi Melayu untuk menunjukkan prestise mereka sebagai Raja Melayu.

### 2.3. Syarif Arab-Melayu: Siak di Bawah Wangsa Syahabuddin

Selain Sayid Muhammad, orang Arab Ba'alawi yang menjalin hubungan dengan keluarga raja Siak dan bahkan melanjutkan wangsa dan takhtanya adalah Sayid Utsman. Sama seperti Sayid Muhammad, Sayid Utsman adalah seorang pedagang yang kemudian mendapatkan jalannya untuk menjalin hubungan dengan Raja Alam. Sayid Utsman membantu Raja Alam, baik ketika pertama kali berkuasa maupun ketika diasingkan sebagai hulubalang. Kapal perang Sayid Utsman menghadang Sultan Ismail sehingga ia melarikan diri ke Pelalawan. Selain itu, ia juga menikahi putri Raja Alam, Tengku Embung Badariyah. Dari pernikahan itu lahirlah Sayid Ali dan Sayid Abdurrahman.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> J. Kathirithamby-Wells, "Siak and its Changing Strategies for Survival, c. 1700-1870", dalam Anthony Reid (editor), *The Last Stand of Asian Autonomies: Responses to Modernity in the Diverse States of Southeast Asia and Korea, 1750-1900* (New York: St. Martin's Press), hlm. 226.

Penulis menamai dinasti ini dengan Wangsa Syahabuddin.<sup>71</sup> Mereka memanfaatkan status keturunan Nabi, dipadu dengan darah *anak gahara* dari Tengku Embung Badariyah, sehingga membentuk kharisma wangsa tersebut. Selain mempertahankan gelar Arab untuk keturunan mereka (Syarif dan Sayid) dan menggelari sultan dengan nama Syaifuddin, mereka sepenuhnya terasimilasi dengan kebudayaan Melayu. Wangsa Syahabuddin juga terbagi dua: dari Syarif Ali yang memerintah Siak, dan dari Syarif Abdurrahman yang memerintah Pelalawan sejak 1811, sebagaimana dijelaskan kemudian.

Ketika Sayid Utsman meninggal, Sayid Ali yang memimpin keluarganya. Dari Bukit Batu, ia menjadi perompak yang ditakuti sepanjang pesisir timur Sumatera hingga menjarah Selangor sebagai saingan dagang Siak, sementara pamannya, Raja Tua Muhammad Ali, memegang Senapelan. Untuk menambah lagi kekerabatan Melayu, Sayid Ali menikahi putri tertua Tengku Musa, anak Sultan Mahmud Syah.<sup>72</sup> Ambisi Sayid Ali menjadi raja dimulai pada masa kekuasaan Sultan Yahya. Sebagaimana dinarasikan sebelumnya, Sayid Ali dan Raja Tua Muhammad Ali meminta kekuasaan Yang Dipertuan Muda ketika Tengku Endut melarikan diri ke Mandau. Ketika Raja Tua meninggal, Sayid Ali mulai menghimpun dukungan, terutama dari Penghulu Empat Suku. Ketika Tengku Endut

---

<sup>71</sup> Terdapat beberapa alternatif nama, seperti Syaifuddin (dipakai sebagai gelar sultan Siak berdarah Arab) dan Hasyimiyah (nama muncul sejak Syarif Hasyim, yang menegaskan diri dan keturunannya dari Bani Hasyim). Namun, berdasarkan semacam “poster” zaman kolonial yang menggambarkan Syarif Kasim II beserta istrinya, tertulis: Allah lanjutkan usia Kerajaan [wangsa] Syahabuddin” sehingga nama inilah yang dipakai. Lihat lampiran.

<sup>72</sup> Donald J. Goudie, *Syair Perang Siak: A Court Poem Presenting the State Policy of a Minangkabau Malay Royal Family in Exile* (Kuala Lumpur: Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 1996), hlm. 40; J. Kathirithamby-Wells, *loc. cit.*; Timothy P. Barnard, *op. cit.*, hlm. 142-152.

membunuh Datuk Tanah Datar karena dukungannya kepada Sayid Ali, jelaslah bahwa dukungan terhadap Raja Yahya dan Tengku Endut merosot, sehingga Raja Yahya melarikan diri ke Pelalawan.<sup>73</sup>

Pada tahun 1791, Sayid Ali naik takhta sebagai Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin. Sebagai penerus sultan Siak, ia menyematkan nama leluhurnya, Abdul Jalil, sedangkan sebagai orang Arab Ba'alawi, ia menyematkan gelar Syaifuddin. Pada awal pemerintahannya, ia memindahkan kerajaan ke Koto Tinggi, seberang Mempura. Selain itu, ia menunjuk saudaranya, Sayid Abdurrahman, sebagai Yang Dipertuan Muda, dan Tengku Busu Sayid Ahmad sebagai syahbandar Bukit Batu.<sup>74</sup> Setelah sempat menyerang Pelalawan pada tahun 1781, Siak menyerbu Pelalawan lagi dan melengserkan rajanya, Maharaja Lela II, serta mengangkat Sayid Abdurrahman sebagai sultan Pelalawan yang baru pada tahun 1810.<sup>75</sup>

Inilah masa-masa kejayaan Siak sebagai sebuah kekuatan di pesisir timur Sumatera. Dengan peperangan Kesultanan Riau melawan VOC, penjarahan Melaka dan Selangor, serta VOC yang berada di ambang kebangkrutan, Siak yang meluas hingga ke Deli menjadi tempat lalu lintas perdagangan Selat Malaka. Dibukanya Penang semakin menambah ramai jalur dagang Siak dari Minangkabau, yang memproduksi gambir dan kopi dan tentu harus melalui sungai Siak. Wilayah takluk

<sup>73</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*, hlm. 158-159

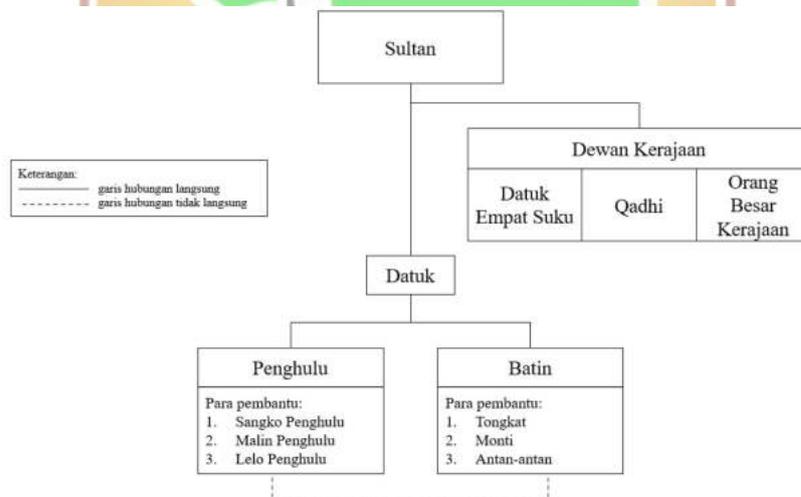
<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 162-163

<sup>75</sup> J. Faes, "Het Rijk Pelalawan", *Tijdschrift Voor Indische Land- En Volkenkunde, Uitgegeven Door Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, 1822, hlm. 23; J. Kathirithamby-Wells, *loc. cit.*

jajahannya seperti Batubara, Asahan, Buluh Cina dan Panai juga produktif. Siak sendiri menjadi penyuplai kayu balok untuk membuat kapal di Penang.<sup>76</sup>

Sistem pemerintahan Kesultanan Siak oleh Wangsa Syahabuddin berubah sedikit. Tunggul Manah yang sebelumnya termasuk ke dalam Dewan Kerajaan digantikan oleh Qadhi, sedangkan hubungan sultan dengan para penghulu dan batin tidak lagi terjadi secara langsung, melainkan melewati datuk. Selain itu, beberapa penghulu juga dapat mewakili datuk dalam mengurus kepentingan sultan kepada batin, disebabkan luasnya wilayah yang dikuasai para batin.<sup>77</sup>

### Bagan 3 Sistem Pemerintahan Kesultanan Siak Wangsa Syahabuddin hingga 1898



Sumber : Ellya Roza, *Kerajaan Siak 1723-1908: Perspektif Sejarah dan Sosiobudaya* (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 130.

Sayid Ali mengundurkan diri sebagai sultan pada tahun 1810 dan mengangkat anaknya, Sayid Ibrahim, sebagai Syarif Ibrahim Abdul Jalil

<sup>76</sup> J. Kathirithamby-Wells, *op. cit.*, hlm. 232

<sup>77</sup> Ellya Roza, *op. cit.*, hlm. 129-130.

Khaliluddin, sementara ia sendiri menjadi Raja Tua. Pada masa ini, Penang berkembang menjadi kota pelabuhan yang pesat dengan harga pasar yang kompetitif, manakala Bukit Batu sebagai pelabuhan Siak masih dikontrol ketat. Pedagang kopi Minangkabau beralih ke sungai Kampar, sehingga Pelalawan menjadi sejahtera. Sementara itu, aktivitas perompakan tidak mungkin diandalkan lagi. Ketika orang-orang Eropa sebelumnya tidak bisa menghalau perompak dan terkadang malah bekerja sama dengan mereka, maka pada awal abad ke-19 kecanggihan angkatan laut Eropa serta militernya menyebabkan mereka mempunyai kekuatan untuk menundukkan kerajaan sekalipun.<sup>78</sup>

**Peta 2.**  
**Wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura pada tahun 1837.**



Sumber : Karte von der Insel Sumatra COLLBN Port 58 N 10, [https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/2013468?solr\\_nav%5Bid%5D=9776864881cc57ca14ae&solr\\_nav%5Bpage%5D=14&solr\\_nav%5Boffset%5D=4](https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/2013468?solr_nav%5Bid%5D=9776864881cc57ca14ae&solr_nav%5Bpage%5D=14&solr_nav%5Boffset%5D=4), diakses tanggal 2 September 2025

<sup>78</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*, hlm. 167-170.

Inggris dan Belanda mencoba untuk mengincar Siak. Inggris, misalnya, mencoba menghubungi Siak melalui William Farquhar, residen Penang, pada tahun 1818. Meskipun hanya sampai di Bukit Batu, Farquhar dapat menawarkan kerja sama dengan Siak dan sekitarnya, meskipun tidak terlalu berpengaruh.<sup>79</sup> Pada tahun 1823, John Anderson mencoba menjalin hubungan dengan Syarif Ibrahim, yang disambut dengan meriah di Siak. Dari kunjungannya tersebut, terlihat bahwa orang Siak lebih tertarik menjalin kerja sama dengan Inggris dibandingkan Belanda.<sup>80</sup> Namun, pada tahun 1824, Inggris dan Belanda sepakat dalam Traktat London bahwa hegemoni Belanda adalah pada pulau Sumatera secara keseluruhan dan Inggris pada Semenanjung Malaya.<sup>81</sup> Hal ini menyurutkan niat Inggris untuk bekerja sama dengan Siak. Sementara itu, Syarif Ibrahim semakin tidak kompeten dan tidak disukai sebagai sultan, terutama setelah kematian Syarif Ali pada tahun 1821, sehingga Datuk Empat Suku beserta Sayyid Abdurrahman sepakat pada tahun 1827 menggantikan Syarif Ibrahim dengan adiknya, Syarif Ismail.<sup>82</sup>

Berpindahnya kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indrapura dari Wangsa Abdul Jalil ke Wangsa Syahabuddin tidak banyak mengubah tradisi kerajaan. Nyatanya, Wangsa Syahabuddin justru berasimilasi secara penuh ke dalam tradisi Melayu. Catatan perjalanan John Anderson ke Siak pada tahun 1823 di bawah ini dapat

<sup>79</sup> Graham Irwin, *Nineteenth-century Borneo: A Study in Diplomatic Rivalry* (Singapura: National Library Board Singapore, 1955), hlm. 55

<sup>80</sup> Kisah perjalanan Anderson ke Siak akan diceritakan kemudian, dalam bab ini.

<sup>81</sup> Lihat Walter Scott, *The Edinburgh Annual Register, for 1824, 17(III)* (Edinburgh: James Ballantyne and Co.) 25-28., tersedia di Google Books, <https://books.google.co.id/books?id=YGQJAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>, diakses tanggal 1 Februari 2025.

<sup>82</sup> O.K. Nizami Jamil *et al.*, *op. cit.*, hlm. 125.

memberi sedikit gambaran bagaimana Kesultanan Siak memberikan “pelayanan” kepada tamu kehormatan secara Melayu.

Pada 17 Maret 1823, sebelum berangkat ke Siak, John Anderson berlabuh di Bukit Batu, kota pelabuhan utama kerajaan. Ia disambut oleh Tengku Long Putih. Besoknya, ia menelusuri Sungai Siak yang merah dan banyak buih selama dua hari. Rombongannya dihampiri oleh Mali, juru tulis kerajaan, dan menanyakan apakah mereka orang Inggris atau Belanda; Kesultanan Siak akan mengusir setiap orang Belanda yang masuk ke wilayahnya. Tengah malam tanggal 20 Maret, Syekh Muhammad bin Syekh Abdullah menyambut rombongan Anderson, berpakaian sutra putih dengan Serban kuning melilit kepalanya. Syekh Muhammadlah yang mengirim surat dari Anderson kepada sultan Siak beberapa bulan sebelumnya mengenai kunjungannya ini.<sup>83</sup>

Rombongan Anderson sampai di kota Siak pada tanggal 22 Maret; mereka menandai kedatangan dengan sembilan tembakan meriam untuk menghormati sultan. Mereka disambut dengan hadiah dari Tengku Pangeran dan undangan untuk menemuinya sebelum menemui raja, tetapi Anderson ingin menemui sultan terlebih dahulu, terutama karena mengetahui sebelumnya bahwa hubungan sultan dengan Tengku Pangeran sedang tidak baik. Saat menghadap sultan di istananya, tembakan meriam sebanyak sembilan kali menyambut kedatangan mereka, dan petinggi kerajaan menyambut di depan istana yang dihiasi kain emas dan perak. Anderson mempersembahkan surat dan berbagai hadiah kepada sultan di istananya, sembilan

---

<sup>83</sup> John Anderson, *Mission to the East Coast of Sumatra, in 1823* (London: Cadell, 1826), hlm. 160-164.

tembakan meriam dilepaskan lagi. Anderson menyampaikan maksud kedatangannya, untuk memperbarui perjanjian Siak dengan Inggris sebagaimana dimulai oleh William Farquhar pada tahun 1818. Sang sultan menjawab “mana boleh buang janji dengan Inggris” dan menjelaskan bahwa ia menolak kerja sama dengan Belanda yang datang tiga bulan silam.<sup>84</sup>

Pada pukul tiga sore, Tengku Pangeran mendarangi kapal Anderson untuk sebuah percakapan pribadi. Tengku Pangeran datang berpakaian sutra dengan benang emas, diiringi oleh seorang putranya; ia disambut dengan tujuh tembakan meriam. Percakapan pribadi itu tidak jadi, karena kemudian datanglah Syekh Muhammad beserta anak dan rombongannya pula, sehingga kapalnya ramai. Rombongan penuh itu berada di kapal selama satu jam, dengan berbagai pertanyaan yang dijejalkan kepada Anderson.<sup>85</sup> Menjelang malam, para datuk mengundangnya ke rumah datuk kepala untuk membahas beberapa hal. Dalam kesempatan itu, mereka menunjukkan sebuah keris yang pernah dipakai dalam peristiwa Pulau Guntung dan terwarisi oleh keturunannya. Mereka sangat kesal dengan kelakuan Belanda dan sangat berharap bahwa Melaka dikuasai oleh Inggris agar perdagangan selat semakin mudah.<sup>86</sup>

Pada tanggal 23 Maret, ia diundang oleh Tengku Panglima Besar untuk sebuah jamuan. rumahnya dihiasi kain kuning gantung, dan ia serta saudaranya berpakaian kebesaran dengan benang emas dan perak dari kepala hingga kaki. Para

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 164-166

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 167

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 168

datuk dan kepala suku juga berkumpul untuk menemui Anderson. Pada pukul tiga sore, ia diundang ke dalam musyawarah kerajaan yang dihadiri para pembesar. Sang sultan mengenakan pakaian dengan benang emas dan bersematkan permata besar, yang berbeda dari hari sebelumnya. Hamba-hamba raja membawa benda pusaka seperti keris, pedang, tombak, tameng dan tepak. Pada pukul tujuh, ia berkunjung lagi ke rumah Tengku Pangeran dan disugahi jamuan teh ala Inggris, disambung dengan makan malam besar, diiringi dengan nyanyian dengan musik biola dan gendang.<sup>87</sup>

Tengku Pangeran digambarkan sebagai orang yang cukup ambisius dan berwawasan luas mengenai apa yang terjadi di luar Siak, termasuk sejarah peperangan Eropa sezamannya dan keberadaan Inggris di India. Anderson bahkan terkejut dengan pengetahuannya mengenai Napoleon. Tengku Pangeran telah banyak berhubungan dengan Inggris di Malaya, sampai-sampai Farquhar memberikan cicinnya sendiri kepadanya. Ia percaya bahwa kehadiran Inggris merupakan satu-satunya cara mempertahankan Siak.<sup>88</sup> Anderson mendapati bahwa Tengku Pangeran dapat menjadi sahabat Inggris dan sangat menentang setiap pejabat kerajaan yang mendukung kerja sama dengan Belanda. Ia sendiri berbual dapat menjadikan dirinya raja dalam satu hari dengan mudah.<sup>89</sup>

Pada tanggal 24 Maret, Anderson didatangi oleh beberapa kepala suku yang memberikan banyak hadiah kepadanya. Keesokan harinya ia juga didatangi oleh

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 172-175

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 171

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 176

para kepala suku lainnya dan juga memberi hadiah. Siangnya, ia mengunjungi rumah datuk kepala, yang bersama datuk-datuk lainnya kemudian berangkat menghadap sultan. Sang sultan memberikan surat perjanjian secara resmi kepada Anderson. Setelah itu, semua yang hadir, termasuk masyarakat setempat sekitar seribu orang, berkumpul di depan lapangan istana untuk melihat pertunjukan “pedang dan tarian” (mungkin tarian pedang dan silat). Selesai pertunjukan, tamu kehormatan kembali ke istana untuk menyantap jamuan manis.<sup>90</sup>

Semua pejabat tinggi hadir pada hari kepulangan Anderson keesokan paginya di tempatnya berlabuh. Ketika Datuk Empat Suku datang dan turun dari perahu, meriam ditembakkan sebanyak lima kali. Sultan datang dengan lebih mewah lagi: ia menaiki perahu dengan empat belas dayung, tenda sutra, panji-panji kuning dan beberapa payung menghiasi perahu itu. Anderson takjub dengan penampilan sultan yang lebih mewah lagi dari sebelumnya. Selain sultan, ada empat orang pendamping berpakaian merah tua, empat orang berselempang kuning yang membawakan pedang kebesaran, tepak emas, dan tameng emas berhiaskan permata. Ketika sultan turun, meriam ditembakkan sebanyak sembilan kali. Semua ‘pertunjukan’ akbar ini.

Sambutan itu sangat membekas bagi Anderson, yang menulis:

*The reception I met with at this place has made an impression upon my mind which will not easily be effaced. I never met anywhere with a more hearty welcome, all the people vying with each other in their kindly offices. How different was the treatment I actually experienced, compared with what I anticipated. I expected to meet with a savage race of pirates, who would*

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 178-182

*receive me with jealousy and distrust. I must describe them, however, as I found them, hospitable and generous.*<sup>91</sup>

(Sambutan yang saya dapati di tempat ini telah membuat kesan dalam pikiran saya yang tidak akan mudah dihapus. Saya tidak pernah menemui tempat lain dengan sambutan yang lebih hangat, yang semua orang berlomba-lomba satu sama lain menjamu di tempatnya yang ramah. Betapa beda perlakuan yang saya alami, dibandingkan dengan apa yang saya antisipasi. Saya kira akan menemui ras lanun yang barbar, yang menerima saya dengan iri dan kecurigaan. Namun, saya harus menjabarkan mereka, sebagaimana yang saya temukan, orang yang ramah dan murah hati.)

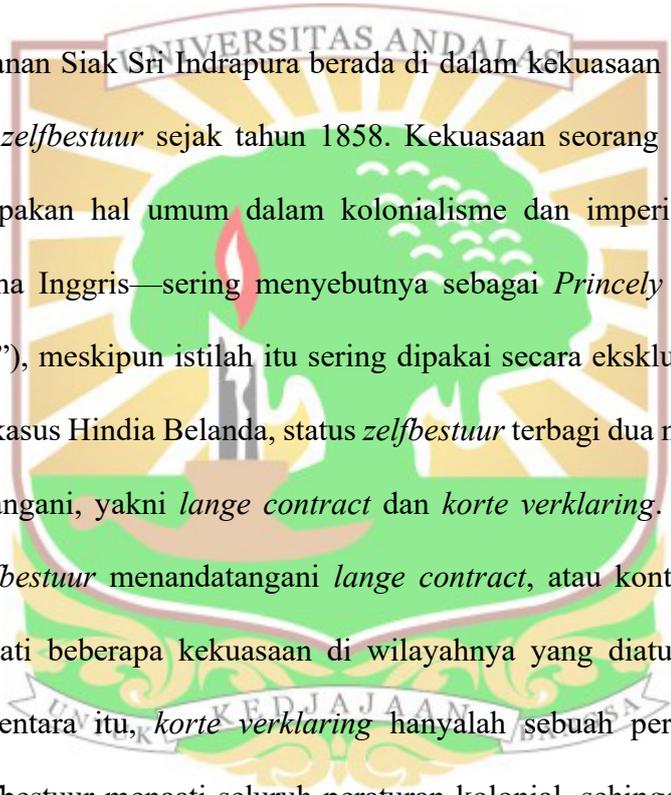


---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 185

### BAB III

## IDENTITAS KESULTANAN SIAK DARI *ZELBESTUUR* HINGGA PEMERINTAH INDONESIA (1858-1968)



Kesultanan Siak Sri Indrapura berada di dalam kekuasaan Hindia Belanda dalam bentuk *zelfbestuur* sejak tahun 1858. Kekuasaan seorang ‘raja’ di bawah kolonial merupakan hal umum dalam kolonialisme dan imperialisme. Penulis Barat—terutama Inggris—sering menyebutnya sebagai *Princely State* (“Negara Kepangeranan”), meskipun istilah itu sering dipakai secara eksklusif untuk kasus India.<sup>1</sup> Untuk kasus Hindia Belanda, status *zelfbestuur* terbagi dua menurut kontrak yang ditandatangani, yakni *lange contract* dan *korte verklaring*. Ketika seorang pemimpin *zelfbestuur* menandatangani *lange contract*, atau kontrak panjang, ia dapat menikmati beberapa kekuasaan di wilayahnya yang diatur oleh kolonial Belanda. Sementara itu, *korte verklaring* hanyalah sebuah pernyataan bahwa pemimpin *zelfbestuur* menaati seluruh peraturan kolonial, sehingga mereka yang menandatangani pernyataan ini sebenarnya tidak mempunyai arti politik.<sup>2</sup>

Pemerintahan-pemerintahan pribumi (termasuk *zelfbestuur*) pada dasarnya memiliki kekuasaan terbatas. Meski demikian, selalu ada jalan untuk menampakkan

---

<sup>1</sup> Lihat misalnya dalam Waltraud Ernst & Biswamoy Pati, *India's Princely States: People, Princes and Colonialism* (London & New York: Routledge, 2007). Penguasa pribumi ini juga kadang dibandingkan dengan fenomena *princely state* India sebagaimana dalam Richard H. Hopper, *Seribu Tahun Sumatera Tengah: Sejarah Manusia, Rempah, Timah dan Emas Hitam* (Depok: Komunitas Bambu, 2016), hlm. 142.

<sup>2</sup> Usep Ranawidjaja, *Swapradja Sekarang dan Dihari Kemudian* (Jakarta: Penerbit Djembatan, 1955), hlm. 6.

bahwa mereka adalah pemimpin berpengaruh. Surakarta dan Yogyakarta selalu menyelenggarakan Sekaten, upacara memperingati hari-hari besar Islam, sekaligus berkumpulnya penguasa bawahan sultan masing-masing.<sup>3</sup> Geertz malah menyebut kerajaan-kerajaan di Bali dalam kuasa kolonial sebagai “Negara Teater”, yang tidak punya kekuasaan lagi selain istananya, sehingga mereka menunjukkan kekuasaannya pada hal-hal yang bersifat seremonial seperti Pelebon (kremasi raja). Bagi Geertz, “negara...adalah wadah pelaksanaan ritual massal”.<sup>4</sup>

Kesultanan Siak Sri Indrapura masih mempunyai kekuasaan di bidang-bidang tertentu. Dari segi politik, sejak di bawah naungan Belanda, ranah kekuasaan sultan Siak memang dipersempit berkali-kali melalui pembaharuan kontrak. Namun, sultan dapat menetapkan hukumnya sendiri di wilayahnya, dan pejabat istana tetap merupakan orang yang berpengaruh bagi pemerintahan, meskipun semua itu menurut kadar tertentu yang tidak melewati wewenang Hindia Belanda. Selain itu, sultan-sultan Siak mengikut arus modernisasi, juga dalam kadar tertentu, yang merombak banyak hal dalam kerajaan dan wilayahnya. Atraksi seremonial Kesultanan Siak juga banyak berubah. Upacara-upacara yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan dikemas dengan fusi gaya Barat dan Melayu, sementara upacara-upacara pribadi, terutama siklus kehidupan seperti pernikahan dan pemakaman, masih diselenggarakan secara tradisional Melayu.

---

<sup>3</sup> Tradisi ini masih terlihat pada sekaten masa sekarang, sekalipun pemimpin-pemimpin yang dimaksud adalah orang-orang istana. Soepanto, Suratmin dan Bambang Sularto, *Upacara Tradisional Sekaten Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya), hlm. 50-52.

<sup>4</sup> Clifford Geertz, *Negara: The Theatre State in Nineteenth-century Bali* (West Sussex: Princeton University Press, 1980), hlm. 13.

### 3.1. Awal *zelfbestuur* Belanda hingga Syarif Kasim I

Siak Sri Indrapura telah lama diincar oleh Belanda, dan mereka sangat khawatir ketika Siak menjalin hubungan dengan Inggris. Hal ini terjadi dua kali. Pertama, pada tahun 1823, Siak sempat menjalin hubungan dengan Inggris melalui William Anderson, sebagaimana diceritakan dalam bab sebelumnya, untuk melanjutkan hubungan Siak dengan William Farquhar yang tampaknya tidak jadi. Setahun kemudian, Traktat London disetujui agar Inggris menguasai Semenanjung Melayu sepenuhnya dan Belanda menguasai Sumatera sepenuhnya. Kedua, kedatangan Wilson ke Siak pada tahun 1857. Hal ini memicu Belanda untuk menguasai Siak secara langsung.

Syarif Ismail adalah faktor yang membuat Belanda dapat menguasai Siak. Dalam musyawarah yang dihadiri Datuk Empat Suku dan Sultan Syarif Hasyim (Sultan Pelalawan dari Wangsa Syahabuddin), Syarif Ismail yang merupakan kemenakan Syarif Ibrahim diangkat sebagai sultan pada tahun 1827. Pada tahun 1857 Tengku Putra, salah satu saudaranya, menghimpun kekuatan untuk memberontak.<sup>5</sup> Hal ini membuat Syarif Ismail lari ke Singapura, berharap bahwa Inggris dapat membantunya. Inggris yang terikat dengan Traktat London 1824 tidak ingin berurusan dengan Syarif Ismail, tetapi ia kemudian bertemu dengan seorang pelaut bernama Wilson. Wilson membantu dengan penyediaan senjata dan kapal, serta bantuan lainnya.<sup>6</sup> Bahkan, Wilson diberikan gelar Maharaja Muda Steer Raja

<sup>5</sup> O.K. Nizami Jamil, *op. cit.*, 124-125.

<sup>6</sup> Richard H. Hopper, *op. cit.*, hlm. 94.

Negeri Siak oleh Syarif Ismail. Hal ini mengakibatkan ketakutan Belanda, yang selain tanda pengaruh Inggris di Siak, juga kekhawatiran terjadi kasus yang sama dengan Sir James Brook, Rajah Putih yang mendirikan Kerajaan Sarawak.<sup>7</sup>

Syarif Ismail malah kelabakan dengan permintaan yang dituntut Wilson dan pasukannya, sehingga ia lari lagi, kali ini untuk menemui residen Riouw. Belanda mengirimkan bala tentaranya sendiri untuk mengusir Wilson, yang waktu itu berada di Bengkalis dan mengibarkan bendera Inggris. Saat melihat kapal-kapal Belanda, Wilson melarikan diri.<sup>8</sup> Residen Riouw juga menengahi perselisihan antara Syarif Ismail dengan Raja Muda. Pada tanggal 13 Juni 1857, keduanya akhirnya berdamai, disaksikan Residen Riouw dan para bangsawan Siak, sementara kapal-kapal perang Wilson dibiarkan begitu saja sehingga diambil oleh sultan.<sup>9</sup> Pada tanggal 29 November 1858, Syarif Ismail menandatangani kontrak 39 pasal dengan Pemerintah Hindia Belanda, diwakili oleh Residen Riau.<sup>10</sup>

Gambaran kondisi Syarif Ismail diparalelkan dengan Sultan Ismail oleh Goudie. Sultan Ismail menghadapi perlawanan dari pamannya sendiri, Raja Alam, manakala Syarif Ismail menghadapi pemberontakan kemenakannya sendiri, Tengku Putra. Sultan Ismail terancam oleh kekuatan asing yang dibawa Raja Alam, manakala Syarif Ismail terancam oleh kekuatan asing yang ia bawa sendiri, pertama

<sup>7</sup> “Amsterdam, Vrijdag 19 Junij”, *Algemeen Handelsblad*, 20 Juni 1857, “s Hertogenbosch, 19 Junij”, *De Noord-Brabanter*, 23 Juni 1857.

<sup>8</sup> Richard H. Hopper, *op. cit.*, hlm. 94-95.

<sup>9</sup> *Javaasche Courant*, 22 Juli 1857.

<sup>10</sup> Mengenai isi Kontrak Siak 1858 lihat “Contract met den Sulthan van Siak en onderhoorigheden”, *Tweede Kamer, Bijlagen*, 59ste vel., tanpa tahun, hlm. 233-236.

dari Wilson dan kemudian dari Belanda, yang akhirnya menamatkan kedaulatan politik Kesultanan Siak Sri Indrapura.<sup>11</sup> Ia wafat pada tahun 1864 dan dimakamkan di Koto Tinggi dengan gelar Marhum Indrapura.<sup>12</sup> Sementara itu, dewan kerajaan bermufakat untuk mengangkat Tengku Syarif Kesuma, adiknya yang lain, sebagai sultan berikutnya dengan gelar Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin.<sup>13</sup> Syarif Kasim dilantik pada tanggal 18 Maret 1865 di Siak.<sup>14</sup>

Penaklukan Siak terbukti krusial bagi penaklukan pantai timur Sumatra. Dengan menaklukkan Siak, maka Belanda dengan mudah dapat menguasai wilayah-wilayah tersebut. Ketika Siak telah takluk kepada Hindia Belanda, wilayah Deli, Serdang, Asahan, dan Langkat dilepas ke Belanda pada tahun 1888.<sup>15</sup> Meski demikian, Siak tetap disegani dan dihormati sepanjang pantai timur Sumatera. Saat penabalan Sultan Deli, Sultan Siak diundang sebagai tamu kehormatan. Demikian juga, ketika sultan Siak mau menandatangani kontrak baru, maka sultan-sultan lainnya tersebut akan dengan mudah menerima kontrak serupa.<sup>16</sup> Siak dipisahkan dari Keresidenan Riouw pada tahun 1873 dengan pembentukan Keresidenan Oostkust van Sumatra.<sup>17</sup>

<sup>11</sup> Donald J. Goudie, *op. cit.*, hlm. 34-35.

<sup>12</sup> O.K. Nizami Jamil, *op. cit.*, hlm. 132.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>14</sup> "Riouw", *Java Bode*, 12 April 1865.

<sup>15</sup> Barbara W. Andaya, "Recreating a Vision: Daratan and Kepulauan in Historical Context", dalam Cynthia Chou and Will Derks (editor), *Riau in Transition* (Leiden: KITLV, 1997), hlm. 487.

<sup>16</sup> "De Sultan van Siak †", *De Sumatra Post*, 2 April 1908

<sup>17</sup> *Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië*, 1874, hlm. 127.

Pada masa seperti ini, Syarif Kasim I memerintah Siak Sri Indrapura. Ia dianggap memulai modernisasi di dalam wilayahnya. Tradisi-tradisi lama yang dianggap tidak manusiawi seperti perbudakan menghilang, sementara beberapa masih bertahan.<sup>18</sup> Ia juga dianggap mengembangkan Koto Tinggi sebagai ibukota Siak Sri Indrapura, membangun masjid kerajaan, membuat mahkota, dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Ia merupakan sultan Siak pertama yang mendapatkan Bintang Singa Belanda (Orde van den Nederlandschen Leeuw) dengan pangkat Ksatria (ridder).<sup>20</sup> Penghargaan ini tentu diberikan atas kemajuan kota Siak yang dibina sang sultan.

### 3.2. Syarif Hasyim (1890-1908)

Syarif Hasyim di sini harus dibincangkan dalam satu subbab khusus ini, karena penulis menemui bahwa sebagai sultan Siak yang dinaungi Belanda ia menggunakan kesempatan yang ada untuk menjunjung identitas monarkinya. Hal ini dapat dilihat dari dua segi. Dari segi regional, beberapa kerajaan Melayu telah mengalami modernisasi, tetapi yang paling mencolok adalah Kesultanan Johor, yang merupakan wilayah silang dagang di Selat Malaka. Sultan Abu Bakar mereorganisasi struktur pemerintahan, birokrasi, pendidikan, serta membentuk konstitusi sendiri, sehingga mirip dengan ‘sekutunya’, Inggris.<sup>21</sup> Hal ini menginspirasi beberapa negeri Melayu lainnya, tetapi yang pertama-tama

<sup>18</sup> H.A. Hijmans van Anrooij, *op. cit.*, hlm. 32

<sup>19</sup> O.K. Nizami Jamil *et al.*, *op. cit.*, hlm. 136.

<sup>20</sup> “Proclamatie”, *Algemeen Handelsblad*, 14 Mei 1874. “Bintang” adalah terjemahan untuk “Order” sebagaimana ditulis dalam surat Syarif Hasyim kepada Ratu Wilhelmina yang mengabarkan kepulangannya, terlampir.

<sup>21</sup> Rahmat Abdul Aziz, *Pembaratan Johor: Suatu Analisis Sosiologi Sejarah (1800-1945)* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997), hlm. 227-230.

mengikuti jejak “modernisasi” ini di bagian Hindia Belanda adalah Kesultanan Riau Lingga. Sejalan dengan pengembangannya menjadi semacam negeri Islam modern, percetakan yang dipelopori kerajaan cukup berkembang dan menyebarkan pengetahuan di wilayah Riau sejak 1880-an.<sup>22</sup> Kesultanan Riau Lingga juga membuat beberapa peraturan dan hukum untuk diterapkan di wilayahnya, seperti Undang-undang Polisi yang Terpakai dalam Kerajaan Riau Lingga.<sup>23</sup>

Dibandingkan masa lalu, masa-masa akhir abad ke-19 di Siak merupakan tantangan yang terlambat dijawab, terutama ketika meningkatnya aktivitas agrikultural. Ketika perkebunan telah marak di Hindia Belanda, Siak menjadi tempat yang berkembang paling akhir. Meskipun Siak masih dikenal dengan jalur perdagangannya, rupanya aspek perkebunan lebih unggul dan diminati pasar. Hal ini terbukti di Medan dan sekitarnya, dengan perkebunan karet dan tembakau, menjadikannya kota yang lebih maju daripada Siak. Sementara itu pertanian di Siak, seperti digambarkan oleh Belanda pada tahun 1890, “*even akelig is als in vroegere jaren*” (sama buruknya seperti tahun-tahun sebelumnya).<sup>24</sup> Perkebunan Tembakau juga pernah berkembang di Siak, tetapi dengan cepat merosot.<sup>25</sup> Hanya setelah ditemukannya minyak sejak tahun 1901, harapan ekonomi baru bagi Siak muncul kembali.

<sup>22</sup> Jan van der Putten, “Printing in Riau: Two Steps Toward Modernity”, dalam Cynthia Chou and Will Derks (editor), *op. cit.*, hlm. 729-730

<sup>23</sup> Timothy P. Barnard, “Rules for Rulers: Obscure Texts, Authority, and Policing in Two Malay States”, *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 32 No. 2, 2001, hlm. 216.

<sup>24</sup> “Blocknotes”, *Deli Courant*, 2 Agustus 1890.

<sup>25</sup> “De Sultan van Siak in Amsterdam”, *Het Nieuws van den dag*, 16 Juni 1898

Kepribadian Syarif Hasyim sendiri dikenal sebagai orang yang cukup terbuka, dan seorang ‘negosiator’ sebagaimana digambarkan oleh orang Eropa yang dekat dengannya. Saat masih menjadi pangeran, ia dapat menyewakan tanah kepada beberapa orang Belanda dan mampu menegosiasi pejabat-pejabat kerajaan lainnya untuk mendapatkan persetujuan kontrak. Ketika Syarif Kasim I hendak membagikan tanah-tanah kerajaan untuk dikelola keempat puteranya, mereka memilih tanah-tanah paling bagus, tetapi Tengku Ngah memilih sebuah tanah tandus di Bagansiapiapi. Pada awalnya ia dicemooh karena tanah itu sendiri dianggap tidak ada harganya. Namun, Tengku Ngah kemudian berangkat ke Singapura dan meyakinkan banyak nelayan dan penebang kayu Tionghoa untuk bekerja di tanahnya tersebut, karena banyak ikan dan kayu yang bagus di sana. Beberapa tahun kemudian, tempat itu berkembang menjadi sebuah kota yang menghasilkan keuntungan tinggi. Ia juga pandai bergaul dan berurusan dengan orang Eropa. Sifat-sifat ini mengantarkannya menjadi sosok yang disukai.<sup>26</sup>

### 3.2.1. Kenaikan Takhta dan Awal Pemerintahan

Sebenarnya, penerus kekuasaan ditetapkan berada pada anak sulung Syarif Kasim, Tengku Muda. Namun, Tengku Muda merupakan orang yang kurang disukai berbagai kalangan. Orang Belanda menilai tidak mapan dalam memerintah, dan berencana memberhentikannya dari jabatan pemangku sultan pada bulan Januari 1889, ketika Syarif Kasim I sakit-sakitan. Ia juga tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Mangkubumi, pamannya yang merupakan petinggi

<sup>26</sup> “De Sultan van Siak”, *De Sumatra Post*, 3 Januari 1899.

kerajaan, serta para Datuk Empat Suku. Hubungan dengan pamannya semakin buruk, sehingga ia meminta Kerapatan Tinggi untuk menanggihkan Mangkubumi dari jabatannya; Residen Bengkalis mengabulkan permintaan ini pada 5 Oktober 1889. Hal ini tidak mengubah sikap Tengku Muda, yang dinilai keras kepala dan memaksakan pandangannya. Ia pun kemudian tidak dapat menjaga hubungan baik dengan Kerapatan Tinggi.<sup>27</sup>

Pada 19 Oktober 1889, Tengku Muda diberhentikan dari dua jabatan sekaligus: pemangku sultan dan putra mahkota. Tengku Muda beserta saudara sekaligus penasehatnya yang terpercaya, Tengku Bagus, diasingkan ke Bengkalis sebelum menerima keputusan lebih lanjut. Dua hari kemudian, Syarif Kasim I mangkat. Kerapatan Tinggi mengisi kekosongan pemerintahan setelah mangkatnya Syarif Kasim I. Setelah bermusyawarah, Kerapatan Tinggi memutuskan bahwa Tengku Ngah diangkat sebagai penerus sultan yang baru. Keputusan ini disetujui oleh Residen pada 3 Februari 1890.<sup>28</sup> Hal ini disambut baik oleh pengamat luar, karena sifat Tengku Ngah yang dianggap progresif dan mampu menghapus kebiasaan lama yang dianggap buruk.<sup>29</sup> Tengku Ngah ditabalkan sebagai Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin pada 25 Oktober 1890. Pertabalan ini dihadiri oleh Residen Bengkalis dan komandan militer, pejabat kerajaan Siak dan Eropa, serta masyarakat yang hadir di luar. Residen dalam sambutannya berkata pemerintah Hindia Belanda sangat mengandalkan kesetiaan Syarif Hasyim, sementara sang

---

<sup>27</sup> “Uit het Koloniaal Verslag van 1890”, *De Locomotief*, 25 Oktober 1890.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> “The Sultan of Siak”, *Pinang Gazette and Straits Chronicle*, 25 Februari 1890

sultan menjawab bahwa ia sangat menghargai kepercayaan tersebut dan tidak perlu khawatir akan permasalahan internal yang telah terjadi.<sup>30</sup>

### Gambar 3

#### Suasana Setelah Penabalan Sultan Syarif Hasyim



Keterangan : Syarif Hasyim, Residen Michielsen serta pejabat Belanda dan kerajaan Siak berfoto bersama setelah penabalan sang sultan pada 25 Oktober 1890

Sumber : Wereldmuseum, [https://collectie.wereldmuseum.nl/?query=search=\\*TM-60001334#/query/b1b39679-3fe9-450982c9-db8f3195f95e](https://collectie.wereldmuseum.nl/?query=search=*TM-60001334#/query/b1b39679-3fe9-450982c9-db8f3195f95e), diakses tanggal 25 Oktober 2024.

Syarif Hasyim melanjutkan modernisasi yang telah dicapai ayahnya. Salah satu terobosan baru yang dilakukan—mengikuti jejak Johor dan Riau Lingga—adalah penyusunan *Ingat Jabatan*. Karena Siak belum mempunyai percetakan sendiri, *Ingat Jabatan* dicetak di Singapura pada tahun 1897, sepanjang 33 halaman. Naskah hukum ini merupakan panduan untuk mereka yang bekerja di lingkungan istana dan balairung kerajaan. Jika *Undang-undang Polisi Riau Lingga* mengatur pekerjaan polisi di dalam lingkungan Kesultanan Riau Lingga, *Ingat*

<sup>30</sup> *Java Bode*, 10 November 1890.

*Jabatan* mengatur lebih detail hierarki jabatan dan peran-peran mereka. Selain itu, berbagai aturan dan hukuman bagi beberapa pelanggaran juga diatur di dalamnya.<sup>31</sup>

Untuk mengimbangi “modernisasi” Johor dan Riau-Lingga, Kesultanan Siak juga ikut membangun berbagai bangunan kerajaan. Bangunan yang paling terkenal adalah Istana Asserayah al-Hasyimiyah<sup>32</sup> dan Balai Kerapatan Tinggi. Kedua bangunan ini dibangun sekitar tahun 1890 hingga sebelum keberangkatan Syarif Hasyim ke Belanda pada tahun 1898.<sup>33</sup> Istana Asserayah al-Hasyimiyah, dikenal juga dengan Istana Siak, adalah sebuah istana kerajaan berarsitektur campuran antara Eropa dan Melayu; dalam gambaran Capitaine Bernard, seorang Prancis yang berkelana ke Sumatera, bangunan itu adalah “sebuah istana Rococo dengan gaya Moor.”<sup>34</sup> Balai Kerapatan Tinggi, di sisi lain, adalah bangunan balairung tempat diadakannya berbagai upacara kerajaan sekaligus majelis penghakiman di Siak. arsitekturnya lebih cenderung ke Melayu, tetapi dengan sedikit fusi Eropa, seolah-olah bangunan bertingkat dua ini menciptakan ilusi rumah panggung.

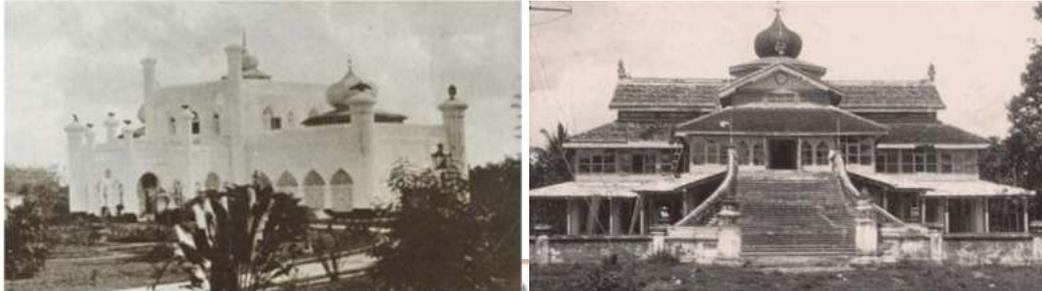
<sup>31</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*, hlm. 219-224.

<sup>32</sup> Berdasarkan surat wasiat Syarif Hasyim, *Kemudian Hendaklah Mengetahui*, nama bangunan ini adalah Istana Asserayah al-Hasyimiyah (اىستان السرية الهاشميه) Salinannya dan transkripsinya dapat ditemukan di istana tersebut.

<sup>33</sup> Penulis tidak dapat memastikan tahun berapa istana ini dibangun, karena belum menemukan sumber primer mengenai hal itu, dan sumber sekunder tentang Istana Siak tidak memberikan sumber pasti, bahkan beberapa di antaranya memberikan interpretasi yang bertentangan, misalnya dalam *Istana Kerajaa Siak Sri Indrapura* terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebut bahwa istana ini dibuat tahun 1889 setelah Syarif Hasyim mengunjungi Belanda (hlm. 4), yang tentu bertentangan dengan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya. Yang jelas, Istana Siak dan Balai Kerapatan Tinggi dibangun sebelum Syarif Hasyim mengunjungi Belanda, karena ia berbelanja di sana untuk mengisi koleksi istana sebagaimana yang akan diterangkan kemudian.

<sup>34</sup> Capitaine Bernard, *A travers Sumatra de Batavia à Atjeh* (Paris: Hachette, 1904), hlm. 168.

**Gambar 4**  
**Istana Siak (kiri) dan Balai Kerapatan Tinggi (kanan)**



**Keterangan** : Kiri: Istana Asserayah al-Hasyimiyyah dalam konstruksi awal; kanan: Balai Kerapatan Tinggi; keduanya dibangun pada paruh akhir dekade 1890-an.

**Sumber** : kiri: Paleis van de sultan Sjarif Kasim Abdul Djalil Saifoedin van Siak te Siak Sri Indrapoera, [https://digitalcollections.universiteit.leiden.nl/view/item/771804?solr\\_nav%5Bid%5D=47fb479cd09bef04cf7e&solr\\_nav%5Bpage%5D=0&solr\\_nav%5Boffset%5D=11](https://digitalcollections.universiteit.leiden.nl/view/item/771804?solr_nav%5Bid%5D=47fb479cd09bef04cf7e&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=11); kanan: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak.

### 3.2.2. Kunjungan ke Belanda 1898

Belanda dan segenap daerah takluk jajahannya bersiap-siap menyambut pemimpin baru. Wilhelmina, anak tunggal Raja William III yang meninggal tahun 1890, akan dilantik menjadi ratu Belanda setelah diwakilkan oleh Ratu Emma selama delapan tahun. Dari Hindia Belanda, *Soerabaiasch Handelsblad* memicu sebuah gagasan agar para bangsawan Hindia Belanda diundang untuk pelantikan sang ratu, akhirnya surat-surat kabar Hindia Belanda beramai-ramai menggaungkan gagasan ini. *Insulinde*, sembari menyebut penobatan Tsar Nikolai II dari Rusia pada 1896 yang mengundang semua vassalnya dari seluruh Rusia, menyatakan bahwa

“Apabila Hindia hendak ambil bagian dalam pesta penobatan yang khidmat itu, hal itu harus terjadi dengan cara yang pantas”.<sup>35</sup>

Pada bulan Desember 1897, Tweede Kamer (Majelis Rendah) Belanda berhimpun untuk membahas masalah ini. Dua puluh dua anggota parlemen tersebut mengajukan anggaran dana sebanyak £ 75.000 demi mengundang “pembesar Pribumi dan tokoh-tokoh lain dari Hindia Belanda” dalam pelantikan Wilhelmina. Cremer, Menteri jajahan saat itu, menolak gagasan dari parlemen. Mewakili eksekutif pemerintah Belanda, ia mengatakan bahwa baik Kabinet maupun pemerintah Hindia-Belanda tidak bermaksud mengundang ataupun mendesak para bangsawan Hindia Belanda untuk datang ke pelantikan sang ratu; walaupun mereka datang, maka harus dengan kehendak dan biaya sendiri. Pemerintah Belanda berpendapat bahwa dana yang diusulkan saja tidak mencukupi, karena mereka memperkirakan tamu-tamu istimewa itu akan datang dengan kemegahan dan pengiringnya.<sup>36</sup>

Karena hanya sepuluh anggota parlemen yang mendukung penolakan Cremer, Tweed Kamer memutuskan bahwa usulan mengundang bangsawan Hindia Belanda untuk pelantikan Wilhelmina tetap disetujui, tetapi dengan delegasi yang jauh lebih sedikit dari yang dibayangkan dan kurang representatif. Para bangsawan yang diundang adalah Pangeran Amidin Notonegoro dan Hasanuddin Sosronegoro dari Kutai, Pangeran Ario Mataram dari Surakarta, dan Sultan Syarif Hasyim dari

---

<sup>35</sup> Harry Poeze, Cornelis Dijk, dan Inge van der Meulen, *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda, 1600-1950* (Jakarta: Gramedia, 2008), 26-27.

<sup>36</sup> *Ibid.*

Siak.<sup>37</sup> Bangsawan Hindia Belanda lainnya merayakan pelantikan sang ratu di Batavia atau di tempat masing-masing.

Perwakilan Surakarta, Pangeran Aryo Mataram, tiba terlebih dahulu pada 10 Mei 1898 dan disambut di kantor Kemeterian Jajahan oleh sang Menteri, Cremer. Keduanya saling bercakap-cakap dengan Ingeluijff, seorang mantan residen di Hindia Belanda, sebagai penerjemahnya. Sebagai persembahan, Pangeran Aryo memberikan lukisan potret Susuhunan Pakubuwono X dan Ratu Wilhelmina kepada sang Menteri.<sup>38</sup> Dua putra sultan Kutai, Pangeran Mangkunegoro dan Sosronegoro, tiba di Belanda pada tanggal 6 Juli,<sup>39</sup> sementara sang sultan yang merayakan pelantikan Wilhelmina di Batavia mengirimkan hadiah berupa diadem emas yang ditempa oleh perusahaan van Arcken.<sup>40</sup>

Syarif Hasyim tiba di Amsterdam pada 15 Juni 1898. Perjalanannya melewati jalur Terusan Suez dan melintasi negara-negara Eropa dari darat, karena ia datang dari Paris menggunakan kereta api.<sup>41</sup> Begitu tiba, mereka langsung menginap di Hotel de l'Europe, ditemani oleh G.A. Schouten, mantan asisten residen pada awal pemerintahan Syarif Hasyim. Setelah tiba di Amsterdam, sultan pergi mengunjungi berbagai tempat seperti pabrik kaca Atlas Works untuk

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> "Laatste berichten", *Nieuwe Groninger courant*, 10 Mei 1898.

<sup>39</sup> "De Prinsen van Kutei", *De Locomotief*, 1 Juni 1898.

<sup>40</sup> *Bataviaasch Nieuwsblad*, 21 Juli 1898.

<sup>41</sup> Sebelum tiba di Belanda, Syarif Hasyim dan rombongan sempat menginap di Paris pada tanggal 30 Mei 1898, "Provinciale Staten", *Het Vaderland*, 31 Mei 1898.

memesan cermin, kebun binatang Artis untuk menghadiahkan seekor gajah dan tapir,<sup>42</sup> Koninklijke Tapijtfabriek untuk memesan karpet,<sup>43</sup> dan lain sebagainya.

Ketibaan seorang ‘sultan’ menarik perhatian wartawan, meskipun pada umumnya mereka sangat tertarik dengan kedatangan bangsawan Hindia Belanda di sana. Saat tiba di Amsterdam, misalnya, ia diwawancarai oleh wartawan *Het Nieuws van den dag* sore hari setelah kunjungan ke berbagai tempat tadi. Dari wawancara tersebut diketahui bahwa Syarif Hasyim masih akan berencana mengunjungi tempat-tempat seperti pabrik berlian, galangan kapal, Rijksmuseum dan sebagainya. Bahkan, ia juga berencana ke London, tetapi menunggu jadwal sultan menghadap Putri Mahkota Wilhelmina. Syarif Kasim menegaskan bahwa ia tidak ingin melakukan “urusan” apapun, untuk menghilangkan kecurigaan yang tidak diinginkan.<sup>44</sup>

Keesokan harinya, 16 Juni, Syarif Hasyim diwawancarai oleh wartawan *Insulinde*. Dari wawancara itu juga diketahui bahwa ia terpesona dengan infrastruktur jembatan yang besar begitu juga gedung-gedungnya. Ia juga berencana mengunjungi tempat-tempat industri, tetapi yang menarik perhatiannya adalah kerajinan perak Van Kempen, karena selain memproduksi kerajinan perak yang sangat indah, pengerjaannya juga cepat. Wartawan ini cukup memperhatikan hal-hal yang mencolok selama berada di sana, di antaranya simbol yang

<sup>42</sup> “Amsterdam”, *De Grondwet*, 28 Juni 1898. Gajah tersebut, yang dinamai Betsy, mati pada tahun 1907, “Gemengd Nieuws uit Binnen- en Buitenland” *Arnhemse Courant*, 31 Juli 1907

<sup>43</sup> “De Sultan van Siak”, *Te Tijd*, 15 Juni 1898

<sup>44</sup> “De Sultan van Siak in Amsterdam”, *Het Nieuws van den dag*, 16 Juni 1898

ditampilkan seperti panji-panji Sultan Syarif Hasyim yang dipasang di Hotel l'Europe. Tercatat bahwa:

*“Op het Hotel de l'Europe wapperde, behalve de Nederlandsche vlag, een zeer eigenaardige vlag, die een geel veld vertoont. In den bevenhoek, aan de zijde van den vlaggestok, is een cirkel, waarin een bruinroode figuur. Deze bestaat uit een horizontalen balk, aan welks uitende vertikale dwarsbalken, terwijl aan het midden naar boven toe eveneens twee uittekeels zijn aangebracht. Daaronder is een ringetje. Onder dit figuur als een meer gecompliceerd teeken, dat er uitziet als een soort slee, waarbinnen twee halve maantjes met de bolle zyde naar beneden.*

*Die vlag waa het eerste onderwerp van het gesprek, dat in het Maleisch gevoerd werd.*

— *„Ik heb in de couranten gelezen, dat dit de vlag en het wapen van Siak is; dat is toch niet zoo.”*

Z. H. — *„Dit is niet juist; het is mijn vlag, en het is mijn wapen. Ik alleen heb het recht dit wapen te voeren; het is een recht, dat uitsluitend toekomt aan da afstammelingen van den grooten profet Mohammed.”<sup>45</sup>*

(Di Hotel de L'Europe, selain bendera Belanda, ada bendera yang sangat unik berkibar, yang menampilkan latar kuning. Di sudut atas, di sebelah tiang bendera, ada sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat gambar berwarna merah kecokelatan. Gambar ini terdiri dari balok horizontal, dengan balok vertikal di ujungnya, sementara di tengahnya terdapat dua cabang yang menjulur ke atas. Di bawahnya terdapat sebuah cincin kecil. Di bawah gambar ini ada simbol yang lebih kompleks yang terlihat seperti kereta luncur, di dalamnya terdapat dua bulan sabit dengan sisi cembung menghadap ke bawah.

Bendera tersebut menjadi topik pertama dalam percakapan yang dilakukan dalam bahasa Melayu.

— "Saya membaca di surat kabar bahwa ini adalah bendera dan lambang Siak; apakah itu benar?"

Y.M. — "Itu tidak benar; ini adalah bendera saya, dan ini adalah lambang saya. Saya sendiri yang memiliki hak untuk menggunakan lambang ini; itu adalah hak yang secara eksklusif dimiliki oleh keturunan Nabi Muhammad yang agung.")

<sup>45</sup> "Een bezoek bij den Sultan van Siak", *Insulinde*, 21 Juni 1898

Meskipun cukup detail, bagi penulis deskripsi tersebut sebenarnya menggambarkan Muhammad Bertangkup, tetapi orang Eropa kurang familiar dengan lambang seperti ini, apalagi dipakai khusus oleh Kesultanan Siak di Nusantara. Hal ini semakin diperkuat oleh banyak objek yang merepresentasikan Muhammad Bertangkup yang penulis amati pada benda-benda bersejarah Kesultanan Siak. Muhammad Bertangkup dipakai sebagai lencana di kopiah dan tanjak sultan Siak, ukiran singgasana, motif piring istana, hingga pajangan foto. Satu objek yang lebih dekat dengan rekonstruksi ini adalah sebuah *fanion*<sup>46</sup> yang dipajang di Istana Siak. Muhammad Bertangkup lama kelamaan telah identik dengan lambang Kesultanan Siak Wangsa Syahabuddin.

**Gambar 5**  
**Rekonstruksi Bendera Kesultanan Siak**



**Keterangan** : Rekonstruksi bendera Kesultanan Siak berdasarkan deskripsi wawancara *Insulinde* dengan Syarif Hasyim dan komparasi lambang Muhammad Bertangkup (kiri), serta dengan komparasi *fanion* yang dipajang di Istana Siak (kanan).

**Sumber** : deskripsi dari *Insulinde*, 21 Juni 1898, direkonstruksi tanggal 7 November 2024

<sup>46</sup> *Fanion* adalah sebuah bendera kecil yang dipasang di bagian bayonet sebuah senjata untuk menandai unit tertentu. *Fanion* tentara Siak terlampir di lampiran 4.

Perusahaan Van Kempen terbukti memproduksi kerajinan perak yang indah dalam waktu cepat. Dalam hal ini, Syarif Kasim memesan sebuah karya kerajinan perak dengan gading gajahnya sebagai *masterpiece* untuk dihadiahkan kepada Putri Mahkota Wilhelmina. Gading merupakan hak sultan ketika seseorang berburu gajah dan gadingnya di wilayah Siak Sri Indrapura, dengan demikian Syarif Hasyim mempersembahkan salah satu harta terbaiknya. Van Kempen yang industrinya diberi predikat “Kerajaan” oleh Belanda sejak 1885<sup>47</sup> mengemas gading tersebut dengan unik dan indah. Dari ketibaan Syarif Hasyim tanggal 17 Juni dan jadwal menghadap Wilhelmina pada tanggal 25 Juni, kerajinan perak tersebut selesai dalam waktu tidak sampai seminggu.

Hasilnya adalah sebuah gading berukir dengan lilitan tumbuhan dan bunga tropis serta buah-buahan khas Nusantara, termasuk durian dan manggis di pucuknya. Di bawah gading terdapat miniatur rusa, kelapa, dan tumbuhan lainnya. Semua ukiran tersebut terbuat dari perak. Gading tersebut beralaskan batu dan tatakan dengan plat di depan tertulis “Aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Huldeblijk van Jang di Pertoean besar Sharif Hasjim Abdul Djalil Sjaifoedin, Sulthan van Siak Sri Indrapoera. 25 Juni 1898” (Untuk Yang Mulia Ratu Wilhelmina. Hadiah dari Yang dipertuan Besar Sharif Hasjim Abdul Djalil Sjaifoedin, Sultan Siak Sri Indrapoera, 25 Juni 1898).

---

<sup>47</sup> Penulis tidak menemukan dokumen penganugerahan gelar Koninklijk (“kerajaan”) kepada perusahaan Van Kempen, tetapi dalam website resmi mereka menampilkan sejarah perusahaan ini, termasuk penganugerahan gelar Koninklijk pada tahun 1855 oleh Raja William III, <https://www.kempen-begeer.nl/>, diakses tanggal 17 Januari 2025. Penganugerahan gelar “kerajaan” (Koninklijk/Royal dll.) kepada suatu perusahaan menandai bahwa pihak kerajaan secara resmi berlangganan kepada perusahaan itu.

### Gambar 6

#### Hadiah Gading Berukir dari Syarif Hasyim kepada Wilhelmina



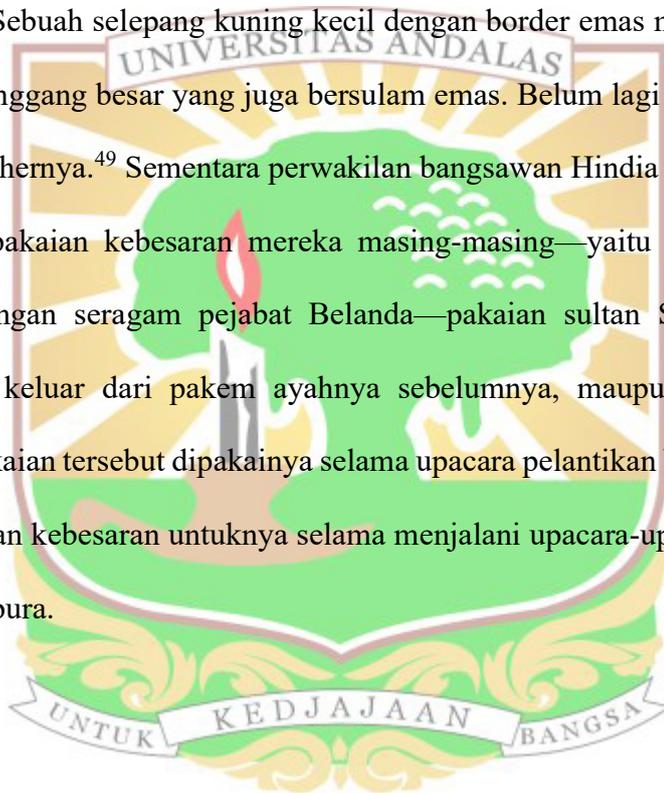
Keterangan : Hadiah Syarif Hasyim kepada Ratu Wilhelmina, berupa gading berukir berhiaskan ornamen perak yang menggambarkan kekayaan alam Siak Sri Indrapura

Sumber : Budi Rahmat Ramadhan, sekretaris MKA LAMR Siak, diperoleh tanggal 4 Desember 2024

Pada hari sabtu, 25 Juni, Syarif Hasyim menghadap Wilhelmina di Istana Soestdijk, Utrecht. Saat tiba di stasiun Baarn, kereta kencana dengan empat ekor kuda telah menunggu sang sultan, dan rombongan berangkat ke istana. Sesampainya di istana dan beristirahat sejenak, Syarif Hasyim diperkenankan menghadap Putri Mahkota Wilhelmina. Setelah perkenalan dan salam, Syarif Hasyim duduk di kursi yang berdekatan dengan Wilhelmina sembari berbincang dengan Schouten sebagai penerjemah. Pertemuan tersebut berlangsung selama 15 menit. Saat menghadap tersebut, Syarif Kasim memberikan hadiah gading berukir

kepada Wilhelmina. Setelah pertemuan selesai, sang sultan diantar ke stasiun Baarn ke Nijmegen, dengan cara yang sama seperti keberangkatannya.<sup>48</sup>

Pakaian yang dikenakan Syarif Hasyim saat menghadap tersebut juga menarik perhatian. Ia mengenakan seragam biru bersulam emas, dengan kerah tegak keemasan dan pangkat bahu (epaulette) berwarna emas berhiaskan berlian-berlian kecil. Sebuah selepang kuning kecil dengan border emas melilit tubuhnya, beserta ikat pinggang besar yang juga bersulam emas. Belum lagi topi berhias dan perhiasan di lehernya.<sup>49</sup> Sementara perwakilan bangsawan Hindia Belanda lainnya mengenakan pakaian kebesaran mereka masing-masing—yaitu paduan pakaian tradisional dengan seragam pejabat Belanda—pakaian sultan Siak merupakan inovasi baru, keluar dari pakem ayahnya sebelumnya, maupun Melayu pada umumnya. Pakaian tersebut dipakainya selama upacara pelantikan Wilhelmina, dan menjadi pakaian kebesaran untuknya selama menjalani upacara-upacara penting si Siak Sri Indrapura.



<sup>48</sup> “Binnenland”, *Arnhemsche Courant*, 28 Juni 1898

<sup>49</sup> *Ibid.*

### Gambar 7

#### Potret Sultan Syarif Hasyim, 25 Juni 1898



**Keterangan** : Syarif Hasyim mengenakan baju kebesaran saat upacara pelantikan Ratu Wilhelmina, pakaian ini kemudian selalu dikenakan dalam upacara penting di dalam kerajaannya.

**Sumber** : Rijksmuseum, <https://www.koninklijkeverzamelingen.nl/mediabank/detail/98ec25ad-cc91-5d79-b93c-103f535ed4d4/media/593e5a66-7404-c10f-44d6-22b9b207b4c3>, diakses tanggal 17 Desember 2024.

Pelantikan dijadwalkan pada tanggal 6 September 1898 di Nieuwe Kerk, Amsterdam, sebagaimana tradisi pelantikan raja-ratu Belanda. Keberangkatan Wilhelmina dimulai dari stasiun Weesperplein, dari sana ia dan Ibu Suri Emma menaiki kereta kencana berwarna gading yang ditarik delapan ekor kuda. Kereta kencana tersebut berada pada urutan ke 30 dari 34 rombongan yang berjalan dari Stasiun Weesperplein menuju Nieuwe Kerk. Tepat di belakang kereta kencana

tersebut adalah ajudan ratu, Sultan Syarif Hasyim, Pangeran Ario Mataram, dan dua pangeran Kutai, serta ajudan-ajudan lainnya.<sup>50</sup>

Sesuai rencana, rute yang dilewati adalah Sarpathistraat, Hooge Sluis, Frederiksplein, Utrechtsche straat, Heerengracht, Thorbeckplein, Vijzelstraat, Heerengracht, Leidschestraat, Keizersgracht, Raadhuisstraat, Nieuwezijds Voorburgwal, Paleisstraat, dan akhirnya di Istana Amsterdam.<sup>51</sup> Perjalanan ini diperkirakan sejauh lebih dari 5 km. Baru sampai di Sarpathistraat, terjadi sebuah insiden. Kuda yang ditunggangi Syarif Hasyim tiba-tiba tidak terkendali sehingga ia terjatuh. Sang sultan melanjutkan perjalanan dengan kereta kencana,<sup>52</sup> sementara berita lainnya menyebutkan bahwa ia berjalan kaki hingga akhir rute.<sup>53</sup> Sesampainya di tujuan, Wilhelmina bersiap mengenakan jubah kebesaran berwarna merah untuk berjalan di bawah kanopi dari Istana Amsterdam menuju Nieuwe Kerk. Semua tamu telah menunggu, termasuk para bangsawan Hindia Belanda, dan Syarif Hasyim berdiri di podium tingkat dua di bagian depan.<sup>54</sup>

<sup>50</sup> “De Inhuldigingsplechtigheid” *Het vaderland*, 10 Agustus 1898

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *The Noord Brabanter*, 7 September 1898; 1898-09-09, *Nieuwe Groninger Courant*, 9 September 1898

<sup>53</sup> *De Morgenpost*, 6 September 1898; *Leeuwarder Courant*, 7 September 1898;

<sup>54</sup> Urutan tamu kehormatan dalam pelantikan Wilhelmina terlampir.

**Gambar 8**  
**Syarif Hasyim Menghadiri Pelantikan Ratu Wilhelmina**



Keterangan : Upacara pelantikan Ratu Wilhelmina di Nieuwe Kerk, Amsterdam, pada 6 September 1898. Syarif Hasyim berada di pojok kiri gambar.

Sumber : Oneindig Noord-Holland, <http://www.oneindignoordholland.nl/public/nl-NL/verhaal/8744/een-koninklijke-inhuldiging-door-de-ogen-van-een-dame-du-palais>, diakses tanggal 22 September 2024

Setelah pelantikan, Wilhelmina berjalan ke Istana Amsterdam sebagaimana ia berjalan ke Nieuwe Kerk, kemudian menampilkan diri di atas balkon di hadapan rakyat Belanda, sementara bangsawan Hindia Belanda melihat dari jendela istana, termasuk Syarif Hasyim yang melihat dari dekat pintu balkon.<sup>55</sup> Setelah acara selesai, Wilhelmina kembali ke stasiun Weesperplein dan para bangsawan Hindia Belanda diantar dengan kereta kencana menuju penginapan masing-masing. Dengan demikian selesailah tugas para bangsawan Hindia Belanda untuk menghadiri pelantikan Wilhelmina, dan setelah beberapa acara lainnya, masing-masing mereka memiliki agenda tersendiri sebelum pulang.

<sup>55</sup> *Delftsche Courant*, 9 September 1898.

Saat pulang, Syarif Hasyim menyempatkan diri untuk mengunjungi beberapa kota besar Eropa, seperti Wina, Budapest, dan Istanbul. Budapest adalah kota paling dikenang dalam ingatan Syarif Hasyim, sementara itu perjalanannya ke Istanbul adalah sesuatu yang dianggap “berbahaya” bagi kolonial Belanda. Pada masa itu, Pan-Islamisme sedang bergejolak dan didukung oleh Sultan Utsmaniyah, Abdul Hamid II. Agar tidak menarik perhatian publik, ia menyamar sebagai “Syekh Syarif Hasyim”. Bahkan, pakaian-pakaian kebesarannya dikirim langsung dari Belanda ke Port Said untuk menutup kecurigaan seandainya diinterogasi.<sup>56</sup> Tentu saja, Syarif Hasyim yang merupakan seorang Ba’alawi—dibandingkan Khalifah Utsmaniyah yang berdarah Turki—dapat menjadi sasaran empuk bagi penyokong Pan-Islamisme untuk mendapat dukungan dan menyebarkan paham itu ke dunia Islam, khususnya di Hindia Belanda.

Sesampainya di Istanbul, rombongan Syekh Syarif Hasyim menginap di Hôtel de Londres di Beyoğlu. Ia sempat mengunjungi tempat bersejarah seperti Istana Topkapi, Bazaar, hingga Hagia Sophia. Rombongan tersebut sangat menjaga identitas mereka dan menghindari bertemu siapapun selain orang-orang tertentu, termasuk beberapa wartawan Belanda yang secara eksklusif meliput kunjungannya ke Istanbul;<sup>57</sup> berita itu saja tidak terbit sampai beberapa hari sebelum Syarif Hasyim hampir tiba di Siak. Syarif Hasyim sangat menyadari ketakutan Belanda terhadap gerakan Pan-Islamisme, sehingga ia memilih untuk menyembunyikan

---

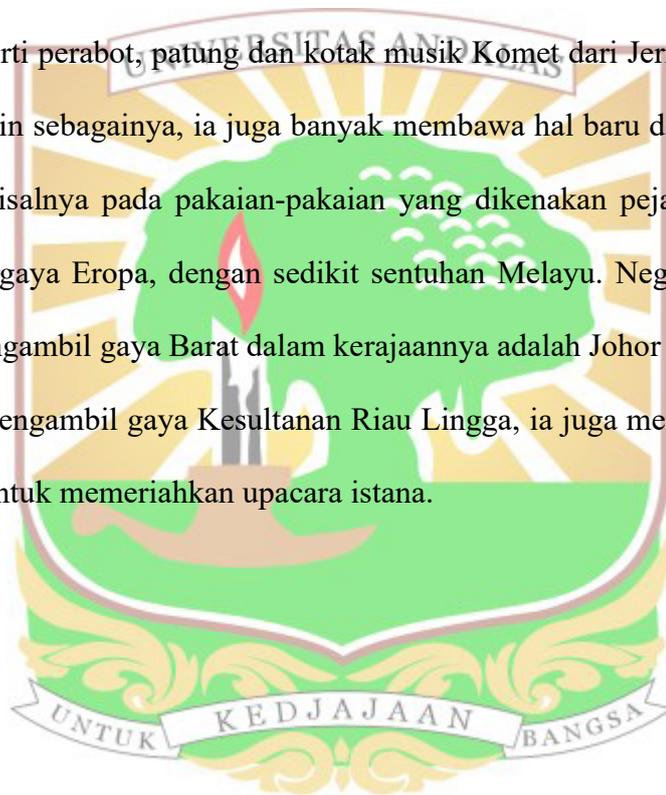
<sup>56</sup> *Bataviaasch Nieuwsblad*, 16 November 1898.

<sup>57</sup> *Ibid.*

identitasnya selama perjalanan pulang. Kekhawatiran Belanda bahwa Syarif Hasyim akan menjadi biang keladi Pan-Islamisme tidak pernah terbukti.

### 3.2.3. Kekuasaan Berikutnya

Kunjungan Syarif Hasyim ke Belanda tidak mungkin tanpa meninggalkan kesan mendalam, apalagi sebagai satu-satunya tamu Hindia Belanda dengan gelar sultan dan dapat bertemu secara pribadi dengan Ratu Wilhelmina. Selain membawa oleh-oleh seperti perabot, patung dan kotak musik Komet dari Jerman, kursi-kursi berlian, dan lain sebagainya, ia juga banyak membawa hal baru dalam istana. Hal ini terlihat, misalnya pada pakaian-pakaian yang dikenakan pejabat istana yang cenderung bergaya Eropa, dengan sedikit sentuhan Melayu. Negeri paling dekat yang juga mengambil gaya Barat dalam kerajaannya adalah Johor di bawah Sultan Abu Bakar. Mengambil gaya Kesultanan Riau Lingga, ia juga membentuk sebuah Pancaragam untuk memeriahkan upacara istana.



### Gambar 9

#### Salah Satu Sesi Majelis Kerajaan Siak Sri Indrapura



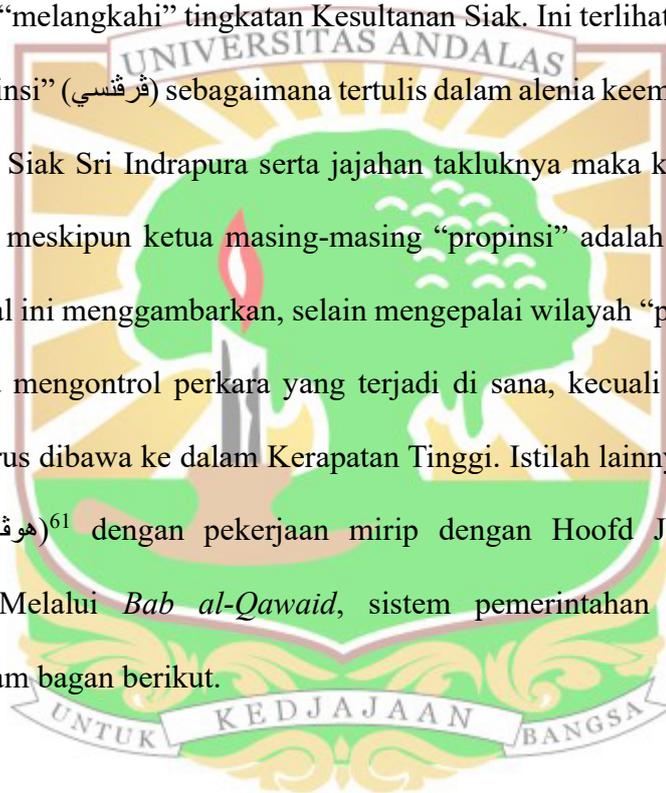
Keterangan : Syarif Hasyim, mengenakan pakaian kebesarannya saat pelantikan Ratu Wilhelmina, beserta petinggi dan petugas kerajaan dalam sebuah majelis kerajaan di Balai Kerapatan Tinggi, Siak Sri Indrapura

Sumber : KITLV, <http://hdl.handle.net/1887.1/item:773417>, diakses tanggal 15 Januari 2023.

Di bidang pemerintahan, perombakan struktur dijalankan oleh Syarif Hasyim. Sebagai kelanjutan dari Ingat Jabatan, Kesultanan Siak menyusun *Bab al-Qawaid*. *Bab al-Qawaid* bagi penulis merupakan hasil inspirasi dari berbagai pengalaman dan pengetahuan Syarif Hasyim mengenai kondisi “modernisasi”. Setidaknya, hal ini terinspirasi dari Johor yang memang sudah mempunyai konstitusi sendiri. Bab al Qawaid disusun segera setelah sang sultan kembali dari Belanda. *Bab al-Qawaid* disahkan pada 1 Desember 1898 dengan meterai Sultan Siak beserta Datuk Empat Suku di hadapan asisten residen Bengkalis, kemudian

dicetak pada tahun 1901.<sup>58</sup> Kali ini, Siak sudah mempunyai mesin cetaknya sendiri, meskipun untuk kalangan istana saja.<sup>59</sup>

Hal yang unik dalam *Bab al-Qawaid*, mengingat kedudukan *zelfbestuur* di antara pemerintah Hindia Belanda, terletak pada pemakaian istilah administrasi yang terkesan “melangkahi” tingkatan Kesultanan Siak. Ini terlihat dari pembagian wilayah “propinsi” (فرقتسي) sebagaimana tertulis dalam alenia keempat “Sebermula, adapun negeri Siak Sri Indrapura serta jajahan takluknya maka kita bagi sepuluh propinsi...”,<sup>60</sup> meskipun ketua masing-masing “propinsi” adalah “Hakim Polisi” (هکيم پوليس). Hal ini menggambarkan, selain mengepalai wilayah “propinsi”, Hakim Polisi ini juga mengontrol perkara yang terjadi di sana, kecuali perkara-perkara besar yang harus dibawa ke dalam Kerapatan Tinggi. Istilah lainnya adalah Hoofd Jaksa (هوف جقس)<sup>61</sup> dengan pekerjaan mirip dengan Hoofd Jaksa di sebuah keresidenan. Melalui *Bab al-Qawaid*, sistem pemerintahan Syarif Hasyim tergambar dalam bagan berikut.



<sup>58</sup> Untuk lebih detail lihat O.K. Nizami Jamil *et al.*, *Bab al-Qawaid: Transliterasi dan Analisis* (Siak Sri Indrapura: Bappeda Kabupaten Siak, 2002). Catatan kaki *Bab al-Qawaid* merujuk kepada sumber ini.

<sup>59</sup> “Van Tempo Doeloe”, *De Sumatera Post*, 9 Desember 1911.

<sup>60</sup> *Bab al-Qawaid*, hlm. 23.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

#### Bagan 4

### Sistem Pemerintahan Kesultanan Siak masa Syarif Hasyim



Sumber : Ellya Roza, *Kerajaan Siak 1723-1908: Perspektif Sejarah dan Sosiobudaya* (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 132.

Di luar pengetahuan Residen Bengkalis dan pejabat Kesultanan Siak Sri Indrapura, *Bab al-Qawaid* yang hanya berlaku hingga tahun 1915 itu hampir tidak diketahui oleh orang luar. Hal ini sebagaimana dalam sebuah berita mengenai kondisi zelfbesturen di Oostkust van Sumatra:

*“... Er is eens een Sultan van Siak geweest, die aan den resident mededeelde, dat hij voor zijn gebied een regeerings-reglement wilde vaststellen, dat dan als grondwet voor zijn rijk zou dienen, maar het is bij een voornemen gebleven. Een eenigszins complete wetgeving heeft geen der zelfbesturen. Zij hebben in den loop der tijden wel te hooi en te gras enkele ver- ordeningen gemaakt, doch zelfs een behoorlijke afkondiging hiervan heeft niet plaats gehad.”<sup>62</sup>*

(... Pernah ada seorang Sultan Siak yang menyampaikan kepada residen bahwa ia berniat menetapkan peraturan pemerintahan untuk wilayahnya, yang akan berfungsi sebagai konstitusi bagi kerajaannya, tetapi niat itu tidak pernah terwujud. Tidak ada satu pun pemerintahan zelfbestuur yang memiliki sistem hukum yang lengkap. Sepanjang waktu, mereka memang telah membuat beberapa peraturan secara sporadis, tetapi bahkan

<sup>62</sup> *De Sumatra post*, 7 November 1918.

pengumuman yang layak tentang peraturan-peraturan tersebut tidak pernah dilakukan.)

Residen J. Ballot yang sering berurusan dengan Syarif Hasyim menganggap berbagai “modernisasi” yang dilakukan Syarif Hasyim sebagai “*operette bouffe* (opera komik)”:

*“De Sultan ... had zijn rijk verdeeld in provinciën, aan het hoofd waarvan waardigheidsbe kleeders met allerkeurigste uniform. Verder had hij ingesteld departementen van algemeen bestuur, de directeurs gekleed in gala uniform als onze departements-chefs. Elk departement was ondergebracht in een hokje onder de vergaderzaal van den raad van landsgrooten ... Dan stond aan het hoofd van zijn vloot, bestaande uit een steamlaunch en een roe boot, een Admirzal, mede in groot uniform. En aan het hoofd van een paar tientallen knulligepolitiedienaren, die een soort lakeidiensten verrichtten, stond een Leger-Commandant, de uniform dragende van Luitenant-Generaal.*

*Zelf liet de Sultan zich een pak maken matjam Keizer GERMANY, waarbij hij als model nam het bekende portret van den Keizer staande op de brug van de Hohenzollern... ”<sup>63</sup>*

(Sang Sultan ... telah membagi kerajaannya menjadi provinsi-provinsi, di mana setiap provinsi dipimpin oleh pejabat berpangkat tinggi yang mengenakan seragam yang sangat beragam. Selain itu, ia mendirikan departemen-departemen pemerintahan umum, dengan para direktur yang mengenakan seragam gala seperti kepala departemen kami. Setiap departemen ditempatkan di sebuah ruangan kecil di bawah aula rapat dewan para pembesar kerajaan [Balai Kerapatan Tinggi, pen.] ... Kemudian di pucuk pimpinan armadanya, yang terdiri dari sebuah kapal uap dan sebuah perahu dayung, terdapat seorang Laksamana yang juga mengenakan seragam kebesaran. Sementara itu, di kepala sekelompok kecil polisi kikuk yang menjalankan tugas seperti pelayan, berdiri seorang Komandan Angkatan Darat yang mengenakan seragam seorang Letnan Jenderal.

Sultan sendiri memerintahkan untuk dibuatkan setelan pakaian “matjam Keizer GERMANY”, dengan mengambil model dari potret terkenal sang Kaisar yang berdiri di jembatan Hohenzollern...)

Pada tahun 1906, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk memperbaharui kontrak bagi semua *zelfbestuur* di Hindia Belanda, untuk

<sup>63</sup> “Van Tempo Doeloe”, *De Sumatera Post*, 9 Desember 1911.

menyesuaikan “prinsip-prinsip” politik pemerintah kolonial. Peraturan ini menetapkan bahwa pajak, hak sewa, impor-ekspor, dan lain-lain akan diambil alih kepada pemerintah Hindia Belanda.<sup>64</sup> Anggaran kerajaan dan pemerintah kolonial akan dipisah. Selain itu, status kependudukan Hindia Belanda diperluas menjadi warga Timur Asing, Eropa, dan pribumi yang bekerja di bawah pemerintah.<sup>65</sup> Kesultanan Siak Sri Indrapura dalam kontrak itu dinyatakan sebagai sebuah “pinjaman” Hindia Belanda kepada penguasanya, Syarif Hasyim.<sup>66</sup>

Sultan Syarif Hasyim sangat keberatan dengan beberapa pasal rancangan kontrak baru ini, sehingga melayangkan keluhan secara tertulis kepada pemerintah, tetapi ditolak dan menyuruh Residen Ballot untuk menemui sultan. Syarif Hasyim, satu-satunya sultan di Hindia Belanda yang diundang untuk menghadiri pelantikan Ratu Wilhelmina, merasa dapat ‘melobi’ kontrak yang dirasa akan menghilangkan kedaulatannya yang tersisa. Dengan demikian, ia menghindari pertemuan dengan residen dalih sedang sakit dan perlu dirawat di Singapura. Ternyata, ia berencana untuk pergi ke Belanda dan menyampaikan keluhannya langsung kepada pemerintah pusat.<sup>67</sup>

Mendengar hal itu, pemerintah Hindia Belanda seperti kebakaran jenggot. Bagi mereka, tentu tidak layak bagi seorang penguasa pribumi sekelas asisten residen untuk menemui langsung pemerintah pusat, karena hal ini dapat mencoreng

<sup>64</sup> “Een Conflict in Siak?”, *Bataviaasch nieuwsblad*, 22 Agustus 1906.

<sup>65</sup> “De nieuw politiek contracten”, *De Sumatera Post*, 28 Agustus 1907.

<sup>66</sup> *De Sumatra Post*, 13 Januari 1912.

<sup>67</sup> “Een Conflict in Siak?”, *Bataviaasch nieuwsblad*, 22 Agustus 1906.

pemerintah kolonial. Sementara sang sultan berkemas, gubernur jenderal Hindia Belanda mengirim telegram kepada Residen Ballot agar segera menghampiri Syarif Hasyim. Residen memasuki Istana Siak sementara sang sultan masih berkemas. “Beliau adalah sekutu saya (*mijn boondgenoote*). Beliau tidak akan membiarkan mereka mencabut penghasilan saya. Sang ratu adalah agung dan adil. Bagaimana menurut Anda, *tuan opziener?*”. Maka sang Residen mengingatkan bahwa melangkahi Gubernur Jenderal adalah tindakan yang akan sangat dipermasalahkan oleh Ratu, yang akan menganggapnya “tidak beradab”.<sup>68</sup>

Setelah diskusi yang lama, akhirnya Residen menyatakan bahwa bea impor dan tiga perempat pajak konsensi tetap dipertahankan. “Boleh tuan, bikin saja tuan”, kata Syarif Hasyim. Pernyataan kontrak bahwa Kesultanan Siak adalah “pinjaman” kepada Syarif Hasyim memang sangat menyinggungkannya, tetapi Residen menyebut bahwa hubungannya dengan Ratu Wilhelmina itu setara dengan hubungan Sunan Surakarta (yang terkenal sejahtera di masa pemerintahannya) dengan sang ratu. Pada akhirnya, Syarif Hasyim menyetujui kontrak 1906 tersebut pada bulan Desember.<sup>69</sup>

Pada akhir hayatnya, Syarif Hasyim menderita demam malaria. Sakit itu tidak tertahankan lagi, sehingga ia memutuskan untuk berobat ke Singapura pada tanggal 31 Maret. Ternyata, sakitnya tidak kunjung sembuh, dan pada tanggal 2

<sup>68</sup> *De Sumatra Post*, 13 Januari 1912.

<sup>69</sup> *Ibid.*

April ia mangkat di Singapura.<sup>70</sup> Jenazahnya diantar ke Siak menggunakan kapal uap Glanggi yang biayanya ditanggung oleh Syed Omar bin Mohammad Assegaf, salah seorang kerabatnya di Singapura.<sup>71</sup> Ia dimakamkan bersama leluhurnya di Koto Tinggi, tidak jauh dari Istana Siak.

### 3.3. Syarif Kasim II (1908-1968)

Setelah Syarif Hasyim meninggal dan dimakamkan, Tengku Sulung Sayid Kasim masih remaja dan menuntut ilmu di Batavia. Oleh sebab itu Kerapatan dan Pemerintah Hindia Belanda menunjuk *regent* (wali) sultan sebanyak dua orang. Mereka adalah Tengku Besar Sayyid Sagoff bin Tengku Sulung Muda Sayyid Alwi, cucu dari Syarif Kasim I, dan Datuk Sri Bijuangsa, Datuk Lima Puluh saat itu. Mereka dilantik pada bulan Juni 1908.<sup>72</sup>

Perkembangan kota Siak Sri Indrapura tidaklah sepesat kota pesisir timur Sumatera lainnya seperti Medan. Sampai tahun 1920-an pun, belum ada jalur darat untuk mencapai Siak, sekalipun Pekanbaru telah berkembang, Tetapi ada indikasi bahwa pemerintah memang menghalang perkembangan Siak itu sendiri. Salah seorang kontrolir pernah membeli peralatan komunikasi dengan dana daerahnya untuk memudahkan setidaknya komunikasi pekerjaannya. Sebelum sempat

<sup>70</sup> "Death of Sultan of Siak", *The Strait Times*, 2 April 1908; "Siak", *De Nieuwe Courant*, 1 Agustus 1908.

<sup>71</sup> *The Straits Times*, 4 April 1908.

<sup>72</sup> "New Sultan of Siak: Youthful Crown Prince Proclaimed Ruler", *The Straits Budget*, 9 Juli 1908

dipasang, kontrolir tersebut dipindahtugaskan.<sup>73</sup> Dengan kondisi demikian, Syarif Kasim II memulai pemerintahannya pada tahun 1915.

### 3.3.1. Syarif Kasim II di bawah Belanda dan Jepang

Pada hari rabu, 3 Maret 1915, Syarif Kasim II dinobatkan sebagai sultan Siak oleh Belanda. Penobatan ini dilaksanakan di “rumah kontrolir” pukul 9 pagi. Semua pejabat dan tamu undangan tiba di lokasi sebelum sang sultan datang kemudian dan bersama-sama menunggu tuan Residen. Setelah Residen tiba di tempat, seluruh hadirin berkumpul melingkar. Residen membacakan surat keputusan pengangkatan sultan beserta kontrak politik, kemudian surat-surat itu ditandatangani oleh sultan. Residen kemudian memahkotai Syarif Kasim II, dilanjutkan kata sambutan oleh residen. Setelah itu, sang sultan diberi ucapan selamat dan jabat tangan oleh residen, asisten residen, kontrolir, serta hadirin lainnya. Hal itu mengakhiri upacara penobatan Syarif Kasim II. Setelah itu, residen meninggalkan tempat, manakala sultan beserta rombongan menuju istana untuk menerima sembah rakyat dan ucapan selamat.<sup>74</sup>

Syarif Kasim II terlihat citranya sebagai seorang yang mendukung pendidikan dan seni dengan gaya hidup yang lebih sederhana dibandingkan

<sup>73</sup> *Deli Courant*, 10 Juni 1920.

<sup>74</sup> “De Troonsopvolging in Siak”, *Deli Courant*, 30 Maret 1915. Gedung kontrolir yang dimaksud bukanlah gedung yang dikenal sekarang sebagai cagar budaya di Kelurahan Benteng Hilir, karena bangunan tersebut baru dibangun pada tahun 1937. Menurut penulis, besar kemungkinan gedung kontrolir tersebut terletak di Kampung Dalam atau sekitarnya, dekat dengan Istana Siak atau Balai Kerapatan Tinggi, meskipun wujudnya tidak ada lagi. Besar kemungkinan gedung yang sama digunakan untuk pelantikan Syarif Hasyim, sebagaimana dalam gambar 3. Opsi lain yang penulis berikan adalah bahwa penulis berita ini menganggap Balai Kerapatan Tinggi sebagai “gedung kontrolir”. Namun sejauh pengamatan penulis, dua gedung tersebut mempunyai perbedaan, baik ukuran maupun proporsinya, meskipun sekilas mirip.

ayahnya. Begitu menjadi sultan, Syarif Kasim II mendirikan sekolah yang terbuka bagi masyarakat Siak, HIS Siak, pada tanggal 15 September 1915. Selang dua tahun kemudian, ia juga mendirikan sekolah berbasis lokal Melayu, Madrasah Taufiqiyah Hasyimiyah. Istrinya, Tengku Agung Syarifah Lathifah, mendirikan sekolahnya sendiri, Latifah School, pada tahun 1926, begitu juga Tengku Mahratu, istri kedua sultan setelah Syarifah Lathifah meninggal, mendirikan Madrasah an-Nisa' pada tahun 1929. Murid-murid Siak yang belajar di sana sering diberikan beasiswa untuk menuntut ilmu di luar.<sup>75</sup> Inilah salah satu ranah kekuasaan sultan yang masih dapat dikembangkan dibandingkan ranah-ranah lainnya yang dikuasai dan dikekang oleh Belanda. Syarif Kasim sangat memedulikan pendidikan murid-murid sekolah yang dinaunginya, sehingga apabila mereka bolos untuk memanen karet, orang tuanya akan dinasehati oleh sultan.<sup>76</sup>

Di samping itu, Syarif Kasim merupakan orang yang luwes, sama seperti ayahnya. Dalam sebuah wawancara, Syarif Kasim sadar akan pergerakan nasionalisme Indonesia serta memasukkan semangat itu, bersama dengan agama, ke dalam pendidikannya. Sekolah kesultanan juga ditujukan untuk pendidikan kaum ibu. Seandainya ada tuntutan perubahan dalam sistem *zelfbestuur* dan pengadilan kerajaan, ia bersedia untuk mengikutinya.<sup>77</sup>

Tradisi kerajaan pada masa Syarif Kasim II dipertahankan melalui berbagai upacara yang telah ditetapkan oleh ayahnya, Syarif Hasyim. Namun, mengingat

<sup>75</sup> Muchtar Lutfi, *Sejarah Riau* (Pekanbaru: Universitas Riau, 1977), hlm. 349.

<sup>76</sup> "Journalist Mengembara: Siak". *Bintang Hindia*, 4 Mei 1929.

<sup>77</sup> *Ibid.*

kekuatan politik tidaklah sebesar dan sepenting zaman ayahnya tersebut, ia bervariasi tradisi kerajaan dengan adat. Berbagai dokumentasi yang penulis kumpulkan menunjukkan bahwa di samping tradisi kerajaan, ia juga sering menyelenggarakan tradisi-tradisi bertepatan adat, ditandai oleh pakaian Melayu yang mereka kenakan. Peralihan ini menunjukkan, di samping bahwa sultan berkuasa di bidang adat, Syarif Kasim juga cukup peduli dengan adat. Selain itu, ia sering mengunjungi berbagai daerahnya dan bertemu dengan rakyat jelata.

**Gambar 10**  
**Salah Satu Aktivitas Syarif Kasim II**



Keterangan : Syarif Kasim II dalam sebuah upacara adat di Istana Siak, terlihat semua peserta mengenakan pakaian Melayu (kiri), serta kunjungannya ke sebuah daerah wilayahnya (kanan)

Sumber : koleksi Istana Siak, diperoleh tanggal 24 September 2024

Satu dari sekian kekuasaan sultan Siak yang masih dapat dipertahankan dan dapat membawa keuntungan besar adalah penganugerahan izin kilang minyak di wilayahnya. Meskipun keberadaan minyak bumi di Siak telah diketahui pada akhir abad ke-19, baru dieksplorasi pada awal abad ke-20. Pada tanggal 18 Juli 1901, sebuah zat minyak bumi ditemukan di Siak.<sup>78</sup> Eksplorasi dan studi semakin gencar

<sup>78</sup> "Petroleum in Siak", *Het Vaterland*, 28 Agustus 1901

dilakukan di wilayah Siak dengan melibatkan berbagai ilmuwan; sebagai rasa terima kasih dan duka cita, dua di antaranya, Baron von der Brüggén and Oscar John, meletakkan karangan bunga dari perak di pusara Syarif Hasyim pada bulan September 1908.<sup>79</sup> Kilang minyak pertama dibuka di Bangkinang, dan pembukaannya dihadiri oleh segenap pejabat Oostkust van Sumatra, termasuk Sultan Syarif Kasim II dan istri.<sup>80</sup> Sejak saat itu, Syarif Hasyim II sering memberikan surat izin tambang minyak ke berbagai perusahaan di Siak. Namun, pada tahun 1938, pemerintah kolonial menghilangkan hak ini, sehingga hanya Hindia Belanda yang dapat memberi izin kilang minyak. Pada tahun 1940, Afdeeling Bengkalis, termasuk wilayah Siak, dimasukkan kembali ke dalam Keresidenan Riouw.<sup>81</sup>

Saksi hidup yang menyaksikan kehidupan Syarif Kasim II berpendapat bahwa ia bukanlah orang yang terlalu mendukung Belanda. Hal ini terlihat dilihat ketika Belanda sangat rapat hubungannya dengan para sultan di Deli dan sekitarnya, selaras dengan kemajuan wilayah itu, manakala Siak hanyalah sebuah daerah pelosok yang bahkan tidak sepesat Pekanbaru; bahkan Siak digambarkan sebagai “kota mati”.<sup>82</sup> Terkadang, ada perselisihan antara Belanda dan Syarif Kasim II. O.K. Muhammad Jamil, seorang sekretaris pribadi sultan, menyaksikan persengketaan pengganti Wak Entol, *districthoofd* Pekanbaru yang ditarik ke Siak, sang sultan

<sup>79</sup> The Strait Times, 2 September 1908; “Een piëteitsdaad”, *De Preanger-bode*, 7 September 1908.

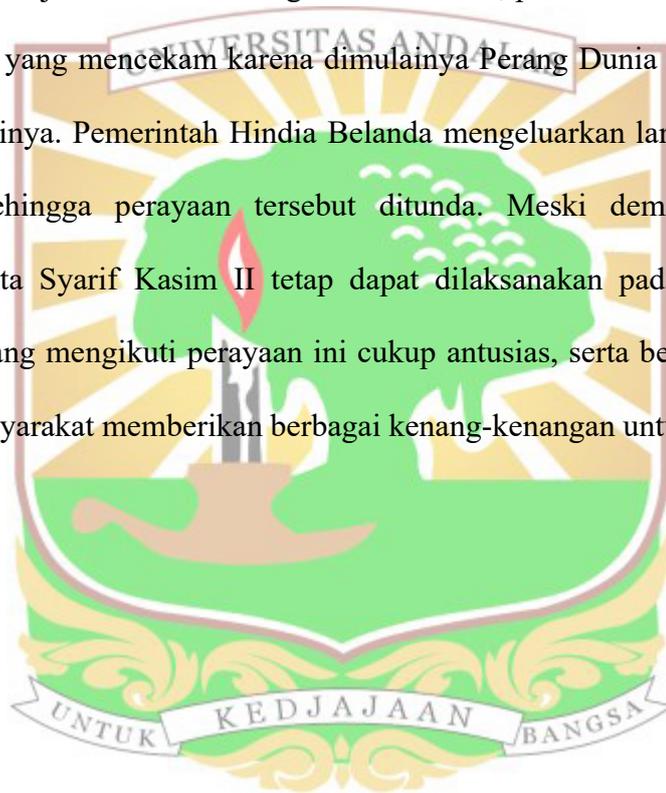
<sup>80</sup> “De Mijnbouw Mij. Stannum”, *Sumatra-bode*, 27 Juli 1926.

<sup>81</sup> Richard H. Hopper, *op. cit.*, hlm. 100.

<sup>82</sup> *Deli Courant*, 30 Juli 1926.

menghendaki Wan Abdurrahman sebagai pengganti sementara Belanda menginginkan yang lain Setelah masalah ini dibawa ke Gubernur Sumatra, Wan Abdurrahman tetap ditunjuk sebagai penggantinya.<sup>83</sup>

Upacara peringatan 25 tahun kenaikan Syarif Kasim sebagai sultan Siak telah disiapkan sejak 1939 oleh orang istana. Namun, pada bulan September 1939 kondisi Eropa yang mencekam karena dimulainya Perang Dunia II memengaruhi wilayah koloninya. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan larangan membuat keramaian, sehingga perayaan tersebut ditunda. Meski demikian, perayaan kenaikan takhta Syarif Kasim II tetap dapat dilaksanakan pada tahun 1940.<sup>84</sup> Masyarakat yang mengikuti perayaan ini cukup antusias, serta berbagai kalangan dan tokoh masyarakat memberikan berbagai kenang-kenangan untuk sang sultan.<sup>85</sup>




---

<sup>83</sup> O.K. Nizami Jamil, *Siak Negeri Pengabdianku: Biografi Orang Kaya Muhamad Djamil, Sekretaris Pribadi Sultan Syarif Kasim II* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2016), hlm. 33-34.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 34-35

<sup>85</sup> Beberapa benda kenangan tersebut masih dipajang di Istana Siak hingga sekarang.

**Gambar 11**  
**Perayaan Kenaikan Takhta Syarif Hasyim Tahun 1940**



Keterangan : Salah satu bentuk perayaan kenaikan takhta Syarif Kasim II pada tahun 1940.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, diperoleh tanggal 18 Oktober 2024

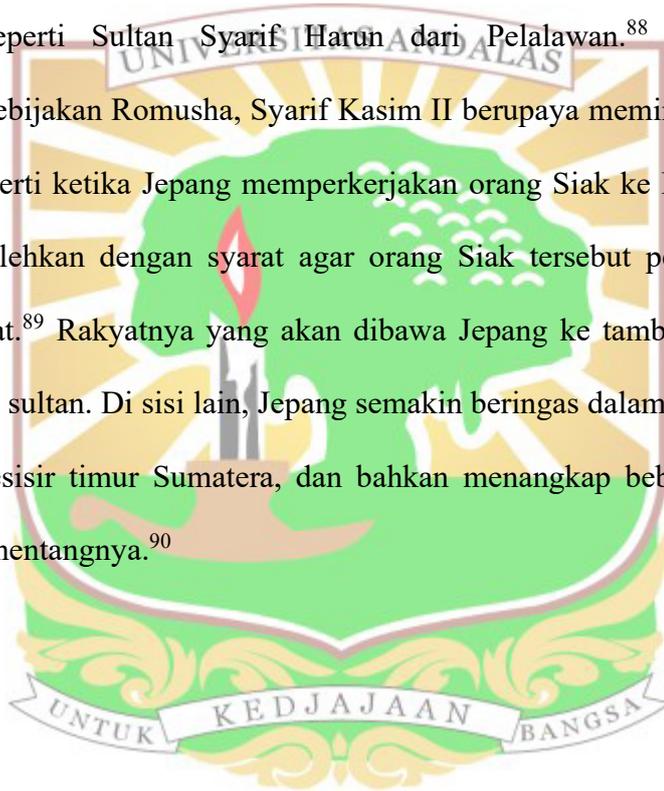
Momen pendudukan Jepang menunjukkan kharisma Syarif Kasim II. Pada bulan April 1942, saat sang sultan berada di Masjid Syahabuddin untuk memperingati Maulid Nabi, kapal berbendera Jepang mulai memasuki Siak. OK Muhammad Jamil sebagai sekretaris pribadi sultan langsung melapor ke Syarif Kasim II, yang ditanggapi dengan tenang dan memesan orang Jepang untuk menunggu di istana sampai peringatan Maulud selesai.<sup>86</sup> Sepertinya Syarif Kasim telah mengetahui bagaimana berhadapan dengan Jepang, dengan pengalamannya berinteraksi dengan mereka yang berinvestasi karet wilayahnya. Sang sultan bertemu panglima Jepang, sementara pejabat Belanda berbaris di depan istana.

---

<sup>86</sup> O.K. Nizami Jamil, *op. cit.*, hlm. 37-38.

Jepang sepakat bahwa Kesultanan Siak menjalankan pemerintahan seperti biasanya, sementara Jepang mengambil alih pemerintahan Belanda.<sup>87</sup>

Syarif Kasim II mengambil langkah kooperatif dengan Jepang dan berpartisipasi dalam majelis Sultan Kaigi yang juga melibatkan beberapa penguasa *zelfbestuur* seperti Sultan Syarif Harun dari Pelalawan.<sup>88</sup> Ketika Jepang menerapkan kebijakan Romusha, Syarif Kasim II berupaya meminimalisasi derita rakyatnya, seperti ketika Jepang memperkerjakan orang Siak ke Pekanbaru, sang sultan membolehkan dengan syarat agar orang Siak tersebut pergi dan pulang dengan selamat.<sup>89</sup> Rakyatnya yang akan dibawa Jepang ke tambang Logan juga dapat dihalang sultan. Di sisi lain, Jepang semakin beringas dalam mengeksploitasi masyarakat pesisir timur Sumatera, dan bahkan menangkap beberapa penguasa lokal yang menentangnya.<sup>90</sup>



<sup>87</sup> O.K. Nizami Jamil, *op. cit.*, hlm. 170-171; Abel Tasman, *Wan Ghalib untuk Riau: Seutas Biografi* (Pekanbaru: Yayasan Pustaka, 2001), hlm. 45.

<sup>88</sup> Ahmad Yusuf *et al.*, *Sejarah Perjuangan Rakyat Riau 1942-1958* (Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau, 2004), hlm. 106-107

<sup>89</sup> O.K. Nizami Jamil, *op. cit.*, hlm 39.

<sup>90</sup> Tenas Effendy dan Nahar Effendy, *Lintasan Sejarah Siak Sri Indrapura* (Pekanbaru: Badan Pembina Kesenian Daerah Propinsi Riau, 1973), hlm. 52.

**Gambar 12****Syarif Kasim II Bekerja Sama dengan Jepang**

Keterangan : Syarif Kasim II dan Tengku Mahratu dalam sebuah acara propaganda Jepang

Sumber : Koleksi Istana Peraduan Siak, diperoleh tanggal 20 Februari 2020

**3.3.2. Syarif Kasim II saat Kemerdekaan Indonesia**

Posisi Syarif Kasim II terhadap kemerdekaan Indonesia sering ditulis oleh sejarawan sebagai seorang pro-Republik, mengesampingkan opsi-opsi lain yang mungkin diambil oleh sang sultan. Hal ini disebabkan ia telah berada di sisi Republikan selama Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Hal ini berbeda dengan sultan-sultan lain di pesisir timur Sumatera, yang sebagian besarnya berharap kedatangan Belanda agar monarki mereka dapat bertahan. Ketimpangan ini tidak dapat dijawab kecuali dengan memperhatikan berbagai faktor, sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya. Pertama, kondisi Siak tidaklah semaju kota pesisir timur lainnya seperti Medan dan sekitarnya. Kedua, pada dasarnya sultan tidak terlalu pro-Belanda dan ia juga menyadari berbagai pergerakan yang berkembang di Hindia Belanda, termasuk nasionalisme Indonesia. Alasan lainnya

akan dijelaskan di bawah, dan inilah yang mungkin menentukan sikap Syarif Kasim II antara memihak Belanda atau Indonesia.

Bagi sebagian orang, sikap Syarif Kasim II yang mendukung republik merupakan suatu misteri, tetapi ini dapat dipermudah ketika kita melihat situasi dan kondisi Afdeeling Bengkalis masa itu. Bagi Anthony Reid, wilayahnya yang terisolasi dapat menghalangi sang sultan untuk berharap bahwa Belanda akan memberikan bantuan padanya.<sup>91</sup> Richard Hopper malah memberikan fakta gamblang: menurut beberapa orang Belanda yang ditahan di Bangkinang, Syarif Kasim II sempat berangkat ke kota itu untuk menemui van Breckel, Residen Riouw yang ditahan selama pendudukan Jepang. Van Breckel menolak kunjungan dengan sang sultan.<sup>92</sup> Dengan demikian, Syarif Kasim II kembali ke istananya. Bila kisah ini benar, maka hal ini adalah sebuah kerugian bagi Belanda, karena dukungan dari penguasa wilayah terbesar di Residen Riouw tersebut sirna.

Berita kemerdekaan Indonesia telah menyebar di berbagai wilayah di Riau. Di Siak, berita itu sekadar desas desus dan belum resmi, sehingga Syarif Kasim II mengutus O.K. Muhammad Jamil untuk mencari kabar di Pekanbaru, berangkat dengan kapal uap Kato kepunyaan sultan. Ternyata, bendera Merah Putih telah terpasang di sebagian besar Kota Pekanbaru. Ia memastikan berita kemerdekaan Indonesia melalui ketua KNI Pekanbaru Raden Yusuf, yang menyarankan

---

<sup>91</sup> Anthony Reid, *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1979), hlm. 221.

<sup>92</sup> Richard H. Hopper, *op. cit.*, hlm. 178.

pembentukan KNI Siak. setelah memastikan kabar, Muhammad Jamil kembali lagi ke Siak dan mengabarkan sultan.<sup>93</sup>

Kira-kira tanggal 1 November 1945, Syarif Kasim II mengadakan upacara bendera di depan Istana Siak yang menandakan dukungan Kesultanan Siak terhadap Republik Indonesia. Dalam upacara tersebut, Tengku Mahratu mengikat pita merah putih di lengan sang sultan, diikuti peserta lainnya. Upacara tersebut juga menandai peresmian TKR yang dipimpin oleh Tengku Juned.<sup>94</sup> Pada tanggal 25 November, Syarif Kasim II menyumbangkan harta kerajaannya sebesar ¥ 20.000 kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berjanji akan menyerahkan hartanya lagi apabila diperlukan.<sup>95</sup>

Syarif Kasim II berangkat ke Medan dan tiba pada tanggal 25 Januari 1946 dan disambut langsung oleh Gubernur Sumatera, Tengku Mohammad Hasan. Sang sultan sangat berperan dalam mengajak sultan-sultan lain di pesisir timur Sumatera untuk mendukung Republik. Syarif Kasim II sendiri menawarkan kebijakan mempertahankan kerajaan dengan memodifikasinya sesuai dengan zaman. Pada tanggal 3 Februari, diadakanlah pertemuan sultan-sultan wilayah keresidenan Sumatera Timur, yakni Deli, Asahan, Langkat, Kota Pinang, Bilah, Panai, enam raja Simalungun, serta hampir semua sebayak (pemimpin) etnis Karo, dan tentu saja Sultan Siak. Rapat itu menghasilkan keputusan bahwa hadirin untuk mendukung

<sup>93</sup> O.K. Nizami Jamil, *op. cit.*, hlm. 61-62.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 62-63; Richard H. Hopper, *op. cit.*, hlm. 178. Cukup aneh bahwa saksi-saksi hidup yang menghadiri upacara tidak menyebut tanggal bersejarah tersebut, sehingga rata-rata penulis sejarah Riau menyebut bahwa upacara itu terjadi pada awal bulan Oktober. Meskipun demikian, satu-satunya berita yang mencatat kejadian ini adalah di *Suluh Merdeka*, 7 November 1945.

<sup>95</sup> Akhirnya, perhitungan final dan menjadi narasi resmi adalah 13 juta gulden.

kemerdekaan Indonesia, dengan memperhatikan daerah Istimewa agar dapat diterapkan di wilayah mereka.<sup>96</sup>

Agresi Militer Belanda menyebabkan Syarif Kasim II, beserta Tengku Mohammad Hasan dan pihak republikan keluar dari Medan ke Kutaraja. Sementara itu, Belanda yang telah menguasai Siak mencoba ‘mengambil hati’ rakyat Siak dengan membentuk yang disebut dengan Dewan Kesultanan Siak pada 1 Maret 1949<sup>97</sup> dan Siak Raad pada 1 Agustus 1949.<sup>98</sup> Besar kemungkinan pembentukan lembaga ini adalah untuk membentuk pecahan wilayah Indonesia, sama seperti Negara Sumatera Timur yang telah dibentuk Belanda sebelum menguasai Siak. Sementara itu, beberapa orang republikan memanfaatkan lembaga-lembaga tersebut dengan tetap memegang prinsip mereka.<sup>99</sup> Pembentukan Siak Raad dan Dewan Kesultanan Siak diketahui oleh Syarif Kasim II dari Kutaraja, sehingga ia menyiarkan pidato melalui radio yang menyatakan agar jangan mau diperalat Belanda untuk melangkahi kedaulatannya di Siak; ia juga menegaskan bahwa kedaulatan Siak “diserahkan sementara kepada Republik Indonesia”<sup>100</sup>

<sup>96</sup> Anthony Reid, *op. cit.*, hlm. 221-222

<sup>97</sup> Djawatan Kepolisian Negara Bagian DPKN Jakarta, “Kegiatan ‘Panitya Swapradja Siak’”, Jakarta, 30 Januari 1953, hlm. 1. Menurut penulis sejarah Siak, lembaga ini bernama Sultan Raad, manakala dalam laporan pemerintah lembaga ini disebut Panitia Penyelenggara Dewan Sementara Kerajaan Siak. Dewan Kesultanan dipakai seterusnya dalam tulisan ini.

<sup>98</sup> Ahmad Yusuf *et al.*, *op. cit.*, hlm. 339.

<sup>99</sup> Salah seorang pejabat istana, yang merupakan ayah Wan Ghalib, seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, mengikuti Siak Raad setelah meminta pendapat keluarganya. Abel Tasman, *op. cit.*, hlm. 87.

<sup>100</sup> Ahmad Yusuf *et al.*, *op. cit.*, hlm. 338-339.

Masyarakat Bengkalis segera mengadakan rapat pada pertengahan September 1949 untuk menentukan sikap tentang Siak Raad dan Dewan Kesultanan.<sup>101</sup> Hal ini penting, karena Bengkalis merupakan bekas ibukota keresidenan Riouw dan Oostkust van Sumatra sekaligus, sehingga pengaruhnya dianggap cukup besar bagi Belanda. Rapat tersebut juga dihadiri oleh G.J.A. Veling, kontrolir pembantu Residen Riouw, dan Datuk Ahmad, perwakilan Dewan Kesultanan. Rapat itu hanya menghasilkan pembentukan panitia berjumlah 6 orang, dan pada akhir bulan mereka mengirimkan pernyataan bahwa rakyat Bengkalis tidak dapat memutuskan bergabung dengan Siak Raad apabila perundingan antara Indonesia dan Belanda belum menghasilkan keputusan. Saat Datuk Kasim Aris, anggota Dewan Kesultanan, diminta Belanda berpartisipasi dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Siak Raad mengeluarkan pernyataan tidak mengakui perwakilannya. Akhirnya, sidang pleno Siak Raad pada tanggal 28-31 Oktober 1949 menyatakan bahwa Siak bergabung ke dalam negara bagian Indonesia.<sup>102</sup>

#### 3.4. Gerakan Swapraja Siak

Seperti yang telah dijelaskan di atas, para sultan di pesisir timur Sumatera berharap dengan bergabungnya mereka ke dalam Republik Indonesia, kesultanan dapat bertahan melalui daerah istimewa, sebagaimana yang dinikmati oleh Yogyakarta. Sultan Syarif Kasim bukanlah pengecualian. Dewan Kesultanan, kemudian menjadi, bergerak aktif untuk mewujudkan Swapraja Siak, sebuah daerah

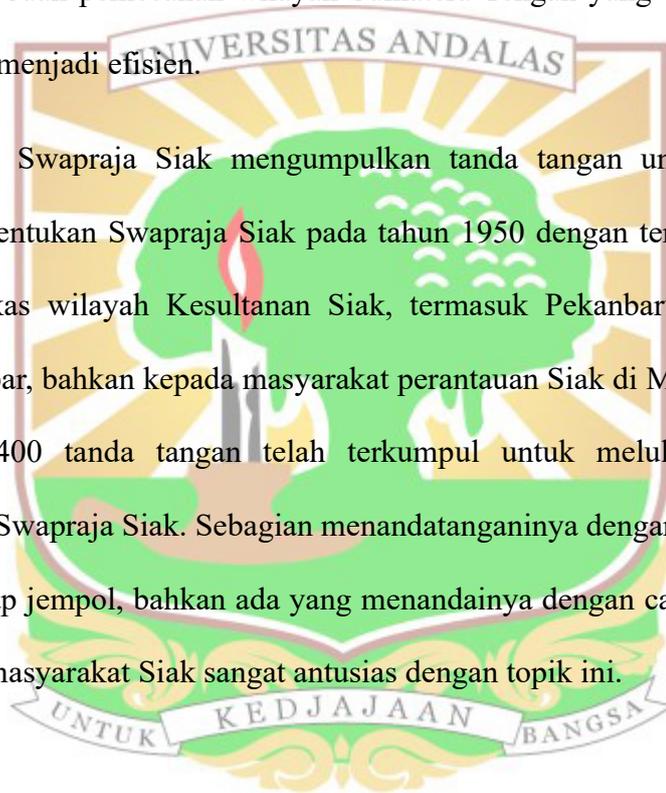
---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 339.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 339-341.

istimewa setingkat kabupaten. Meskipun tuntutan mereka adalah menegakkan kembali Kesultanan Siak dalam bentuk swapraja, “Panitya Swapradja Siak tidak berkeberatan sesuatu apa apabila daerah Swapradja Siak diberi Status Kabupaten sebagai sjarat minimum.”<sup>103</sup> Sehingga, tidak salah bagi para pengusung Swapraja Siak maupun tokoh-tokoh Riau lainnya untuk menyatakan bahwa gerakan Swapraja Siak adalah sebuah pemecahan wilayah Sumatera Tengah yang terlalu luas agar pemerintahan menjadi efisien.

Panitia Swapraja Siak mengumpulkan tanda tangan untuk menyetujui resolusi pembentukan Swapraja Siak pada tahun 1950 dengan terjun ke berbagai daerah di bekas wilayah Kesultanan Siak, termasuk Pekanbaru dan beberapa wilayah Kampar, bahkan kepada masyarakat perantauan Siak di Medan. Sebanyak lebih dari 2.400 tanda tangan telah terkumpul untuk meluluskan proposal pembentukan Swapraja Siak. Sebagian menandatangani dengan pena, sebagian lagi dengan cap jempol, bahkan ada yang menandainya dengan cap darah. Hal ini menandakan masyarakat Siak sangat antusias dengan topik ini.



<sup>103</sup> Djawatan Kepolisian Negara, *Perihal Panitya Swapradja Siak*, Nomor A.13/3/18-53, 30 Januari 1953. (Jakarta: Djawatan Kepolisian Negara bagian DPKN), hlm. 2

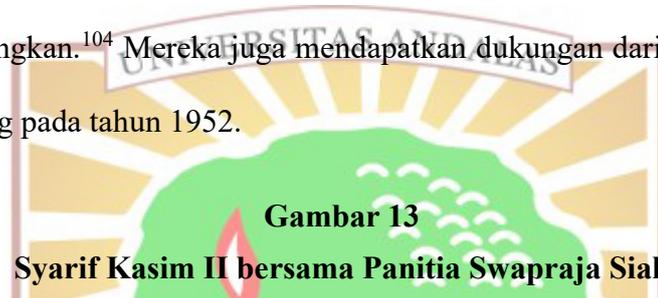
**Tabel 1. Jumlah penandatanganan resolusi pembentukan Swapraja Siak**

No	Kampung	Kecamatan	Jumlah tanda tangan
1.	Baran Melintang	Bengkalis	69
3.	Kp. Terubuk	Bengkalis	78
4.	Penasa	Bengkalis	60
6.	Buruk Bakul	Bukit Batu	30
7.	Mandau	Mandau	30
8.	Melibur	Mandau	31
9.	Pekalar	Mandau	17
10.	Mengkopot	Merbau	140
11.	Pelantai (Teluk Ketapang)	Merbau	110
12.	Renak Dungun	Merbau	90
13.	Teluk Belitung	Merbau	170
14.	Kp. Bukit	Pekanbaru	104
15.	Kp. Dalam	Pekanbaru	34
16.	Kp. Dalam	Pekanbaru	52
17.	Benteng Hilir	Siak	70
18.	Beringin	Siak	16
19.	Buatan	Siak	51
20.	Kp. Dalam (organisasi Sekuntum)	Siak	70
21.	Kp. Dalam 1-2	Siak	137
22.	Kp. Tualang	Siak	24
23.	Mempura	Siak	40
24.	Meredan	Siak	20
25.	Merempan	Siak	128
26.	Pangkalan Pisang	Siak	6
27.	Pematang Tumang	Siak	71
28.	Pinang Sebatang	Siak	7
29.	Pusaka	Siak	39
30.	Selat Panjang	Siak	69
31.	Semukut	Siak	90
32.	Suak Lanjut	Siak	46
33.	Sungai Apit	Siak	100
34.	Teluk Rimba	Siak	26
35.	Perantau Siak di Medan		48
36.	Tidak teridentifikasi		353
<b>Total</b>			<b>2.426</b>

Sumber : diolah dari Departemen Kepolisian Negara, *Perihal Gerakan Swapradja Siak*. Nomor B.2923/31/18-53, 5 Desember 1953 (Jakarta: Kepolisian Negara)

Setelah diangkat sebagai penasihat presiden di Jakarta, Syarif Kasim II meminta perwakilan Panitia Penyelenggara Dewan Sementara Kerajaan Siak, sebanyak dua orang untuk menemuinya. Untuk memenuhi panggilan ini, anggota

panitia bersepakat untuk mengutus Datuk Adham dan Wan Sulung. Setelah berkonsultasi dengan Datuk Achmad sebagai walikota Pekanbaru dan Wan Abdul Rachman sebagai bupati Kampar, mereka berangkat pada 19 Juli 1951 ke Jakarta. Sang sultan berpesan kepada panitia agar giat berkampanye dan mengusung anggota-anggota dewan yang mau mendukung Swapraja Siak agar mereka dapat duduk di kursi parlemen daerah, bahkan parlemen pusat, sehingga aspirasi swapraja dapat diperjuangkan.<sup>104</sup> Mereka juga mendapatkan dukungan dari buruh Caltex di Sungai Pakning pada tahun 1952.



**Gambar 13**

**Syarif Kasim II bersama Panitia Swapraja Siak**



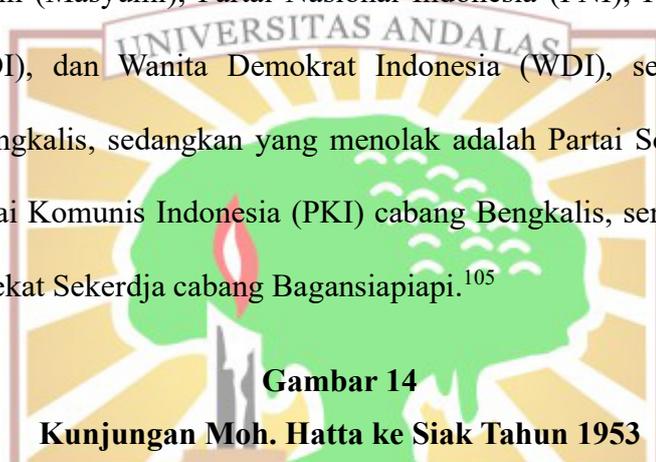
Keterangan : Sultan Siak sedang berdiskusi dengan anggota Swapraja Siak di Jakarta

Sumber : Abel Tasman, *Wan Ghalib untuk Riau: Seutas Biografi* (Pekanbaru: Yayasan Pustaka, 2001), hlm. 91.

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2

Isu Swapraja Siak yang hangat tersebut menyebabkan wakil presiden Mohammad Hatta mengunjungi Siak pada tanggal 10 April 1953 sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat Siak di depan Istana Siak. Sementara itu, berbagai organisasi masyarakat dan partai politik di Siak juga mengemukakan pendapat mereka. Organisasi yang menyetujui Swapraja Siak adalah Partai Majelis Syuro Muslimin (Masyumi), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Wanita Demokrat Indonesia (WDI), semuanya cabang Kabupaten Bengkalis, sedangkan yang menolak adalah Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) cabang Bengkalis, serta Masyumi dan Gabungan Sarekat Sekerdja cabang Bagansiapiapi.<sup>105</sup>



**Gambar 14**  
**Kunjungan Moh. Hatta ke Siak Tahun 1953**



**Keterangan** : Wakil Presiden Mohammad Hatta mengunjungi Istana Siak (kiri) dan unjuk rasa mendukung pembentukan Swapraja Siak di depan istana (kanan)

**Sumber** : Arsip Negara Republik Indonesia

<sup>105</sup> Departemen Kepolisian Negara. *Perihal Gerakan Swapradja Siak*. Nomor B.2923/31/18-53, 5 Desember 1953. Jakarta: Kepolisian Negara. Di dalamnya terlampir resolusi masing-masing partai dan organisasi, baik pro maupun kontra.

Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia telah membuat laporan mengenai aktivitas Swapraja Siak ini. Laporan ini mewakili pandangan pemerintah pusat. Dari segi kekuatan pengurus, beberapa di antaranya mempunyai kedudukan dalam pemerintahan tingkat kabupaten/kota, termasuk walikota Pekanbaru, Datuk Achmad, dan Djawatan Penerangan (Dinas Informasi) Bengkalis, Nahar Effendy. Syarif Kasim II juga menyarankan untuk berusaha memenangkan pemilu 1955, dengan menyokong anggota parlemen daerah, bahkan kalau bisa di tingkat pusat, yang mendukung pembentukan Swapraja Siak. Pemerintah curiga bahwa perusahaan-perusahaan asing seperti Caltex turut membantu kampanye-kampanye politik, mempengaruhi buruh, memberi sokongan finansial dan lain sebagainya. Pandangan sinis dan tidak mendukung ini sangat kentara, termasuk panggilan tim panitia Swapraja Siak sebagai “gembong” serta mengungkit-ungkit Siak Raad sebagai bentukan Belanda.<sup>106</sup>

Sikap pemerintah kepada gerakan Swapraja Siak juga mewakili sikap terhadap swapraja secara umum. Sebenarnya, pada tahun 1953 daerah-daerah swapraja telah banyak dibentuk di Kalimantan dan beberapa tempat di Indonesia.<sup>107</sup> Namun, situasi Kalimantan berbeda dengan Sumatera. Sementara Sumatera saat Revolusi Kemerdekaan dan Republik Indonesia Serikat adalah bagian dari Indonesia, Kalimantan merupakan daerah yang terpisah sebagai negara bagian RIS. Bagi pemerintah, sistem swapraja yang merupakan turunan dari zelfbestuur

<sup>106</sup> Djawatan Kepolisian Negara, *Perihal Panitia Swapradja Siak*, *op. cit.*, hlm. 1-4.

<sup>107</sup> Berdasarkan UU Darurat no. 3 tahun 1953, pemerintah pusat membentuk 15 swapraja dan 3 neo-swapraja sepanjang Kalimantan.

merupakan transisi agar wilayah itu bisa mengintegrasikan diri ke dalam sifat republik dan demokrasi.<sup>108</sup> Sebab, hampir semua kekuasaan politik kepala Swapraja diserahkan kepada rakyat, manakala “urusan adat” masih dipegangnya.<sup>109</sup> Karena hampir semua wilayah Sumatera, termasuk Siak, merupakan bagian Republik Indonesia, maka penerapan Swapraja Siak seharusnya tidak diperlukan. Selain itu, penghidupan kembali sifat feodalisme menjadi senjata bagi pihak yang menentang swapraja, baik secara umum maupun Swapraja Siak.<sup>110</sup>

Meskipun aktivitasnya sangat gencar dan tidak terlihat gerakan tandingan anti-swapraja, gerakan Swapraja Siak menghilang begitu saja. Kita bisa melihat bahwa pemerintah pusat mengacuhkan begitu saja tuntutan masyarakat Siak, bahkan terhadap tuntutan minimalnya yakni pembentukan Kabupaten Siak. Pemerintah daerah Sumatera Tengah sadar akan gerakan Swapraja Siak, tetapi membiarkan begitu saja dan menganggapnya sebagai kehendak segolongan kecil,

<sup>108</sup> Setelah mengalami pemerintahan swapraja dalam demokrasi Indonesia, Sukarno menghapus semua swapraja melalui Undang-undang no. 18 tahun 1965, dan menyatakan bahwa “sifat istimewa bagi Daerah-daerah lain tidak akan diadakan lagi pada saatnya diharapkan bahwa status atau sifat istimewa bagi Yogyakarta dan Aceh akan hapus” (penjelasan ayat 1 dan 2).

<sup>109</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, penjelasan umum 16.

<sup>110</sup> Contoh yang dapat dibandingkan adalah dalam buku *Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai* yang dirilis oleh pemerintah. Sebuah kongres pada tanggal 27-29 Oktober 1950 bernama “Kongres Rakyat Kalimantan Timur” diselenggarakan oleh tujuh perwakilan organisasi, dengan hasil setuju dengan penghapusan Swapraja Kalimantan Timur, sementara 11 organisasi tidak mendukung kongres tersebut (hlm. 114). Namun, narasi dukungan anti-swapraja dipaksakan, sehingga Sebagian besar rakyat terlihat mendukung anti-swapraja. *Tiga Tungku Sejarah: Sejarah Kesultanan Indragiri sampai Peristiwa 5 Januari 1949* menggambarkan para penguasa *zelfbestuur*, terutama Sultan Mahmud dari Indragiri yang menjadi objek pembicaraannya, sebagai penguasa feodal. Dalam salah satu resolusi yang menentang Swapraja Siak, para pendukungnya disebut “manusia feodal”.

sehingga dengan sendirinya cita-cita itu tidak terwujud.<sup>111</sup> Keberadaan Syarif Kasim II sebagai penasehat presiden juga tidak kuat dalam melobi gerakan ini.

Faktor lain yang dapat dipertimbangkan adalah kurangnya anggota parlemen daerah apalagi pusat yang mendukung Swapraja Siak. dalam 29 anggota DPR Sumatera Tengah, hanya 5 orang yang berasal dari Riau, dan 4 orang dari Jambi.<sup>112</sup> Faktanya, mereka mendukung aspirasi masyarakat yang lebih luas: Provinsi Riau. Dukungan lintas daerah Riau dan Jambi ini disebabkan telah terjadi kesenjangan pembangunan antara wilayah pusat (Minangkabau) dengan wilayah lainnya (Jambi dan Riau).<sup>113</sup> Setelah beberapa kongres sporadis selama tahun 1954-1955, Kongres Rakyat Riau diadakan pada tanggal 31 Januari sampai 2 Februari 1956 di Pekanbaru.<sup>114</sup> Syarif Kasim II sendiri mendukung pembentukan Provinsi Riau<sup>115</sup> dan hadir pada perayaannya, Malam Riau, di Jakarta.<sup>116</sup>

### 3.5. Akhir Cerita Syarif Kasim II

Syarif Kasim II menghabiskan banyak waktunya di Menteng, Jakarta, sebagai salah seorang penasehat presiden Sukarno. Kemungkinan besar, jabatan itu

<sup>111</sup> Kementerian Penerangan, *Propinsi Sumatera Tengah* (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 309.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 297-298.

<sup>113</sup> Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 228

<sup>114</sup> Ahmad Yusuf, *op. cit.*, hlm. 386-395. Selengkapnya lihat *Pendjelasan atas usul untuk membentuk wilajah Kabupaten2 Kampar; Bengkalis, Indragiri dan Kepulauan Riau mendjadi daerah Swantantra (Otonomi) tingkat pertama.*

<sup>115</sup> Gusti Asnan, *loc. cit.*

<sup>116</sup> Abel Tasman, *op. cit.*, hlm. 175-176.

dipegangnya hingga tahun 1954.<sup>117</sup> Sese kali ia mengunjungi Singapura untuk bertemu saudaranya, Tengku Long Putih. Terakhir ia mengunjunginya ialah pada tahun 1963, lalu pulang ke Siak melalui Pulau Belakang Padang, Riau, karena Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Kedatangannya disambut camat Dumai, Tengku Sulaiman, yang mengantarnya ke dalam Istana Siak. Syarif Kasim II kemudian menempati Istana Peraduan, sebuah bangunan di sebelah Istana Siak, dan diberikan uang pension sebesar Rp 3.000,-. Masa ini seolah-olah merupakan penutup Kesultanan Siak Sri Indrapura. Seorang sultan yang tidak memerintah lagi, tinggal di sebuah rumah di sebelah istana yang pernah ditinggalinya, Sementara beberapa isinya mulai hilang. Puncaknya pada bulan Agustus 1967, singgasana kerajaan raup dicuri dari istana. Kursi berbahan tembaga tersebut ditemukan polisi di sebuah pasar gelap di Kepulauan Riau dalam keadaan sudah terbelah di dalam karung goni. Singgasana tersebut dijual seharga Rp 35,- per kilogram. Padahal, nilainya diperkirakan mencapai Rp 50 juta.<sup>118</sup>

Sejak 1967 Syarif Kasim II mulai sakit-sakitan, sehingga ia berobat ke Rumbai, Pekanbaru, karena terdapat rumah sakit yang lebih lengkap fasilitas kesehatannya daripada Siak, yakni RS Caltex. Pemerintah juga menambah tunjangan pension menjadi Rp 15.000,-. Pada akhirnya, Syarif Kasim II meninggal di Rumbai, Pekanbaru, pada tanggal 23 April 1968. Jenazahnya diantar ke Gedung Daerah Provinsi Riau untuk disemayamkan, dengan balutan bendera merah putih

<sup>117</sup> Dokumen penetapan gaji Syarif Kasim II terhenti sampai tahun 1954.

<sup>118</sup> “In a sack for sale, a Sultan’s throne”, *The Straits Times*, 26 September 1967; “Takhta Sultan Siak di Pasar”, *Berita Harian*, 26 September 1967.

menutupi jasadnya. Dari sana, jenazah diantar, dalam peti yang diselubungi kain kuning kemudian bendera merah putih di atasnya, melalui upacara pelepasan secara kenegaraan. Pelepasan dipimpin oleh gubernur Riau Arifin Ahmad. Jenazah Syarif Kasim II diantar ke pelabuhan untuk diberangkatkan ke Siak.<sup>119</sup> Sebagian adat pemakaman raja Melayu keluar: jasad Syarif Kasim II diiringi payung kuning delapan buah, dan semua yang mengenakan kopiah membalutkan pita putih di kopiahnya sebagai tanda berkabung.

Sesampainya di dermaga Siak, ratusan orang menyaksikan perarakan jenazah sang sultan dari dermaga ke Istana Siak. Dalam perarakan itu, peti dinaikkan ke atas tandu serba kuning (dalam adat Melayu disebut Raja Diraja) dengan empat orang duduk di sisi tandu tersebut, sementara dua belas pembawa payung kuning menaungi sisi kiri dan kanan tandu itu. Di depan tandu adalah beberapa orang militer yang membawa karangan bunga, panji-panji tentara Siak yang dibawa seorang anak kecil, beberapa perempuan yang menabur beras, serta payung kebesaran sultan dan sebuah keris. Alat-alat kebesaran tersebut tidak pernah dikeluarkan lagi setelah Siak bergabung ke dalam Republik Indonesia.

---

<sup>119</sup> O.K. Nizami Jamil, *et al.*, *Sejarah Kerajaan Siak* (Pekanbaru: Sukabina, 2011), hlm. 192-193.

**Gambar 15**  
**Pemakaman Syarif Kasim II**



Keterangan : Suasana pemakaman Syarif Kasim II. Jenazah ditandu dengan Raja Diraja dan diselenggarakan dengan adat Melayu, sekaligus diberikan penghormatan militer

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak.

Sesampainya di Istana Siak, jenazah disemayamkan di aula tengah, menjadi kali terakhir sang sultan berada di istana tersebut. Upacara pelepasan jenazah Syarif Kasim II diselenggarakan, dengan kehadiran Tengku Long Putih. Secara simbolis, Tengku Long Putih menyerahkan kunci istana kepada pemerintah melalui camat Siak.<sup>120</sup> Dengan demikian, Tengku Long Putih menyerahkan segala hal yang berkaitan dengan Kesultanan Siak Sri Indrapura kepada Indonesia. Setelah upacara pelepasan, peti jenazah sultan dibawa lagi dengan perarakan sebagaimana sebelumnya, menuju tempat peristirahatan terakhir, di depan Masjid Syahabuddin. Syarif Kasim II dikuburkan di sebelah istri pertamanya, Tengku Agung Syarifah

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 193-194.

Latifah. Upacara pemakaman ditutup dengan tahlil. Tahun itu menjadi kala terakhir disaksikannya prosesi Kesultanan Siak Sri Indrapura.



## BAB IV

### IDENTITAS KESULTANAN SIAK PASCA SYARIF KASIM II (1968-2023)

Meninggalnya Syarif Kasim II mengakhiri sejarah Kesultanan Siak dan kemungkinannya untuk direstorasi secara mulus. Meskipun Tengku Long Putih merupakan adik Syarif Kasim II—dengan demikian calon sultan yang potensial—pernikahannya dengan orang Eropa yang beragama Kristen menyebabkan ia tidak dipandang lagi sebagai calon penerus sultan, sedangkan ia juga telah menyerahkan kepemilikan harta benda sultan kepada pemerintah. Dengan warisan sejarah yang ada, identitas Kesultanan Siak dieksplorasi dan dimanfaatkan dalam membentuk identitas yang terwujud dalam pendirian Kabupaten Siak 1999 dan seterusnya. Sementara itu, pamor Siak sebagai wilayah tenggelam dalam Kabupaten Bengkalis, demikian juga dengan kotanya. Hal ini tidak menutup peluang bagi masyarakat Siak untuk

#### 4.1. Menggali dan Menjaga Identitas Siak (1968-1999)

Pada masa Orde Baru yang kondusif, masing-masing daerah di Indonesia mulai menyusun sejarah daerahnya, demikian pula dengan Riau. Pembentukan identitas Kesultanan Siak pada periode ini dapat dilihat dari upaya penyusunan Sejarah Kesultanan Siak sebagai bagian dari Provinsi Riau, eksplorasi peristiwa dan tokoh yang dapat diambil nilai kepahlawanannya sebagai bagian dari perjuangan bangsa Indonesia, serta identifikasi adat istiadat yang ada di bekas wilayah Kesultanan Siak.

Pada Seminar Sejarah Nasional II di Yogyakarta, 26–29 Agustus 1970, tim penulis sejarah dari Riau beberapa materi untuk diseminarkan, termasuk mengenai Kesultanan Siak. Makalah yang diseminarkan mengenai Siak adalah “Peranan Keradjaan ‘Siak’ dalam Sedjarah Indonesia”, disusun oleh tim Universitas Riau. Tulisan tersebut kebanyakan merupakan hasil wawancara dengan saksi sejarah yang masih hidup, beberapa literatur, serta hasil analisis tim penulis. Misalnya, lembaga-lembaga Kesultanan Siak sepadan dengan institusi politik seperti negara modern: Sultan sebagai pemegang kuasa eksekutif, Dewan Kerajaan sebagai legislatif, dan Kerapatan Tinggi sebagai yudikatif.<sup>1</sup> Upaya ini dapat dilihat sebagai cara sejarawan Riau meningkatkan pamor Kesultanan Siak. Makalah ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah buku *Sejarah Riau*.

Hal yang menarik dalam *Sejarah Riau* mengenai Siak adalah penamaan daerah tersebut. Beberapa pendapat dikemukakan dalam menjelaskan etimologi Siak yaitu:<sup>2</sup>

1. Kata “SIAK” adalah berasal dari bahasa daerah Tapanuli Selatan yang berarti “PEDAS”.
2. Kata “SIAK” adalah berasal dari nama tumbuhan yaitu pohon Siak-Siak. Adapun pohon tersebut terdapat dalam daerah Siak
3. Kata “SIAK” adalah berasal dari nama “SUAK”.

---

<sup>1</sup> Suwardi Moh. Samin, Nur Muhammad, dan Said Mahmud Umar, “Peranan Keradjaan Siak dalam Sedjarah Indonesia”, Makalah Seminar Nasional Sejarah II di Yogyakarta, 26-29 Agustus 1970, hlm. 11.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 3.

4. Kata “SIAK” adalah suatu nama panggilan yang diberikan kepada orang yang menjaga Mesjid.

Untuk hipotesis pertama, kata “Siak” dihubungkan dengan “sifat penduduknya yang pantang tersinggung dan pedas” lalu dihubungkan padanannya dengan bahasa lain, “lasiak” dari bahasa “Tapanuli Selatan” menjadi penjelasannya.<sup>3</sup> Lasiak menurut pengusungnya artinya “pedas”, walau arti sebenarnya dalam bahasa Batak Toba dan Angkola adalah cabai. Argumen ini kemudian dikembangkan lebih lanjut: tepian sungai Siak dahulunya banyak tumbuh pohon lada, dan ketika orang Batak melakukan ekspedisi ke sana maka mereka menamai pohon-pohon itu “lasiak”.<sup>4</sup>

“Siak” sebagai panggilan kepada orang alim telah umum dalam masyarakat Melayu dan Minangkabau,<sup>5</sup> tetapi asal mula nama Siak dalam konteks ini masih belum jelas. Penulis *Peranan Keradjaan Siak* dan turunannya cenderung memilih pendapat bahwa nama Siak berasal dari “siak” sebagai orang alim. Argumen ini kemudian berkembang lagi dalam tulisan Amir Luthfi yang secara ekstensif membedah hukum dan kekuasaan Kesultanan Siak. Ia menggabungkan sejarah Gasib dengan kisah raja Siak di *Sulalatus Salatin*. Baginya, Megat Kudu raja Gasib

<sup>3</sup> Ibid, 4 dan 6.

<sup>4</sup> Sejarah Riau (1970), 13.

<sup>5</sup> Kata “siak” masuk ke dalam kata baku di Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus Dewan Bahasa (Malaysia).

masuk Islam dengan nama Sultan Ibrahim, dan dengan mengambil pola Islamisasi dari Sulalatus Salatin, sang sultan menyebarkan Islam di wilayah Siak.<sup>6</sup>

Penelitian-penelitian yang terkait dengan Kesultanan Siak cukup diperhatikan secara intens, baik dari penulis dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, meskipun sejarah Kesultanan Siak telah ditulis oleh beberapa orang, seperti OK Nizami Jamil dalam *Sedjarah Ringkas Keradjaan Siak*, pada periode ini penelitian tentang kesultanan tersebut dilakukan menyeluruh dan dipublikasikan secara nasional, yang digunakan untuk menyusun sejarah daerah, baik Riau maupun Siak. Penulis luar negeri juga turut menyumbang banyak kajian mengenai Kesultanan Siak, di antaranya Donald J. Goudie yang menganalisis *Syair Perang Siak*,<sup>7</sup> Mohd. Yusoff Hashim yang menganalisis *Hikayat Siak*.<sup>8</sup> Tenas Effendy “dengan memberanikan diri” menyusun ulang *Syair Perang Siak* berdasarkan wawancara dari berbagai orang yang menyaksikan, mengingat, dan menghapal naskah tersebut.<sup>9</sup>

Ada dua corak penyusunan identitas Kesultanan Siak pada masa ini. Corak pertama adalah sejarah yang dibalut nasionalisme. Hal ini selaras dengan tuntutan penulisan sejarah Indonesia yang cenderung Indonesia sentris. Sehingga, peristiwa-

<sup>6</sup> Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak 1901-1942* (Pekanbaru: Suska Press, 1991), hlm. 66-67.

<sup>7</sup> Lihat Donald J. Goudie, *A Critical Edition of The Syair Perang Siak, With a Consideration of its Literary and Historical Significance* (tesis Universitas London).

<sup>8</sup> Lihat Mohammad Yusoff Hashim, “Tradisi persejarahan di dalam Hikayat Siak atau Sejarah Raja-Raja Melayu: di antara fakta dan mitos”, *Sejarah: jurnal Jabatan Sejarah*, no. 1 (1988), hlm. 63-139

<sup>9</sup> Lihat Tenas Effendy, *Syair Perang Siak* (Pekanbaru: Badan Pembina Kesenian Daerah Propinsi Riau, 1969).

peristiwa yang dapat dihubungkan dengan nasionalisme Indonesia dikembangkan. Misalnya, Pada tahun 1988, Keluarga Besar Masyarakat Riau se-Sumatera Utara bekerja sama dengan Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara untuk menyelenggarakan Seminar Sejarah Kepahlawanan Bangsa Indonesia di Riau. Tokoh-tokoh yang dibahas adalah Raja Ali Haji, Tuanku Tambusai dan Syarif Kasim II. Dalam seminar tersebut, ada 3 makalah yang membahas Syarif Kasim II: “Sultan Syarif Qasim Hijrah Ke Tanah Aceh, Karena Tidak Bersedia Menjadi Sultan Boneka’ di Siak Indrapura” oleh Ali Hasjmy, “Sultan Syarif Qasim II Dengan Rela Meletakkan Mahkota Kerajaan Siak Demi Perjuangan Bangsa Indonesia” oleh OK Nizami Jamil, dan “Segi Kepahlawanan Sultan Syarif Qasim II Siak Indrapura” oleh Amir Luthfi.<sup>10</sup>

Kasus Si Koyan pada tahun 1931 dimaknai sebagai sebuah pemberontakan terhadap Belanda yang menjalankan kerja rodi di Siak dan dibantu diam-diam oleh sang sultan.<sup>11</sup> Vonis penjara 20 tahun, alih-alih hukuman mati, kepada Si Koyan oleh Kerapatan Tinggi dimaknai sebagai upaya sultan meringankan hukumannya. Si Koyan sendiri memberikan kesaksian kepada Amir Luthfi pada tahun 1986 mengenai perlawanannya terhadap Belanda dan proses pengadilannya oleh Kerapatan Tinggi.<sup>12</sup> Bagi Si Koyan, semua yang dilakukannya adalah demi

---

<sup>10</sup> Resume dan Hasil Rumusan Seminar Sejarah Kepahlawanan Bangsa Indonesia di Riau (Medan, 30-31 Mei 1988), hlm. 28.

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 29.

<sup>12</sup> Amir Luthfi, “Segi Kepahlawanan Sultan Syarif Kasim Siak Sri Indrapura”, dalam Resume dan Hasil Rumusan Seminar Sejarah Kepahlawanan Bangsa Indonesia di Riau (Medan, 30-31 Mei 1988), hlm. 40.

melawan Belanda dan ia tidak ingin patuh kecuali kepada sultan.<sup>13</sup> Kisah Si Koyan memberikan aspek perlawanan Syarif Kasim II secara politik terhadap Belanda.

Corak kedua adalah mengenai penjelasan sifat etnis Kesultanan Siak Sri Indrapura. Telah dijelaskan bahwa Siak adalah wilayah persimpangan budaya antara perantau Minang, masyarakat Melayu, serta penduduk asli. Dengan demikian, penulis sejarah Siak dengan latar belakang yang berbeda akan menghasikan tafsiran yang berbeda pula. Misalnya Amir Luthfi, seorang sejarawan dari Kuantan, membahas sistem hukum dan kekuasaan secara intens dalam karyanya *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak*. Menurut Amir Luthfi, untuk melihat adat Melayu Siak maka perlu melihat adat Minangkabau, sebab antara keduanya terdapat hubungan historis.<sup>14</sup> Namun, ia juga memadukan konsep Adat Perpatih dan Adat Temenggung dalam menganalisis sistem sosial dan budaya Siak. Adat yang dijalankan oleh masyarakat Siak dijelaskan dalam klasifikasi Adat Perpatih dan Adat Temenggung yang dipinjam dari Malaysia.<sup>15</sup> Menurut Amir Luthfi:

*“... Sebagai penerus Kesultanan Johor, perkembangan hukum di Kesultanan Siak dalam awal perkembangannya diwarnai oleh corak*

<sup>13</sup> *Ibid.*; Elly Roza (editor), *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI Di Kabupaten Kepulauan Meranti* (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Pekanbaru, 2013), hlm. 99.

<sup>14</sup> Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak* (Pekanbaru: Susqa Press, 1990), hlm. 106.

<sup>15</sup> Klasifikasi ini dibuat oleh R. Winstedt untuk menjelaskan keunikan adat Negeri Sembilan terhadap adat-adat lainnya sepanjang Semenanjung Malaya, kemudian diadopsi sebagai sebuah teori oleh penulis-penulis Melayu Malaysia. Sejauh penelusuran penulis, klasifikasi Adat Perpatih dan Adat Temenggung awalnya tidak dikenal pada masyarakat Melayu Indonesia, tetapi ikut diadopsi oleh penulis kebudayaan Melayu Indonesia (dalam hal ini Riau) yang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia atau kenal dan bersimpati dengan “perkembangan pesat” Melayu Malaysia. Dalam *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan* Amir Luthfi menyamakan saja Adat Perpatih dan Adat Temenggung dengan Lareh Bodi Caniago (Datuk Parpatih nan Sabatang) dan Koto Piliang (Datuk Katumanggungan) (hlm. 121-122).

*kehidupan hukum yang berlaku di Johor, yaitu bentuk hukum yang didasarkan pada Adat Temenggong dengan kombinasi hukum Islam. Namun demikian, pengendali kekuasaan di Kesultanan Siak memberikan otonomi yang luas kepada kepala-kepala suku untuk memberlakukan adat mereka. Dengan demikian, di daerah yang telah tertanam pengaruh adat Minangkabau berlaku Adat Perpatih dengan kombinasi hukum Islam.”<sup>16</sup>*

Amir Luthfi melihat bertahannya Adat Perpatih dan Temenggong di Siak dengan keberadaan suku-suku yang hak tradisi mereka diakui dan dijaga oleh sultan Siak pada masa Kolonial, manakala para sultan memegang Adat Temenggong melalui adat raja-raja Melayu. Pandangan yang condong ke Minangkabau ini akan berubah setelah era Reformasi.

Aspek pariwisata belum berkembang pada masa sebelum berdirinya Kabupaten Siak, tetapi Pada dekade 1980 pula, potensi wisata Siak mulai dieksplorasi. Pada tahun 1970-an, Istana Siak tidak dibuka untuk umum dan kuncinya disimpan oleh camat Siak; istana tersebut dilaporkan dibiarkan dalam keadaan kotor dan dokumen-dokumennya berserakan.<sup>17</sup> memasuki tahun 1980, istana tersebut mulai dibuka sebagai objek wisata<sup>18</sup> dan menarik perhatian asing, termasuk Rombongan Sejarawan Johor pada tahun 1984.<sup>19</sup> *Berita Harian* dari Singapura malah mencoba menghangatkan diskusi mengenai perhatian terhadap peninggalan Datuk Laksamana, salah seorang petinggi sederajat dengan Datuk Empat Suku, karena sementara Istana Siak di tempat ‘pelosok’ mendapat perhatian penuh, rumah Datuk Laksamana lebih ‘terpelosok’ tidak begitu diperhatikan,

<sup>16</sup> Amir Luthfi, *op. cit.*, hlm. 184.

<sup>17</sup> “Nasib Peninggalan Para Sultan”, *Tempo*, 31 Juli 1971, hlm. 49.

<sup>18</sup> “Istana Siak di Riau”, *Waspada*, 18 Oktober 1987.

<sup>19</sup> *Berita Yuda*, 8 Mei 1984.

padahal sejarah antara Sultan Siak dan Datuk Laksamana begitu penting.<sup>20</sup> Bersama dengan objek wisata Riau lainnya, pariwisata provinsi ini dikatakan “ibarat memetik durian runtuh”.<sup>21</sup>

#### 4.2. Identitas Siak sebagai Kabupaten (1999-2023)

Kabupaten Siak secara resmi berdiri pada 12 Oktober 1999 sebagai pecahan dari Kabupaten Bengkalis. Identitas Kesultanan Siak berkembang dalam dua bentuk: sebagai identitas Kabupaten Siak dan pemanfaatannya di bidang pariwisata, serta upaya-upaya restorasi Kesultanan Siak Sri Indrapura yang dimulai dengan Kekerabatan Resam.

Seminar Sejarah Kepahlawanan Bangsa Indonesia di Riau membawa dampak bagi pembentukan Kabupaten Siak. pada tanggal 6 November 1998, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Syarif Kasim II sekaligus Bintang Mahaputra Adipradana.<sup>22</sup> Penyerahan gelar dan Bintang tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 November di Istana Negara Jakarta oleh presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dan diterima oleh Tengku Makmun al-Rasyid, seorang mantan sekretaris sultan, didampingi oleh Fadlan Sulaiman sebagai bupati Bengkalis, dan OK Nizami Jamil sebagai tokoh Siak. Keesokan harinya, tanda-tanda kebesaran tersebut dibawa ke Siak, dan masyarakat sekitar menyambut

<sup>20</sup> “Antara Dua Istana”, *Berita Harian*, 13 April 1992.

<sup>21</sup> “Kepariwisatahan Provinsi Riau Tinggal Petik Durian Runtuh”, *Harian Neraca*, 31 Maret 1989.

<sup>22</sup> Kementerian Sekretaris Negara, Daftar Warganegara Republik Indonesia yang Mendapat Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Tahun 1959 s.d. 2003 (laporan Sekretariat Negara Republik Indonesia), hlm. 129

dengan antusias dengan menyelenggarakan Tepung Tawar, tradisi menyambut tamu dalam adat Melayu, sebelum disemayamkan di Istana Siak secara permanen.<sup>23</sup>

Dengan semangat otonomi daerah, upaya pembentukan Kabupaten Siak dimulai pada tahun 1999. Rencana wilayah dan batas-batas Kabupaten Siak adalah seluas bekas Kewedanaan Siak, kurang sedikit dari wilayah rencana Swapraja Kabupaten Siak dan bekas wilayah Kesultanan Siak. Pembicaraan telah dimulai sejak tanggal 5 Mei, ketika beberapa tokoh Siak berbincang-bincang di Pekanbaru. Pada tanggal 23 Mei Khairuddin Yunus, salah seorang tokoh tersebut, menghimpun Ikatan Warga Siak dan Sekitarnya yang ia pimpin, untuk mempersiapkan dan membentuk panitia pembentukan Kabupaten Siak.<sup>24</sup>

Musyawahar Besar Masyarakat wilayah Eks Kewedanaan Siak diselenggarakan pada hari Jumat, 11 Juni 1999 di Kota Siak Sri Indrapura. Setelah salat Jumat dan ziarah kubur Syarif Kasim II, peserta musyawarah sebanyak 300 orang berkumpul di Gedung Mahratu, dekat Istana Siak, dipimpin Wan Ghalib. Syarwan Hamid, Menteri Dalam Negeri kelahiran Siak, datang satu jam kemudian, menggunakan helikopter yang mendarat di lapangan depan Istana Siak. Rapat tersebut berlanjut hingga pukul delapan malam.<sup>25</sup> Musyawarah besar itu menghasilkan sebuah resolusi yang menuntut MPR untuk menetapkan Kabupaten

---

<sup>23</sup> OK Nizami Jamil, *Negeri Siak Tanah Kelahiranku: Sebuah Autobiografi Anak Kampung Dalam* (Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 2008), hlm 155-156.

<sup>24</sup> Tuah Hasrun Saily, *Sejarah Pembentukan Kabupaten Siak* (Siak: Komite Perjuangan Pembentukan Kabupaten Siak, 2011), hlm. 18-19.

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 22-24.

Siak dengan wilayah Kecamatan Siak, Mandau, Minas dan Sungai Apit.<sup>26</sup> Akhirnya, Kabupaten Siak diresmikan pada tanggal 12 September 1998 oleh DPR RI, dengan Tengku Rafian sebagai pejabat sementara bupati.<sup>27</sup> Untuk sementara, berbagai gedung peninggalan Kesultanan Siak (selain Istana Siak) dipakai untuk menyelenggarakan pemerintahan kabupaten.

**Gambar 16**  
**Balai Kerapatan Tinggi sebagai DPRD Kabupaten Siak**



**Keterangan** : Balai Kerapatan Tinggi dipakai sebagai gedung DPRD Kabupaten Siak (kiri) dan suasana rapat parlemen di dalam lantai dua Balai Kerapatan Tinggi (kanan)

**Sumber** : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Siak

Perkembangan Kabupaten Siak terus berlanjut dengan ditemukannya sumber daya minyak dan gas di berbagai tempat di Siak. Berbagai pembangunan infrastruktur dijalankan, termasuk jembatan besar yang diresmikan pada 11 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jembatan tersebut dinamai Jembatan Tengku Agung Syarifah Latifah, istri pertama Syarif Kasim II.<sup>28</sup> Berbagai

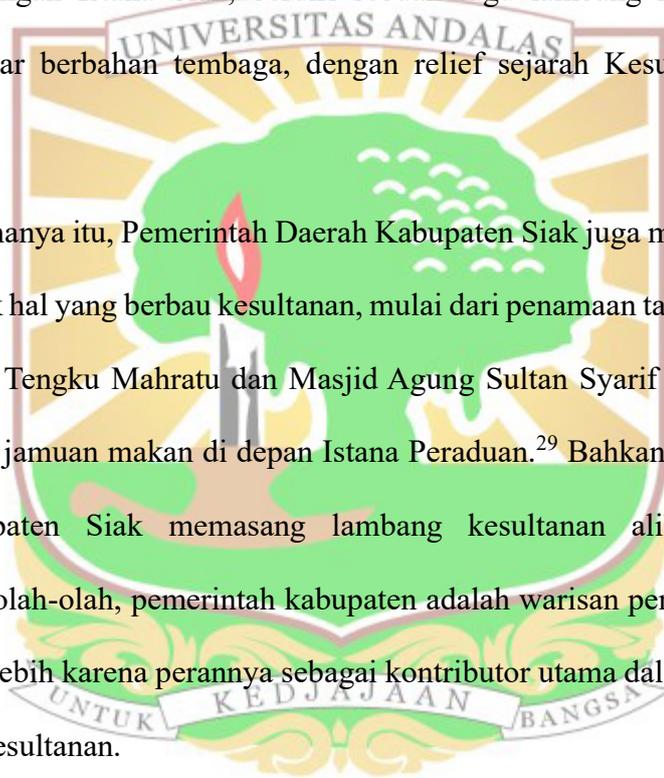
<sup>26</sup> Ibid, hlm. 83.

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 29-30.

<sup>28</sup> “Presiden Resmikan Beroperasinya Jembatan Siak”, <https://www.antaraneews.com/berita/73437/presiden-resmikan-beroperasinya-jembatan-siak>, diakses tanggal 17 Februari 2025.

taman dinamai dengan tokoh-tokoh kerajaan seperti Taman Tengku Mahratu, Taman Sri Bijuangsa, dan lain sebagainya. Perkembangan infrastruktur selanjutnya dilakukan pada tepi sungai Siak dengan membangun turap dan mengemasnya dalam bentuk *waterfront*. Proyek ini telah dirancang sejak 2013 dan selesai tiga tahun kemudian dengan nama Tepian Bandar Sungai Jantan. Dalam area *waterfront*, garis lurus dengan Istana Siak, berdiri sebuah tugu lambang Kesultanan Siak berukuran besar berbahan tembaga, dengan relief sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura.

Tidak hanya itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak juga menata Kota Siak dengan banyak hal yang berbau kesultanan, mulai dari penamaan taman dan gedung seperti Taman Tengku Mahratu dan Masjid Agung Sultan Syarif Hasyim, hingga meramu paket jamuan makan di depan Istana Peraduan.<sup>29</sup> Bahkan, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Siak memasang lambang kesultanan alih-alih lambang kabupaten. Seolah-olah, pemerintah kabupaten adalah warisan penerus kesultanan itu sendiri, terlebih karena perannya sebagai kontributor utama dalam melestarikan peninggalan kesultanan.



<sup>29</sup> “Wabup Husni Gelar Jamuan Makan di Istana Peraduan” <https://riaupos.jawapos.com/siak/2253553914/wabup-husni-gelar-jamuan-makan-di-istana-peraduan>, diakses tanggal 28 Agustus 2025.

**Gambar 17**  
**Tampilan Lambang Kesultanan Siak di Ruang Publik**



**Keterangan** : Lambang Kesultanan Siak Sri Indrapura sebagai sebuah monument di taman Tengku Mahratu, seberang Istana Siak (kiri) dan terpajang di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Siak, dekat Jembatan Siak (kanan). Letaknya yang strategis memudahkan wisatawan mengidentifikasi lambang tersebut sebagai salah satu identitas Siak

**Sumber** : Dokumentasi pribadi

Sementara itu, pengembangan wisata Kabupaten Siak secara serius mulai dikembangkan sejak tahun 2006. Selama 5 tahun, pemerintah masih memelihara peninggalan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Ketika memasuki periode selanjutnya (2011-2016), pemerintah kabupaten secara masif merevitalisasi peninggalan tersebut, menegaskannya sebagai objek cagar budaya melengkapi fasilitas yang menunjang pariwisata, serta menyusun atraksi wisata di sekitar cagar budaya. Objek-objek cagar budaya tersebut kemudian ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Kesultanan Siak Sri Indrapura. Basis pengembangan pariwisata di kawasan tersebut adalah sejarah Kesultanan Siak dan Kebudayaan Melayu, dengan Istana Siak sebagai *centerpiece* objek wisata Kabupaten Siak.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Abdul Harits Ritonga dan Siti Fatimah, *op. cit.*, hlm. 122-126.

Identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura ini berdampingan dengan identitas Melayu yang ada di Kabupaten Siak. Dalam kajian Melayu Riau kontemporer, beberapa unsur Kesultanan Siak Sri Indrapura ditafsirkan ulang ke dalam makna budaya. Muhammad Bertangkup sebagai simbol sultan Siak keturunan Ba'alawi ditafsirkan menurut makna Islam, lagipula lambang tersebut didasari oleh kaligrafi nama Muhammad.<sup>31</sup> *Bab al-Qawaid* yang merupakan produk hukum Siak dimaknai sebagai hasil produk Islam di bumi Melayu.<sup>32</sup>

Meskipun demikian, terdapat pembeda yang cukup jelas mana yang merupakan identitas kesultanan dengan identitas Melayu secara umum. Hal ini dapat dilihat dalam simbolisme yang dimunculkan. mereka yang merasa merupakan keturunan sultan akan sering mengusung simbolismenya, seperti memakai pakaian kuning (warna khusus raja atau keturunannya), memasang lambang Muhammad Bertangkup di kopiah atau sebagai pin, dan lain sebagainya.

#### 4.3. Kekerabatan Resam Kesultanan Siak Sri Indrapura

Sebelum membahas Kekerabatan Resam Kesultanan Siak Sri Indrapura (disingkat Kekerabatan Resam) dan para pengklaim sultan Siak, terlebih dahulu penulis menjelaskan konteks munculnya, yang dapat dikaitkan dengan fenomena restorasi kesultanan di Indonesia. Restorasi kesultanan, atau dalam bahasa Gerry van Klinken “Kembalinya para sultan”, adalah sebuah fenomena yang marak terjadi setelah Reformasi 1998. Gerakan ini adalah salah satu contoh simbol paling baik

---

<sup>31</sup> Dede Burhanudin, “The Religious Meaning of Islamic Inscription in Kota Tinggi Cemetery, Siak, Riau Province”, *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, vol. 6 no. 1, Juni 2017.

<sup>32</sup> Bab al Qawaid, hlm. 93

untuk sebuah identitas daerah Indonesia.<sup>33</sup> Sultan-sultan tersebut hadir kembali bukan sebagai penguasa definitif, atau “diktator”, melainkan sebagai representasi adat dan identitas komunitas lokal.<sup>34</sup>

Restorasi kesultanan telah mengembalikan dan mengembangkan identitas berbagai daerah di Kalimantan. Banyak istana-istana kesultanan yang telah direnovasi menjadi museum, sebagian kecil lainnya ditempati oleh keluarga kesultanan yang masih ada.<sup>35</sup> Di Kalimantan Barat, berbagai kesultanan menjadi simbol penting bagi orang Melayu di tengah konflik antaretnis pada tahun 1999 dan setelahnya.<sup>36</sup> Kasus paling sukses adalah Kesultanan Kutai Kartanegara, yang bersama dengan pemerintah Kabupaten Kutai, membangun istana kesultanan yang baru dan mengangkat tradisi Erau sebagai event utama kabupaten.<sup>37</sup> Sejak tahun 2007, pemerintah telah memasukkan institusi monarki di Indonesia sebagai sarana untuk pelestarian budaya daerah.<sup>38</sup>

Untuk Sumatera, selain beberapa kesultanan Melayu yang masih bertahan di Sumatera Utara, ada juga beberapa kesultanan yang dihidupkan kembali. Kesultanan Serdang dihidupkan kembali melalui restorasi institusi Wazir Berempat

---

<sup>33</sup> Gerry van Klinken, *op. cit.*, hlm. 166

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 182

<sup>35</sup> Bernard Sellato, *loc. cit.*

<sup>36</sup> Gerry van Klinken, *op. cit.*, hlm. 165 dan 173-175

<sup>37</sup> Fadli Afriandi dan Fachriza Ariyadi, “Efek Domino Pasca Dibangkitkannya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura”, *Reformasi*, Vol. 10 No. 2, tahun 2020, hlm. 132-138.

<sup>38</sup> Lebih lanjut lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.

dan kemudian penabalan Tengku Abunawar Sinar sebagai sultan baru.<sup>39</sup> Meskipun beberapa simbol Kerajaan Pagaruyung telah dibangun sejak Orde Baru, seperti Istana Basa, Raja Pagaruyung tidak direstorasi hingga tahun 2002, ketika Lembaga Pucuk Adat Alam Minangkabau melantik Taufiq Thaib sebagai Rajo Alam Pagaruyung yang baru.<sup>40</sup> Beberapa restorasi kesultanan menyusul kemudian, seperti Jambi dan Palembang.

Sejauh pengamatan penulis, para aktor Kekerabatan Resam, yang dapat dianggap sebagai perwakilan kelompok kesultanan,<sup>41</sup> bukanlah tokoh-tokoh yang begitu dikenal di Provinsi Riau maupun Kabupaten Siak sendiri. Saat pembentukan Kabupaten Siak, keberadaan mereka juga tidak begitu disorot. Untuk menganggap mereka sebagai golongan elit kerajaan, peran mereka begitu kecil dan tidak semencolok tokoh adat Siak. Hal ini disebabkan lembaga kesultanan telah tidak ada, putra dari sultan Syarif Kasim II juga tidak ada, Tengku Long Putih sebagai penerus potensial juga telah “menyerahkan” klaimnya kepada pemerintah, sehingga pada dasarnya lembaga itu kosong dan tidak dianggap lagi. Jadi, usaha untuk membentuk kembali kelompok kesultanan dapat dianggap sebagai suatu hal yang baru dan dimulai dari awal kembali, tidak seperti Kesultanan Pelalawan yang masih memiliki putra sultan terakhirnya dan dengan mudah merestorasi kesultanan tersebut.

---

<sup>39</sup> Tengku Mira Sinar, *Tengku Luckman Sinar, Melayu Nusantara dan Strategi Kebudayaan* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2016), hlm. 104-105.

<sup>40</sup> Nopriyasman, “Politik Representasi Istana *Basa* Pagaruyung sebagai Identitas Minangkabau di Sumatera Barat”, *Disertasi* Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2011, hlm. 221-227

<sup>41</sup> Tokoh-tokoh Melayu Siak atau Riau yang mempunyai gelar keturunan raja (Tengku, Wan dsb.) tidak bisa secara langsung dianggap sebagai kelompok elit kesultanan, karena gelar tersebut sifatnya adalah diwariskan, selama generasinya mempunyai gelar yang bersangkutan, meskipun tingkat generasinya dengan seorang raja begitu jauh sehingga tidak dapat terlacak dengan jelas.

Meskipun demikian, seiring dengan pengembangan identitas Kabupaten Siak dalam hal wisata sejarah kesultanan dan budaya Melayu, pemerintah daerah juga perlu untuk mengetahui dan mengembangkan identitas Kesultanan Siak dan memadukannya dengan kebudayaan Melayu. Dengan demikian, kerja sama, atau minimal pelibatan, antara pemerintah daerah dengan tokoh budaya dan kerajaan menjadi penting di sini. Perpaduan ini tampak, misalnya pada desain gedung Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak yang mirip dengan Istana Siak, atau partisipasi kelompok kesultanan dalam beberapa acara adat Melayu Siak. Dari sinilah berkembang pemahaman bahwa warisan Kesultanan Siak berkaitan dengan kebudayaan Melayu, atau tepatnya Kesultanan Siak adalah kebudayaan Melayu Siak.

Kekerabatan Resam Kesultanan Siak Sri Indrapura dicetuskan oleh beberapa kerabat sultan Siak yang merupakan keturunan Syarif Kasim I. Upaya ini mulai dibicarakan sejak tahun 2001. Pada tahun 2002, Kekerabatan Resam didirikan dengan Tengku Muhammad Toha sebagai aktor utama. Untuk mengepalai lembaga ini, dipilihlah Tengku Muchtar bin Tengku Anum. Tengku Muchtar Anum merupakan keturunan dari Syarif Ismail dan istri pertamanya. Meskipun berasal dari keturunan jauh Syarif Ismail, ia dianggap seorang yang mapan dan dituakan.<sup>42</sup> Tengku Muchtar mewakili Kesultanan Siak setiap kali ada acara yang melibatkan keraton-keraton Nusantara, tetapi tidak pernah mengklaim sebagai sultan Siak, melainkan digelari Mangkubumi Mangkudiraja.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Tengku Sufyan Tsauri, 5 Desember 2024.

Penulisan sejarah Kesultanan Siak secara ‘resmi’ diterbitkan pada tahun 2011 dengan judul *Sejarah Kerajaan Siak*. Buku ini disusun oleh tim penulis yang diketuai oleh OK Nizami Jamil. Penulis dari berbagai latar belakang, termasuk anggota Kekerabatan Resam, menegaskan bahwa pada saat pemakaman Syarif Kasim II, Tengku Long Putih sebagai adik sultan sekaligus calon paling potensial untuk melanjutkan kesultanan, menyerahkan kunci istana secara simbolis kepada camat Siak sebagai tanda bahwa peninggalan Kesultanan Siak telah diserahkan dari keluarga kepada pemerintah. Hal yang juga perlu disorot di sini adalah mengenai Syarif Hasyim yang disusun oleh pihak kerabat kesultanan Siak. Syarif Hasyim, terutama dalam narasi kenaikan takhtanya, ditulis menurut sudut pandang kerabat keturunan Tengku Bagus, saudara Tengku Muda yang merupakan calon penerus Syarif Kasim I. Dalam hal ini, Syarif Hasyim digambarkan berkonspirasi dengan Belanda untuk membatalkan kedudukan Tengku Muda sebagai putra mahkota, sehingga mengucilkan Tengku Muda dan Tengku Bagus keluar dari wilayah Siak. Semua ini didasarkan pada sebuah teks yang ditulis oleh Tengku Bagus sendiri, yang dipegang oleh keturunannya, sementara tidak ada keturunan Syarif Hasyim yang tersisa, atau setidaknya terlibat dalam penyusunan buku ini.<sup>43</sup>

Pertemuan antara Kekerabatan Resam diadakan pada bulan Mei 2018 untuk mendirikan lembaga itu secara resmi. Pada tanggal 24 Agustus 2019, Kekerabatan Resam dan LAMR Siak mengundang Yang Dipertua Negeri Melaka, Mohammad Khalil Yaakob dan mendirikan Kekerabatan Resam secara resmi. Tengku Muchtar

---

<sup>43</sup> O.K. Nizami Jamil *et al.*, *op. cit.*, hlm. 197.

Anum sebagai ketua, serta Tengku Muhammad Toha dan Syed Mohammad Yusuf bin Syed Nasir sebagai timbalan (wakil). Yang Dipertua Negeri Melaka juga diberi gelar Orang Kaya Maharaja Siak oleh Kekerabatan Resam, demikian juga dengan beberapa tokoh Siak lainnya.

**Gambar 18**  
**Peresmian Kekerabatan Resam**



Keterangan : Lembaga Kekerabatan Resam Kesultanan Siak Sri Indrapura dibentuk pada tahun 2019. Tampak Tengku Muchtar Anum (tengah), bersama dengan Syed Mohammad Yusuf bin Syed Nasir (kanan), dan Alfredi, Bupati Siak (kiri).

Sumber : infosiak.com, <https://infosiak.com/majelis-kerapatan-adat-kukuh-kan-lembaga-kesultanan-siak>

Sejalan dengan itu, terdapat usaha-usaha menelusuri keturunan sultan agar dapat ditabalkan menjadi sultan baru. Usaha ini tidak pernah diklaim dilakukan oleh Kekerabatan Resam. Contohnya, terdapat upaya orang-orang yang mengklaim sebagai ahli waris Kesultanan Siak (selain dari keluarga Syarifah Fadlun, istri terakhir Syarif Kasim II, yang menempati Istana Peraduan) yang mencoba

mengklaimnya. Pada tahun 2009, beberapa orang semacam ini mendatangi kantor Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Siak yang bertujuan untuk memfasilitasi ahli waris “untuk ditabalkan sebagai pewaris Sultan Siak. Karena mereka menilai bekas kerajaan Siak ini seperti tidak bertuan.” Mereka sendiri telah tiga kali mendatangi LAMR Siak, tetapi belum ada tanggapan pasti dari kantor tersebut.<sup>44</sup> Harian *Metro Riau* pada tanggal 3 Januari 2016 menerbitkan dua artikel koran yang membahas secara khusus mengenai pentingnya Kesultanan Siak ditegakkan kembali. Pertama, “Kembalinya Kesultanan di Bumi Melayu”, mengharapkan kembalinya Kesultanan Siak Sri Indrapura sebagaimana kesultanan Melayu lainnya di Indonesia sebagai pemangku adat dan pengayom masyarakat, sedangkan “Ada Sultan Adat Berdiri, Tiada Sultan Adat Mati” menjelaskan kemungkinan menelusur keturunan Syarif Kasim I untuk menentukan calon sultan Siak yang baru, beserta syarat-syarat lainnya.<sup>45</sup>

Klaim-klaim sultan Siak maupun ahli warisnya bahkan pernah dibawa sampai ke meja hijau. Pada tahun 2020, empat pemohon mengajukan klaim ahli waris Syarif Kasim II. Mereka mengaku keturunan Tengku Sayid Abdullah bin Tengku Sayid Abbas Alidrus, yang beristrikan Syarifah Zahra Tengku Long Jiwa binti Tengku Besar Syarif Sagoff bin Tengku Sulung Muda Syarif Alwi bin Syarif Kasim I. Pengadilan Agama Pekanbaru memutuskan bahwa bukti-bukti nasab yang diajukan pemohon tidak menguatkan klaim ahli waris, apalagi kalau diperpanjang masih banyak keturunan Syarif Kasim I selain Tengku Sulung Muda, dan tidak

<sup>44</sup> “Ahli Waris Kerajaan Siak Kecewa”, *Dumai Pos*, 18 Maret 2009.

<sup>45</sup> *Metro Riau*, 3 Januari 2016, hlm. 2-3.

dijelaskan rinci bagaimana nasib keturunan Tengku Long Putih, yang seharusnya lebih berhak karena merupakan saudara Syarif Kasim II.<sup>46</sup>

#### 4.4. Para pengklaim Sultan Siak

Penulis telah menemukan sebanyak tiga orang pengklaim sultan Siak yang ketiga belas. Mereka Tengku Syatir (Syarif Syatir Abdul Jalil Syaifuddin), Tengku Ridwan (Syarif Ridwan Abdul Jalil Syaifuddin), dan Tengku Nazir (Syarif Nazir Abdul Jalil Syaifuddin). Sementara perwakilan Kekerabatan Resam Kesultanan Siak yang diresmikan pemerintah Kabupaten Siak tidak mengklaim ketuanya, Tengku Muchtar Anum, sebagai seorang sultan.

##### 4.4.1. Tengku Syatir

Tengku Syatir, dengan nama Syarif Muhammad Syatir Abdul Jalil Syaifuddin adalah salah seorang keturunan Tengku Bagus bin Syarif Kasim I. Ia sendiri mengklaim bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 beberapa kerabat sultan Siak melakukan rapat untuk membentuk kembali Kesultanan Siak dan dengan bertahap berupaya memperhatikan kesultanan dan mempersatukan kesejahteraan keluarga kesultanan tersebut. Dalam rapat tersebut, ia diminta untuk menjadi calon sultan. Meskipun pada awalnya ia mengaku keberatan karena masih ada orang yang lebih tua darinya, mereka tetap menyuruhnya untuk memegang tampuk kesultanan.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Lihat Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru no. 169/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

<sup>47</sup> “Kronologis Sultan Syarif Kasim Siak Ke XIII”, [https://www.youtube.com/watch?v=e\\_C0RHa2Kdg](https://www.youtube.com/watch?v=e_C0RHa2Kdg), diakses pada 15 Januari 2025.

Tengku Syatir berencana “melantik” diri sebagai sultan Siak yang resmi pada tahun 2017 di “Istana Kerajaan Siak” dengan mengundang sultan dan raja-raja se-Nusantara.<sup>48</sup> Namun, sebelum hal itu dilaksanakan, ia telah menggelar sebuah acara penganugerahan gelar pada tanggal 5 November 2016 di Istana Hinggap Pekanbaru. Dengan berpakaian kesultanan lengkap mirip dengan Syarif Kasim II, Penganugerahan gelar itu diberikan kepada Syarif Kamaruddin Yusof Sani dengan gelar Raja Tua Agung Siak Sri Indrapura, beserta surat keputusan tiga halaman yang diberi materai Rp 5.000,- setiap lembarnya.<sup>49</sup>



**Gambar 19**  
**Sosok Syarif Syatir**

**Keterangan** : Syarif Kamaruddin Yusof Sani (kiri) bersalaman dengan Syarif Syatir (kanan) saat penganugerahan gelar di Istana Hinggap Pekanbaru.

**Sumber** : Majelis Kesultanan Siak Sri Indrapura, Riau, Indonesia (Facebook)

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Dokumentasi acara tersebut dapat dilihat pada pranala Facebook “MAJLIS PENGISTIHRAN KETURUNAN DAN BAIHAH TAAT SETIA” <https://www.facebook.com/media/set/?vanity=546890032074782&set=a.1113059972124449>, diakses pada 15 Januari 2025.

Syarif Kamaruddin Yusof Sani adalah seorang keturunan Tengku Muda, putra Syarif Kasim I, yang menetap di Malaysia.<sup>50</sup> Ia telah membentuk Majelis Kesultanan Siak Sri Indrapura yang dengan tujuan menghimpun beberapa keturunan-keturunan sultan Siak di sana.<sup>51</sup> Dalam akun Facebook resminya, ia juga menjelaskan nasib leluhurnya, Tengku Muda, yang diasingkan bersama dengan Tengku Bagus oleh Belanda, dengan narasi yang mirip dengan *Sejarah Kerajaan Siak*.<sup>52</sup> Syarif Kamaruddin Yusuf Sani mengunjungi Siak pada tahun 2015<sup>53</sup> dan berziarah ke makam para sultan Siak setahun kemudian.<sup>54</sup> Frekuensi kegiatannya yang cukup intens dan relasinya dengan Tengku Syatir mengantarnya kepada penganugerahan gelar Raja Tua Agung.

Penganugerahan gelar tersebut cukup membuat heboh, setidaknya bagi beberapa instansi pemerintahan Provinsi Riau dan Kabupaten Siak. Banyak tokoh-tokoh Riau dan Siak tidak tahu menahu dengan sosok Syarif

<sup>50</sup> Silsilah Syarif Kamaruddin Yusof Sani dapat dilihat di lampiran.

<sup>51</sup> Semua informasi mengenai Syarif Kamaruddin Yusof Sani hanya didapat dari akun Facebook resminya, Majelis Kesultanan Siak Sri Indrapura, Riau, Indonesia, dan tidak ada informasi lebih lanjut selain itu. Dokumentasi yang dipublikasikan di sana justru penting dalam melacak aktivitas Tengku Syatir, karena selain pranala YouTube di atas hanya ini dokumentasi mengenai dirinya. Akun ini terakhir membuat posting tanggal 23 April 2018.

<sup>52</sup> “Fakta Sejarah”, <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=815341881896261&id=546890032074782&set=a.570616086368843>, diakses tanggal 15 Januari 2025.

<sup>53</sup>

<sup>54</sup> “Ziarah Makam-Makam Sultan Siak Sri Indrapura Dan Kerabat-Kerabat”, <https://www.facebook.com/media/set/?set=a.926858344077947&type=3>, diakses tanggal 15 Januari 2025.

Syatir, mulai dari anggota DPRD Siak<sup>55</sup> hingga Lembaga Adat Melayu Riau.<sup>56</sup> Namun, setelah kejadian itu tidak banyak, atau tepatnya tidak ada, aktivitasnya yang dapat dilacak lagi; berdasarkan wawancara beberapa tokoh di Siak, Syarif Syatir mengalami stroke hingga tesis ini ditulis.

#### 4.4.2. Tengku Ridwan

Tengku Ridwan mengaku sebagai salah satu keturunan sultan Siak. Ia mendirikan Kekerabatan Kesultanan Siak Sri Indrapura (KKSSI) pada tanggal 30 Oktober 2018. Tengku Ridwan menabalkan dirinya di Istana Hinggap Pekanbaru, pada tanggal 31 Maret 2019 sebagai “pemangku kesultanan” dengan nama Sri Peduka Yang Maha Mulia yang Dipertuan Besar dan Agung Asy-Syarif Ridwan Abdul Jalil Abdurrahman. Setelah lantunan ayat Al-Quran, kesepakatan resmi diadakan oleh empat datuk pemangku adat dari Siak, Dumai, Minas dan Kampar, kemudian datuk batin Sakai Minas membacakan surat penetapannya. Setelah itu, Tengku Ridwan dan istri duduk di atas ‘singgasana’ untuk diberikan adat Tepung Tawar oleh para datuk dan tamu penting, termasuk camat Senapelan, Fabila Sandi. Sebelum penutupan dan doa, sebuah keris pusaka disematkan oleh panglima Tengku Ibrahim.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> “Sultan ke XIII? Ini kata Komisi II DPRD Siak” <https://redaksiriau.co.id/berita/cetak/8599/sultan-ke-xiii?-ini-kata-komisi-ii-dprd-siak.html>, diakses tanggal 18 Januari 2025.

<sup>56</sup> “Sultan Siak ke XIII, Ketua LAM Riau: Enggak Tahu”, <https://redaksiriau.co.id/berita/detail/8624/sultan-siak-ke-xiii,-ketua-lam-riau:-enggak-tahu.html>, diakses tanggal 18 Januari 2025.

<sup>57</sup> “Tengku Ridwan Syah Dinobatkan Sebagai Pemangku Kesultanan Siak”, <https://www.berazam.com/read-10664-tengku-ridwan-syah-dinobatkan-sebagai--pemangku->

**Gambar 20**  
**Sosok Syarif Ridwan**



Keterangan : Syarif Ridwan (lima dari kiri), setelah penabalannya pada 31 Maret 2019

Sumber : medialokal.co., <https://medialokal.co/news/detail/7588/daerah/sebanyak-29-datuk--memberi-tengku-ridwan-gelar-sebagai--assyarif-ridwan-abdul-jalil--abdurrahman>, diakses tanggal 18 Januari 2025

Dibandingkan pengklaim sultan lainnya, Syarif Ridwan cukup aktif dalam mengembangkan kegiatan melalui organisasinya. Kepengurusan KKSSI se-Provinsi Riau “ditabalkan” pada tanggal 12 Januari 2020, dengan menghadirkan Komandan Distrik Militer 0301 Pekanbaru<sup>58</sup> cukup rajin “menabalkan” (meresmikan) cabang-cabangnya di berbagai kabupaten/kota

---

[kesultanan-siak.html#sthash.dhEY8UHR.dpbs](https://kesultanan-siak.html#sthash.dhEY8UHR.dpbs), diakses tanggal 18 Januari 2025; “Sebanyak 29 Datuk Memberi Tengku Ridwan Gelar Sebagai As-Syarif Ridwan Abdul Jalil Abdurrahman”, <https://medialokal.co/news/detail/7588/daerah/sebanyak-29-datuk--memberi-tengku-ridwan-gelar-sebagai--assyarif-ridwan-abdul-jalil--abdurrahman>, diakses tanggal 18 Januari 2025.

<sup>58</sup> “Bersama Kepengurusan KKSSI, Korem 031/WB Akan Tetap Menjaga Budaya Melayu Di Riau”, <https://pilarbangsanews.com/2020/01/12/bersama-kepengurusan-kkssi-korem-031-wb-akan-tetap-menjaga-budaya-melayu-di-riau/>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

di Riau seperti Indragiri Hilir,<sup>59</sup> Kecamatan Bukit Batu,<sup>60</sup> Kota Dumai,<sup>61</sup> Minas<sup>62</sup>. Beberapa kegiatan KKSSI yang terlacak adalah kunjungan kepada Ketua DPRD Riau,<sup>63</sup> silaturahmi antar pimpinan cabang,<sup>64</sup> hingga penelusuran sebuah situs makam tua<sup>65</sup> serta pembagian takjil dan masker gratis.<sup>66</sup>

Pemikiran-pemikiran Syarif Ridwan mengenai Kesultanan Siak tidak terlalu banyak dan ambisius. Pada 26 April 2021, Syarif Ridwan mendeklarasikan beberapa hal, diantaranya ia dan lembaganya tidak akan terlibat dalam persengketaan harta sultan Siak dan mendukung penegakan



<sup>59</sup> “As-Syarif Ridwan Abdul Jalil Abdurrahmansyah Tabalkan Pengurus KKSSI Inhil”, <https://www.indragirione.com/2020/01/assyarif-ridwan-abdul-jalil-abdurrahmansyah-tabalkan-pengurus-kkssi-inhil>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

<sup>60</sup> “Penguhan Penabalan KKSSI Kecamatan Bukit Batu” [https://www.youtube.com/watch?v=T72S55WUXbA&list=PL3LEgU\\_NaAxJC-hj5HKHdVtfnqDkVXRl3&index=14](https://www.youtube.com/watch?v=T72S55WUXbA&list=PL3LEgU_NaAxJC-hj5HKHdVtfnqDkVXRl3&index=14), diakses tanggal 19 Januari 2025.

<sup>61</sup> “Penabalan Kekerabatan Kesultanan Siak Sri Indra Pura Kota Dumai Riau”, <https://www.mediahumaspolri.com/penabalan-kekerabatan-kesultanan-siak-sri-indra-pura-kota-dumai-riau.html>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

<sup>62</sup> “Kekerabatan Kesultanan Siak Sri Indrapura Wilayah Kecamatan Minas Resmi Dikukuhkan”, <https://web.archive.org/web/20240421021044/https://catatanriau.com/news/detail/10379/daerah/siak/kekerabatan-kesultanan-siak-sri-indrapura-wilayah-kecamatan-minas-resmi-dikukuhkan>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

<sup>63</sup> “Ketua DPRD Riau Terima Kunjungan Silaturahmi Pengurus Kekerabatan Kesultanan Siak Sri Indrapura”, <https://www.transriau.com/read-501-15400-2019-11-19-ketua-dprd-riau-terima-kunjungan-silahturahmi-pengurus-kekerabatan-kesultanan-siak-sri-indrapura.html>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

<sup>64</sup> “KKSSI: Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Modal Penting Wujudkan Indonesia Damai”, <https://pelitariu.com/berita/detail/21203/1>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

<sup>65</sup> “KKSSI Rapat dan Bengkalis Telusuri Keberadaan Situs Makam Tua di Terkul Laut”, <https://www.riautrust.com/read-166490-kkssi-rapat-dan-bengkalis-telusuri-keberadaan-situs-makam-tua-di-terkul-laut.html>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

<sup>66</sup> “Kekerabatan Kesultanan Siak Sri Indrapura dan Rumah Aspirasi, Berbagi dan Peduli”, <https://centroriau.id/2021/05/08/kekerabatan-kesultanan-siak-sri-indrapura-dan-rumah-aspirasi-berbagi-dan-peduli/>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

hukum terhadap pelaku perusakan cagar budaya Siak.<sup>67</sup> Ia juga ikut berkomentar saat ‘peninjauan’ pemugaran Istana Peraduan di Siak, dengan menyayangkan barang-barang peninggalan istana yang tidak dijaga, serta tidak melibatkan berbagai pihak-pihak terkait, termasuk ‘kekerabatan kesultanan’.<sup>68</sup>

#### 4.4.3. Tengku Nazir

Klaim ketiga dan cukup kontroversial dilahirkan oleh Tengku Nazir. Setelah ditelusuri, Tengku Nazir merupakan adik dari Syarif Syatir.<sup>69</sup> Tengku Nazir sempat menyuarakan keberatan atas peresmian Kekerabatan Resam dan pengangkatan ketuanya sebagai klaim pewaris kesultanan yang ilegal, begitu juga dengan penobatan Syarif Ridwan. Ia mengaku sebagai pewaris yang sah dan telah mendapat surat keputusan pengadilan agama Kabupaten Siak mengenai ahli waris Tengku Bagus. Ia mengaku sudah sejak tahun 2000 berjuang menjadi sultan, bahkan mengklaim bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 ia telah dilantik sebagai sultan Siak ke-13.

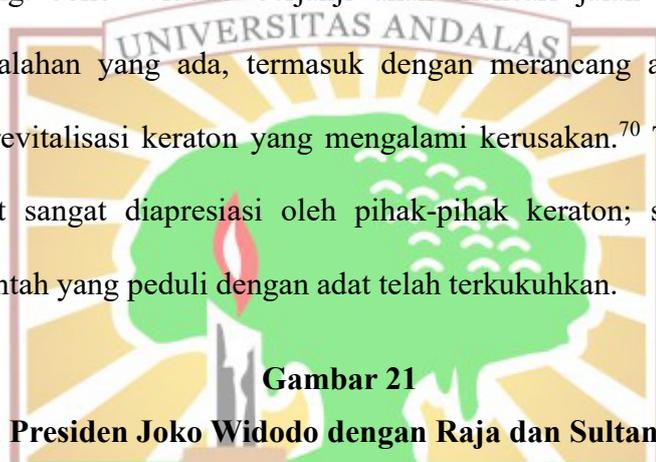
Konteks klaim Tengku Nazir sebagai sultan Siak cukup berbeda jika dibandingkan dengan pengklaim-pengklaim lainnya. Pemicu utama yang

<sup>67</sup> “KKSSI Deklarasikan Sembilan Poin Ikrar Kebulatan Tekad, Siap Bersinergi dengan Pemerintah”, <https://lamanriau.com/2021/04/26/kkssi-deklarasikan-9-poin-ikrar-kebulatan-tekad/>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

<sup>68</sup> “Tengku Ridwan: Pemugaran Istana Peraduan Tanpa Melibatkan Kekerabatan Kesultanan Siak”, <https://www.lintas10.com/tengku-ridwan-pemugaran-istana-peraduan-tanpa-melibatkan-kekerabatan-kesultanan-siak.html>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Iskandar, pegawai Istana Siak, 24 September 2024; Wawancara dengan Budi Rahmad, Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Siak, 4 Desember 2024; Wawancara dengan Tengku Sufyan Tsauri, anggota Kekerabatan Resam, 5 Desember 2024.

penulis lihat adalah adanya “angin segar” yang dihembuskan pemerintah pusat bagi lembaga keraton di Indonesia. Pada 4 Januari 2018, Presiden Joko Widodo mengundang 88 “raja dan sultan dari seluruh Indonesia” ke Istana Bogor. Pertemuan tersebut berisi diskusi mengenai masalah-masalah yang ada di keraton serta masukan-masukan dari raja dan sultan yang diundang. Joko Widodo berjanji akan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang ada, termasuk dengan merancang anggaran khusus untuk revitalisasi keraton yang mengalami kerusakan.<sup>70</sup> Tentu pertemuan tersebut sangat diapresiasi oleh pihak-pihak keraton; setidaknya, citra pemerintah yang peduli dengan adat telah terkukuhkan.



**Gambar 21**

**Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Raja dan Sultan se-Indonesia**



**Keterangan** : Presiden Joko Widodo bersama perwakilan raja dan sultan se-Indonesia setelah pertemuan di Istana Bogor tanggal 4 Januari 2018.

**Sumber** : Kementerian Sekretaris Negara, [https://www.setneg.go.id/baca/index/merawat\\_adat\\_leluhur\\_presiden\\_mendukung\\_pelestarian\\_kerajaan\\_dan\\_kesultanan\\_nusantara](https://www.setneg.go.id/baca/index/merawat_adat_leluhur_presiden_mendukung_pelestarian_kerajaan_dan_kesultanan_nusantara), diakses tanggal 17 Februari 2025

<sup>70</sup> “Merawat Adat Leluhur, Presiden Mendukung Pelestarian Kerajaan dan Kesultanan Nusantara”, [https://www.setneg.go.id/baca/index/merawat\\_adat\\_leluhur\\_presiden\\_mendukung\\_pelestarian\\_kerajaan\\_dan\\_kesultanan\\_nusantara](https://www.setneg.go.id/baca/index/merawat_adat_leluhur_presiden_mendukung_pelestarian_kerajaan_dan_kesultanan_nusantara), diakses tanggal 17 Februari 2024.

Berangkat dari citra tersebut, berdirilah sebuah lembaga “keraton”, atau tepatnya lembaga hukum adat, yang bernama Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia (LKPASI). LKPASI) adalah sebuah lembaga yang didirikan pada 24 Februari 2020. Organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan tanah ulayat agar dapat diberdayakan oleh masyarakat adat seluruh Indonesia. Berbeda dengan lembaga-lembaga penghimpun keraton lainnya, LKPASI menghimpun bentuk lembaga adat apapun, termasuk penglingsir, kepala marga, dan kepala persekutuan masyarakat hukum adat. Dengan memperluas cakupannya itu, lembaga kerajaan yang mungkin tidak tidak terhimpun dalam lembaga keraton seperti FSKN dapat bergabung di sini.<sup>71</sup>

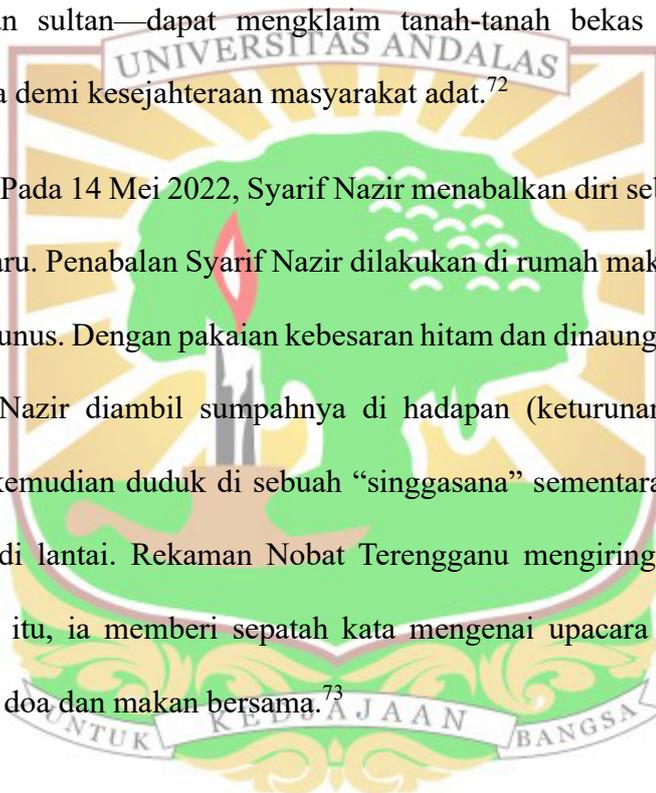
Salah satu celah yang dimanfaatkan sebagai tuntutan LKPASI sebagai tuntutan mereka adalah Swapraja. Dalam tiga simposium yang dihimpun LKPASI sejak tahun 2022, mereka membahas tanah ulayat secara hukum, menggali kembali dalil-dalil legal yang sudah ditinggalkan, serta berupaya mencari celah melalui dalil hukum baru. Dalam hal ini, mereka memasukkan swapraja sebagai salah satu bentuk hak ulayat. Mereka menegaskan bahwa penghapusan swapraja yang ditetapkan dalam UU

---

<sup>71</sup> Deskripsi resmi LKPASI terdapat dalam website [lkpasi.or.id](https://lkpasi.or.id)—akses alternatif melalui <https://web.archive.org/web/20240725023641/https://lkpasi.or.id/>, diakses tanggal 18 Februari 2025. LKPASI tidak pernah menyebutkan asal keanggotaan lembaganya, yakni siapa dan dari lembaga adat mana. Namun, berdasarkan observasi penulis, cakupan lembaga tersebut amat luas, mulai dari lembaga adat kerajaan kecil seperti Raja Gunung Sahilan di Kampar dan Raja Huristak di Padang Lawas, hingga lembaga kerajaan baru seperti Praja Mangkualaman—pecahan dari Praja Pakualam, yang kepala prajanya menjabat sebagai wakil gubernur Yogyakarta—dan Diradja Air Tiris—mendeklarasikan diri tahun 2020.

nomor 5 tahun 1960 adalah bentuk ketidakadilan pemerintah terhadap masyarakat adat, dan dengan dibukanya celah pengelolaan tanah swapraja melalui PP no. 18 tahun 2021—implementasi pertemuan raja dan sultan seluruh Indonesia tadi—maka kepala masyarakat hukum adat—termasuk raja dan sultan—dapat mengklaim tanah-tanah bekas swapraja untuk dikelola demi kesejahteraan masyarakat adat.<sup>72</sup>

Pada 14 Mei 2022, Syarif Nazir menabalkan diri sebagai sultan Siak yang baru. Penabalan Syarif Nazir dilakukan di rumah makan Pondok Patin H.M. Yunus. Dengan pakaian kebesaran hitam dan dinaungi payung kuning, Syarif Nazir diambil sumpahnya di hadapan (keturunan) Datuk Empat Suku, kemudian duduk di sebuah “singgasana” sementara tamu yang lain duduk di lantai. Rekaman Nobat Terengganu mengiringi acara tersebut. Setelah itu, ia memberi sepatah kata mengenai upacara ini, lalu ditutup dengan doa dan makan bersama.<sup>73</sup>



<sup>72</sup> Simposium LKPASI terbaru dilaksanakan pada 3-6 September 2024 di Balikpapan, lihat <https://www.youtube.com/live/2yIsulBuYM4?si=VqV4LcLjsPMIOoFM>, diakses tanggal 17 Februari 2024.

<sup>73</sup> Prosesi penobatan Syarif Nazir di Rumah Makan Pondok Patin H.M. Yunus dapat dilihat pada pranala berikut, “Bukan Main Gagahnya Sultan Siak ke 13, inilah Acara Prosesi Penabalan Sultan Siak yg ke-13”, [https://www.youtube.com/watch?v=sewpjMwPvLc&list=PL3LEgU\\_NaAxJC-hj5HKHdVtfnqDkVXR13&index=12&t=2481s](https://www.youtube.com/watch?v=sewpjMwPvLc&list=PL3LEgU_NaAxJC-hj5HKHdVtfnqDkVXR13&index=12&t=2481s), diakses tanggal 29 Juli 2023.

**Gambar 22**  
**Proses Penabalan Syarif Nazir**



**Keterangan** : Kiri atas, proses penabalan Syarif Nazir, dengan membaca ikrar; kanan atas, perwakilan Datuk Empat Suku menyentuhkan keris ke pundak sultan; bawah kiri, sultan duduk di singgasana dan bersiap menerima “benda pusaka”; kanan bawah, “titah” oleh Syarif Nazir.

**Sumber** : YouTube, Bukan Main Gagahnya Sultan Siak ke 13, inilah Acara Prosesi Penabalan Sultan Siak yg ke-13, <https://www.youtube.com/watch?v=sewpiMwPvLc&t=1961s>, diakses tanggal 17 Februari 2024.

Pada 13 Juni, Syarif Nazir mengunjungi Selatpanjang dan disambut dengan meriah oleh Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil. Setelah arak-arakan sultan yang menaiki becak, bupati menyambut sang sultan di depan kantor bupati Kepulauan Meranti, dilanjutkan dengan kata sambutan dan Tepung Tawar. Syarif Nazir menganugerahkan gelar Datuk Tuah Amanah Jasa Negeri<sup>74</sup> dan sebilah keris kepada bupati tersebut. Muhammad

<sup>74</sup> “Bupati Adil Terima Gelar Datuk Tuah Amanah Jasa Negeri dari Sultan Siak Sri Indrapura”, <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/640431/bupati-adil-terima-gelar-datuk-tuah-amanah-jasa-negeri-dari-sultan-siak-sri-indrapura>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

Adil menyatakan, “Sebagai orang Meranti, kita harus bersyukur putra asli Meranti telah ditetapkan menjadi Sultan Siak ke XIII yang ditabalkan di Pekanbaru”.<sup>75</sup> Syarif Nazir bahkan diundang menghadiri Sidang Paripurna HUT Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 19 Desember.<sup>76</sup>

**Gambar 23**

**Kunjungan Syarif Nazir ke Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti**



Keterangan : Kiri: Syarif Nazir disambut oleh Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, kanan: Syarif Nazir dan Muhammad Adil beserta rombongan menziarahi makam salah seorang keturunan sultan Siak.

Sumber : targetriau.com, <https://www.targetriau.com/2022/06/kembali-ke-tanah-kelahiran-bupati-adil-sambut-sultan-siak-ke-xiii.html>, diakses tanggal 17 Februari 2025.

Syarif Nazir bergabung ke dalam Lembaga Komunikasi Perangkat

Adat Seluruh Indonesia (LKPASI), satu dari sekian banyak lembaga tandingan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN). LKPASI saat ini sedang memperjuangkan tanah ulayat agar dapat dikelola oleh “perangkat adat”, termasuk sultan, raja, datuk, penglingsir, dan sebagainya. Setiap tahun LKPASI menyelenggarakan semacam “workshop” untuk membahas

<sup>75</sup> “” <https://riaupos.jawapos.com/kepulauan-meranti/2253557081/sultan-siak-xiii-serahkan-sebilah-keris-kepada-bupati-meranti-h-adil>

<sup>76</sup> “Hadiri HUT Ke-14 Kabupaten Kepulauan Meranti, Bupati Ucapkan Selamat”, <https://prokopim.bengkaliskab.go.id/web/cetakberita/14091>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

hal ini. Syarif Nazir pada tahun 2023 mengikuti “workshop” yang diadakan di Jakarta. Ia juga bersuara agar Swapraja Siak ditegakkan kembali dan Istana Siak dikembalikan kepada “yang punya”, yakni pewaris kesultanan Siak.

**Gambar 24**  
**Syarif Nazir dalam Simposium LKPASI 2023**



Keterangan : Syarif Nazir (paling tengah) dalam simposium LKPASI 2023, dihadiri oleh staf presiden Ali Mochtar Ngabalin

Sumber : Tinta Riau, <https://www.tintariau.com/hut-lkpasi-ketiga-di-jakarta-tengku-nazir-tampil-sebagai-narasumber-seminar.html>, diakses tanggal 17 Februari 2025

#### 4.5. Kontroversi Klaim Sultan Siak

Ada beberapa faktor yang menimbulkan kontroversi dalam kemunculan sultan Siak yang baru. Pertama, calon penerus yang jelas sudah tidak bisa dipastikan lagi. Seandainya ada seorang putra kandung dari Syarif Kasim II, atau pihak kerabat sultan Siak dan lembaga adat di Siak menerima Tengku Long Putih dan keturunannya sebagai penerus takhta, hal ini mungkin tidak akan terjadi. Di sisi lain, keturunan yang potensial (dari Tengku Bagus atau lainnya) terlalu banyak dan

menyebarkan di berbagai tempat di Riau. Pihak LAMR (Provinsi Riau dan Kabupaten Siak) dan Kekerabatan Resam menyatakan bahwa semua Tengku dari keturunan Syarif Kasim I mempunyai potensi (dengan kata lain, berhak) menjadi sultan Siak.<sup>77</sup> Namun, dalam kasus Kekerabatan Resam, pemilihan Tengku Muchtar Anum yang merupakan keturunan Syarif Ismail malah menambah kemungkinan potensi dari keturunan sultan lainnya, meskipun dapat juga dilihat bahwa pilihan tersebut dianggap netral dibandingkan memilih keturunan Tengku Bagus atau yang lain.

Kedua, lembaga yang ada dan dapat bertanggung jawab untuk mendirikan kembali Kesultanan Siak Sri Indrapura tidak kuat. Syarif Nazir tidak membentuk lembaga apapun dan bertindak atas namanya sendiri. Kalaupun ia dapat membuat acara dengan seorang bupati, yang demikian menampakkan dukungan pemerintah, hal ini kandas karena Muhammad Adil kemudian ditangkap atas tindak pidana korupsi.<sup>78</sup> KKSSI bentukan Syarif Ridwan sejauh ini hanyalah sebuah lembaga dengan sedikit program yang tampak, dan memiliki lobi yang kurang kuat. Meski mereka dapat mengundang pejabat seperti komandan militer, seolah-olah ini adalah sebuah lobi, nyatanya tidak tampak aksi lebih lanjut. Kekerabatan Resam yang merupakan lembaga resmi dan diakui oleh pemerintah Kabupaten Siak sebagai perwakilan resmi Kesultanan Siak ternyata juga tidak memiliki lobi yang kuat. Terakhir Kekerabatan Resam menunjukkan “aksi” kekuatannya adalah ketika pemerintah pusat berencana mengelola tambang minyak Blok Rokan yang

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Budi Rahmad, 4 Desember 2024; Wawancara dengan Tengku Sufyan Tsauri, 5 Desember 2024.

<sup>78</sup> “KPK Tetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil Tersangka TPPU” <https://www.antaraneews.com/berita/4031718/kpk-tetapkan-bupati-kepulauan-meranti-muhammad-adil-tersangka-tppu>, diakses tanggal 18 Februari 2025.

sebelumnya dikelola Chevron. Kekerabatan Resam menganggap bahwa wilayah itu dulunya termasuk bagian dari Kesultanan Siak, sehingga mereka melakukan jajak pendapat dengan DPR di Jakarta pada 9 Februari 2021.<sup>79</sup> Tidak ada tindak lanjut setelahnya.

Ketiga, baik dari Kekerabatan Resam maupun pengklaim sultan Siak tidak terlalu mengetahui seluk beluk Kesultanan Siak, baik secara umum maupun detail. Banyak pihak menunjukkan bahwa *Bab al-Qawaid* menyediakan prosedur pengangkatan seorang sultan, meskipun tidak ada satu katapun yang menyinggung suksesi takhta dalam kitab tersebut. Bahkan, sejarah Siak menunjukkan keragaman suksesi takhta, mulai dari jalan damai dengan penunjukan Raja Muda hingga pertikaian antar pangeran dengan dukungan pembesar kerajaan. Namun, sebagian besar suksesi takhta Siak dicapai dengan kesepakatan Datuk Empat Suku. Inilah yang diingat-ingat oleh pengklaim sultan baru, sehingga masing-masing mereka memiliki Datuk Empat Suku sendiri. Datuk-datuk tersebut juga mengklaim dirinya berasal dari keturunan Datuk Empat Suku yang lama, tetapi sebenarnya hal ini lebih sulit dilacak lagi, kecuali ada silsilah resmi dan cara penentuan Datuk Empat Suku. Prosedur inipun tidak pernah tercatat dalam sejarah Siak, dan organisasi yang menghimpun keturunan Datuk Empat Suku tidak pernah dibentuk.

Para pengklaim sultan Siak seringkali mengabaikan aspek lain dari sejarah Kesultanan Siak sendiri. Dalam hal simbolisme dan adat, misalnya, mereka

---

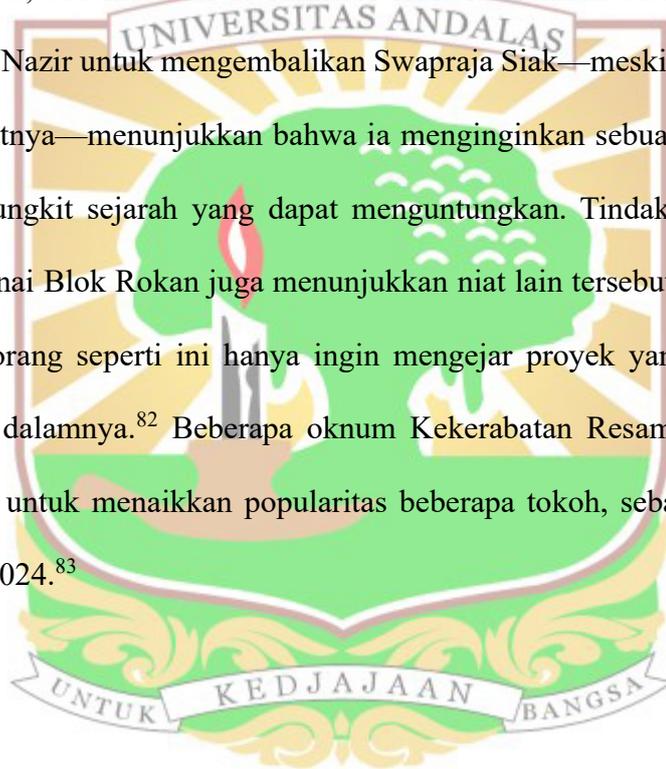
<sup>79</sup> “Keluarga Kesultanan Siak Sri Indrapura Utus Perwakilan Rapat Blok Rokan di DPR RI”, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/64967/2021/02/08/keluarga-kesultanan-siak-sri-indrapura-utus-perwakilan-rapat-blok-rokan-di-dpr-ri#sthash.q12Q5wsg.dpbs>, diakses tanggal 18 Februari 2025.

menyesuaikan tradisi masyarakat Melayu ke dalam adat penabalan, atau terjatuh dalam inovasi. Dalam penobatan Syarif Ridwan, adat khusus yang dipakai adalah Tepung Tawar, tradisi yang biasa dilakukan ketika menyambut tamu atau dalam pernikahan. Alih-alih menghadirkan Datuk Empat Suku yang dahulu biasa terlibat dalam penentuan penerus takhta Siak, ia mengundang banyak datuk dari berbagai tempat yang ternaung dalam KKSSI. Penabalan Syarif Nazir lebih fatal: meskipun mungkin mengetahui bahwa musik Nobat mengesahkan pertabalan raja, ia memakai rekaman suara Nobat Terengganu sebagaimana penabalan Tuanku Abdullah dari Pahang sebagai Yang Dipertuan Agong 2019; penabalnya sendiri dilaksanakan di sebuah rumah makan, yang tidak ada sangkut pautnya dengan warisan Kesultanan Siak.

Kalaupun aspek-aspek seperti itu telah diketahui, pengklaim sultan belum bisa merumuskan apa yang akan dilakukan seorang sultan dalam kapasitasnya. Misalnya, apabila kapasitasnya sebagai pelestari adat dan budaya, peran tersebut telah diambil LAMR Siak, sedangkan sebagai pelestari sejarah, peran itu juga telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Siak. Bagi Syarif Nazir, perannya saat ini adalah memperjuangkan Swapraja Siak, tetapi masyarakat adat untuk mewujudkan swapraja tersebut tidak ada. Mencampurkan swapraja dengan tanah ulayat sendiri sudah rancu. Menurut undang-undang dan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, swapraja adalah sebuah daerah yang sifatnya demokratis, kecuali bahwa kepala daerahnya adalah raja atau sejenisnya yang kekuasaannya hanya

terletak pada istana dan tradisinya,<sup>80</sup> sedangkan tanah ulayat adalah tanah yang dikelola oleh masyarakat hukum adat yang masih ada, dan pengelolaannya tidak boleh bertentangan dengan hukum negara.<sup>81</sup>

Keempat, ada niat lain di balik restorasi Kesultanan Siak Sri Indrapura. Ambisi Syarif Nazir untuk mengembalikan Swapraja Siak—meskipun tidak terlalu paham hakekatnya—menunjukkan bahwa ia menginginkan sebuah kuasa tertentu dengan mengungkit sejarah yang dapat menguntungkan. Tindakan Kekerabatan Resam mengenai Blok Rokan juga menunjukkan niat lain tersebut. Bagi beberapa pihak, orang-orang seperti ini hanya ingin mengejar proyek yang mungkin ada pendanaan di dalamnya.<sup>82</sup> Beberapa oknum Kekerabatan Resam memanfaatkan posisi mereka untuk menaikkan popularitas beberapa tokoh, sebagaimana dalam Pilkada Siak 2024.<sup>83</sup>



<sup>80</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 1957, penjelasan pasal 2.

<sup>81</sup> Undang-undang nomor 5 tahun 1960, penjelasan umum II.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Budi Rahmad, 4 Desember 2024; Wawancara dengan Tengku Sufyan Tsauri, 5 Desember 2024.

<sup>83</sup> “Bagi Kekerabatan Resam Kesultanan Siak Alfredri Sudah Banyak Berbuat”, <https://riaupos.jawapos.com/siak/2255189933/bagi-kekerabatan-resam-kesultanan-siak-alfedri-sudah-banyak-berbuat>, diakses tanggal 19 Januari 2024; “Kekerabatan Resam Kesultanan Siak Akui Alfredri Sudah Banyak Berbuat Untuk Daerah”, <https://riaubernas.com/news/detail/13493/kekerabatan-resam-kesultanan-siak-akui-alfedri-sudah-banyak-berbuat-untuk-daerah>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

## BAB V

### KESIMPULAN

Kesultanan Siak Sri Indrapura, yang berdiri sejak tahun 1723 hingga 1858, memiliki identitas unik yang mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan politik di wilayahnya selama masa kemerdekaan. Kesultanan ini didirikan oleh Raja Kecil, seorang tokoh yang berasal dari Minangkabau dan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan tatanan politik serta kebudayaan di Siak.

Pemerintahan Kesultanan Siak secara umum menunjukkan dua corak utama yang mencerminkan latar belakang para sultan yang memerintah. Pertama, corak pemerintahan Melayu terlihat pada masa kekuasaan Sultan Mahmud Syah, Sultan Ismail, dan Sultan Yahya. Pada periode ini, nilai-nilai dan tradisi Melayu sangat menonjol dalam tata kelola pemerintahan, simbolisme adat, serta hubungan masyarakat. Kedua, corak perantauan Minangkabau atau Kacu terlihat selama pemerintahan Sultan Alamuddin dan Sultan Muhammad Ali. Pengaruh budaya dan jaringan perantauan Minangkabau membawa dinamika baru dalam sistem politik serta interaksi ekonomi di wilayah Kesultanan Siak.

Dinasti Syahabuddin yang memerintah di kemudian hari tetap mempertahankan sistem pemerintahan yang sudah ada, sekaligus menjaga kesinambungan dengan tradisi politik dan budaya yang diwariskan para pendahulunya. Hal ini menunjukkan upaya konsisten untuk menjaga stabilitas politik serta identitas budaya Kesultanan Siak di tengah berbagai tantangan.

Dari sisi sosial, masyarakat Siak terbagi ke dalam beberapa kelompok utama. Selain masyarakat lokal Siak, terdapat pula komunitas perantauan Minangkabau dan Johor yang memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Di samping itu, terdapat kelompok Timur Asing serta komunitas lain yang turut mewarnai keberagaman masyarakat di wilayah ini.

Secara simbolis, Kesultanan Siak cenderung kuat mempertahankan nilai-nilai adat Melayu. Symbolisme adat Melayu ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upacara kenegaraan, tradisi hukum, serta praktik sosial masyarakat. Identitas Melayu yang kuat ini menjadi salah satu elemen penting yang menjaga persatuan dan kesinambungan Kesultanan Siak selama masa pemerintahannya.

Ketika Kesultanan Siak berada di bawah pengaruh Belanda, terjadi perubahan signifikan dalam corak pemerintahan dan simbolisme budaya. Sistem pemerintahan yang sebelumnya berkembang mulai menerima intervensi dari Belanda, meskipun Kesultanan tetap berupaya mempertahankan beberapa elemen otonomi. Sempitnya ruang kekuasaan membuat para sultan mencari cara untuk tetap menunjukkan eksistensinya.

Salah satu contoh terbaik adalah Sultan Syarif Hasyim, yang melakukan modernisasi kerajaan dengan terinspirasi dari kondisi negeri-negeri Melayu seperti Johor serta pengalamannya selama berada di Belanda. Dalam upaya memperkuat legitimasi dan status kerajaan, Syarif Hasyim mengembangkan simbolisme yang merupakan campuran antara tradisi Eropa dan Melayu. Hal ini menjadikannya

tampil sebagai sosok raja modern yang seolah-olah setara dengan pemerintah kolonial Belanda. Salah satu pencapaian pentingnya adalah pembangunan Bab al-Qawaid, sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa Siak memiliki konstitusi sendiri.

Di sisi lain, Sultan Syarif Kasim II lebih fokus pada pengembangan pendidikan dan tidak menunjukkan sikap pro-Belanda yang kuat. Beliau cermat dalam membaca setiap situasi politik yang dihadapinya, dengan tetap menjaga keseimbangan antara menjaga hubungan dengan Belanda dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Siak. Termasuk di antara kecermatannya adalah mengambil sikap kooperatif ketika Jepang menduduki wilayahnya serta mendukung Republik Indonesia saat Revolusi Kemerdekaan.

Sultan Syarif Kasim II sempat berupaya mengembalikan kekuasaannya melalui gagasan Swapraja Siak, yang diperjuangkannya sejak pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Meskipun telah berhasil mengumpulkan banyak tanda tangan dukungan, respons pemerintah pusat dan daerah tetap acuh tak acuh. Akibatnya, gerakan Swapraja Siak meredup, serupa dengan nasib swapraja-swapraja lainnya di Indonesia belasan tahun kemudian. Meskipun upaya tersebut gagal, identitas Siak sebagai wilayah dan kesultanan tidak pudar. Hal ini terlihat dari banyaknya kajian akademik mengenai Siak serta perkembangan signifikan ketika Kabupaten Siak terbentuk pada tahun 1998. Identitas sejarah Kesultanan Siak dimanfaatkan sebagai potensi untuk pengembangan pariwisata yang kaya akan nilai budaya dan sejarah.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura mengalami perubahan, baik dari segi bentuk maupun maknanya. Dari bentuk, Kesultanan Siak pada awalnya merupakan sebuah entitas monarki campuran Minang-Melayu di pesisir timur Sumatera, kemudian identitas kesultanan di masa kekuasaan Belanda telah dialihkan kepada simbolisme-simbolisme tertentu, karena kekuasaan sultan semakin terbatas. Ketika Kesultanan Siak tidak ada lagi, sisa-sisa peninggalannya menjadi modal bagi penyusunan identitas Kesultanan Siak, dengan interpretasi sesuai zaman penyusunannya. Pada awalnya, identitas Kesultanan Siak digunakan sebagai penunjang nasionalisme Indonesia di daerah Riau, kemudian berkembang lagi menjadi modal pariwisata sejarah dan budaya Kabupaten Siak.

Fenomena baru kemudian muncul dalam bentuk klaim-klaim terkait Kesultanan Siak. Hal ini dimulai begitu Kabupaten Siak mengembangkan pariwisata sejarah dan budaya, sekaligus membentuk citra Siak menggunakan peninggalan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Meskipun Lembaga Kekerabatan Resam Kesultanan Siak Sri Indrapura dibentuk secara tidak resmi pada tahun 2003, lembaga ini tidak pernah mengklaim kesultanan dan berusaha membuat kesan legitimasi peninggalan kesultanan untuk pemerintah daerah Kabupaten Siak. Sementara itu, beberapa orang yang mengaku keturunan sultan Siak mulai mengklaim dan membicarakan peninggalan kesultanan. Awalnya, klaim tersebut hanya berkaitan dengan pewarisan harta kesultanan. Namun, seiring waktu, klaim ini berkembang menjadi perebutan gelar sultan. Faktor-faktor seperti garis suksesi yang tidak jelas, ketidaksetujuan di antara keturunan yang bercabang, serta motivasi

tertentu menyebabkan upaya pendirian kembali Kesultanan Siak menimbulkan kontroversi.

Klaim pewaris dan perebutan gelar tersebut menunjukkan adanya dinamika yang kompleks di sekitar identitas Kesultanan Siak pada masa modern. Beberapa pihak melihat upaya ini sebagai bentuk pelestarian sejarah dan budaya, sementara pihak lain memandangnya sebagai ambisi politik atau upaya pribadi yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Klaim tentang sultan Siak ke-13 sampai tesis ini ditulis masih merupakan perkara kontroversial dan belum selesai. Terlepas dari berbagai kontroversi yang muncul, fenomena tersebut mencerminkan betapa kuatnya nilai simbolis dan sejarah Kesultanan Siak dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun demikian, fenomena sultan Siak baru ini harus dianggap sebagai efek samping alih-alih sebuah konsekuensi dari otonomi daerah pasca Reformasi. Hal ini disebabkan para aktor, yang belum pernah atau jarang terdengar oleh publik, baru muncul ke permukaan takkala Kabupaten Siak telah memapankan dan melestarikan identitas Kesultanan Siak yang telah diarahkan kepada aspek budaya Melayu kabupaten tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Primer dan Arsip

- Anderson, John. 1826. *Mission to the East Coast of Sumatra, in 1823*. London: Cadell.
- Anonim. 1955. *Pendjelasan atas usul untuk membentuk wilayah Kabupaten2 Kampar, Bengkalis, Indragiri dan Kepulauan Riau mendjadi daerah Swantantra (Otonomi) tingkat pertama*. Pekanbaru: Panitia Pembentukan Provinsi Riau.
- Bernard, Capitaine. 1904. *A travers Sumatra de Batavia à Atjeh*. Paris: Librairie Hachette Et Cie.
- Djawatan Kepolisian Negara, *Perihal Panitya Swapradja Siak*, Nomor A.13/3/18-53, 30 Januari 1953. Jakarta: Djawatan Kepolisian Negara bagian DPKN.
- Djawatan Kepolisian Negara. 1953. *Perihal Gerakan Swapradja Siak*. Nomor B.2923/31/18-53, 5 Desember 1953. Jakarta: Kepolisian Negara bagian DPKN.
- Kementerian Sekretaris Negara, *Daftar Warganegara Republik Indonesia yang Mendapat Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Tahun 1959 s.d. 2003* (laporan Sekretariat Negara Republik Indonesia).
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat*.
- Panitia Seminar Sejarah Kepahlawanan Bangsa Indonesia di Riau. 1988. *Resume dan Hasil Rumusan Seminar Sejarah Kepahlawanan Bangsa Indonesia di Riau*. Medan, 30-31 Mei 1988.
- Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië*, 1874. Batavia: Landsdrukkerij.
- Undang-undang Darurat nomor 22 tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri*.
- Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia*.
- Undang-undang nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah*

*Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang.*

### **Koran dan Majalah Sezaman**

- “’s Hertogenbosch, 19 Junij”, *De Noord-Brabanter*, 23 Juni 1857.
- “Ahli Waris Kerajaan Siak Kecewa”, *Dumai Pos*, 18 Maret 2009
- “Amsterdam, Vrijdag 19 Junij”, *Algemeen Handelsblad*, 20 Juni 1857.
- “Amsterdam”, *De Grondwet*, 28 Juni 1898.
- “Antara Dua Istana”, *Berita Harian*, 13 April 1992.
- “Binnenland”, *Arnhemsche Courant*, 28 Juni 1898
- “Blocknotes”, *Deli Courant*, 2 Agustus 1890
- “Contract met den Sulthan van Siak en onderhoorigheden”, *Tweede Kamer, Bijlagen, 59ste vel.*, tanpa tahun
- “De Inhuldigingsplechtigheid” *Het vaderland*, 10 Agustus 1898
- “De Mijnbouw Mij. Stannum””, *Sumatra-bode*, 27 Juli 1926.
- “De nieuw politiek contracten”, *De Sumatera Post*, 28 Agustus 1907.
- “De Prinsen van Kutei”, *De Locomotief*, 1 Juni 1898.
- “De Sultan van Siak †”, *De Sumatra Post*, 2 April 1908
- “De Sultan van Siak in Amsterdam”, *Het Nieuws van den dag*, 16 Juni 1898
- “De Sultan van Siak”, *De Sumatra Post*, 3 Januari 1899.
- “De Sultan van Siak”, *Te Tijd*, 15 Juni 1898
- “De Troonsopvolging in Siak”, *Deli Courant*, 30 Maret 1915
- “Death of Sultan of Siak”, *The Strait Times*, 2 April 1908.
- “Een bezoek bij den Sultan van Siak”, *Insulinde*, 21 Juni 1898
- “Een bladzijde geschiedenis” *Het nieuws van den daag voor Nederlandsch-indie*, 23 September 1924

- “Een Conflict in Siak?”, *Bataviaasch nieuwsblad*, 22 Agustus 1906.
- “Een piëteitsdaad”, *De Preanger-bode*, 7 September 1908.
- “Gemengd Nieuws uit Binnen- en Buitenland” *Arnhemsche Courant*, 31 Juli 1907
- “In a sack for sale, a Sultan’s throne”, *The Straits Times*, 26 September 1967.
- “Istana Siak di Riau”, *Waspada*, 18 Oktober 1987.
- “Journalist Mengembara: Siak”. *Bintang Hindia*, 4 Mei 1929.
- “Kepariwisataan Provinsi Riau Tinggal Petik Durian Runtuh”, *Harian Neraca*, 31 Maret 1989.
- “Laatste berichten”, *Nieuwe Groninger courant*, 10 Mei 1898.
- “Nasib Peninggalan Para Sultan”, *Tempo*, 31 Juli 1971, hlm. 49.
- “New Sultan of Siak: Youthful Crown Prince Proclaimed Ruler”, *The Straits Budget*, 9 Juli 1908
- “Petroleum in Siak”, *Het Vaderland*, 28 Agustus 1901
- “Proclamatie”, *Algemeen Handelsblad*, 14 Mei 1874
- “Provinciale Staten”, *Het Vaderland*, 31 Mei 1898.
- “Riouw”, *Java Bode*, 12 April 1865
- “Siak”, *De Nieuwe Courant*, 1 Agustus 1908.
- “Takhta Sultan Siak di Pasar”, *Berita Harian*, 26 September 1967.
- “The Sultan of Siak”, *Pinang Gazette and Straits Chronicle*, 25 Februari 1890
- “Uit het Koloniaal Verslag van 1890”, *De Locomotief*, 25 Oktober 1890.
- “Van Tempo Doeloe”, *De Sumatera Post*, 9 Desember 1911.
- Bataviaasch Nieuwsblad*, 16 November 1898.
- Bataviaasch Nieuwsblad*, 21 Juli 1898.
- Berita Yuda*, 8 Mei 1984.
- De Morgenpost*, 6 September 1898
- De Sumatra Post*, 13 Januari 1912.

*De Sumatra post*, 7 November 1918.

*Delftsche Courant*, 9 September 1898.

*Deli Courant*, 10 Juni 1920.

*Deli Courant*, 30 Juli 1926.

*Java Bode*, 10 November 1890.

*Javaasche Courant*, 22 Juli 1857

*Leeuwarder Courant*, 7 September 1898;

*Metro Riau*, 3 Januari 2016

*Nieuwe Groninger Courant*, 9 September 1898

*The Noord Brabanter*, 7 September 1898.

The Strait Times, 2 September 1908.

*The Straits Times*, 4 April 1908.

### Buku

A. Samad Ahmad. 2008. *Sulalatus Salatin: Sejarah Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, hlm. 510-512.

Abel Tasman. 2001. *Wan Ghalib untuk Riau: Seutas Biografi*. Pekanbaru: Yayasan Pustaka.

Ahmad Yusuf *et al.* 2004. *Sejarah Perjuangan Rakyat Riau 1942-1958*. Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau.

Amir Luthfi. 1991. *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak 1901-1942*. Pekanbaru: Suska Press, hlm. 66-67.

Andaya, B. W. 1997. "Recreating a Vision: Daratan and Kepulauan in Historical Context", dalam C. Chou & W. Derks (editor), *Riau in Transition*. Leiden: KITLV.

Andaya, L. B. 2019. *Selat Malaka: Sejarah Perdagangan dan Etnisitas*. Depok: Komunitas Bambu.



- Appiah, K. A. 2018. *The Lies that Bind: Rethinking Identity: Creed, Country, Colour, Class, Culture*. London-New York: Liveright Publishing Corporation.
- Blom, H., Laursen, J. C. & Simonutti, L. 2007. "Introduction", dalam H. Blom, J. C. Laursen, & L. Simonutti (editor), *Monarchisms in the Age of Enlightenment: Liberty, Patriotism, and the Common Good*. Toronto: University of Toronto Press, hlm. 3-15.
- Borgdanon, V. 1995. *The Monarchy and the Constitution*. New York: Clarendon Press.
- Collier, M. J. 2015. "Cultural Identity and Intercultural Communication", dalam L. A. Samovar, R. E. Porter, E. R. McDaniel, & C. S. Roy (editor), *Intercultural Communication: A Reader*, 14th ed. Boston: Cengage Learning.
- Cribb, R. & Kahin, A. 2004. *Historical Dictionary of Indonesia*. Oxford: Scarecrow Press, hlm. 462.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1979. *Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai*. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah.
- Ellya Roza (editor). 2013. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Kabupaten Kepulauan Meranti*. Pekanbaru: Yayasan Pustaka Pekanbaru.
- Ellya Roza. 2020. *Kerajaan Siak 1723-1908: Perspektif Sejarah dan Sosiobudaya*. Depok: Rajawali Press, hlm. 126-128.
- Geertz, C. 1980. *Negara: The Theatre State in Nineteenth-century Bali*. West Sussex: Princeton University Press.
- Gottschalk, L. 1969. *Understanding History: A Primer of Historical Method*, 2nd edn. New York: Alfred A. Knopf.
- Hall, S. 1990. "Cultural Identity and Diaspora", dalam J. Rutherford (editor), *Identity: Community, Culture, Difference*. London: Lawrence & Wishart, hlm. 223.
- Van Anrooij, H. A. Hijmans 2016. *Het Rijk van Siak* (diterjemahkan oleh Wielala, N. A. Zulkifli & K. Alimin). Pekanbaru: Asa Riau, hlm. 15-18.
- Hopper, R. H. 2016. *Seribu Tahun Sumatera Tengah: Sejarah Manusia, Rempah, Timah dan Emas Hitam*. Depok: Komunitas Bambu.
- Irwin, G. 1955. *Nineteenth-century Borneo: A Study in Diplomatic Rivalry*. Singapura: National Library Board Singapore.

- Kathirithamby-Wells, J. 2000. "Siak and its Changing Strategies for Survival, c. 1700-1870", dalam A. Reid (ed.), *The Last Stand of Asian Autonomies: Responses to Modernity in the Diverse States of Southeast Asia and Korea, 1750-1900*. New York: St. Martin's Press.
- Matheson, V. (editor). 1997. *Tuhfat al-Nafis: Raja Haji Ahmad dan Raja Ali Haji*. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti, Sdn. Bhd.
- Netscher, E. 2002. *Belanda di Johor dan Siak* (diterjemahkan oleh Wan Ghalib). Pekanbaru: Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan Yayasan Arkeologi dan Sejarah "Bina Pustaka".
- Npriyasman. 2015. "Peranan Institusi Raja pada masa Kemerdekaan Indonesia", dalam Ni Made Diana Erfiani, *Ragam Wacana Bahasa, Sastra, dan Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- O.K. Nizami Jamil et al. 2011. *Sejarah Kerajaan Siak*. Pekanbaru: Sukabina.
- O.K. Nizami Jamil. 2016. *Siak Negeri Pengabdianku: Biografi Orang Kaya Muhamad Djamil, Sekretaris Pribadi Sultan Syarif Kasim II*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Poeze, H., Dijk, C. & van der Meulen, I. 2008. *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda, 1600-1950*. Jakarta: Gramedia.
- Reid, A. 1979. *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Tenas Effendy & Nahar Effendy. 1973. *Lintasan Sejarah Siak Sri Indrapura*. Pekanbaru: Badan Pembina Kesenian Daerah Propinsi Riau.
- Tengku Mira Sinar. 2016. *Tengku Luckman Sinar: Melayu Nusantara dan Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, hlm. 104-105.
- Tuah Hasrun Saily. 2011. *Sejarah Pembentukan Kabupaten Siak*. Siak: Komite Perjuangan Pembentukan Kabupaten Siak.
- Woodacre, E. 2019. "Understanding the Mechanisms of Monarchy", dalam E. Woodacre et al. (editor), *The Routledge History of Monarchy*. New York: Routledge.

### **Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

- Aidil Kurniawan. 2017. "Hubungan Perkembangan Kota Siak Sri Indrapura dengan Kawasan Cagar Budaya Istana Asserayah Al-Hasyimiah". *Skripsi*.

Yogyakarta: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

Goudie, Donald J. 1976. A “Critical Edition of The Syair Perang Siak, With a Consideration of its Literary and Historical Significance.” *Tesis*. Universitas London. dst

Nopriyasman. 2011. Politik Representasi Istana Basa Pagaruyung sebagai Identitas Minangkabau di Sumatera Barat. *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Shelvy Nujuliyani. 2021. Suksesi dan Konflik (Studi atas Jumenengan Sultan Sepuh XV Keraton Kasepuhan Cirebon pada Tahun 2020). *Skripsi*. Jakarta: Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Sirullah Bin Syaiful Syuriansyah. Sejarah Kesultanan Kadriah Pontianak 1778 M-2017 M. *Skripsi*. Surabaya: Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Sundström, Peter. 2014. “Emergence of Monarchies? A Comparative Study of Three East European Countries”. *Tesis*. Örebro: School of Humanities, Education and Social Sciences Örebro University. hlm. 50-51.

### Artikel Ilmiah

Abdul Harits Ritonga & Siti Fatimah. 2020. “Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Kesultanan Siak Sri Inderapura sebagai Objek Wisata (2006-2019)”, *Kronologi*, Vol. 2, No. 4.

Ahmad Effendi. 2022. “Melayu Islam Beraja: Ideologi Negara Brunei Darussalam”, *Tafhim Al-Ilmi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Vol. 13, No. 2, Maret.

Barnard, Timothy P. 2001, ‘Rules for Rulers: Obscure Texts, Authority, and Policing in Two Malay States’, *Journal of Southeast Asian Studies*, vol. 32, no. 2.

De Sauvigny, G.B. 1981, ‘The Bourbon Restoration: One Century of French Historiography’, *French Historical Studies*, vol. 12, no. 1 (Spring), pp. 41-67.

Desi Purnama Indah, Isjoni & Kamaruddin. 2017. “Pemerintahan Sultan Syarif Harun di Kerajaan Pelalawan Tahun 1940-1945”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, No. 2.

- Faes, J. 1822. "Het Rijk Pelalawan". *Tijdschrift Voor Indische Land- En Volkenkunde, Uitgegeven Door Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*.
- Fadli Afriandi & Fachriza Ariyadi. 2020. "Efek Domino Pasca Dibangkitkannya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura", *Reformasi*, Vol. 10, No. 2.
- Gusti Asnan. 2008. "Pusat-Pinggiran Dunia Melayu Nusantara: Dahulu dan Sekarang", *Sosiohumanika*, Vol. 1, No. 1.
- Habiburrahman. 2016. "Legalitas Kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III", *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni.
- Hakimul Ikhwan & Fachry Aidulsyah. 2020. "Sultanates and the Making of Nationhood in Indonesia and Malaysia", *Asian Journal of Social Science*, No. 48, hlm. 339-352.
- I Putu Gede Suwitha. 2019. "Wacana "Kerajaan Majapahit Bali": Dinamika Puri dalam Pusaran Politik Identitas Kontemporer", *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 4, No. 1, hlm. 8-12.
- Laleye, O.M. & Ayeni, V. 1993, "On the Politics of Traditional Rulership", *International Journal of Politics, Culture, and Society*, vol. 6, no. 4 (Summer).
- Moh Abdul Hakim *et al.* 2015. "Monarchism, National Identity and Social Representations of History in Indonesia: Intersections of the Local and National in the Sultanates of Yogyakarta and Surakarta", *Asian Journal of Social Psychology*, September.
- Mohammad Syawaludin, M. Sirajudin Fikri & Yulion Zalpa. 2019. "Tradisi Politik Melayu: Analisis Pengangkatan dan Pergantian Kekuasaan di Kesultanan Palembang Darussalam", *Society*, Vol. 7, No. 2, hlm. 243-244.
- Mohammad Yusoff Hashim. 1988. *Tradisi Persejarah di dalam Hikayat Siak atau Sejarah Raja-Raja Melayu: di antara Fakta dan Mitos*, *Sejarah: Jurnal Jabatan Sejarah*, No. 1.
- Mohammad Yusoff Hashim. 1995. "'Daulat" dalam Tradisi Budaya dan Politik Kesultanan Melayu Abad ke-15 dan Awal Abad ke-16: Antara Mitos dan Realiti." *Sejarah*, Vol. 3, No. 3.
- Mustafa Mansur & Rusli M. Said. 2018. "Dinamika Sosial-Politik Kesultanan Jailolo (2002-2017)". *Jurnal Etnohistori*, Vol. V, No. 2.
- Rustam Hasim, Oktosiyanti MT Abdullah, dan Siti Rahia H. Umar. 2019. "Kebangkitan Kesultanan Ternate pada Era Reformasi 1998-2002." *Jurnal Rihlah*. Vol. 7, No. 2.

- Rustam Hasim, Syawal Abdulajid, dan Mohtar Kamisi. 2021. "A Sultan of Ternate, Mudaffar Sjah, and the Local Politics Consolidation During the New Order Era From 1966 to 1998." *Jurnal Ilmu Budaya*. Vol. 9, No. 2.
- Sellato, Bernard. 2015. "Sultans' Palaces and Museums in Indonesian Borneo: National Policies, Political Decentralization, Cultural Depatrimonization, Identity Relocalization, 1950-2010", *Archipel [Online]*, No. 89.
- Sumikawa, S. 1999, "The Meiji Restoration: Roots of Modern Japan", *Asia 163, Work Paper*, pp. 1-18.
- Suprayitno. 2023. "Acehnese Tombstones in Southeast Asia: Chronology and a Typology". *ISVS e-journal*, Vol. 10, Issue 11, hlm. 362.
- Suwardi Moh. Samin, Nur Muhammad & Said Mahmud Umar. 1970. "Peranan Keradjaan Siak dalam Sedjarah Indonesia". *Makalah Seminar Nasional Sejarah II di Yogyakarta*, 26-29 Agustus.
- Wee, Vivienne. 2002. "Ethno-nationalism in Process: Ethnicity, Atavism and Indigenism in Riau, Indonesia". *The Pacific Review*, vol. 15, issue 4.

### Media elektronik

- "As-Syarif Ridwan Abdul Jalil Abdurrahmansyah Tabalkan Pengurus KKSSI Inhil", <https://www.indragirione.com/2020/01/assyarif-ridwan-abdul-jalil-abdurrahmansyah-tabalkan-pengurus-kkssi-inhil>, diakses tanggal 19 Januari 2025.
- "Bagi Kekerabatan Resam Kesultanan Siak Alfedri Sudah Banyak Berbuat", <https://riaupos.jawapos.com/siak/2255189933/bagi-kekerabatan-resam-kesultanan-siak-alfedri-sudah-banyak-berbuat>, diakses tanggal 19 Januari 2024
- "Bersama Kepengurusan KKSSI, Korem 031/WB Akan Tetap Menjaga Budaya Melayu di Riau", <https://pilarbangsanews.com/2020/01/12/bersama-kepengurusan-kkssi-korem-031-wb-akan-tetap-menjaga-budaya-melayu-di-riau/>, diakses tanggal 19 Januari 2025.
- "Bukan Main Gagahnya Sultan Siak ke 13, inilah Acara Prosesi Penabalan Sultan Siak ke-13", [https://www.youtube.com/watch?v=sewpjMwPvLc&list=PL3LEgU\\_NaAxJC-hj5HKHdVtfnqDkVXRl3&index=12&t=2481s](https://www.youtube.com/watch?v=sewpjMwPvLc&list=PL3LEgU_NaAxJC-hj5HKHdVtfnqDkVXRl3&index=12&t=2481s), diakses tanggal 29 Juli 2023.
- "Bupati Adil Terima Gelar Datuk Tuah Amanah Jasa Negeri dari Sultan Siak Sri Indrapura", <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/640431/bupati->

adil-terima-gelar-datuk-tuah-amanah-jasa-negeri-dari-sultan-siak-sri-indrapura, diakses tanggal 19 Januari 2025.

- “Fakta Sejarah”,  
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=815341881896261&id=546890032074782&set=a.570616086368843>, diakses tanggal 15 Januari 2025.
- “Hadiri HUT Ke-14 Kabupaten Kepulauan Meranti, Bupati Ucapkan Selamat”,  
<https://prokopim.bengkaliskab.go.id/web/cetakberita/14091>, diakses tanggal 19 Januari 2025.
- “Kekerabatan Kesultanan Siak Sri Indrapura dan Rumah Aspirasi, Berbagi dan Peduli”,  
<https://centroriau.id/2021/05/08/kekerabatan-kesultanan-siak-sri-indrapura-dan-rumah-aspirasi-berbagi-dan-peduli/>, diakses tanggal 19 Januari 2025.
- “Kekerabatan Kesultanan Siak Sri Indrapura Wilayah Kecamatan Minas Resmi Dikukuhkan”,  
<https://web.archive.org/web/20240421021044/https://catatanriau.com/news/detail/10379/daerah/siak/kekerabatan-kesultanan-siak-sri-indrapura-wilayah-kecamatan-minas-resmi-dikukuhkan>, diakses tanggal 19 Januari 2025.
- “Kekerabatan Resam Kesultanan Siak Akui Alfredri Sudah Banyak Berbuat Untuk Daerah”,  
<https://riaubernas.com/news/detail/13493/kekerabatan-resam-kesultanan-siak-akui-alfedri-sudah-banyak-berbuat-untuk-daerah>, diakses tanggal 19 Januari 2025.
- “Keluarga Kesultanan Siak Sri Indrapura Utus Perwakilan Rapat Blok Rokan di DPR RI”,  
<https://www.cakaplah.com/berita/baca/64967/2021/02/08/keluarga-kesultanan-siak-sri-indrapura-utus-perwakilan-rapat-blok-rokan-di-dpr-ri#sthash.q12Q5wsg.dpbs>, diakses tanggal 18 Februari 2025.
- “Ketua DPRD Riau Terima Kunjungan Silaturahmi Pengurus Kekerabatan Kesultanan Siak Sri Indrapura”,  
<https://www.transriau.com/read-501-15400-2019-11-19-ketua-dprd-riau-terima-kunjungan-silahturahmi-pengurus-kekerabatan-kesultanan-siak-sri-indrapura.html>, diakses tanggal 19 Januari 2025.
- “KKSSI Deklarasikan Sembilan Poin Ikrar Kebulatan Tekad, Siap Bersinergi dengan Pemerintah”,  
<https://lamanriau.com/2021/04/26/kkssi-deklarasikan-9-poin-ikrar-kebulatan-tekad/>, diakses tanggal 19 Januari 2025.
- “KKSSI Rumat dan Bengkalis Telusuri Keberadaan Situs Makam Tua di Terkul Laut”,  
<https://www.riautrust.com/read-166490-kkssi-rumat-dan-bengkalis->

telusuri-keberadaan-situs-makam-tua-di-terkul-laut.html, diakses tanggal 19 Januari 2025.

“KKSSI: Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Modal Penting Wujudkan Indonesia Damai”, <https://pelitariau.com/berita/detail/21203/1>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

“KPK Tetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil Tersangka TPPU” <https://www.antaraneews.com/berita/4031718/kpk-tetapkan-bupati-kepulauan-meranti-muhammad-adil-tersangka-tppu>, diakses tanggal 18 Februari 2025.

“Kronologis Sultan Syarif Kasim Siak Ke XIII”, [https://www.youtube.com/watch?v=e\\_C0RHa2Kdg](https://www.youtube.com/watch?v=e_C0RHa2Kdg), diakses pada 15 Januari 2025.

“LOKAKARYA NASIONAL LKPASI - UNIVERSITAS MULIA” <https://www.youtube.com/live/2yIsulBuYM4?si=VqV4LcLjsPMIOoFM>, diakses tanggal 17 Februari 2024.

“MAJLIS PENGISTIHARAN KETURUNAN DAN BAIHAH TAAT SETIA” <https://www.facebook.com/media/set/?vanity=546890032074782&set=a.1113059972124449>, diakses pada 15 Januari 2025.

“Merawat Adat Leluhur, Presiden Mendukung Pelestarian Kerajaan dan Kesultanan Nusantara”, [https://www.setneg.go.id/baca/index/merawat\\_adat\\_leluhur\\_presiden\\_mendukung\\_pelestarian\\_kerajaan\\_dan\\_kesultanan\\_nusantara](https://www.setneg.go.id/baca/index/merawat_adat_leluhur_presiden_mendukung_pelestarian_kerajaan_dan_kesultanan_nusantara), diakses tanggal 17 Februari 2024.

“Penabalan Kekerabatan Kesultanan Siak Sri Indra Pura Kota Dumai Riau”, <https://www.mediahumaspolri.com/penabalan-kekerabatan-kesultanan-siak-sri-indra-pura-kota-dumai-riau.html>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

“Penguohan Penabalan KKSSI Kecamatan Bukit Batu”, [https://www.youtube.com/watch?v=T72S55WUXbA&list=PL3LEgU\\_NaAxJC-hj5HKHdVtfnqDkVXR13&index=14](https://www.youtube.com/watch?v=T72S55WUXbA&list=PL3LEgU_NaAxJC-hj5HKHdVtfnqDkVXR13&index=14), diakses tanggal 19 Januari 2025.

“Sebanyak 29 Datuk Memberi Tengku Ridwan Gelar Sebagai As-Syarif Ridwan Abdul Jalil Abdurrahman”, <https://medialokal.co/news/detail/7588/daerah/sebanyak-29-datuk--memberi-tengku-ridwan-gelar-sebagai--assyarif-ridwan-abdul-jalil--abdurrahman>, diakses tanggal 18 Januari 2025.

“Sultan ke XIII? Ini kata Komisi II DPRD Siak” <https://redaksiriau.co.id/berita/cetak/8599/sultan-ke-xiii?-ini-kata-komisi-ii-dprd-siak.html>, diakses tanggal 18 Januari 2025.

“Sultan Siak ke XIII, Ketua LAM Riau: Enggak Tahu”,  
<https://redaksiriau.co.id/berita/detail/8624/sultan-siak-ke-xiii,-ketua-lam-riau:-enggak-tahu.html>, diakses tanggal 18 Januari 2025.

“Sultan Siak Serahkan Keris kepada Bupati Meranti H. Adil”  
<https://riaupos.jawapos.com/kepulauan-meranti/2253557081/sultan-siak-xiii-serahkan-sebilah-keris-kepada-bupati-meranti-h-adil>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

“Tengku Ridwan Syah Dinobatkan Sebagai Pemangku Kesultanan Siak”,  
<https://www.berazam.com/read-10664-tengku-ridwan-syah-dinobatkan-sebagai--pemangku-kesultanan-siak.html#sthash.dhEY8Uhr.dpbs>, diakses tanggal 18 Januari 2025;

“Tengku Ridwan: Pemugaran Istana Peraduan Tanpa Melibatkan Kekerabatan Kesultanan Siak”,  
<https://www.lintas10.com/tengku-ridwan-pemugaran-istana-peraduan-tanpa-melibatkan-kekerabatan-kesultanan-siak.html>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

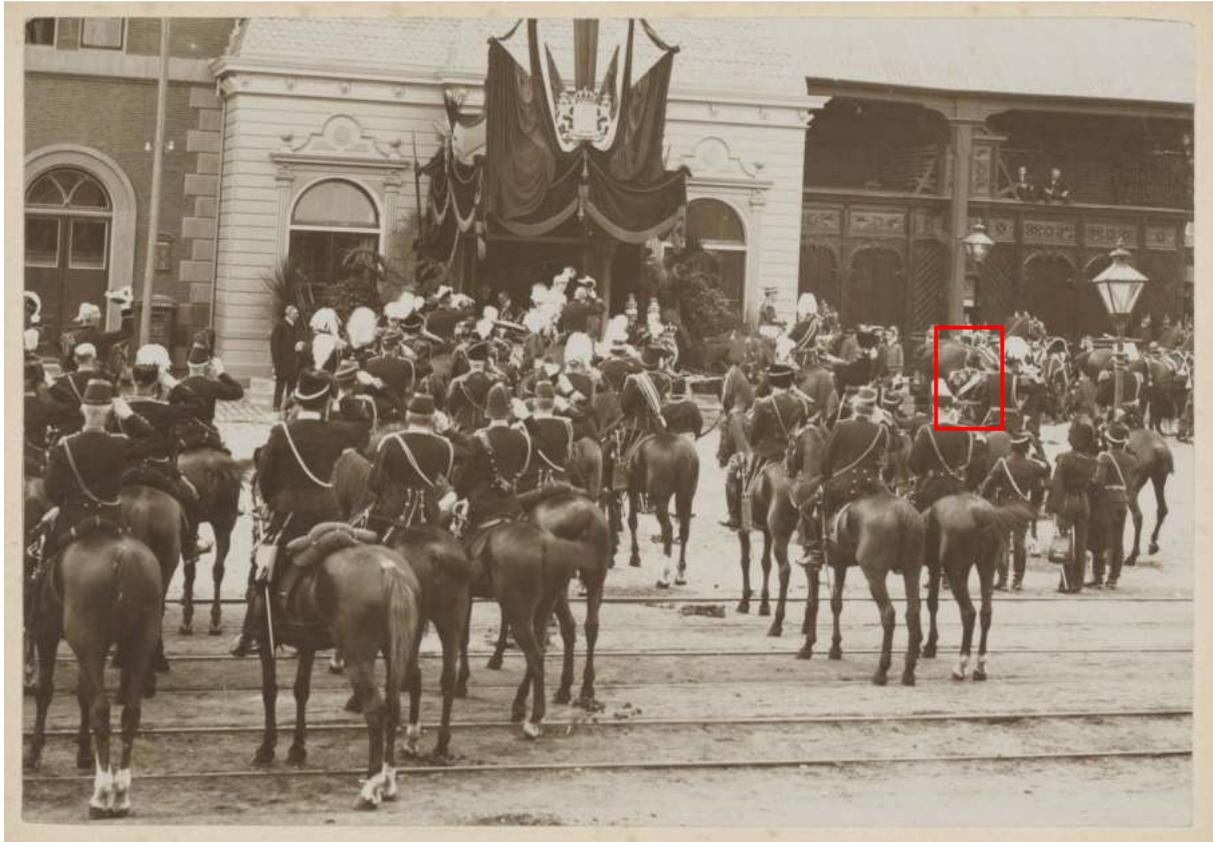
“Ziarah Makam-Makam Sultan Siak Sri Indrapura Dan Kerabat-Kerabat”,  
<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.926858344077947&type=3>, diakses tanggal 15 Januari 2025.

<https://web.archive.org/web/20240725023641/https://lkpasi.or.id/>, diakses tanggal 18 Februari 2025.

“Wabup Husni Gelar Jamuan Makan di Istana Peraduan”,  
<https://riaupos.jawapos.com/siak/2253553914/wabup-husni-gelar-jamuan-makan-di-istana-peraduan>, diakses tanggal 28 Agustus 2025.



Lampiran 1. Dokumentasi kunjungan Syarif Hasyim ke Belanda tahun 1898.



Gambar 1. Putri Mahkota Wilhelmina disambut di Stasiun Weesperplein. Syarif Hasyim ditandai dalam kotak merah



Gambar 2, Syarif Hasyim bersama bangsawan Hindia Belanda lainnya



Gambar 3. *Pelantikan Ratu Wilhelmina*, lukisan karya Nicolaas van der Waay.



Lampiran 2. Posisi tamu dalam Pelantikan Ratu Wilhelmina di Nieuwe Kerk

No. 8785. Woensdag 7 September 1898.

# Het Nieuws van den Dag.

(Opgericht door G. L. FUNKE en P. VAN SANTEN.)

HOOFDREDACTEUR: D<sup>r</sup>. P. H. RITTER.  
Directoren: J. L. BELLERS en J. FUNKE.

ADVERTENTIËN:  
In Het Nieuws van den Dag (oplage 97,000 exempl.)  
bij 4 of minder regels / 1.12; elke regel meer 27½ Ct.  
In het Zondagsblad (oplage 12,000 exempl.)  
bij 4 of minder regels / -30; elke regel meer 12½ Ct.

Abonnementen worden aangegaven bij onze Agenten in verschillende plaatsen hier te lande en overtegen bij alle Boekhandelaars en Briefvervaarders. In het Buitenland bij de Postkantoren.  
Het auteursrecht voor den inhoud van dit Blad wordt verzekerd overeenkomstig de wet van 25 Juni 1881 (Staatsblad No. 154).

## Inhoudiging van Koningin Wilhelmina. PLAN VAN DEN TROON.

Voorzitter der Vereenigde Eeving.

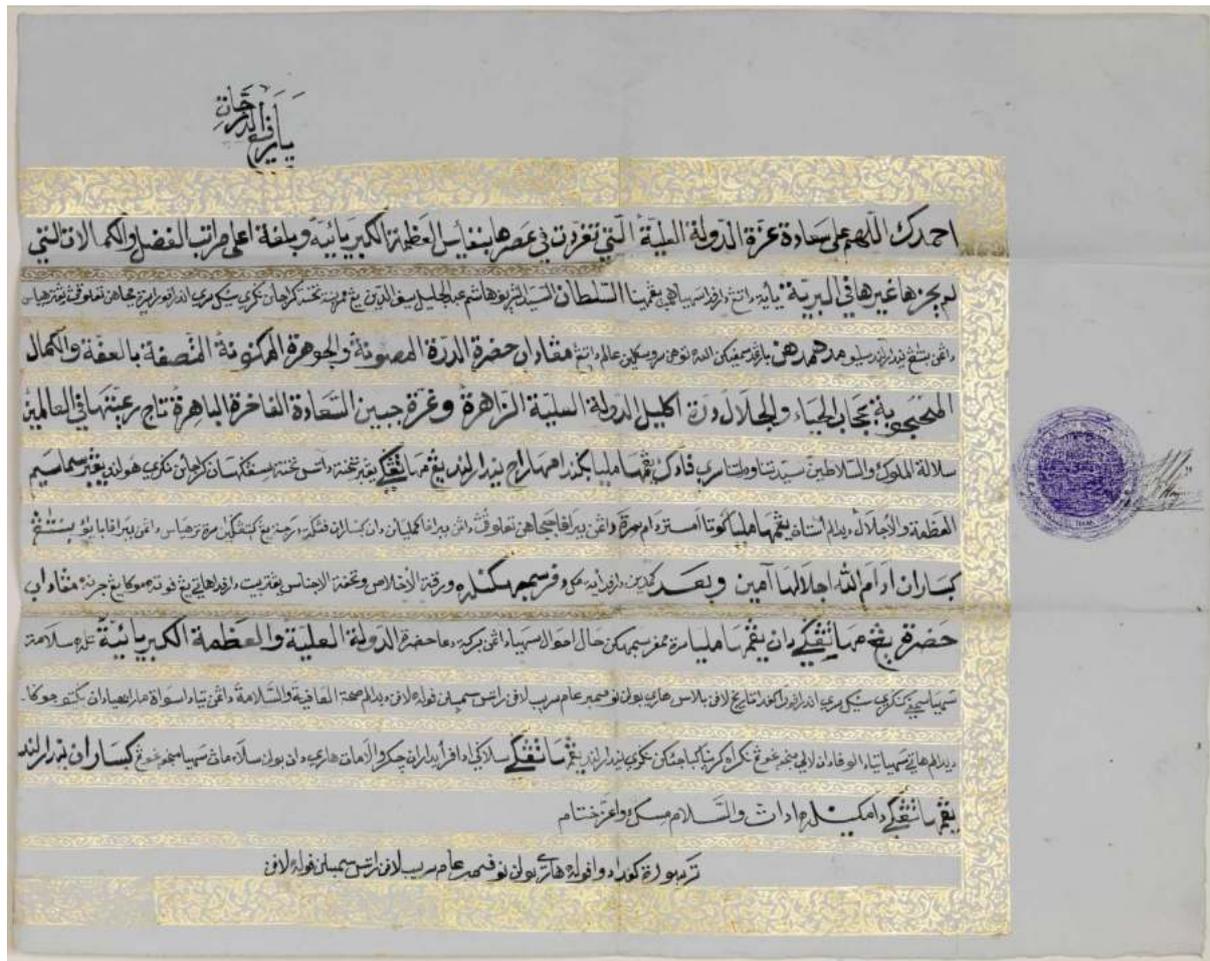
1. Koning van Wapenen Jhr. Rutgers.
2. Oppercamermeester Barou de Tour.
3. Overcamermeester.
4. Koning van Wapenen Barou van Herckenbroek.
5. Ordonnansseff. luit. Loo.
6. Ordonnansseff. Jhr. van Soethien.
7. Vaandel Te rug. luit. kolonel Goudschaal.
8. Vaandel 3de schutterij (kolonel Boelstaal).
9. Vaandel grenadiers en jagers (kolonel De Boek).
10. Standaard de reg. huaren (kolonel Wapenaar).
11. Ordonnansseff. luit. Graaf Du Monceau.
12. Ordonnansseff. luit. Jhr. Biz.
- 13 en 14. Officieren bevelvoerders Bijkantendaard.
15. Standaard van het Koninkrijk (openen. vice-adm. Ten Bosch).
16. Bijkantendaard luit.-gen. K. van der Heyden.
- 17 en 18. Officieren bevelvoerders Bijkantendaard.
19. Kamerjunker Barou van Zeylen.
20. Kamerjunker Jhr. Huydecooper.
21. Adf. luit.-kol. Van Hoogstraaten.
22. Adf. gen.-majoor Van Broom Hoogdorp.
23. Pangéras Mangéras Nagoro (Kote).
24. Z. H. de Sultan van Sak.
25. Pangéras Ario Mataram (Kote).
26. Pangéras Boero (Kote).
27. Adf. generaal-majoor Holtius.
28. Adf. luit.-kol. Reet van Tonningen.
29. Jagermeester Verbejan.
30. Kamerjunker Graaf van Limburg Stirum.
- 31, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
33. Adf. generaal-maj. Baron van Amurongen.
34. Adf. generaal-maj. Baron de Pousan.
35. Adf. luit.-gen. Dempsinck.
36. Adf. luit.-gen. Ridder Alewijn.
37. Adf. luit.-gen. Van Helden.
38. Adf. luit.-gen. Kool.
39. Adf. ebeand. hie Barou van Hogedorp.
40. Adf. generaal-maj. Jhr. Lamas Trip.
41. Adf. kolonel Jhr. van Mühlen.
42. Stelmester Van der Oudeposten.
43. Adf. kap. Jhr. van den Bosch.
44. Adf. luit.-kol. Barou Groenvelt.
45. Adf. luit.-kol. Jhr. van de Poll.
46. Adf. kapitein ter see Voncken.
47. Jagermeester Barou Boelstaal.
48. Adf. majoor De Boerde.
49. Adf. kolonel Simons.
50. Kamerjunker Van Broekhorst.
51. Adf. ebeand. Barou van Tuyll.
52. Dame de Palais Heronesse van Knoelbedroff.
53. Grootmeester van H. M. de Koningin.
54. Grootmeester Graaf van Lynden.
55. Oppercamerjunker.
56. Chef van het Militaire Huis.
57. Oppercamermeester.
58. Adf. generaal Jhr. Veszpyk.
59. Grootmeester van H. M. de Koningin-Moeder (s).
60. Dame de Palais Marcou van Loon.
61. Adf. ritmeester Jhr. van Yets.
62. Kamerjunker Jhr. Schimmelpenninck.
63. Adf. kolonel Jhr. Baud.
64. Adf. luit.-kol. Jhr. Baud.
65. Adf. luit.-kol. Jhr. Baud.
66. Hofdame Baronesse Rangere.
67. Kamerjunker Jhr. van Fabst.
68. Hofdame Baronesse Rangere.
69. Kamerjunker Jhr. van Fabst.
70. Hofdame Baronesse Rangere.
71. Kamerjunker Jhr. van Fabst.
72. Hofdame Baronesse Rangere.
73. Kamerjunker Jhr. van Fabst.
74. Hofdame Baronesse Rangere.
75. Kamerjunker Jhr. van Fabst.
76. Hofdame Baronesse Rangere.
77. Kamerjunker Jhr. van Fabst.
78. Hofdame Baronesse Rangere.
79. Kamerjunker Jhr. van Fabst.
80. Hofdame Baronesse Rangere.
81. Kamerjunker Jhr. van Fabst.
82. Hofdame Baronesse Rangere.
83. Kamerjunker Jhr. van Fabst.
84. Hofdame Baronesse Rangere.
85. Kamerjunker Jhr. van Fabst.
86. Hofdame Baronesse Rangere.
87. Kamerjunker Jhr. van Fabst.
88. Hofdame Baronesse Rangere.
89. Kamerjunker Jhr. van Fabst.
90. Hofdame Baronesse Rangere.
91. Hofdame Baronesse van Marsum.
92. Hofdame Jonkvrouw van de Poll.
93. Kamerjunker Barou van Falkenst.
94. Kamerjunker Barou van Knoelbedroff.
95. Kamerjunker Barou van Soethien.
96. Kamerjunker Barou van Lynden.
97. Kamerjunker Jhr. de Wit.
98. Kamerjunker Barou van Amurongen.
99. Kamerjunker Barou van Limburg Stirum.
100. Kamerjunker Barou van Limburg Stirum.

(a) Plaatst zich vóór de komst en na het vertrek der Koningin op N<sup>o</sup>. 70.  
(b) Plaatst zich vóór de komst en na het vertrek der Koningin op N<sup>o</sup>. 87.  
(c) Plaatst zich vóór de komst en na het vertrek der Koningin op N<sup>o</sup>. 80.

**FEUILLETON.**  
**IN LAMSGEWAAZ.**  
Door het Russisch van P. N. FOLYEVOL.

6)  
Toen Alexander Popof omstreeks den middag het Gouvernementsgebouw verliet, nam hij aan den uitgang plaats in een huursede, welke de portier hijzelf voor hem besteld had, en riep den koetsier toe:  
«In draaf naar de gevangenis. Vooruit!»  
De voorman legde de zweep over zijn roestige paardje en stuurde voortreffelijk, wel wetende, dat hij een «groot haas» vervoerde. Na twee hoofdstraten te hebben doorgereden, sloeg hij een nauwe steeg op daarop een huiswijk in, om door de stadpoort den straatweg te bereiken. Dese volgende, kwam hij aan een klein dorp, dat nog onder de stad behoorde, en daarop aan een ruïne, beneeuwde vlakke, in het midden waartu het laatste der gevangenis zich verhiel. Dit laatste was een groot gebouw, van baksteen opgetrokken en omgeven door een hoogen, wit gepleisterden muur, met vier ronde torens op de hoeken. In pelzen gewikkeld en de warme borenmuisen op het hoofd, marcheerden de schildwachters, met het geweer op schouder, langs den muur en voorbij de poort der gevangenis. Een troepje verwarddeelden, ten getale van 20 man, in korte, ongevoerde schampelpaalen en grijze mutsen gestoken, haalde water uit de bijt; ener naburige sloot, dat zij daarna in tobben binnen de gevangenis droegen.  
Toen Alexander Ivanovitsch aan de poort was gekomen, sprong een dikke, pokdalige wachter, die zich steeds bij den hoofdginger der gevangenis ophield, naar de alsie toe, nam het dekkelooft weg, en namt hij den vice-Gouverneur eerbiedig had helpen uitstappen, sprak hij:  
«Welkom, en riep De intendant wacht u met genoegen.»  
Hij vochtige wagenwijd eens kleinere deur in de hoofpoort, waarin een bijlegat was aangebracht, en liet Alexander door.  
Onder de gewelfde poort, welke tot eens goed verwarmde dienstkamer was ingericht, zaten portiers op hune banken en stonden soldaten, die de in- en uitgangen der gevangenis moesten bewaken. Al dese lieden kwamen van hune plaatsen en gingen Popof te gemoet.  
«Wees zoo goed hier in de wachtkamer te gaan,» sprak een der ciniere beloofd, terwijl hij den nieuwangekomenen met krijt op een zwart leien bord aan den muur opschreef. En met den sientelbos rammelsed, opende hij eens zware met ijzer beslagen deur, welke naar de wachtkamer leidde.  
Deze wachtkamer was een vrij groot gewelfd vertrek, waarvan de zoldering door dikke balken werd gedragen. Links aan den haken muur bespeurde men, in eens der donkere nissen achter traliewerk verscholen, een groot en somber Heiligbeeld, waarvoor eens lamp brandde en een offerden hing voor het insamelen van giften. Rechts aan den muur stonden banken met eens ruzachtige tufel in den hoek, terwijl eens rij vensters, door dubbel traliewerk afgesloten, vrij hoog in den muur boven dese banken was aangebracht. Een sparsaam licht viel van de binnenuitplaats door dese vensters in de wachtkamer en overstepte alles met eens pijnlijke en huiveringwekkende naargestigheid.  
Eens vochtige lucht, als van een onderaardsch gewelf, weel Alexander te gemoet, en onwillkeurig sidderde hij bij de gedachte, dat vele duizenden menschen van helre laven tusschen zulke vreeselijke muren hadden doorgebracht. Een afgebroken, eentonig rammelen van ketenen klonk op dit oogenblik beneden de vensteropeningen en drong in de wachtkamer door.  
«Daar laat men juist de zwaargehoedden uit om hun middagmaal te gebruiken,» merkte de ciniere aan. «De intendant wilde u vragen daarbij eens toe te zien en in de keuken de spijzen te proeven.»  
Zwijgend volgde Alexander den ciniere. Hij bekeek alles, waar men hem heensleide, en bezocht ook de keuken, de eet- en slaekamer, alsook de cellen; op vels plaatsen toefde hij enige oogenblikken en sprak met de gevangenen zóó verstandig, zóó vriendelijk en listig-veleide — na eens de Schrift aanbalende, dan onder de belofte van allerlei lotverbeteringen — dat hij overal onder die menigte de aandacht trek en zelfs in sekers zin sympathie verwekte. Nergens een overschuldig woord, brutaal geschreeuw of driesle, uitluttende blikken!  
Na ontrent twee uren in de gevangenis te hebben doorgebracht, govoelde Alexander, die steeds in overspannen toestand had verkeer, zich zóó afgemat, dat hij bestoot dinnmaal niet naar sijn bureau, maar zoodra mogelijk naar huis te gaan.  
«Het was verkeer van mij, vandaag uit te rijden,» dacht Popof bij zichzelf. «Ik vrees, dat die bezwijning van sijnzen sich zal herhalen.»  
Toen hij de wachtkamer weer binnentrad, kwam sijn luitantich portier naar hem toe met de woorden:  
«Mijnheer de chef! ik heb nog een klein verzoek aan u. Koninkweg verkeer ik u, dat ik hem geding van heden niet verkeer. Er berischt sich onder hen een endo voooroede, een luitantich; dese sluwte vogel kwam vandaag bij mij en fluiterde mij heimelijk

Lampiran 3. Surat Syarif Hasyim kepada Ratu Wilhelmina mengabarkan ketibaannya di Siak.



Transliterasi:

[Wahai Yang Mengangkat Derajat]

[Hamba memuji-Mu ya Allah atas kebahagiaan dan kemuliaan kerajaan yang tinggi martabatnya, yang pada masa baginda menjadi tanda kebesaran dengan kejayaan-kejayaan yang mulia, mencapai derajat tertinggi dalam keutamaan serta perkataan yang penuh hikmah, yang tiada tandingannya di dunia ini] yaitu datang daripada sahaya hamba yang hina Al-Sultan Al-sayyid Al-Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah kerajaan negeri Siak Sri Indrapura serta jajahan takluknya yang terhias Dengan Bintang Nederlands Liew mudah-mudahan barang disampaikan Allah Tuhan seru sekalian alam

datang menghadap [\*mengadab] [Yang Mulia yang terpelihara lagi permata yang tersembunyi, bersifat dengan kesucian dan kesempurnaan terselubung di balik tirai kesopanan dan keagungan, mutiara mahkota kerajaan yang tinggi lagi berseri, cahaya di dahi kebahagiaan yang mulia lagi gemilang, mahkota bagi rakyatnya di seluruh alam keturunan para raja dan sultan, junjungan kami dan pemimpin kami] Sri Paduka Yang Maha Mulia Baginda Maharaja Nederland yang maha tinggi yang bertakhta di atas takhta singgahsana kerajaan negeri Hollandia yang bersemayam [kebesaran dan kemuliaan] di dalam istana yang maha mulia kota Amsterdam serta dengan beberapa jajahan takluknya dengan beberapa kemuliaan dan kebesaran pangkat derajat yang ketinggian serta terhias dengan beberapa banyak Bintang Kebesaran [semoga Allah memberkati hidupnya, amin, dan selanjutnya]

kemudian daripada itu maka dipersembahkanlah [warkah (surat) yang Ikhlas dan hadiah berbagai rupa] yang terbit daripada hati yang putih muka yang jernih menghadap [hadirat] yang maha tinggi dan yang maha mulia serta mempersembahkan hal ihwal sahaya dengan berkat doa [Yang Mulia kerajaan yang tinggi dan kebesaran yang agung] setelah selamat Sahaya sampai ke negeri Siak Sri Indrapura kepada tarikh (de)lapan belas hari bulan November (tahun) seribu lapan ratus sembilan puluh lapan di dalam [sehat (wal)afiat dan selamat] dengan tiada suatu marabahaya

Dan begitu juga di dalam hati sahaya tiada lupa dan lali menjunjung anugerah [\*nukrah], kurnia, kebajikan negeri Nederland yang maha tinggi, selagi ada peredaran cakrawala matahari dan selama-lamanya [\*sela2manya] sahaya menjunjung kebesaran Nederland Yang maha tinggi, demikianlah adanya, [dan salam penutup yang wangi lagi mulia]

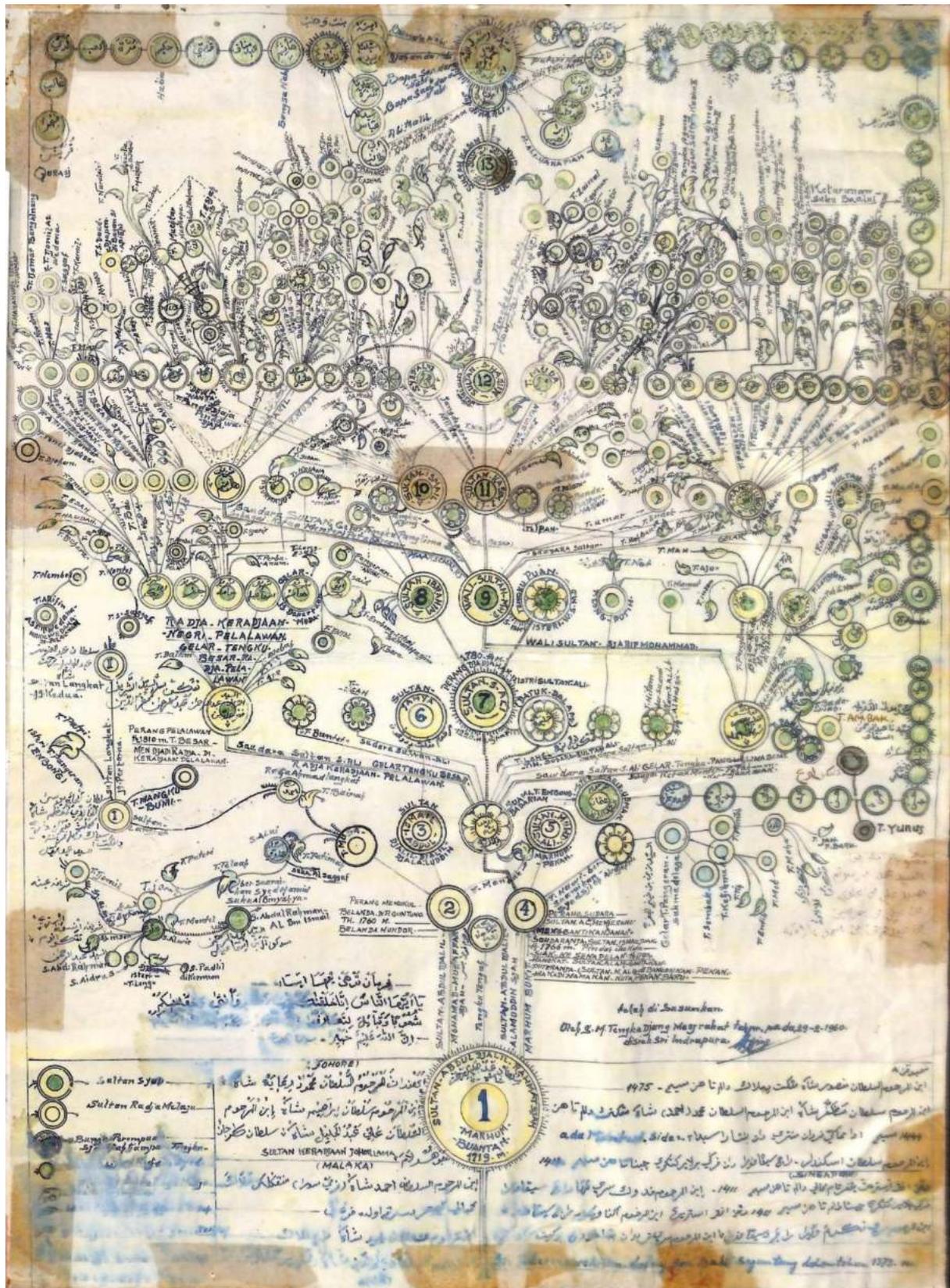
Tersurat kepada dua puluh hari bulan November [tahun] seribu lapan ratus sembilan puluh lapan



Lampiran 4. *Fanion* Muhammad Bertangkep di Istana Siak



Lampiran 5. Silsilah Sultan Siak hingga Syarif Kasim II





# Abdul Harits Ritonga

## untuk turnitin.pdf

 Universitas Andalas

---

### Document Details

Submission ID

trn:oid::3618:110644311

Submission Date

Sep 3, 2025, 6:44 AM GMT+7

Download Date

Sep 3, 2025, 7:06 AM GMT+7

File Name

untuk turnitin.pdf

File Size

6.0 MB

158 Pages

32,835 Words

205,219 Characters

# 2% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 10 words)

## Exclusions

- ▶ 113 Excluded Matches

---

## Top Sources

- 2%  Internet sources
- 1%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

---

## Integrity Flags

### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Top Sources

- 2% Internet sources
- 1% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	id.wikipedia.org	<1%
2	Internet	dr.ntu.edu.sg	<1%
3	Internet	www.cakaplah.com	<1%
4	Internet	kekunaan.blogspot.com	<1%
5	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
6	Internet	archive.org	<1%
7	Internet	ejournal.unida.gontor.ac.id	<1%
8	Internet	www.berazam.com	<1%
9	Internet	riaupos.co	<1%
10	Publication	Georgia Vullingsh. "Chapter 13 "A Crown of Everlasting Glory": The Afterlife of Ma...	<1%
11	Internet	historia.id	<1%

12	Publication	"Book reviews", Asian Studies Review, 2006	<1%
13	Internet	etd.repository.ugm.ac.id	<1%
14	Internet	www.youtube.com	<1%
15	Internet	bincangmuslimah.com	<1%
16	Internet	libcat.uin-malang.ac.id	<1%
17	Internet	repositori.usu.ac.id	<1%
18	Internet	www.lintashukum-indonesia.com	<1%
19	Submitted works	Universitas Andalas on 2023-04-09	<1%
20	Internet	e-perpus.unud.ac.id	<1%
21	Internet	medialokal.co	<1%
22	Internet	potret24.com	<1%
23	Internet	www.goodnewsfromindonesia.id	<1%
24	Internet	www.tandfonline.com	<1%
25	Internet	docplayer.info	<1%

26	Internet	ia903106.us.archive.org	<1%
27	Internet	surya24.com	<1%
28	Internet	www.riaubisa.com	<1%
29	Publication	Dewi Arnita Sari, Azka Hanani. "LEGAL CHALLENGES IN COVER SONG DISPUTES: A ...	<1%
30	Submitted works	Universitas Andalas on 2023-04-02	<1%
31	Submitted works	Universitas Mercu Buana on 2018-07-07	<1%
32	Internet	id.123dok.com	<1%
33	Internet	infopublik.id	<1%
34	Internet	www.lintas10.com	<1%

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kabupaten Siak adalah sebuah daerah muda yang baru terbentuk pada tahun 1999. Segera setelah pemekarannya dari Kabupaten Bengkalis tersebut, Siak menjadi salah satu daerah yang produktif akan hasil minyak bumi dan manufakturnya di Provinsi Riau.<sup>1</sup> Namun, yang paling dikenal dari Siak adalah Istana Asserayah al-Hasyimiyah, atau sering disebut Istana Siak dan peninggalan sejarahnya. Apabila kita mengobservasi kecil-kecilan, misalnya mencari kata kunci Siak di *browser* internet ataupun media sosial lainnya, maka kita sering diarahkan kepada konten Istana Siak, atau lebih luasnya sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura. Pemerintah Kabupaten Siak, dengan anggaran yang melimpah, juga gencar melakukan pembangunan objek wisata beserta fasilitasnya di sekitar kawasan cagar budaya Kesultanan Siak Sri Indrapura, di mana Istana Siak menjadi *centrepiece*. Pariwisata yang dikembangkan pemerintah daerah juga mengukung

---

<sup>1</sup> Berdasarkan data *Siak dalam Angka*, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Siak sektor pertambangan, yang sebagian besar adalah minyak bumi dan gas, adalah sekitar Rp 21 triliun pada tahun 2010, melonjak hingga lebih dari Rp 40 triliun pada tahun 2012-2014, dan menurun seiring harga minyak bumi global sejak itu, yang pada tahun 2023 sekitar Rp 28 triliun. Sementara itu, PDRB sektor manufaktur (termasuk pengolahan *pulp*) naik secara konsisten, dari Rp 17 triliun pada tahun 2010, Rp 28 triliun pada tahun 2015, hingga Rp 43 triliun pada tahun 2023.

tema sejarah dan budaya.<sup>2</sup> Intinya, Kabupaten Siak sering diasosiasikan dengan Istana Siak, atau warisan sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura.

1 Hal ini bukannya tidak berdasar. Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah sebuah kerajaan besar yang pernah berdiri di pesisir timur Sumatera. Keberadaannya unik di antara kerajaan-kerajaan Melayu lainnya, karena masyarakatnya merupakan percampuran antara masyarakat lokal, perantau Minangkabau, dan orang Melayu; sebuah kombinasi masyarakat yang dalam bahasa Barnard disebut *kacu*.<sup>3</sup> Kekuatan angkatan lautnya membuat Kesultanan Siak ditakuti sepanjang Selat Malaka.<sup>4</sup> Dengan kekuasaannya yang mencapai wilayah pesisir timur Sumatera (termasuk Medan dan sekitarnya), Kesultanan Siak menjadi kerajaan yang disegani oleh takluk jajahannya seperti Kesultanan Deli dan Asahan bahkan beberapa masa setelah daerah tersebut bebas dari kekuasaan Siak.<sup>5</sup>

Penjajahan Belanda dan kemerdekaan Indonesia selanjutnya meredupkan identitas Siak, baik sebagai wilayah maupun sejarah kesultannya. Hal ini disebabkan selama zaman Kolonial Kesultanan Siak tidak dapat berkembang pesat sebagaimana kota-kota lainnya di Sumatera, meskipun masih bisa mengandalkan pelayaran yang lalu lalang sepanjang Sungai Siak. Setelah kemerdekaan Indonesia,

---

<sup>2</sup> Abdul Harits Ritonga dan Siti Fatimah, "Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Kesultanan Siak Sri Inderapura sebagai Objek Wisata (2006-2019)", *Kronologi*, vol. 2 no. 4 tahun 2020, hlm. 124.

<sup>3</sup> Timothy P. Barnard, *Multiple Centres of Authority: Society and Environment in Siak and Eastern Sumatra, 1674-1827* (Leiden: KITLV Press, 2003), hlm. 1-2.

<sup>4</sup> John Anderson, *Mission to the east coast of Sumatra in 1823* (Edinburgh: William Blackwood, 1826), hlm. 342.

<sup>5</sup> "Een bladzijde geschiedenis" Het nieuws van den daag voor Nederlandsch-indie, 23 September 1924.

wilayahnya dimasukkan sebagai sebuah kecamatan dalam Kabupaten Bengkalis, Riau. Bila wilayah Riau sebagai bagian Sumatera Tengah pada tahun 1950-1957 dianggap tidak diperhatikan,<sup>6</sup> maka terlebih lagi Kecamatan Siak. Situasi ini tidak berubah ketika Provinsi Riau dibentuk, dan tidak pernah berubah sampai akhir periode Orde Baru.

Situasi ini diperparah dengan sentralisme Orde Baru, misalnya dalam hal politik dengan menolak aspirasi daerah mengenai kepala daerah mereka, atau dalam hal ekonomi dengan penguasaan sektor minyak bumi yang hasilnya tidak dinikmati oleh daerah,<sup>7</sup> dan lain sebagainya. Namun, hal ini tidak menghilangkan ingatan masyarakat Siak mengenai sejarah mereka. Perjuangan pembentukan Kabupaten Siak dengan wilayah hampir seluas wilayah Kesultanan Siak zaman kolonial dapat dianggap sebagai representasi ingatan sejarah tersebut.<sup>8</sup> Segera setelah pembentukan Kabupaten Siak, mereka memanfaatkan warisan sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura untuk membangun identitasnya, mulai dari Istana Siak sebagai fitur lambang Kabupaten Siak, hingga pemanfaatan cagar budaya Istana Siak dan sekitarnya sebagai objek wisata Kabupaten Siak.

Dengan latar belakang sejarahnya, pembentukan Kabupaten Siak dan penonjolan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura melahirkan fenomena lain. Beberapa orang yang mengaku sebagai keturunan sultan Siak mengklaim sebagai

---

<sup>6</sup> Gusti Asnan, *Memikir ulang regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an* (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 230.

<sup>7</sup> Destra Wati, Nopriyasan dan Wannofri Samry, "Riau Pascakeluar dari Sumatera Tengah 1957-1985", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 7 no. 1, tahun 2020, hlm. 41-49.

<sup>8</sup> Proses pembentukan Kabupaten Siak dapat dilihat lebih lanjut dalam *Sejarah Pembentukan Kabupaten Siak*.

sultan baru dan berupaya mendirikan kembali Kesultanan Siak Sri Indrapura. Meskipun mendapat dukungan dari beberapa pihak, banyak yang mengecam aksi ini. Dalam kasus terakhir di mana Tengku Nazir menabalkan diri sebagai sultan Siak, berbagai tokoh masyarakat menolaknya,<sup>9</sup> termasuk lembaga yang dianggap resmi mewakili Kesultanan Siak, Kekerabatan Resam Keluarga Kerajaan Siak.<sup>10</sup>

Klaim sultan Siak baru ini adalah bagian dari fenomena “kembalinya para sultan” pada masa setelah Reformasi. Fenomena ini telah dilihat oleh Van Klinken sebagai contoh gerakan identitas daerah masa Reformasi dan konsekuensi dari otonomi daerah. Beberapa institusi monarki (kesultanan, kerajaan, kedatuan dan sejenisnya) didirikan kembali, bukan untuk menegaskan kedaulatan politik mereka, melainkan atas nama pelestari adat dan budaya daerah.<sup>11</sup> Contoh gerakan pendirian kesultanan di Indonesia yang berhasil adalah Kesultanan Kutai Kartanegara pada tahun 2001 yang, bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, membentuk identitas kebudayaan daerah tersebut, seperti pembangunan Kedaton

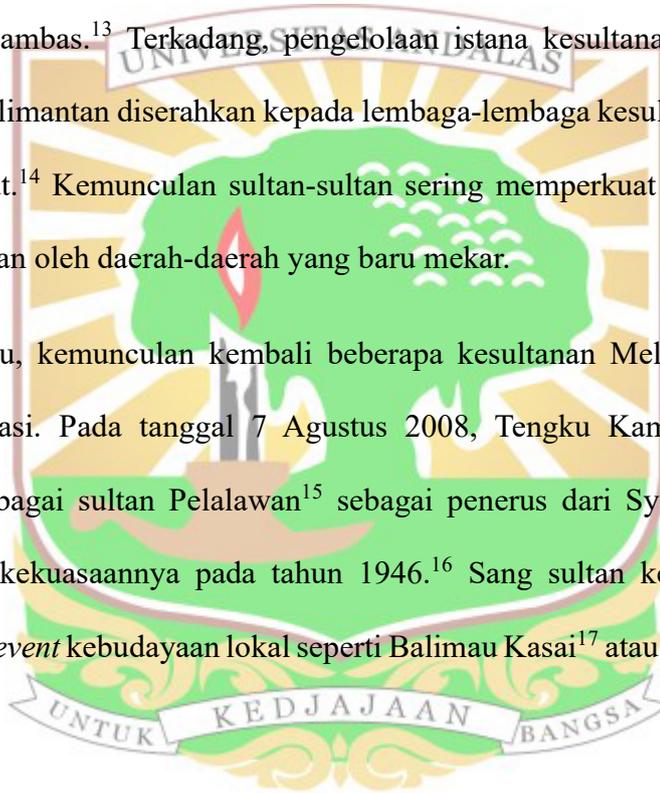
<sup>9</sup> “Penabalan Tengku Muhammad Nazir sebagai Sultan Siak XII Ditolak Zuriyat Syah” <https://potret24.com/artikel/penabalan-tengku-muhammad-nazir-sebagai-sultan-siak-xiii-ditolak-oleh-zuriyat-syah/>, diakses tanggal 7 Februari 2025.

<sup>10</sup> “PERNYATAAN LEMBAGA KEKERABATAN RESAM KELUARGA KERAJAAN SIAK TERKAIT PENOBATAN SULTAN SIAK KE-13”, <https://www.youtube.com/watch?v=thtR2bp11BI>, diakses tanggal 14 Juni 2023; lihat juga “Zuriyat Sah Kesultanan Siak Tolak Penabalan Tengku Muhammad Nazir sebagai Sultan Siak XIII”, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/85887/2022/06/15/zuriyat-sah-kesultanan-siak-tolak-penabalan-tengku-muhammad-nazir-sebagai-sultan-siak-xiii#sthash.yYG8Ip70.dpbs>, diakses tanggal 14 Juni 2023.

<sup>11</sup> Gerry van Klinken, “Return of The Sultans: the Communitarian Turn in Local Politics,” dalam *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: the Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism* (London: Routledge, 2007) hlm. 149-151.

Kutai Kartanegara hingga menyelenggarakan *event* tahunan Festival Erau.<sup>12</sup> Berbagai daerah di Kalimantan juga menghidupkan kesultannya kembali, seperti Landak dan Sambas.<sup>13</sup> Terkadang, pengelolaan istana kesultanan yang menjadi museum di Kalimantan diserahkan kepada lembaga-lembaga kesultanan yang telah berdiri tersebut.<sup>14</sup> Kemunculan sultan-sultan sering memperkuat identitas daerah yang dibutuhkan oleh daerah-daerah yang baru mekar.

Di Riau, kemunculan kembali beberapa kesultanan Melayu juga terjadi pasca Reformasi. Pada tanggal 7 Agustus 2008, Tengku Kamaruddin Harun, dinobatkan sebagai sultan Pelalawan<sup>15</sup> sebagai penerus dari Syarif Harun yang menyerahkan kekuasaannya pada tahun 1946.<sup>16</sup> Sang sultan kemudian banyak terlibat dalam *event* kebudayaan lokal seperti Balimau Kasai<sup>17</sup> atau penganugerahan



<sup>12</sup> Fadli Afriandi & Fachriza Ariyadi, “Efek Domino Pasca Dibangkitkannya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura”, *Reformasi* Vol. 10 No. 2, 2020, hlm. 127-139

<sup>13</sup> Gerry van Klinken, op. cit., hlm. 149

<sup>14</sup> Bernard Sellato, “Sultans’ Palaces and Museums in Indonesian Borneo: National Policies, Political Decentralization, Cultural Depatrimonization, Identity Relocalization, 1950-2010”, *Archipel* [Online] no. 89 tahun 2015, hlm. 143.

<sup>15</sup> Meskipun catatan dan dokumentasi peristiwa ini belum ditemukan, perwakilan Kesultanan Pelalawan menegaskan penobatan Syarif Kamaruddin pada tanggal tersebut saat membuat klarifikasi terkait sebuah insiden, “Pers Rilis Lembaga Perangkat Kesultanan Pelalawan” <https://radarpekanbaru.com/news/detail/19274/pers-rilis--lembaga-perangkat-kesultanan-pelalawan-lpkp>, diakses tanggal 31 Januari 2024.

<sup>16</sup> Desi Purnama Indah, Isjoni & Kamaruddin, “Pemerintahan Sultan Syarif Harun di Kerajaan Pelalawan Tahun 1940-1945”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan* Vol. 4 No. 2, 2017, hlm.

<sup>17</sup> “Mandi Balimau Sultan Tradisi Turun Temurun Menyambut Bulan Suci Ramadhan di Negeri Seiya Sekata”, <https://pelalawanpos.co/news/detail/1079/mandi-balimau-sultan-tradisi-turun-temurun-menyambut-bulan-suci-ramadhan-di-negeri-seiya-sekata>, diakses tanggal 31 Januari 2024.

gelar adat.<sup>18</sup> Kerajaan Gunung Sahilan didirikan kembali pada 22 Januari 2017.<sup>19</sup> Berbeda dengan fenomena “kembalnya para sultan” di Riau, klaim sultan Siak dan upaya mendirikan kembali Kesultanan Siak Sri Indrapura malah menimbulkan kontroversi.

Keberadaan Kesultanan Siak Sri Indrapura, kekhasan kebudayaan Siak dalam sejarahnya, redupnya identitas Siak semasa Kolonial Belanda hingga Orde Baru, kemunculan kembali identitas Siak yang melahirkan pembentukan Kabupaten Siak serta pemanfaatan identitas kesultanan, hingga munculnya fenomena klaim sultan Siak baru adalah menarik untuk dikaji. Oleh sebab itu, penulis menyelenggarakan penelitian dengan hasil sebuah tesis berjudul “Identitas Kesultanan Siak Sepanjang Sejarah (1723-2023).”

## 1.2. Perumusan Masalah

Masalah pokok pada penelitian ini adalah perkembangan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura, yang dibagi dalam tiga keadaan. Pertama, ketika Kesultanan Siak masih berdiri sebagai kerajaan merdeka dan memiliki kekuasaan yang luas. Kedua, ketika Kesultanan Siak berada di bawah kekuasaan yang lebih kuat darinya, yakni Belanda, dan kemudian Indonesia. Ketiga, ketika Kesultanan

<sup>18</sup> “Ketua DPD RI Menerima Penganugerahan Gelar Adat dari Kesultanan Pelalawan”, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/588511/ketua-dpd-ri-menerima-penganugerahan-gelar-adat-dari-kesultanan-pelalawan?show=>, diakses tanggal 31 Januari 2024.

<sup>19</sup> “Penobatan Pewaris Kerajaan Gunung Sahilan Kampar Dihadiri Raja Raja Se-Nusantara” <https://riaukarya.com/read/detail/714/regional/kampar/Dimulai%2018%20Desember%202024>, diakses tanggal 7 Februari 2025.

Siak sudah tidak ada lagi, yakni mereka yang masih hidup merekonstruksi identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura.

Dengan demikian, penulis mengajukan tiga rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses perkembangan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura pada masa kedaulatannya secara penuh (1723-1858), apa saja identifikasi pembentukannya dan mengapa proses tersebut terjadi?
- b. Bagaimana proses perkembangan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura pada masa dikuasai oleh Belanda dan Indonesia (1858-1968), apa saja identifikasi pembentukannya dan mengapa proses tersebut terjadi?
- c. Bagaimana proses perkembangan dan dinamika identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura dengan tidak adanya kesultanan tersebut (1968-2023), apa saja identifikasi pembentukannya, apa saja fenomena yang terjadi dan mengapa hal tersebut terjadi?

### 1.3. Pembatasan Masalah Penelitian

Penulis membatasi penelitian ini, dari segi spasial, di dalam ranah pembahasan Kesultanan Siak Sri Indrapura dan Kabupaten Siak. Kesultanan Siak merupakan objek kajian penelitian ini, dan Kabupaten Siak kurang lebih dapat dianggap sebagai penerus wilayah bekas Kesultanan Siak. yang dalam sejarah merupakan tempat berkembangnya Kesultanan Siak Sri Inderapura. Fokus penulis terpusat pada wilayah historis tersebut. Dari segi temporal, penulis mengambil titik kajian dari tahun 1723 hingga 2023. Tahun 1723 adalah berdirinya Kesultanan Siak

Sri Indrapura, meskipun latar belakangnya dapat ditarik sedikit jauh dari tahun 1699 yang diyakini tahun kelahiran Raja Kecil. Tahun 2023 adalah aktivitas terakhir Tengku Nazir, pengklaim sultan Siak, yang masih dapat dilacak. Panjangnya rentang waktu ini adalah untuk menunjukkan bahwa terjadi perubahan, kesinambungan, dan keterputusan pada identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura.

#### 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis bertujuan untuk:

1. Menganalisis pembentukan dan perkembangan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura pada masa kedaulatannya (1723-1858).
2. Menganalisis pembentukan dan perkembangan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura pada masa dikuasai hingga Syarif Kasim II meninggal (1858-1968).
3. Menganalisis pembentukan dan perkembangan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura setelah kesultanan tersebut tidak ada lagi (1968-2023), termasuk fenomena yang muncul dan analisisnya.

Penelitian ini bermanfaat dari segi teoretis dan praktis. Penelitian mengenai identitas daerah berdasarkan sejarah monarki dan kemunculan monarki di Indonesia pasca Reformasi masih sangat sedikit, sehingga penelitian ini akan membantu memperkaya literatur mengenai hal tersebut, begitu juga dengan ragam motif dan model kemunculan monarki yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini juga akan bermanfaat untuk memberi perspektif baru berkaitan dengan kebudayaan (*tamaddun*) Melayu dan unsur-unsurnya.

Segi praktis penelitian ini adalah memberikan pemahaman terhadap persoalan yang dihadapi pihak-pihak berkonflik terkait dengan pihak yang berupaya mendirikan kembali Kesultanan Siak Sri Inderapura, begitu juga dengan kasus yang sama di Indonesia.

### 1.5. Tinjauan Pustaka

12 Karya terbaik mengenai dinamika identitas Kesultanan Siak adalah *Multiple Centres of Authority: Society and Environment in Siak and Eastern Sumatra, 1674-1827*, ditulis oleh Timothy P. Barnard.<sup>20</sup> Karakteristik pesisir timur Sumatera menyebabkan corak Kesultanan Siak berbeda dengan negeri-negeri Semenanjung Melayu. Dari bentang alam, wilayah tersebut merupakan hutan tropis yang lebat di timur, memanjang hingga ke hamparan hutan bakau berawa, dan bermuara ke Selat Malaka yang ramai. Dari segi sosial, wilayah ini merupakan tempat tinggal berbagai macam suku bangsa, seperti perantauan Minangkabau, orang Melayu, masyarakat lokal, hingga pedagang India, Tionghoa, Arab, Jawa, Bugis, dan lain sebagainya. Kemampuan seorang raja dalam menghimpun masyarakat ini terbukti menentukan apakah kehidupan Kesultanan Siak berlangsung damai atau terjadi kekacauan.

Karya spesifik dan detail mengenai kerajaan-kerajaan Nusantara yang muncul pada masa Reformasi adalah karya Gerry van Klinken yang berjudul "Return of The Sultans: The Communitarian Turn in Local Politics".<sup>21</sup> Van Klinken telah mengamati maraknya kemunculan sultan-sultan di berbagai daerah di

---

<sup>20</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*

<sup>21</sup> Gerry van Klinken, *op. cit.*, hlm. 149-169.

Indonesia sekitar era Reformasi dan setelahnya. Van Klinken mencatat 25 kerajaan yang ada di Indonesia—meski tidak mewakili daftar seluruh monarki se-Indonesia—16 di antaranya dimunculkan melalui pemulihan (*resurreciton*) dan pembentukan kembali (*reinvention*). Pemulihan terjadi pada kesultanan yang dihapuskan pada masa Republik Indonesia oleh kebijakan Sukarno, sedangkan pembentukan kembali terjadi pada kesultanan yang bubar jauh pada masa Hindia Belanda. Beberapa sultan yang masih bertahan meningkatkan citra mereka untuk mendapat simpati di hadapan publik. Ia mendiskusikan bagaimana memahami kemunculan ‘kesultanan’ di Indonesia kontemporer sebagai bentuk negosiasi republikanisme dengan kebudayaan lokal, bukan sebuah langkah kemunduran, melainkan sebagai “penawar dari perpecahan modernitas” dan membawa “keharmonisan sosial baru” dengan peran mereka sebagai pengayom budaya. Namun, ia tetap mewaspadaai sikap oportunistik feodalistik yang bisa muncul dan pengabaian peran baru mereka sendiri terhadap permasalahan daerah yang membutuhkan kharisma seorang tokoh lokal.

Mengenai kondisi kesultanan-kesultanan Melayu di Indonesia, Hakimul Ikhwan dan Fachry Aidulsyah menulis “Sultanates and the Making of Nationhood in Indonesia and Malaysia”.<sup>22</sup> Tulisan ini adalah perbandingan antara kesultanan di Malaysia dan Indonesia, mulai dari latar belakang perlakuan kolonial hingga situasi pascakolonial. Kolonialisme Inggris di Malaya menciptakan “pemerintahan kolonial tidak langsung” dengan memanfaatkan sultan yang berkuasa dalam

---

<sup>22</sup> Hakimul Ikhwan & Fachry Aidulsyah, “Sultanates and the Making of Nationhood in Indonesia and Malaysia”, dalam *Asian Journal of Social Science* no. 48 tahun 2020, hlm. 339-352

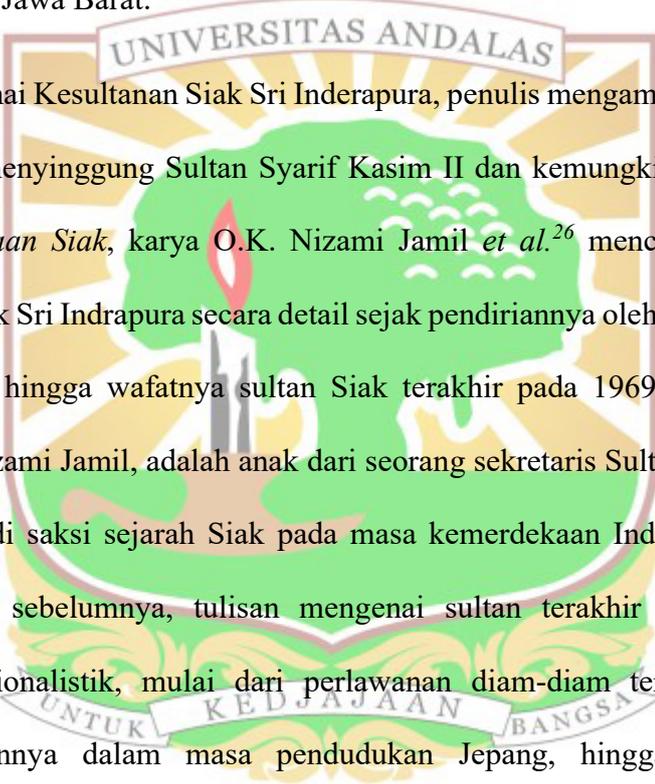
administrasi mereka. Kontras, pemerintahan Hindia Belanda selalu bersifat antagonis dengan otoritas lokal dan menciptakan sistem baru yang menumpangtindihkan sistem lama. Popularitas republikanisme di Indonesia telah mencoreng citra kesultanan yang dianggap feodal dan tidak mendukung Republik Indonesia, dan meskipun pemerintah memberi kesempatan eksistensi mereka dengan memberi status swapraja, peran politik mereka akhirnya lenyap oleh rezim Sukarno dan Suharto. Malaysia yang mengadopsi federalisme telah menjaga eksistensi kesultanan Melayu dengan memberi kuasa mereka sebagai kepala negara masing-masing negeri. Sementara perkembangan kesultanan di Indonesia kemudian diasosiasikan dengan pelestarian adat, institusi kesultanan di Malaysia semakin penting sebagai pelestari agama Islam dan bangsa Melayu di tengah multikulturalisme negara tersebut.

Salah satu kasus *resurrection* monarki yang juga termasuk dalam kasus kemunculan monarki di Indonesia pasca Reformasi adalah Kerajaan Pagaruyung. Meskipun baru direstorasi pada tahun 2004, ide dan faktor pencetusnya telah berkembang beberapa dekade sebelumnya, dengan Istana Basa Pagaruyung sebagai representasi. Nopriyasman dalam “Politik Representasi Istana Basa Pagaruyung sebagai Identitas Minangkabau di Sumatera Barat”<sup>23</sup> telah meneliti Istana Basa Pagaruyung sebagai pembangkit citra Minangkabau dan sejarahnya yang gemilang, di tengah hegemoni politik Orde Baru yang sentralistik dan menuntut keseragaman. Representasi istana monumental tersebut membawa dampak, salah satunya

---

<sup>23</sup> Nopriyasman, “Politik Representasi Istana Basa Pagaruyung sebagai Identitas Minangkabau di Sumatera Barat”, *disertasi* (Denpasar: Program Studi Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2011), *passim*.

dimanfaatkan oleh golongan keturunan raja Pagaruyung untuk merestorasi institusi Yang Dipertuan Rajo Alam beserta perangkat-perangkatnya, ditambah dengan relasi yang baik dengan institusi budaya lokal, sehingga restorasi itu terwujud secara resmi pada tahun 2004. Kasus lainnya adalah Kesultanan Jailolo di timur<sup>24</sup> dan Cirebon di Jawa Barat.<sup>25</sup>



Mengenai Kesultanan Siak Sri Inderapura, penulis mengambil sebuah karya sejarah yang menyinggung Sultan Syarif Kasim II dan kemungkinan suksesinya. *Sejarah Kerajaan Siak*, karya O.K. Nizami Jamil *et al.*<sup>26</sup> menceritakan sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura secara detail sejak pendiriannya oleh Raja Kecil pada akhir abad 18 hingga wafatnya sultan Siak terakhir pada 1969. Salah seorang penulisnya, Nizami Jamil, adalah anak dari seorang sekretaris Sultan Syarif Kasim II yang menjadi saksi sejarah Siak pada masa kemerdekaan Indonesia. Berbeda dengan sultan sebelumnya, tulisan mengenai sultan terakhir tersebut sangat bernuansa nasionalistik, mulai dari perlawanan diam-diam terhadap kolonial Belanda, perannya dalam masa pendudukan Jepang, hingga dukungannya terhadap Republik Indonesia, termasuk menyumbangkan 13 juta Gulden untuk pemerintahan republik. Dalam bab terakhir, mereka membahas kemungkinan penerus Sultan Syarif Kasim II, yang telah mengintegrasikan diri ke dalam Republik Indonesia dan tidak menghasilkan keturunan sebelum kesultanan itu

---

<sup>24</sup> Mustafa Mansur dan Rusli M. Said, *Dinamika Sosial-Politik Kesultanan Jailolo (2002-2017)*, *Jurnal Etnohistori*, Vol. V, No. 2, Tahun 2018 110-135.

<sup>25</sup> Shelvy Nujuliyani, "Suksesi dan Konflik (Studi atas Jumenengan Sultan Sepuh XV Keraaton Kasepuhan Cirebon pada Tahun 2020)", *skripsi* (Jakarta: Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), *passim*.

<sup>26</sup> O.K. Nizami Jamil *et al.*, *op. cit.*, hlm. 185-186.

berakhir. Sang sultan memiliki adik tiri yang bernama Tengku Long Putih. Sepertinya para penulis telah sadar bahwa ada beberapa pihak yang ingin mengklaim takhta—atau harta—Kesultanan Siak Sri Inderapura, sehingga mereka memberi contoh bahwa sang adik tiri sultan tidak dapat mengklaim takhta Siak karena telah menjadi warga negara Singapura dan menikahi seorang Belanda Kristen.

Dari segi peninggalan pada masa kontemporer, topik yang sering diusung berkaitan dengan sejarah Kesultanan Siak Sri Inderapura adalah bagaimana objek tersebut dipelihara dan dimanfaatkan sebagai cagar budaya. “Hubungan Perkembangan Kota Siak Sri Indrapura dengan Kawasan Cagar Budaya Istana Asserayah Al-Hasyimiah” karya Aidil Kurniawan<sup>27</sup> mengamati bagaimana pemerintah Kabupaten Siak mengatur pembangunan dan tata kota di sekitar kawasan cagar budaya Kesultanan Siak Sri Indrapura. Penulis sendiri juga telah meneliti bagaimana Kabupaten Siak merancang dan melaksanakan pariwisata sejarah dan budaya di kawasan cagar budaya tersebut sesuai dengan kriteria *sustainable tourism*.<sup>28</sup>

## 1.6. Kerangka Teoretis

Penelitian ini berfokus pada identitas yang berkembang pada Kesultanan Siak Sri Indrapura. Kwame Anthony Appiah berpendapat sebagai berikut. *Pertama,*

---

<sup>27</sup> Aidil Kurniawan, “Hubungan Perkembangan Kota Siak Sri Indrapura dengan Kawasan Cagar Budaya Istana Asserayah Al-Hasyimiah”, *skripsi* (Yogyakarta: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, 2017).

<sup>28</sup> Abdul Harits Ritonga & Siti Fatimah, *loc. cit.*

Setiap identitas datang dengan pelabelan, sehingga untuk memahami identitas seseorang harus memahami label tersebut. *Kedua*, identitas tersebut dianggap penting bagi pemegangnya. Hal ini karena identitas dapat memberikan gambaran bagaimana seseorang dapat cocok dengan dunianya. Selain itu, identitas membentuk pikiran dan tindakan pemegangnya, yakni alasan mengapa mereka berpikir atau bertindak dengan cara tertentu. *Ketiga*, identitas membentuk pikiran dan tindakan orang lain kepada pemegang identitasnya, baik terhadap sesama ataupun orang-orang yang berbeda identitas.<sup>29</sup>

Stuart Hall menjelaskan ada dua posisi berbeda dalam memahami identitas budaya. Posisi *pertama* menjelaskan konsep identitas budaya sebagai sebuah budaya bersama yang satu, berdasarkan kesamaan keturunan dan sejarah, yang semacam ‘jati diri’ yang kolektif, sebagai ‘sebuah bangsa’.<sup>30</sup> Konsepsi identitas budaya semacam ini memainkan peran penting dalam perjuangan bangsa yang terjajah, termasuk Indonesia dengan beribu latar sosial-budaya yang berbeda disatukan dengan penjajahan Belanda dan kesamaan rumpun. Pandangan kedua adalah bahwa sebagaimana banyak persamaan, ada titik kritis perbedaan yang mendalam dan signifikan, yang membentuk “apakah kita yang sebenarnya”, atau—  
1 karena keterlibatan sejarah—“kita telah menjadi apa”. Identitas budaya datang dengan sejarah, yang tentu mengalami perubahan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Kwame Anthony Appiah, *The Lies that Bind: Rethinking Identity: Creed, Country, Colour, Class, Culture* (London-New York: Liveright Publishing Corporation, 2018), hlm. 10-14.

<sup>30</sup> Stuart Hall, “Cultural Identity and Diaspora”, dalam Jonathan Rutherford, *Identity: Community, Culture, Difference* (London: Lawrence & Wishart), hlm. 223.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 225.

Setiap identitas kebudayaan dibentuk oleh suatu kelompok melalui penciptaan simbol-simbol budaya berikut makna dan gagasannya, yang kemudian memiliki sejarah dan dilestarikan turun temurun. Dari perspektif komunikasi, sebuah identitas budaya diciptakan, dinegosiasikan, diteguhkan, dan ditantang melalui komunikasi. Identitas tersebut muncul ketika terjadi pertukaran pikiran antar manusia. Persamaan dan perbedaan identitas bergantung pada posisi seseorang (kelompok) dengan orang (kelompok) lain, pentingnya identitas tersebut bagi mereka masing-masing, topik dan konteks, serta interpretasi dan atribusi. Karakteristik dari identitas budaya terdiri dari tujuh macam yaitu: sudut pandang pribadi, yakni *avowal* (pengakuan dari diri sendiri) dan *ascription* (pengakuan dari orang lain); cara mengekspresikan identitas tersebut, yakni melalui *core symbols* (simbol inti), *labels* (label) dan *norms* (norma); ruang lingkup identitas, baik secara individual, relasional, maupun komunal, sifat identitas antara bertahan (*enduring*) dan berubah (*changing*); komponen kognitif, afektif dan behavioral dari sebuah identitas; interpretasi dari kandungan dan relasinya, antar golongan yang saling berinteraksi; serta ciri khas (*salience*) dan ragamnya (*variation*).<sup>32</sup>

Manuel Castells membagi tiga macam pembentukan identitas. Pertama, *legitimizing identity*, yakni identitas yang terbentuk dari lembaga sosial terstruktur yang dominan beserta agennya (aktor sosial) untuk memperluas dan menjadikan identitas itu masuk akal dalam kehidupan masyarakat. Kedua, *resistance identity*, muncul dari kelompok/masyarakat yang berada di dalam kondisi tertekan

---

<sup>32</sup> Mary Jane Collier, "Cultural Identity and Intercultural Communication", dalam Larry A. Samovar, Richard E. Porter, Edwin R. McDaniel, Carolyn Sexton Roy, *Intercultural Communication: A Reader, 14th edition* (Boston: Cengage Learning, 2015), hlm. 56-59.

(direndahkan atau dilabeli stereotip) sehingga menegaskan diri dengan prinsip-prinsip, atau karakteristik, yang berbeda dengan masyarakat dominan. Ketiga, *project identity*, yakni ketika aktor sosial merangkai identitas baru berdasarkan modal budaya yang tersedia yang membentuk ulang posisi masyarakatnya dengan yang lain.<sup>33</sup>

Untuk memahami kerajaan dalam penelitian ini, kita harus mendudukan konsep dasarnya. Monarki dalam bentuk aslinya adalah “a state ruled by a single absolute hereditary ruler” (suatu negara yang diperintah oleh seorang penguasa turun temurun yang mutlak)<sup>34</sup> dan merupakan salah satu bentuk pemerintahan tertua di dunia. Monarkisme berarti “a belief in the necessity or desirability of monarchy” (keyakinan akan kemestian dan keinginan pada monarki).<sup>35</sup> Namun, makna monarkisme berbeda menurut pembahasannya. Ketika berbicara dalam konteks sebelum abad ke-18, monarkisme berkaitan dengan sikap ideal seorang raja dalam pemerintahannya yang absolut, terutama pada abad ke-17 dan 18,<sup>36</sup> dan setelah Revolusi Prancis monarki selalu dipasangkan dengan rivalnya, republikanisme. Pada masa kontemporer, pendukung monarkisme mengukung monarki terbatas dan mendasari dukungan tersebut pada kegunaan institusi tersebut

---

<sup>33</sup> Manuel Castells, *The Power of Identity*, 2<sup>nd</sup> edition (West Sussex: John Wiley & Sons Ltd., 2010), hlm. 8.

<sup>34</sup> Vernon Borgdanon, *The Monarchy and the Constitution* (New York: Clarendon Press, 1995), hlm. 1.

<sup>35</sup> Lincoln Allison, “Monarchism”, dalam Garret W. Brown, Iain McLean & Alistair McMillan (editor), *The Concise Oxford Dictionary of Politics & International Relations* (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm. 857-858.

<sup>36</sup> Hans Blom, John Christian Laursen, dan Luisa Simonutti, “Introduction, dalam Hans Blom, John Christian Laursen, dan Luisa Simonutti (ed.), *Monarchisms in the Age of Enlightenment: Liberty, Patriotism, and the Common Good* (Toronto: University of Toronto Press, 2007), hlm. 3-15.

dalam konteks tertentu, termasuk perwujudan simbolis dari sejarah suatu negara.<sup>37</sup> Penelitian kontemporer mengenai monarkisme membahas beberapa negara bekas monarki yang rakyatnya masih memiliki dukungan terhadap restorasi monarki seperti di Serbia, Rumania dan Bulgaria.<sup>38</sup>

Namun, monarki sering dipahami dalam konteks politik skala besar, yaitu negara, baik absolut maupun konstitusional, dan sebagai lawan dari republikanisme. Membatasi konteks monarki sebagai institusi politik praktis akan menutupi diskusi dari aspek lain, seperti sosiologi dan antropologi. Secara khusus, kemunculan kembali monarki di Indonesia tidak membawa konsekuensi politik apapun. Untuk memahami monarki secara luas, Woodacre membuat konsepsi berdasarkan tiga area dengan masing-masing tiga komponen kunci.<sup>39</sup> Komponen penentu peran seorang raja terletak pada *power* (kekuasaan), *law* (hukum), dan *religion* (agama). Aspek ranah kekuasaan raja ialah *dynasty* (dinasti), *court* (“istana”, dapat juga bermakna “dewan”) dan *realm* (wilayah kekuasaan). *Ceremonial* (“upacara”, hal yang bersifat seremonial), *representation* (perwakilan) dan *display* (tampilan) berguna untuk menegaskan peran dan ranah kekuasaan raja tersebut.

---

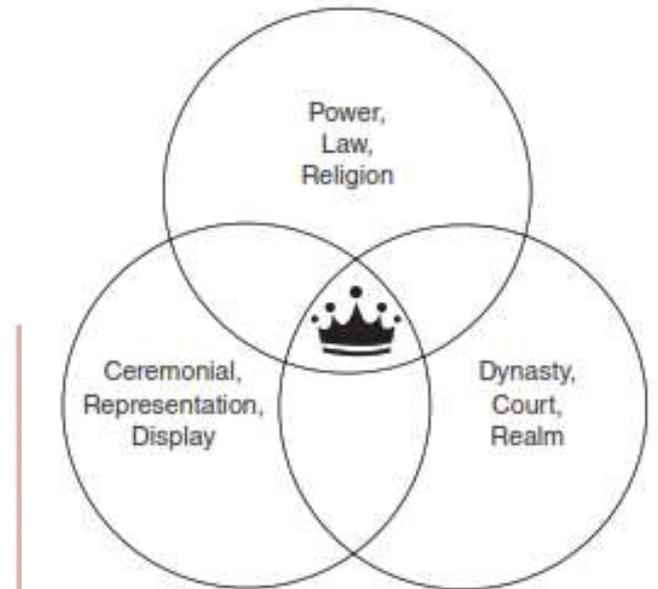
<sup>37</sup> Lincoln Allison, *loc. cit.*

<sup>38</sup> Peter Sundström, "Emergence of monarchies? A Comparative study of three East European countries", *tesis* (Örebro: School of Humanities, Education and Social Sciences Örebro University 2014), hlm. 50-51.

<sup>39</sup> Elena Woodacre, “Understanding the Mechanisms of Monarchy”, dalam Elena Woodacre *et al.* (ed.), *The Routledge History of Monarchy* (New York: Routledge, 2019), 2-3.

### Bagan 1

#### Elemen-elemen Kunci yang Membentuk Sebuah Monarki



Keterangan : Bingkai teoritis berbentuk diagram venn yang berisi tiga aspek dalam kajian tentang monarki

Sumber : Elena Woodacre, "Understanding the Mechanisms of Monarchy", dalam Elena Woodacre *et al.* (editor), *The Routledge History of Monarchy* (New York: Routledge, 2019), hlm. 3.

Penulis menerapkan kerangka teoretis tersebut pada kasus identitas Siak Sri Indrapura sebagai sebuah monarki. Monarki (dalam berbagai nama seperti kerajaan, kesultanan, kadipaten dan sebagainya) memiliki sejarah panjang di Indonesia sejak kemunculan peradaban Hindu-Buddha, tetapi fokus penulis adalah identitas monarkinya, mulai dari masa kedaulatannya, masa kolonial Belanda hingga setelah kemerdekaan Indonesia. Belanda memberikan status *zelfbestuur* kepada berbagai monarki lokal di Hindia Belanda.<sup>40</sup> Dari status *zelfbestuur*, Pemerintah Republik

<sup>40</sup> Robert Cribb & Audrey Kahin, *Historical Dictionary of Indonesia*, (Oxford: Scarecrow Press, 2004), hlm. 462.

Indonesia membuka kesempatan pembentukan daerah istimewa<sup>41</sup> dan swapraja.<sup>42</sup> Daerah tersebut hanya dapat mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah yang berasal “dari keturunan keluarga yang berkuasa”<sup>43</sup> dan sisanya “tidak berbeda dengan pemerintahan di daerah biasa; kekuasaan pemerintahan ada ditangan rakyat”.<sup>44</sup> Hampir tidak ada lagi daerah istimewa sejak tahun 1959,<sup>45</sup> dan sistem swapraja sepenuhnya dihapus pada tahun 1965.<sup>46</sup> Status swapraja dan penghapusannya menjadi salah satu faktor historis kemunculan kembali monarki di Indonesia pasca Reformasi, yang akan penulis bahas dalam bab berikutnya.

### 1.7. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Tesis ini disusun sebagai sebuah penelitian sejarah, yang melewati empat tahap klasik dari metode sejarah: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi atau konstruksi sejarah.<sup>47</sup> Rincian metode penelitian tesis ini dipaparkan di bawah ini.

Penulis akan menelusuri sumber-sumber sejarah berkaitan dengan Kesultanan Siak Sri Inderapura. Sumber dokumen seperti arsip, silsilah keluarga

<sup>41</sup> Penetapan daerah istimewa didasari oleh UU no. 22 tahun 1948

<sup>42</sup> Penetapan daerah swapraja didasari oleh Konstitusi RIS pasal 64-67 dan UUDS 1950 pasal 132-133

<sup>43</sup> UU no. 22 Tahun 1948, pasal 18 ayat (5)

<sup>44</sup> UU no. 22 Tahun 1948, penjelasan nomor 22.

<sup>45</sup> Dengan penghapusan Daerah Istimewa Berau, Bulongan dan Kutai, melalui UU no. 27 Tahun 1959, maka hanya tersisa Daerah Istimewa Aceh dan Yogyakarta

<sup>46</sup> UU No. 18 Tahun 1965 pasal 88 ayat (3)

<sup>47</sup> Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method (2<sup>nd</sup> edition)* (New York: Alfred A. Knopf, 1969), hlm. 52; Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007, hlm. 13.

kerajaan, surat-surat kerajaan, berita koran dan media elektronik kebanyakan didapat dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak dan Provinsi Riau, serta berbagai *website* berita terkait. Sumber literatur berupa tulisan-tulisan ilmiah dan karya sejarah lainnya berkaitan dengan dua kesultanan tersebut, yang mudah didapat di Perpustakaan Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Siak.

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak terkait dengan Kekerabatan Resam berkaitan dengan upaya menghidupkan kembali Kesultanan Siak Sri Inderapura. Penulis juga mewawancarai beberapa pihak lain terkait dengan kasus ini, seperti Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Siak dan pegawai Istana Siak yang pernah berurusan dengan para pengklaim sultan Siak.

Sumber-sumber yang telah diperoleh akan melewati tahap kritik sumber dari segi eksternal (autentisitas) dan internal (kredibilitas). Kritik sumber ini sekaligus memilah sumber yang relevan bagi penulisan tesis. Interpretasi memperjelas konteks dan makna dari sumber-sumber yang didapat untuk kemudian disusun secara kronologis dan kritis. Dalam konstruksi ini, penulis memakai pendekatan multidisipliner dari segi budaya dan politik. Hasil konstruksi tersebut akan menjadi karya tesis dengan judul seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Susunan tesis ini terdiri atas lima bab yang dijabarkan sebagai berikut. Bab I menyajikan penyebab munculnya ide penulisan karya ilmiah ini dengan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah disertai batasan, tujuan dan manfaat.

Bab ini juga dilengkapi dengan tinjauan pustaka, kerangka teoretis, serta metode dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura pada masanya berdaulat, dimulai saat Raja Kecil mendirikan kerajaannya pada tahun 1723 hingga Sultan Syarif Ismail menyerahkan kedaulatan Siak melalui Kontrak 1858. Penulis memberikan gambaran geografis dan demografis sebelum menjabarkan identitas yang dibangun dalam Kesultanan Siak pada masa ini, yang dibagi dalam dua periode: Kesultanan Siak di bawah Wangsa Abdul Jalil dan Wangsa Syahabuddin

Bab III menjelaskan identitas Kesultanan Siak saat telah dikuasai Belanda di bawah sistem *zelfbestuur* hingga saat wilayah Siak berada di bawah pemerintah Indonesia. Identitas Kesultanan terbagi menurut masa awal *zelfbestuur* Siak hingga pemerintahan Syarif Kasim I, masa pemerintahan Syarif Hasyim, masa pemerintahan Syarif Kasim II, serta saat kemerdekaan hingga Gerakan Swapraja Siak.

Bab IV menjelaskan identitas Kesultanan Siak setelah mangkatnya Syarif Kasim II, yang terbagi atas masa menggali dan menjaga identitas (1968-1998) dan masa setelah pembentukan Kabupaten Siak (1998-2023). Pada periode terakhir, pembahasan juga mengarah pada pembentukan Kekerabatan Resam, klaim sultan Siak baru, dan penjelasan di balik kontroversi tersebut. Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan tesis ini.

## BAB II

### IDENTITAS KESULTANAN SIAK BERDAULAT (1723-1858)

#### 2.1. Awal Pembentukan Kesultanan Siak

Untuk memahami identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura, perlu dijabarkan bagaimana kondisi wilayah Siak itu sendiri, mulai dari kondisi geografis hingga aspek strategisnya di bidang ekonomi. Wilayah Siak terletak di pesisir timur Sumatera, dialiri oleh Sungai Siak, salah satu sungai besar di sana selain Sungai Kampar dan Rokan. Sungai Siak memiliki aliran yang tenang dan dalam, sehingga memudahkan kapal untuk berlayar. Sungai Rokan di utara di bagian hilir penuh dengan lumpur dan gundukan pasir, sementara Sungai Kampar di bagian hilir berkelok dan kadang memunculkan ombak pasang yang dapat menghantam kapal di sana,<sup>1</sup> sehingga pedagang yang berlayar dari Sungai Kampar biasanya akan berhenti di Teratak Buluh sebelum menyeberang ke Sungai Siak. Selain itu, bila melihat peta, muara Sungai Siak terletak lebih dekat dengan kota Melaka.

---

<sup>1</sup> Timothy P. Barnard, *Multiple Centres of Authority: Society and Environment in Siak and Eastern Sumatra, 1674-1827* (Leiden: KITLV Press, 2003), hlm. 20-21 Ombak pasang di hilir Sungai Kampar saat ini dikenal bagi masyarakat Pelalawan sebagai Ombak Bono dan malah menjadi objek wisata bagi peselancar.

## Peta 1

### Gambaran lokasi Siak dalam peta sederhana



Keterangan : gambaran lokasi Siak di antara pesisir timur Sumatera dan Selat Melaka

Sumber : disederhanakan dari Timothy Barnard, *Multiple Centres of Authority: Society and Environment in Siak and Eastern Sumatra, 1674-1827* (Leiden: KITLV Press, 2003), hlm. xv.

Pesisir timur Sumatera yang dilewati Sungai Siak merupakan daerah strategis; sebelah barat daerah tersebut menghasilkan komoditas pertanian penting seperti beras dan lada, sedangkan sebelah timurnya, Selat Malaka, merupakan jalur lalu lintas perdagangan internasional. Komoditas asli adalah hasil hutan seperti kayu, madu sialang dan guliga. Penemuan timah di sekitar Tapung Kiri dan Kampar Kanan pada abad ke 17 menambah komoditas lokal bagi pesisir timur Sumatera,<sup>2</sup> yang kemudian diperdagangkan ke Selat Malaka. Sementara itu, agrikultur tidak pernah berkembang pesat di wilayah ini, karena sekalipun ekosistem hutannya

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 39

sangat beragam, unsur haranya tidak dapat mendukung aktivitas pertanian.<sup>3</sup> Dengan demikian, perkembangan ekonomi di sini bergantung pada aktifnya jalur lalu lintas antara hulu (Minangkabau) dan hilir (Selat Malaka).

Sungai Siak merupakan salah satu jalur perdagangan Minangkabau dari hulu, sehingga secara alami terdapat pengaruh perantau Minangkabau di sekitarnya. Di sisi lain, masyarakat lokal juga menetap di sana, dan terjadilah kawin campur dengan perantau tersebut. Apabila terjadi kawin campur dengan perempuan penduduk lokal, anak-anaknya cenderung mengikuti adat ibunya; walaupun kedua orang tuanya adalah orang Minangkabau, tidak ada sosok penjaga adat seperti mamak di Rantau. Kondisi seperti itu menyebabkan basis identitas keturunannya bergeser, dari sistem matrilineal (suku dalam terminologi Minangkabau) menjadi sistem kawasan atau etnik (suku dalam terminologi Siak).<sup>4</sup> Sistem suku di Siak ini bukanlah sistem yang termasuk ke dalam kebudayaan Minangkabau, melainkan hasil akulturasi antara perantau Minang dengan penduduk lokal pesisir timur Sumatera. Suku-suku tersebut baru terkodifikasi dalam catatan kerajaan Siak pada tahun 1901 melalui *Bab al-Qawaid*.

Sebagai salah satu wilayah yang dilewati jalur perdagangan internasional, masyarakat di pesisir timur Sumatera juga telah berinteraksi dengan orang-orang bukan Minang/Melayu seperti Bugis dan pedagang asing. Bengkalis telah dikenal

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16. Pertanian tidak pernah berkembang pesat di wilayah ini, kecuali setelah memasuki abad ke-20 dan terlihat sekarang ini dengan maraknya perkebunan sawit sepanjang Kabupaten Siak.

<sup>4</sup> Leonard Andaya, *Selat Malaka: Sejarah Perdagangan dan Etnisitas* (Depok: Komunitas Bambu, 2019) *op. cit.*, hlm. 96-97.

sebagai salah satu tempat berlabuh bagi pedangang Arab, Eropa, India, dan Tionghoa.<sup>5</sup> Orang India sering memperdagangkan lada dan emas di wilayah ini,<sup>6</sup> sementara orang Melayu tertarik dengan kain tenun dari India.<sup>7</sup> Mereka juga bersaing dengan orang Arab yang, selain memperdagangkan kain dan emas, ahli dalam pencatatan dan penanaman modal.<sup>8</sup> Orang Tionghoa biasa berdagang di kota-kota yang sudah ramai seperti Bengkalis dan kemudian Buantan serta membuka toko ketika prospeknya cukup menjanjikan.<sup>9</sup>

Secara politik, Siak bukanlah tanah tidak bertuan; beberapa kekuatan silih berganti menguasai wilayah ini. Bila ingin mengamini seluruh fakta dalam Sulalatus Salatin, maka “Kerajaan Siak” pernah berdiri, dengan Parameswara dari Pagaruyung sebagai rajanya. Parameswara akhirnya ditaklukkan oleh Melaka dan diangkatlah Megat Kudu sebagai raja baru dengan gelar Raja Ibrahim.<sup>10</sup> Hilmans van Anrooij yang telah meneliti cerita rakyat dan peninggalan di Koto Gasib dan sekitarnya menyimpulkan bahwa kerajaan lokal pertama yang berdiri di Siak adalah Kerajaan Gasip. Kerajaan ini ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh, lalu perlahan menjadi bagian dari Johor.<sup>11</sup>

---

<sup>5</sup> Barnard, *op.cit.*, hlm. 30.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 36

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 50

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 89-90

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 83

<sup>10</sup> A. Samad Ahmad, *Sulalatus Salatin: Sejarah Melayu* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, 2008), hlm. 510-512. Catatan kaki *Sulalatus Salatin* merujuk kepada naskah ini.

<sup>11</sup> H.A. Hiljans van Anrooij, *Het Rijk van Siak* (diterjemahkan oleh Wielala, Nur Aisya Zulkifli, dan Khaidir Alimin) (Pekanbaru: Asa Riau, 2016) hlm. 15-18.

Kesultanan Johor merupakan penerus dari Kesultanan Melaka, yang didirikan oleh salah satu putra Mahmud Syah, Alauddin Riayat Syah; putranya satu lagi, Muzaffar Syah, menjadi sultan Perak.<sup>12</sup> Pada akhir abad ke-17 garis keturunan dari raja-raja Melaka akan punah. Ujung garis keturunan itu adalah Sultan Mahmud Syah II. Ia dikatakan dalam sastra Melayu abad ke-19 sebagai seorang pemimpin Melayu yang zalim dan tidak masuk akal. Ia menghukum mati istri Megat Sri Rama dengan kejam, belum lagi hubungannya dengan peri. Ketika hari Jumat ia menuju masjid dengan dibopong (dijulang), Megat Sri Rama membunuh sang sultan, sehingga Mahmud Syah II digelar Marhum Mangkat Dijulang. Sesuai adat kerajaan, Mahmud Syah II digantikan oleh Tengku Bendahara dengan gelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah; sebenarnya Tengku Bendahara berkomplot dengan Megat Sri Rama untuk membunuh sang sultan.<sup>13</sup>

Delapan belas tahun kemudian, muncullah seorang yang mengaku sebagai putra Mahmud Syah II, yaitu Raja Kecil. Menurut *Hikayat Siak*, Raja Kecil, atau nama lahirnya disebut Tuan Bujang, adalah anak dari Mahmud Syah II dan Cik Apong. Beberapa hari sebelum kematiannya, sang sultan yang sedang berahi menyuruh Cik Apong mengumpulkan “air mahnikam” dan menelannya, dengan demikian Cik Apong mengandung. Setelah Mahmud Syah II mangkat, Cik Apong melarikan diri Johor dan ketika melahirkan, ia menitipkan anaknya untuk dibawa

---

<sup>12</sup> *Sulalatus Salatin*, hlm. 202-203.

<sup>13</sup> Virginia Matheson (editor), *Tuhfat al-Nafis: Raja Haji Ahmad dan Raja Ali Haji* (Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti, Sdn. Bhd., 1997), hlm. 39, catatan kaki *Tuhfat al-Nafis* merujuk kepada naskah ini; Muhammad Yusoff Hashim, *Hikayat Siak, Dirawikan oleh Tengku Said* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), hlm. 112, catatan kaki *Hikayat Siak* merujuk kepada naskah ini.

ke tempat lain. Akhirnya, Tuan Bujang dibawa ke Pagaruyung untuk diasuh keluarga Kerajaan Pagaruyung.<sup>14</sup>

Putri Jamilan, istri Yang Dipertuan Sakti raja Pagaruyung, mengasuhnya dengan sayang karena kasihan ayahnya tidak ada. Ia bahkan tidak melarang Tuan Bujang bermain bersama anak-anak raja lainnya, sekalipun di atas singgasana raja. Saat usia tiga belas tahun, ia berkelana ke Palembang dan menjadi pembawa tepak Sultan Lemah Abang. Saat Palembang dikuasai oleh Sultan Anum, Sultan Lemah Abang yang merupakan keponakannya melarikan diri, dan Tuan Bujang mengikuti rombongan tersebut hingga akhirnya Sultan Lemah Abang dapat merebut kembali takhtanya. Di sanalah banyak cerita yang membuktikan bahwa ia bukan anak sembarangan, melainkan bertuah.<sup>15</sup>

Sekembalinya dari Palembang, dimobatkan oleh Raja Pagaruyung, dengan dorongan Putri Jamilan untuk menuntut kematian ayahnya Mahmud Syah II. Segala upacara adat dilakukan untuk membuktikan dirinya anak raja: bunyi-bunyian nobat, bersandar di atas tiang kayu jelatang, pakaian dan mahkota kerajaan dan lain sebagainya. Setelah itu, Tuan Bujang digelari Raja Kecil. Dengan beberapa regalia, termasuk Pedang Sepurejab, potongan rambut Putri Jamilan, serta surat kerajaan dengan cap mohor Pagaruyung, Raja Kecil memulai jalannya menjadi raja Johor.<sup>16</sup>

Ia memulai mengumpulkan pengikut dari Bengkalis, tetapi sebelum mencapainya ia dihentikan oleh syahbandar Bukit Batu, yang masih berada di

---

<sup>14</sup> *Hikayat Siak*, hlm. 113-115.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 115-121.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 115-123.

bawah Johor. Di Bengkalis, ia mendapatkan banyak pengikut dari orang Minang, kemudian pergi ke Batubara dan juga mendapatkan banyak pengikut. Saat hendak mencapai Johor, ia juga mendapat pengikut dari Orang Laut, yang membuktikan dirinya sebagai anak sultan Johor dengan mengubah air asin menjadi tawar. Saat menyerang Johor, meriam-meriam Johor tidak bisa menembak, melainkan keluar air. Demikianlah Raja Kecil menaklukkan Johor, menurut *Hikayat Siak*.<sup>17</sup>

Kisah Raja Kecil dalam *Hikayat Siak* mengungkap banyak hal mengenai identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura. Tentu, dari segi logika banyak keraguan dalam *Hikayat Siak* mengenai munculnya Raja Kecil. Penulis Barat abad ke-18 seperti Netscher meragukan legitimasi Raja Kecil sebagai putra Mahmud Syah II, belum lagi kisah pembuahannya yang tidak logis. Dari perkiraan logisnya, Raja Kecil akan berusia terlalu muda untuk dapat menghimpun berbagai bangsa untuk merebut takhta Johor<sup>18</sup> (belasan tahun, atau 17 tahun bila dihitung dari wafatnya Mahmud Syah II tahun 1699 hingga penaklukan Johor tahun 1718). Penelitian-penelitian abad ke-20 menyatakan, untuk memahami fakta-fakta sastra Melayu maka tidak boleh ditelan begitu saja. Timothy Barnard menyebutkan bahwa pembuahan Raja Kecil adalah salah satu bentuk mitos paling tua dalam kebudayaan Nusantara, dapat ditarik dari peradaban Hindu-Buddha, dan masih dipakai dalam beberapa literatur seperti Babad Kraton tentang kerajaan Surakarta.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 124-126.

<sup>18</sup> Elisa Netscher, *Belanda di Johor dan Siak* (diterjemahkan oleh Wan Ghalib *et al.*) (Pekanbaru: Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan Yayasan Arkeologi dan Sejarah “Bina Pustaka”, 2002), hlm. 90.

<sup>19</sup> Timothy P. Barnard, *op.cit.*, hlm., 58-60.

Leonard Andaya menetapkan dua corak penanda kerajaan Melayu sejak masa Melaka hingga abad ke-18. *Pertama*, paduan “silsilah” tokoh Islam (Andaya menyebut Sulaiman, meskipun Iskandar Dzulkarnain lebih disukai) dengan asal usul mistisnya menciptakan membenaran seorang penguasa sebagai penengah bagi penguasa lain. *Kedua*, kuatnya hubungan penguasa dengan cabang keluarga yang lain, baik dari pernikahan maupun cara lain, yang dengan demikian meredam perpecahan yang mungkin akan terjadi.<sup>20</sup>

Berdasarkan legenda *Hikayat Siak*, maka Raja Kecil adalah kelanjutan sultan Johor yang sejati, dengan kekuatan berbagai bangsa merebut kembali takhta Johor. Hal ini penting dalam menegaskan dinastinya, baik dalam usahanya merebut takhta Johor maupun dalam mendirikan kerajaan baru di Siak. Pertama, asal-usul seorang raja Melayu sangat penting di dalam dunia Melayu. Sejarah Melayu menceritakan asal usul raja Melaka; keturunannya merupakan leluhur dari Iskandar Zulkarnain yang menetap di Palembang, tempat dahulunya berdiri Kerajaan Sriwijaya.<sup>21</sup> Johor sendiri adalah penerus dari Kerajaan Melaka. Dengan mengaku sebagai putra Mahmud Syah, Raja Kecil telah mendapat keramat keturunan Johor.

Keturunan yang agung dan suci tersebut berkaitan pula dengan konsep *daulat* dan *derhaka*. Daulat dan derhaka ini sangat dijunjung dalam kebudayaan Melayu, setidaknya pada masa lalu; seorang Melayu harus menjunjung kedaulatan

---

<sup>20</sup> Leonard B. Andaya, *op.cit.*, hlm. 69

<sup>21</sup> *Sulalatus Salatin*, hlm. 19.

raja dan pantang untuk durhaka padanya.<sup>22</sup> Kisah Hang Jebat yang mengamuk karena kematian Hang Tuah di *Sulalatus Salatin*,<sup>23</sup> serta Megat Sri Rama yang membunuh Mahmud Syah II untuk membalas dendam kematian istrinya dalam *Hikayat Siak* dan *Tuhfat al-Nafis* di atas memperlihatkan bahwa tindakan seseorang yang benar sekalipun tidak dapat menghalangi murka seorang raja, tetapi setiap orang mendapat akibat dari pekerjaannya.<sup>24</sup>

Hal ini berpengaruh pada poin kedua, yakni loyalitas pengikutnya. Ketika orang Melayu percaya bahwa Raja Kecil adalah putra sultan Johor yang terakhir, mereka akan setia padanya, manakala ketika orang Minangkabau tahu bahwa Raja Kecil mendapat titah dari Pagaruyung, mereka juga akan berhimpun kepadanya. Raja Kecil memberikan 'solusi' baru wangsa Melayu, melalui legitimasi dari Kerajaan Pagaruyung. Dengan demikian, ia mendapat jaminan pengakuan keramat, pertama melalui garis keturunan 'ayah', Mahmud Syah II, kedua melalui keramat Pagaruyung, yang dengannya kekuatan orang Minangkabau di pesisir Sumatera timur dapat dihimpun.

---

<sup>22</sup> "Daulat" dan "durhaka" telah dibahas secara ekstensif, misal dalam Mohammad Yusoff Hashim, "Daulat" dalam Tradisi Budaya dan Politik Kesultanan Melayu Abad ke-15 dan Awal Abad ke-16: Antara Mitos dan Realiti", *Sejarah*, Vol. 3 No.3, 1995.

<sup>23</sup> *Sulalatus Salatin*, 138-140.

<sup>24</sup> Kepercayaan ini masih penulis temui di masa sekarang. Ketika penulis mewawancarai beberapa keturunan Tengku perihal orang-orang yang mengklaim takhta Siak, mereka juga mengaitkan "darah keturunan sultan" dengan tulah yang mencoba mengklaimnya. Misalnya, Tengku Sufyan Tsauri, anggota Kekerabatan Resam, berpendapat bahwa klaim-klaim darah keturunan sultan yang tidak benar menyebabkan cepatnya orang menemui 'akibatnya', sebagaimana Tengku Syatir yang mengalami stroke setelah mengaku sebagai sultan Siak, atau Azis Zaenal, bupati Kampar, yang dinobatkan sebagai Raja Kampa pada April 2019 kemudian meninggal pada bulan Desember tahun yang sama.

Di samping semua itu, ada alasan praktis mengapa banyak orang mendukung Raja Kecil. Johor sebenarnya bertindak sewenang-wenang terhadap penduduk di pesisir timur Sumatera. Johor terus menikmati hasil lalu lintas perdagangan di Selat Malaka. Pada suatu waktu, laksamana Johor menuntut semua batu guliga dari Siak, Bengkalis dan sekitarnya harus diserahkan kepada Johor, belum lagi aksi pembajakan yang dilakukannya waktu itu. Dengan berkuasanya Johor pada kurun 1690-an, perdagangan semakin ketat.<sup>25</sup> raja Kecil dalam suratnya kepada VOC mengatakan bahwa penduduk tersebut telah muak diperlakukan bagai hamba sahaya.<sup>26</sup>

Namun, pada corak kedua, Raja Kecil tidak dapat mempertahankan aliansinya, baik dengan Tengku Bendahara maupun orang Bugis. Pertama, ia yang pada awalnya hendak menikahi Tengku Tengah justru menikahi adiknya, Tengku Kamariah, sehingga membuat malu Tengku Tengah, dengan demikian melukai aliansi dengan Tengku Bendahara. Kedua, Daeng Parani menuntut janji Raja Kecil untuk dijadikan Raja Muda karena telah menaklukkan Johor bersama-sama. Namun, pembesar kerajaan menolak dengan alasan Daeng Parani baru tiba ketika Johor telah ditaklukkan, dan Raja Kecil mengikuti pendapat tersebut. Sejak saat itu, Daeng Parani dan orang-orang Bugis beraliansi dengan Tengku Bendahara dan mulai merebut Johor lagi. Pertama, Tengku Tengah menikah dengan Daeng Parani dan menuntut balas malu melaluinya. Kedua, Raja Sulaiman, anak Tengku

---

<sup>25</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*, hlm. 50-53.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

Bendahara, menjanjikan jabatan Raja Muda kepada Daeng Parani kalau ia berhasil merebut Johor.<sup>27</sup>

Dalam Hikayat Siak dan Tuhfat al-Nafis, Kudeta dimulai dengan pihak Tengku Bendahara menculik Tengku Kamariah pada malam hari atas gagasan Tengku Tengah. Hal itu membangkitkan amarah Raja Kecil, yang menganggap kejadian ini didalangi oleh Tengku Bendahara kemudian mengirim orang menyerangnya. Tengku Bendahara melarikan diri ke berbagai tempat hingga sampai ke Kuala Pahang di mana ia tewas dan digelar Marhum Kuala Pahang. Kejadian ini menyebabkan Raja Kecil melarikan diri dari Johor, karena “negeri celaka”. Ia sempat berdiam di Riau (kepulauan Riau sekarang) dan membuat istananya, tetapi kemudian diserang Johor-Bugis sehingga keluar dari sana dan berpindah-pindah di sekitar kepulauan itu.<sup>28</sup> Setelah mendapatkan istrinya, Raja Kecil undur ke pesisir timur Sumatera.

## 2.2. Raja Melayu: Kesultanan Siak di bawah Wangsa Abdul Jalil

Raja Kecil mendirikan kerajaannya sendiri di Buantan. Dari situlah ia mendirikan tatanan pemerintahan baru yang cukup berbeda dari kerajaan-kerajaan Melayu lainnya. Dengan sebagian besar pengikutnya yang merupakan keturunan Minang, ia menegakkan sistem pemerintahan yang unik dan berbeda dari Johor. Dengan masyarakat lokal, ia mengintegrasikan sistem yang sudah ada ke dalam kerajaannya.

---

<sup>27</sup> *Hikayat Siak*, hlm. 127-128.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 128-130. *Tuhfat al-Nafis*, hlm. 55-62.

Buantan adalah sebuah tempat baru yang terletak agak menjauh dari muara sungai, sebagaimana pusat kerajaan lain di pesisir timur Sumatera. Jarak antara Buantan dengan hilir sungai Siak diperkirakan mencapai 85 km. Dengan perompakan yang marak di Selat Malaka seiring dengan ramainya lalu lintas perdagangan di sana, ditambah dengan saingan kerajaan lain, banyak pusat kerajaan berdiri menjauh dari pesisir timur. Nilai lebih lain selain terhindar dari serangan tersebut adalah mereka dapat memperkuat hubungan dengan kekuatan di hulu sungai.<sup>29</sup> Dalam hal ini, Raja Kecil menghindari Johor yang mungkin menyerang dari pesisir melalui Bengkalis, sekaligus dapat memegang kontrol atas lalu lintas dari hulu ke muara sungai Siak. Selain Buantan, pusat pemerintahan yang didirikan sultan-sultan Siak juga menjauh dari pesisir, seperti Mempura ( $\pm 15$  km dari Buantan), Senapelan (Pekanbaru sekarang,  $\pm 100$  km dari Buantan) dan terakhir Koto Tinggi (seberang Mempura).

Dalam sistem pemerintahannya, Raja Kecil membentuk pemerintahan dengan Orang Besar-besar sebagai semacam penasehatnya. Empat Orang Besar-besar yang berperan besar adalah Datuk Empat Suku. Sistem empat datuk ini telah disinggung dalam *Hikayat Siak* yang menandai adanya pengaruh Minangkabau. *Hikayat Siak* menyebut empat datuk dalam sistem pemerintahan Pagaruyung, sedangkan Raja Kecil setelah penobatannya diberikan empat orang hulubalang, yakni Datuk Lebai Tasi, Datuk Gergaji, Raja Mendeling dan Sutan Pendalihan. Di

---

<sup>29</sup> Gusti Asnan, *Sungai dan Sejarah Sumatera* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hlm. 84-86.

Bengkalis, ia juga menetapkan empat Penghulu, ditambah Tanah Putih dan Kubu.<sup>30</sup> Ketika ibukota Siak berpindah ke Senapelan, empat penghulu baru juga diangkat lagi. Jejak Empat Suku ini terlihat dalam sistem pemerintahan raja yang pernah berada di bawah taklukan Siak, seperti Kesultanan Deli, Serdang dan Langkat.<sup>31</sup>

19  
5  
Lama-kelamaan, para datuk ini disebut masing-masing sebagai Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Menurut Anrooij para datuk ini dapat ditelusuri dari tempat asalnya: Datuk Lima Puluh dari Geuting, Datuk Tanah Datar dari Sumanik, dan Datuk Pesisir dari Sianok Koto Gadang. Datuk Pesisir membawahi rakyatnya yang berasal dari Agam (yang *luhak*-nya mencapai pesisir barat Sumatra), Datuk Lima Puluh dari bagian timur dataran tinggi Minangkabau (Luhak Limo Puluh Kota) dan Datuk Tanah Datar dari wilayah selatan (Luhak Tanah Datar). Datuk Kampar, di sisi lain, muncul pada masa Sultan Ismail pada akhir abad ke-18. Rakyat yang berada di bawah Datuk Kampar adalah semua orang Melayu di Siak yang tidak termasuk ke dalam warga tiga datuk lainnya.<sup>32</sup> Tidak ada indikasi tempat asal mereka, baik dalam *Hikayat Siak* maupun dokumen-dokumen Belanda;<sup>33</sup> setidaknya, masyarakat Siak abad ke-19 telah menganggapnya sebagai fakta, dan hal itu dikodifikasikan di dalam *Bab al-Qawaid*.

Selain Datuk Empat Suku, pejabat istana lainnya adalah Tunggul Manah dan Orang Besar Kerajaan. Tunggul Manah adalah sekumpulan penghulu dan batin

---

<sup>30</sup> *Hikayat Siak*, hlm. 123.

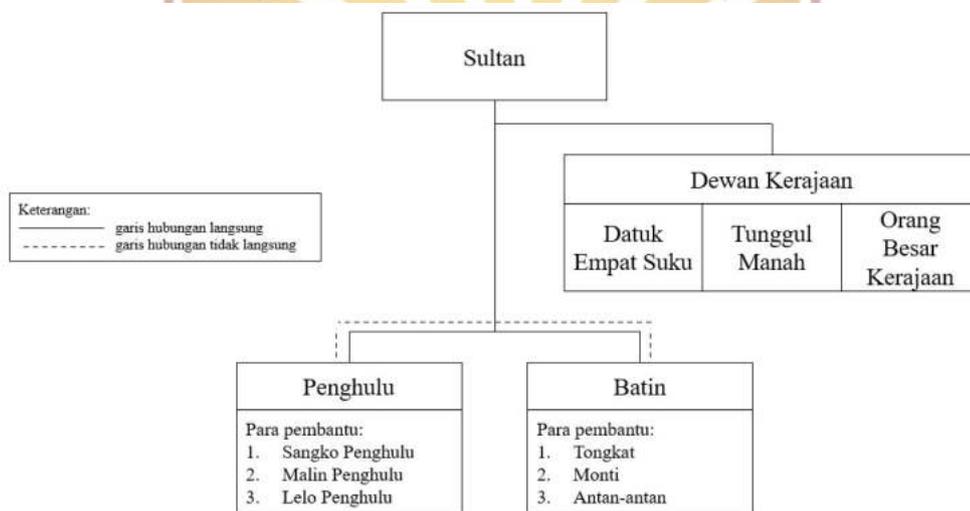
<sup>31</sup> Tengku H.M. Lah Husny, *Lintasan Sejarah Peradaban Sumatera Timur* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 245.

<sup>32</sup> H.A. Hijmans van Anrooij, *op. cit.*, hlm. 57

<sup>33</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*, hlm. 75

yang dituakan dan bertugas memberi nasehat tentang adat, sedangkan Orang Besar Kerajaan memberi nasehat di bidang pertahanan. Ketiga kelompok tersebut membentuk Dewan Kerajaan. Di bawahnya adalah para penghulu dan batin yang berkuasa di wilayahnya masing-masing. Dewan Kerajaan serta para penghulu dan batin bertanggung jawab langsung kepada sultan.<sup>34</sup>

**Bagan 2**  
**Sistem Pemerintahan Kesultanan Siak Wangsa Abdul Jalil**



Sumber : Ellya Roza, *Kerajaan Siak 1723-1908: Perspektif Sejarah dan Sosiobudaya* (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 128.

Corak atau kecenderungan pemerintahan raja-raja Siak dapat pula dibagi menjadi dua. Pertama, corak yang cenderung kepada sistem Melayu, yang dilakukan oleh Sultan Mahmud Syah, Sultan Ismail, dan Sultan Yahya. Mereka mempunyai pertalian keluarga dengan dinasti Johor dan Terengganu, yang menerapkan sistem Melayu. Corak yang cenderung kepada negosiasi lokal adalah

<sup>34</sup> Ellya Roza, *Kerajaan Siak 1723-1908: Perspektif Sejarah dan Sosiobudaya* (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 126-128.

Sultan Alamuddin, Sultan Muhammad Ali. Sebagai keturunan bukan bangsawan Melayu, mereka tidak terlalu terikat dengan sistem Melayu, serta lebih banyak mengandalkan dan memanfaatkan sistem lokal. Namun, unsur-unsur yang bersifat kehormatan tetap bernuansa Melayu, sebagaimana tampak dalam Nobat Siak dan makam para raja.

Nobat Kesultanan Siak setidaknya disinggung dalam Hikayat Siak perihal penobatan Raja Kecil. Nobat Siak terdiri atas sebuah serunai dan dua gendang kembar (gendang *menjejalu* dan *meningkah*). Sebagaimana adat Melayu umumnya, selama Nobat dimainkan, tidak ada yang boleh berjalan sehingga selesai bunyi Nobat tersebut; pelanggarnya biasanya akan didenda.<sup>35</sup> Berbeda dengan kelengkapan Nobat di dunia Melayu, tidak ada Gendang Nekara dalam Nobat Siak. Gendang Nekara biasanya merupakan gendang sakral dalam Nobat Melayu. Hal ini berarti dua kemungkinan: Nobat Siak mencerminkan tradisi Minangkabau, atau pada awalnya Gendang Nekara tidak begitu penting. Namun, dengan melihat bahwa hampir seluruh Nobat Melayu memakai Gendang Nekara, termasuk di Pelalawan, Indragiri dan Serdang, kemungkinan pertama lebih kuat.

---

<sup>35</sup> H.A. Hijmans van Anrooij, *op. cit.*, hlm. 63-64.

### Gambar 1 Gendang Nobat Siak



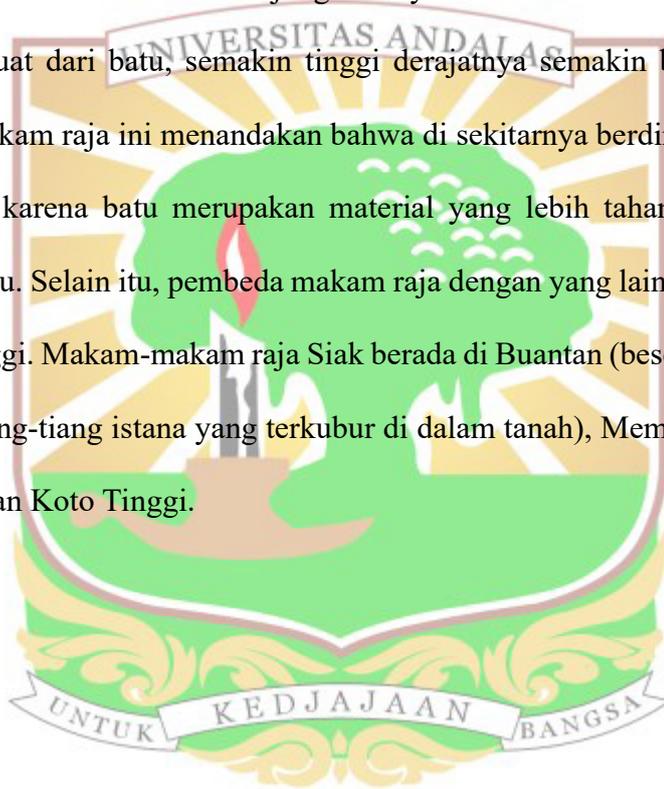
Keterangan : salah satu gendang Nobat Siak yang dipakai dalam pertabalalan sultan dan upacara-upacara kerajaan, kini tersimpan di Istana Siak

Sumber : <https://mehttravelwithme.blogspot.com/2016/07/istana-asserayah-hasyimiyah-istana-siak.html>, diakses tanggal 18 Februari 2025

Nobat, selain dalam pertabalalan, juga dimainkan saat upacara pemakaman. Pemakaman sultan seringkali diiringi dengan pengangkatan sultan baru. Sebagai contoh, *Syair Raja Siak* menceritakan bagaimana Sultan Mahmud Syah II dimakamkan. Setelah jenazah diselenggarakan oleh imam dan kadi kerajaan, Raja Ismail bersiap untuk diangkat menjadi sultan baru, yang disambut oleh seluruh pejabat istana. Jenazah sultan dimasukkan ke keranda, kemudian diletakkan di atas Raja Diraja, tandu jenazah yang dinaungi delapan payung. Raja Diraja diarak menuju makam beserta sultan baru, seluruh pembesar dan pegawai kerajaan, delapan di antaranya memakai kain tampan. Nobat dimainkan sepanjang

perjalanan. Jenazah diturunkan oleh imam dan kadi, lalu dikubur. Talqin oleh imam dan kadi menutup prosesi pemakaman.<sup>36</sup>

Seluruh makam sultan dapat dikenali melalui jirat makam mereka. Makam ini menunjukkan pengaruh Aceh yang pernah menguasai Siak serta beberapa daerah lainnya di Sumatera dan Semenanjung Malaya.<sup>37</sup> Makam-makam Melayu pada umumnya dibuat dari batu, semakin tinggi derajatnya semakin besar dan bagus ukirannya. Makam raja ini menandakan bahwa di sekitarnya berdiri pusat kerajaan Siak, terlebih karena batu merupakan material yang lebih tahan lama daripada konstruksi kayu. Selain itu, pembeda makam raja dengan yang lain adalah letaknya yang lebih tinggi. Makam-makam raja Siak berada di Buntan (beserta peninggalan berupa sisa tiang-tiang istana yang terkubur di dalam tanah), Mempura, Senapelan (Pekanbaru) dan Koto Tinggi.



---

<sup>36</sup> Donald J. Goudie, *A Critical Edition of The Syair Perang Siak, With a Consideration of its Literary and Historical Significance* (tesis Universitas London), hlm. 190 (Syair Perang Siak, bait 204-215).

<sup>37</sup> Suprayitno, "Acehnese Tombstones in Southeast Asia: Chronology and a Typology", *ISVS e-journal*, Vol. 10, Issue 11, hlm. 362.

**Gambar 2**  
**Makam Raja Kecil di Buantan, Siak**



**Keterangan** : Makam Raja Kecil di Buantan, Siak. Jiratnya menunjukkan budaya Aceh dan merupakan struktur asli makam, sedangkan bangunan yang menaunginya adalah hasil revitalisasi makam pada tahun 2008.

**Sumber** : dokumentasi pribadi, diperoleh tanggal 19 September 2024

*Hikayat Siak* memulai kisah pemerintahan Raja Kecil di Buantan dengan membalas dendam perbuatan Syahbandar Bukit Batu. Karena ia bersumpah akan meminum darahnya, ia penuhi tanpa harus membunuhnya, dengan melukai tangan syahbandar itu dan meminum tetesan darahnya, setelah itu orang Bukit Batu takluk padanya.<sup>38</sup> Belakangan, pemimpin Bukit Batu—yang kemudian bergelar Datuk Laksamana—menjadi bagian penting dari pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Namun, sebelum menjadi sebuah wilayah yang mapan, pemerintahan Raja Kecil di Siak lebih banyak diwarnai dengan peperangan antara Siak dengan

---

<sup>38</sup> *Hikayat Siak*, hlm. 135. Kisah ini merupakan prototipe—atau setidaknya contoh—dari tradisi Begito, di mana seseorang melakukan sumpah darah dengan orang lain sehingga menjadi saudaranya.

Johor. Konflik itu terjadi di kepulauan Riau, tetapi kadang meluas, mulai dari Bengkalis dan Kedah, dengan kemenangan silih berganti antara keduanya.<sup>39</sup>

Dinasti Raja Kecil yang mulai mapan tersebut akan penulis sebut sebagai sebagai Wangsa Abdul Jalil. Hal ini karena seluruh sultan Siak, termasuk Raja Kecil, menyematkan nama Abdul Jalil saat naik takhta, hingga sultan terakhir sekalipun. Namun, mereka yang merupakan keturunan patrilineal dari Raja Kecil adalah sultan kedua (Sultan Mahmud) hingga keenam (Sultan Yahya); sultan-sultan setelah itu merupakan keturunan Baalawi, setelah menyingkirkan keturunan patrilineal Raja Kecil. Meskipun sultan Siak dari Wangsa Abdul Jalil selesai pada Sultan Yahya, ada keturunan Tengku Buwang yang menjadi raja di negeri lain, yakni Tengku Akil gelar Abdul Jalil Yang Dipertuan Syah di Sukadana (Nieuwe Brussels); ini akan dijelaskan kemudian.

### 2.2.1. Kesultanan Siak di bawah Cabang Tengku Mahmud

Di antara banyaknya anak-anak Raja Kecil, dua orang yang dianggap penting, yakni Raja Alam dan Tengku Buwang. Raja Alam lahir ketika Raja Kecil masih berkelana di Palembang, hasil pernikahannya dengan putri seorang Dipati Batu Kucing di Rawas.<sup>40</sup> Saat Raja Kecil berpindah ke Siak, Raja Alam menghadapnya. Sementara para pembesar

---

<sup>39</sup> Masing-masing penulis *Hikayat Siak* dan *Tuhfat al-Nafis* menuliskan banyak kemenangan berada di pihak yang mereka dukung. Misalnya, dalam perebutan kuasa di Kedah, meskipun sama-sama menulis bahwa Daeng Parani tewas dalam peperangan ini, *Hikayat Siak* menyatakan Raja Kecil menewaskan Daeng Parani dan memenangkan pertempuran, lalu raja yang mereka dukung naik takhta, dan Siak undur diri, manakala *Tuhfat al-Nafis* menyatakan bahwa orang Bugis mengamuk sehingga Raja Kecil melarikan diri. *Hikayat Siak*, hlm. 138; *Tuhfat al-Nafis*, hlm. 77.

<sup>40</sup> *Hikayat Siak*, hlm. 121.

kerajaan tidak mengenalnya sama sekali, Raja Kecil mengakuinya sebagai putra sulungnya setelah menanyakan nama ibunya.<sup>41</sup> Raja Alam membuktikan kekuatannya dengan mengadakan serangan ke Johor pada tahun 1737 kemudian merompak beberapa wilayahnya.<sup>42</sup> Tengku Buwang, di sisi lain, adalah hasil pernikahan Raja Kecil dan Tengku Kamariah yang lahir saat diculik oleh pihak Tengku Bendahara, yang baru dilepas ketika Raja Kecil menyerang Riau.<sup>43</sup>

Pewarisan kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indrapura tidak mengikat hanya pada garis keturunan; pembesar kerajaan menentukan siapa yang layak di antara anak raja yang akan naik takhta. Hikayat Siak menceritakan bagaimana suksesi pemerintahan berjalan. Ketika Raja Kecil mulai hilang akal karena istrinya meninggal dan sering tidur di atas makamnya, pembesar kerajaan menanyakan perihal Tengku Buwang dan Raja Alam, karena “paduka anakanda perang, Tuanku”. Raja Kecil menjawab “siapa yang menang, dialah anak kita.” Dengan perkataan seperti ini, kedua putra Raja Kecil dapat merebut takhta dengan kekerasan. Di sinilah peranan Orang Besar-besar amat penting. Mereka sepakat memilih Tengku Buwang sebagai penerusnya. Hal ini disebabkan Tengku Buwang merupakan *anak gahara*, karena ibunya merupakan anak sultan, sedangkan ibu Raja Alam adalah

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 133.

<sup>42</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*, hlm. 81

<sup>43</sup> Hikayat Siak, *loc. cit.*

seorang kepala suku.<sup>44</sup> Masing-masing memegang kekuatannya: Tengku Buwang di Siak, sedangkan Raja Alam di Batubara.

Raja Kecil kemudian meninggal, antara tahun 1746, dan Tengku Buwang menggantikannya. Masa ini sebenarnya menandai krisis Siak. Menurut catatan Belanda, Sultan Sulaiman bersama orang Bugis telah bersiap menyerang Siak dengan armadanya yang sudah berlabuh di Johor. Sementara itu, Tengku Buwang telah bersiap pula untuk melarikan diri ke Pagaruyung dengan rombongan sebanyak 500-600 orang untuk menghadang Johor. Rencana pelarian ke Pagaruyung itu meningkatkan kemungkinan peperangan besar antara Minangkabau dengan Johor. Rencana itu tidak jadi, karena Sultan Sulaiman menarik diri dari Melaka pada tahun 1747, menghadapi ancaman lain. Raja Alam menduduki Siantan, salah satu wilayah tradisional Johor yang penting dan strategis. Dari sana, ia menghimpun banyak pengikut dan merompak kapal-kapal yang berlayar, termasuk kapal Inggris *Nancy*.<sup>45</sup>

Dengan kondisi seperti ini, Siak justru menjalin hubungan dengan Johor. Raja Mahmud dan Sultan Sulaiman bersama-sama mengepung Siantan. Aliansi ini perlu diperhatikan, mengingat bahwa Sultan Sulaiman telah bermusuhan dengan ayah Raja Mahmud, Raja Kecil, tetapi ibunya sendiri adalah saudari Sultan Sulaiman. Ancaman-ancaman yang terlihat

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

<sup>45</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*, 86-87

oleh Raja Mahmud, terutama dari VOC, membuatnya bekerja sama dengan pamannya itu. Sultan Sulaiman yang bukan orang Minang justru menjalani peran mamak kepada Raja Mahmud kemenakannya.<sup>46</sup> Bersama Sultan Sulaiman, Raja Mahmud kemudian mengepung Siantan pada tahun 1749, sehingga Raja Alam melarikan diri dari sana dan mengembara. Sebagai saudara, Raja Mahmud meminta Raja Alam melarikan diri sebelum benar-benar ditangkap oleh Johor.<sup>47</sup>

Interaksi pertama orang Arab dengan kerajaan Siak adalah pada masa ini, diawali oleh kemunculan Sayid Muhammad. Ia adalah seorang pedagang Ba'alawi bermarga Sagoff, yang kemudian diangkat sebagai syahbandar Senapelan, atau dahulu disebut Payung Sekaki. Selama Raja Mahmud berangkat ke Siantan, Sayid Muhammad ditunjuk sebagai wakilnya bersama tiga orang lainnya. Ternyata, perwakilan Sayid Muhammad yang merupakan orang asing mengundang amarah penduduk, apalagi ia tidak mempunyai rasa hormat kepada pemimpin lokal lainnya. Saat Raja Mahmud kembali, ia menghadapi 700-800 orang yang menghadang, dipimpin oleh Tengku Unus, salah seorang anak Raja Kecil. Pemberontakan itu dapat ditumpas pada tahun 1750, tetapi kekacauan masih melanda Siak hingga satu tahun kemudian.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, 88-89

<sup>47</sup> *Ibid.*, 87-88; *Hikayat Siak*, 144-145

<sup>48</sup> Timothy P. Banard, *op. cit.*, 90-91

24 Setelah pengepungan Siantan, Raja Mahmud memindahkan kerajaannya dari Buantan ke Mempura. Ia dengan orang-orangnya membuka tanah untuk membangun “kota, parit, dan istana balairung, dan balai gendang, dan masjid, pedapuram, penanggah” dan menetap di sana beserta orang-orang kerajaannya. Ketika mendengar kabar bahwa raja Pagaruyung berangkat ke Petapahan, ia berangkat ke sana, dan raja Pagaruyung menabalkan sebagai Sultan Mahmud Syah.<sup>49</sup> Pemberontakan di Siak masih membekas, dan penabalnya tidak membuat para pembesar kerajaan puas, di tambah pemindahan kerajaan ke Mempura tidaklah begitu dibutuhkan. Sekarang, Raja Alam yang telah kembali dari Palembang dan Deli ke Batubara, bersiap-siap menduduki Siak. Pembesar kerajaan tampak membiarkan kedatangan Raja Alam begitu saja dan Sultan Mahmud Syah melarikan diri.<sup>50</sup>

Pendudukan Siak oleh Raja Alam berlangsung sebentar, karena Sultan Mahmud Syah kembali lagi, kali ini dengan bala bantuan dari Johor dan penduduk lokal lainnya. pada bulan Agustus 1754 Mereka dengan mudah menduduki Buantan, tempat kedudukan Raja Alam, yang ternyata lari ke Batubara, hanya untuk menyerang Sultan Mahmud Syah lagi tiga bulan kemudian, sehingga ia kembali ke Johor. Kali ini, Sultan Mahmud Syah bekerja sama juga dengan VOC, yang meminta akses ke Siak dengan membuka loji di Pulau Guntung. Dengan persiapan yang matang, pada

---

<sup>49</sup> *Hikayat Siak*, 145-146.

<sup>50</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*, hlm. 92-94

bulan Desember mereka menyerang Buantan kembali. Pasukan Sultan Mahmud Syah menang, dan Raja Alam menyingkir ke Batubara kembali.<sup>51</sup>

Aliansi Sultan Mahmud Syah dengan Sultan Sulaiman dan Raja Alam dengan penduduk lokal sebenarnya menggambarkan corak masing-masing pemerintahannya. Sultan Mahmud Syah, *anak gahara*, lebih dekat dengan sistem pemerintahan Melayu, manakala Raja Alam mendekati dengan sistem perantauan yang fleksibel. Hal inilah yang menyebabkan Raja Alam dapat menghimpun kekuatan dari berbagai bangsa. Sementara Sultan Mahmud Syah mengikat diri dengan keturunan Johor, Raja Alam menjalin hubungan dengan Bugis, yakni menikah dengan Daeng Khadijah, saudari Daeng Kamboja yang bersekutu dengan Johor. Ia juga menikahkan putrinya, Tengku Embung Badariyah, dengan Sayid Utsman, seorang Ba'alawi yang telah setia berperang bersamanya.<sup>52</sup> Dari Sayid Utsman, keturunan sultan Siak mendapatkan darah Arab dan gelar Syarif, yang akan dijelaskan kemudian.

VOC perlahan beralih kepada Raja Alam, setelah mendapati bahwa perdagangan di loji Pulau Guntung tidak begitu menguntungkan. Hal ini mencapai puncaknya pada peristiwa Pulau Guntung, di mana kemukaan Sultan Mahmud Syah atas VOC menyebabkannya menyerang loji Pulau Guntung. Sultan Mahmud Syah Mahmud datang bersama 40 kapal ke Pulau

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, 94-95

<sup>52</sup> Donald J. Goudie, *Syair Perang Siak: A Court Poem Presenting the State Policy of a Minangkabau Malay Royal Family in Exile* (Kuala Lumpur: Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 1996), hlm. 38.

Guntung dengan kedok ingin mengantar putri Sultan Sulaiman dan singgah ke loji VOC. Saat Hansen, kepala loji, mengizinkan masuk Sultan Mahmud Syah dan beberapa orang lainnya untuk berdiskusi, Hansen ditusuk keris oleh Said Umar, dan mulailah pasukan Sultan Mahmud Syah membantai seisi loji. Dari 72 orang Belanda di Pulau Guntung, 56 orang tewas, sementara yang lain lari atau diperbudak.<sup>53</sup>

### 2.2.2. Kesultanan Siak di bawah Cabang Raja Alam dan setelahnya

Masa-masa setelah Sultan Mahmud Syah masih diwarnai dengan konflik dan peperangan. Sultan Mahmud meninggal pada tahun 1760 dan digantikan Tengku Ismail dengan gelar Sultan Ismail Abdul Jalil Syah.<sup>54</sup> Dengan usianya yang muda dan kurang berpengalaman, Raja Alam menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Siak dan naik takhta. Raja Alam beserta VOC menyerbu Siak pada tahun 1761, sehingga Sultan Ismail melarikan diri.<sup>55</sup> Selama pelarian, Sultan Ismail menjadi perompak yang ditakuti di pesisir timur Sumatera, sama seperti Raja Alam dahulu. Sementara itu, Raja Alam memindahkan kerajaannya ke Senapelan dan menunjuk putranya, Raja Muhammad Ali, sebagai pewaris takhtanya. Dari Senapelan, Raja Alam perlahan menegakkan kekuasaannya di bagian hulu Siak, meluaskan aliansinya dengan Minangkabau, serta meluaskan kekuasaannya di pesisir timur Sumatera. Pada masa ini, pemimpin-

<sup>53</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*, 101-102; *Hikayat Siak*, hlm. 147-150

<sup>54</sup> Donald J. Goudie, *loc. cit.*

<sup>55</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*, hlm. 109

pemimpin Kubu, Rokan, Bila, Pane, Asahan, dan Batu Bahara berada di bawah kekuasaan Raja Alam.<sup>56</sup> Setelah sakit selama beberapa waktu, Raja Alam meninggal pada 18 September 1765.<sup>57</sup> Raja Alam juga dikenal dengan gelar Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah.<sup>58</sup>

Raja Muhammad Ali menggantikan Raja Alam sebagai Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah.<sup>59</sup> Pada masa ini pula, ia kehilangan dukungan dari pihak ibunya, orang Bugis Johor, tetapi ia tetap meneruskan aliansinya dengan Sayid Utsman dengan mengangkatnya sebagai panglima besar. Ia menguatkan kekuasaannya di pesisir dan hulu sungai Siak. Masa pemerintahannya menunjukkan kemajuan Siak sebagai wilayah lalu lintas perdagangan, yang menguasai aliran sungai dari Kampar hingga ke Kubu dan pulau-pulau di pesisirnya, belum lagi wilayah-wilayahnya di barat laut seperti Asahan dan Bila. Ia juga menjalin hubungan dengan VOC yang telah dilakukan pada masa pemerintahan ayahnya, malah lebih kuat dari sebelumnya.<sup>60</sup>

Sultan Ismail yang telah dilengserkan pada 1761 menjadi perompak ulung di Selat Malaka. sama seperti ayahnya, ia menjalin hubungan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 117-121

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 123

<sup>58</sup> O.K. Nizami Jamil et al., *Sejarah Kerajaan Siak* (Pekanbaru: Sukabina, 2011), hlm. 92. *Hikayat Siak* tidak terlalu banyak menceritakan pemerintahan Raja Alam karena keberpihakan naskah tersebut pada Tengku Mahmud dan keturunannya, seolah-olah terlewat sebuah episode dari sejarah Kesultanan Siak. Pemerintahan Raja Alam telah digali oleh Timothy P. Barnard dalam *Multiple Centres of Authority* berdasarkan catatan-catatan VOC mengenai Raja Alam.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 103.

<sup>60</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*, hlm. 124-126.

kekerabatan dengan raja Melayu, kali ini dengan menikahi Tengku Tipah, putri Sultan Mansyur Syah, Raja Terengganu. Aliansi Sultan Ismail membantu Sultan Mahmud membantu menghadang serangan dari Kedah. Hikayat Siak menggambarkan pernikahan dan tinggalnya selama di Terengganu penuh dengan adat Melayu. Misalnya ketika Raja Daud, saudara Sultan Ismail, dituduh berzina dengan Tengku Saliah, saudari tiri Raja Daud, maka Sultan Ismail menghukum mati Raja Daud secara adat. Ketika diketahui Tengku Abdullah, saudara Sultan Ismail yang lain, ia marah dan mempertanyakan 'daulat' Sultan Ismail atas keputusannya itu. Putra Sultan Ismail, Tengku Musa, menengahi mereka dan mengingatkan bahwa semua sepakat bahwa Sultan Ismail adalah raja, dan menentang keputusannya adalah 'durhaka'.<sup>61</sup>

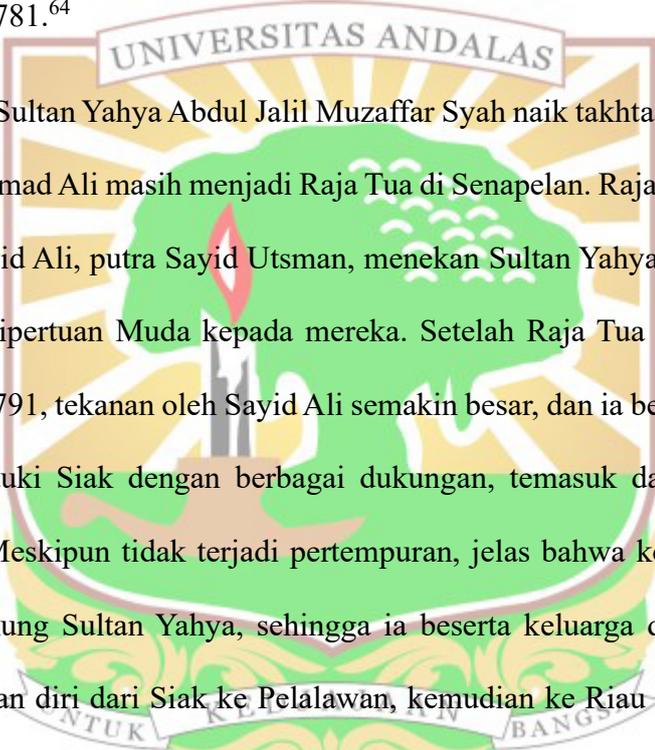
Kekuasaan Sultan Ismail di Selat Melaka semakin kuat, bahkan ia sempat menyerang Singapura pada tahun 1767, meskipun dikalahkan orang Bugis. Ia berkelana sebagai perompak, dari Pattani di Selatan Siam hingga Mempawah di Kalimantan.<sup>62</sup> Sejak 1773 Sultan Ismail berusaha untuk menembus Siak, dan setahun kemudian Sultan Muhammad Ali mengizinkan Sultan Ismail dan pengikutnya untuk menetap di Rokan. Dualisme kekuasaan Siak-Rokan ini berlangsung selama enam tahun, sampai Sultan Ismail memutuskan untuk menduduki Siak, sementara Sultan Muhammad Ali mulai sakit-sakitan. Akhirnya, pada tahun 1779 Siak jatuh ke dalam

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, 130-131.

<sup>62</sup> *Ibid.*, 134

kekuasaan Sultan Ismail. Sultan Muhammad Ali tidak dibunuh oleh Sultan Ismail; mereka berdamai, dan Sultan Muhammad Ali dijadikan Yang Dipertuan Muda.<sup>63</sup> Sultan Ismail mengalihkan Yang Dipertuan Muda kepada putranya, Tengku Yahya, sementara Raja Muhammad Ali menjadi Raja Tua di Senapelan. Sultan Ismail meninggal di dalam balairung pada tahun 1781.<sup>64</sup>



Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah naik takhta, sementara Raja Muhammad Ali masih menjadi Raja Tua di Senapelan. Raja Muhammad Ali dan Sayid Ali, putra Sayid Utsman, menekan Sultan Yahya agar kekuasaan Yang Dipertuan Muda kepada mereka. Setelah Raja Tua meninggal pada tahun 1791, tekanan oleh Sayid Ali semakin besar, dan ia bersiap-siap untuk menduduki Siak dengan berbagai dukungan, termasuk dari pihak Empat Suku. Meskipun tidak terjadi pertempuran, jelas bahwa kondisi tidak lagi mendukung Sultan Yahya, sehingga ia beserta keluarga dan pengikutnya melarikan diri dari Siak ke Pelalawan, kemudian ke Riau hingga akhirnya ke kampung ibunya, Terengganu.<sup>65</sup> Dengan demikian, berakhirilah pemerintahan Wangsa Abdul Jalil.

Wangsa Abdul Jalil tidak langsung punah sebagai sebuah dinasti, karena salah satu keturunannya, Tengku Akil, ternyata menjadi raja. Tengku Akil merupakan putra Raja Musa dan cucu dari Sultan Mahmud Syah. Lahir

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, 136-140

<sup>64</sup> *Ibid.*, 142-143

<sup>65</sup> *Ibid.*, 157-159

sekitar tahun 1775, ia dibesarkan di lingkungan istana Kesultanan Pontianak, tetapi saat kembali ke Siak ia tidak disambut hangat oleh ayahnya. Tengku Akil berkelana ke selatan Sumatera (Palembang dan sekitarnya) dengan membantu seorang pelaut Inggris, dan kemudian kepada Belanda. Saat di Kalimantan, ia membantu Belanda menengahkan perompak di sana dan diberikan pangkat Mayor.<sup>66</sup> Saat Belanda menduduki Kesultanan Matan dan melengserkan sultannya pada tahun 1828, Tengku Akil diangkat sebagai pemimpin baru, dengan gelar Abdul Jalil Yang Dipertuan Syah, dan wilayah Matan dan sekitarnya (secara kolektif disebut Sukadana) diubah namanya menjadi Nieuw Brussel untuk mengenang kemenangan Jenderal Du Bus atas Sukadana.<sup>67</sup>

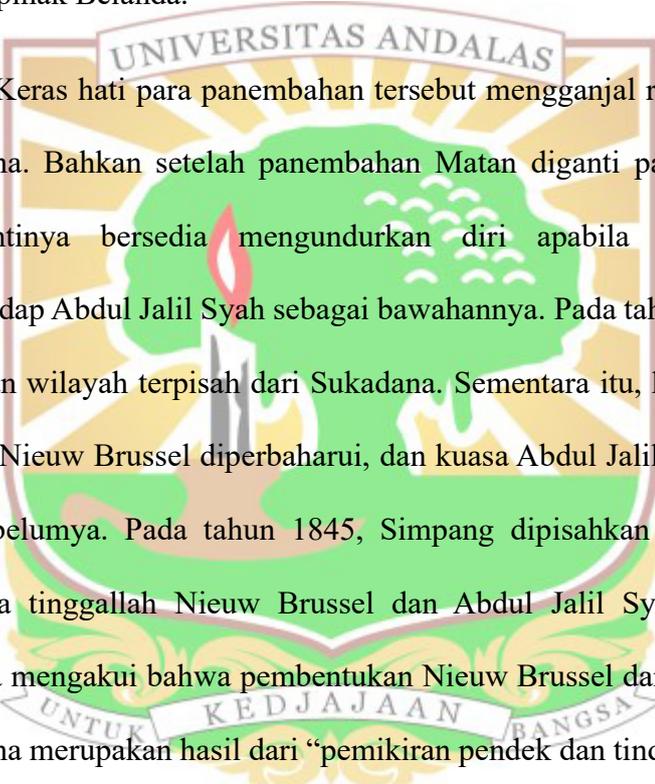
Pemerintahan Sultan Abdul Jalil Yang Dipertuan Syah di Sukadana tidak berjalan mulus. Ia dianggap kurang berpengalaman dalam memerintah Nieuw Brussel. Ia sendiri tidak memperhatikan keadaan rakyatnya dan memeras mereka dengan pekerjaan yang berat. Hubungannya dengan pemimpin lain juga tidak harmonis. Sementara Belanda menganggap Sultan Nieuw Brussel sebagai pemimpin tertinggi Sukadana dengan panembahan Matan dan Simpang sebagai bawahannya, pemimpin negeri-negeri tersebut tidak menganggapnya demikian. Saat Belanda memerintahkan panembahan Simpang untuk menghadap Abdul Jalil Syah, ia menolak. Hal ini

---

<sup>66</sup> Donald J. Goudie, *op. cit.*, 41

<sup>67</sup> Yusri Darmadi & Ika Rahmatika Chalimi, "Nieuw Brussel" di Kalimantan: Peran Strategis Sukadana pada Abad ke-19 (Yogyakarta: Kepel Press, 2017), hlm. 35.

menyebabkan Belanda merancang kontrak baru dengan Abdul Jalil Syah pada tahun 1831. Tetap saja, setiap kali Belanda mengundang panembahan Matan dan Simpang untuk bertemu sang sultan, mereka selalu menghindar dan menegaskan bahwa kedudukan mereka harus setara untuk dapat menjalin hubungan baik, sembari bertanggung jawab secara langsung kepada pihak Belanda.<sup>68</sup>



Keras hati para panembahan tersebut mengganjal relasi Belanda di Sukadana. Bahkan setelah panembahan Matan diganti pada tahun 1833, penggantinya bersedia mengundurkan diri apabila masih dipaksa menghadap Abdul Jalil Syah sebagai bawahannya. Pada tahun 1837, Matan dijadikan wilayah terpisah dari Sukadana. Sementara itu, kontrak Belanda dengan Nieuw Brussel diperbaharui, dan kuasa Abdul Jalil Syah dikurangi dari sebelumnya. Pada tahun 1845, Simpang dipisahkan dari Sukadana, sehingga tinggallah Nieuw Brussel dan Abdul Jalil Syah memerintah. Belanda mengakui bahwa pembentukan Nieuw Brussel dan penggabungan Sukadana merupakan hasil dari “pemikiran pendek dan tindakan yang tidak tuntas”. Pada 1 September 1845, Nieuw Brussel sebagai “kerajaan boneka Belanda” dibubarkan, dan Sultan Abdul Jalil Yang Dipertuan Syah meninggal empat tahun kemudian.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 37-40

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 42-49

Intinya secara keseluruhan, Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah sebuah kerajaan Melayu dengan gaya adaptasi, yang berbeda dengan kesultanan Melayu di Semenanjung Malaya. Meskipun tetap menalikan asal-usulnya dari Melaka melalui Johor, Siak membentuk corak lain dengan memadukan sistem dan tradisi Melayu dengan sistem lokal yang telah berdiri di pesisir timur Sumatera. Sistem pemerintahan tinggi cenderung meminjam dari tradisi Melayu, tetapi sistem Empat Penghulu yang kemudian menjadi Datuk Empat Suku menjadi pembesar-pembesar penting yang dapat menentukan keberlangsungan—atau jatuh banggunya—seorang sultan Siak. Tradisinya juga banyak dipengaruhi kebudayaan lokal, tetapi banyak memakai tradisi Melayu untuk menunjukkan prestise mereka sebagai Raja Melayu.

### 2.3. Syarif Arab-Melayu: Siak di Bawah Wangsa Syahabuddin

Selain Sayid Muhammad, orang Arab Ba'alawi yang menjalin hubungan dengan keluarga raja Siak dan bahkan melanjutkan wangsa dan takhtanya adalah Sayid Utsman. Sama seperti Sayid Muhammad, Sayid Utsman adalah seorang pedagang yang kemudian mendapatkan jalannya untuk menjalin hubungan dengan Raja Alam. Sayid Utsman membantu Raja Alam, baik ketika pertama kali berkuasa maupun ketika diasingkan sebagai hulubalang. Kapal perang Sayid Utsman menghadang Sultan Ismail sehingga ia melarikan diri ke Pelalawan. Selain itu, ia juga menikahi putri Raja Alam, Tengku Embung Badariyah. Dari pernikahan itu lahirlah Sayid Ali dan Sayid Abdurrahman.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> J. Kathirithamby-Wells, "Siak and its Changing Strategies for Survival, c. 1700-1870", dalam Anthony Reid (editor), *The Last Stand of Asian Autonomies: Responses to Modernity in the Diverse States of Southeast Asia and Korea, 1750-1900* (New York: St. Martin's Press), hlm. 226.

Penulis menamai dinasti ini dengan Wangsa Syahabuddin.<sup>71</sup> Mereka memanfaatkan status keturunan Nabi, dipadu dengan darah *anak gahara* dari Tengku Embung Badariyah, sehingga membentuk kharisma wangsa tersebut. Selain mempertahankan gelar Arab untuk keturunan mereka (Syarif dan Sayid) dan menggelari sultan dengan nama Syaifuddin, mereka sepenuhnya terasimilasi dengan kebudayaan Melayu. Wangsa Syahabuddin juga terbagi dua: dari Syarif Ali yang memerintah Siak, dan dari Syarif Abdurrahman yang memerintah Pelalawan sejak 1811, sebagaimana dijelaskan kemudian.

Ketika Sayid Utsman meninggal, Sayid Ali yang memimpin keluarganya. Dari Bukit Batu, ia menjadi perompak yang ditakuti sepanjang pesisir timur Sumatera hingga menjarah Selangor sebagai saingan dagang Siak, sementara pamannya, Raja Tua Muhammad Ali, memegang Senapelan. Untuk menambah lagi kekerabatan Melayu, Sayid Ali menikahi putri tertua Tengku Musa, anak Sultan Mahmud Syah.<sup>72</sup> Ambisi Sayid Ali menjadi raja dimulai pada masa kekuasaan Sultan Yahya. Sebagaimana dinarasikan sebelumnya, Sayid Ali dan Raja Tua Muhammad Ali meminta kekuasaan Yang Dipertuan Muda ketika Tengku Endut melarikan diri ke Mandau. Ketika Raja Tua meninggal, Sayid Ali mulai menghimpun dukungan, terutama dari Penghulu Empat Suku. Ketika Tengku Endut

---

<sup>71</sup> Terdapat beberapa alternatif nama, seperti Syaifuddin (dipakai sebagai gelar sultan Siak berdarah Arab) dan Hasyimiyah (nama muncul sejak Syarif Hasyim, yang menegaskan diri dan keturunannya dari Bani Hasyim). Namun, berdasarkan semacam “poster” zaman kolonial yang menggambarkan Syarif Kasim II beserta istrinya, tertulis: Allah lanjutkan usia Kerajaan [wangsa] Syahabuddin” sehingga nama inilah yang dipakai. Lihat lampiran.

<sup>72</sup> Donald J. Goudie, *Syair Perang Siak: A Court Poem Presenting the State Policy of a Minangkabau Malay Royal Family in Exile* (Kuala Lumpur: Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 1996), hlm. 40; J. Kathirithamby-Wells, *loc. cit.*; Timothy P. Barnard, *op. cit.*, hlm. 142-152.

membunuh Datuk Tanah Datar karena dukungannya kepada Sayid Ali, jelaslah bahwa dukungan terhadap Raja Yahya dan Tengku Endut merosot, sehingga Raja Yahya melarikan diri ke Pelalawan.<sup>73</sup>

Pada tahun 1791, Sayid Ali naik takhta sebagai Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin. Sebagai penerus sultan Siak, ia menyematkan nama leluhurnya, Abdul Jalil, sedangkan sebagai orang Arab Ba'alawi, ia menyematkan gelar Syaifuddin. Pada awal pemerintahannya, ia memindahkan kerajaan ke Koto Tinggi, seberang Mempura. Selain itu, ia menunjuk saudaranya, Sayid Abdurrahman, sebagai Yang Dipertuan Muda, dan Tengku Busu Sayid Ahmad sebagai syahbandar Bukit Batu.<sup>74</sup> Setelah sempat menyerang Pelalawan pada tahun 1781, Siak menyerbu Pelalawan lagi dan melengserkan rajanya, Maharaja Lela II, serta mengangkat Sayid Abdurrahman sebagai sultan Pelalawan yang baru pada tahun 1810.<sup>75</sup>

Inilah masa-masa kejayaan Siak sebagai sebuah kekuatan di pesisir timur Sumatera. Dengan peperangan Kesultanan Riau melawan VOC, penjarahan Melaka dan Selangor, serta VOC yang berada di ambang kebangkrutan, Siak yang meluas hingga ke Deli menjadi tempat lalu lintas perdagangan Selat Malaka. Dibukanya Penang semakin menambah ramai jalur dagang Siak dari Minangkabau, yang memproduksi gambir dan kopi dan tentu harus melalui sungai Siak. Wilayah takluk

---

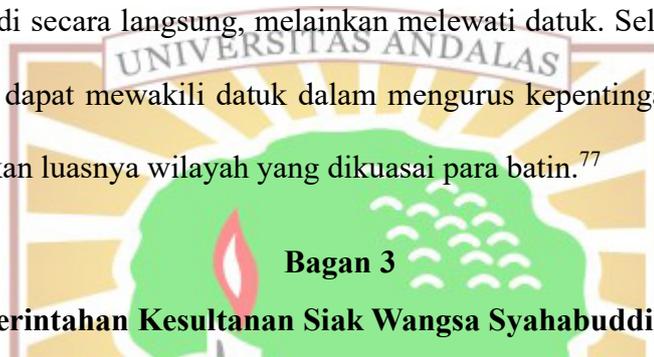
<sup>73</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*, hlm. 158-159

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 162-163

<sup>75</sup> J. Faes, "Het Rijk Pelalawan", *Tijdschrift Voor Indische Land- En Volkenkunde, Uitgegeven Door Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, 1822, hlm. 23; J. Kathirithamby-Wells, *loc. cit.*

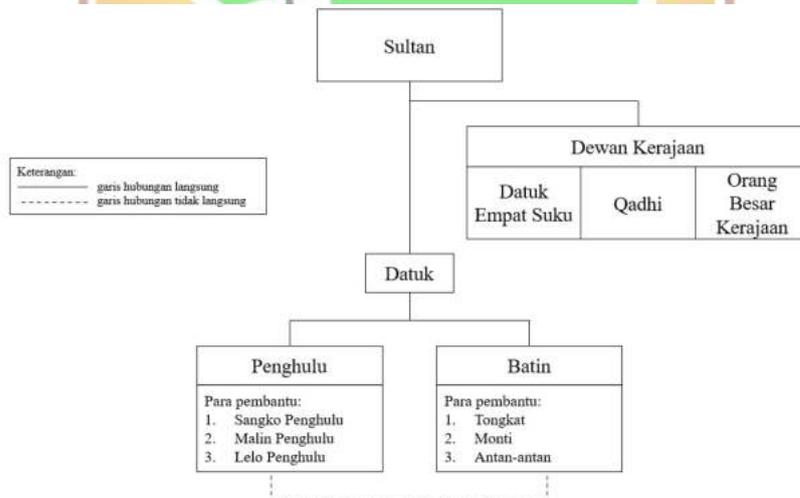
jajahannya seperti Batubara, Asahan, Buluh Cina dan Panai juga produktif. Siak sendiri menjadi penyuplai kayu balok untuk membuat kapal di Penang.<sup>76</sup>

Sistem pemerintahan Kesultanan Siak oleh Wangsa Syahabuddin berubah sedikit. Tunggul Manah yang sebelumnya termasuk ke dalam Dewan Kerajaan digantikan oleh Qadhi, sedangkan hubungan sultan dengan para penghulu dan batin tidak lagi terjadi secara langsung, melainkan melewati datuk. Selain itu, beberapa penghulu juga dapat mewakili datuk dalam mengurus kepentingan sultan kepada batin, disebabkan luasnya wilayah yang dikuasai para batin.<sup>77</sup>



**Bagan 3**

**Sistem Pemerintahan Kesultanan Siak Wangsa Syahabuddin hingga 1898**



Sumber : Ellya Roza, *Kerajaan Siak 1723-1908: Perspektif Sejarah dan Sosiobudaya* (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 130.

Sayid Ali mengundurkan diri sebagai sultan pada tahun 1810 dan mengangkat anaknya, Sayid Ibrahim, sebagai Syarif Ibrahim Abdul Jalil

<sup>76</sup> J. Kathirithamby-Wells, *op. cit.*, hlm. 232

<sup>77</sup> Ellya Roza, *op. cit.*, hlm. 129-130.

Khaliluddin, sementara ia sendiri menjadi Raja Tua. Pada masa ini, Penang berkembang menjadi kota pelabuhan yang pesat dengan harga pasar yang kompetitif, manakala Bukit Batu sebagai pelabuhan Siak masih dikontrol ketat. Pedagang kopi Minangkabau beralih ke sungai Kampar, sehingga Pelalawan menjadi sejahtera. Sementara itu, aktivitas perompakan tidak mungkin diandalkan lagi. Ketika orang-orang Eropa sebelumnya tidak bisa menghalau perompak dan terkadang malah bekerja sama dengan mereka, maka pada awal abad ke-19 kecanggihan angkatan laut Eropa serta militernya menyebabkan mereka mempunyai kekuatan untuk menundukkan kerajaan sekalipun.<sup>78</sup>

**Peta 2.**  
**Wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura pada tahun 1837.**



Sumber : Karte von der Insel Sumatra COLLBN Port 58 N 10, [https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/2013468?solr\\_nav%5Bid%5D=9776864881cc57ca14ae&solr\\_nav%5Bpage%5D=14&solr\\_nav%5Boffset%5D=4](https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/2013468?solr_nav%5Bid%5D=9776864881cc57ca14ae&solr_nav%5Bpage%5D=14&solr_nav%5Boffset%5D=4), diakses tanggal 2 September 2025

<sup>78</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*, hlm. 167-170.

Inggris dan Belanda mencoba untuk mengincar Siak. Inggris, misalnya, mencoba menghubungi Siak melalui William Farquhar, residen Penang, pada tahun 1818. Meskipun hanya sampai di Bukit Batu, Farquhar dapat menawarkan kerja sama dengan Siak dan sekitarnya, meskipun tidak terlalu berpengaruh.<sup>79</sup> Pada tahun 1823, John Anderson mencoba menjalin hubungan dengan Syarif Ibrahim, yang disambut dengan meriah di Siak. Dari kunjungannya tersebut, terlihat bahwa orang Siak lebih tertarik menjalin kerja sama dengan Inggris dibandingkan Belanda.<sup>80</sup> Namun, pada tahun 1824, Inggris dan Belanda sepakat dalam Traktat London bahwa hegemoni Belanda adalah pada pulau Sumatera secara keseluruhan dan Inggris pada Semenanjung Malaya.<sup>81</sup> Hal ini menyurutkan niat Inggris untuk bekerja sama dengan Siak. Sementara itu, Syarif Ibrahim semakin tidak kompeten dan tidak disukai sebagai sultan, terutama setelah kematian Syarif Ali pada tahun 1821, sehingga Datuk Empat Suku beserta Sayyid Abdurrahman sepakat pada tahun 1827 menggantikan Syarif Ibrahim dengan adiknya, Syarif Ismail.<sup>82</sup>

Berpindahnya kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indrapura dari Wangsa Abdul Jalil ke Wangsa Syahabuddin tidak banyak mengubah tradisi kerajaan. Nyatanya, Wangsa Syahabuddin justru berasimilasi secara penuh ke dalam tradisi Melayu. Catatan perjalanan John Anderson ke Siak pada tahun 1823 di bawah ini dapat

---

<sup>79</sup> Graham Irwin, *Nineteenth-century Borneo: A Study in Diplomatic Rivalry* (Singapura: National Library Board Singapore, 1955), hlm. 55

<sup>80</sup> Kisah perjalanan Anderson ke Siak akan diceritakan kemudian, dalam bab ini.

<sup>81</sup> Lihat Walter Scott, *The Edinburgh Annual Register, for 1824, 17(III)* (Edinburgh: James Ballantyne and Co.) 25-28., tersedia di Google Books, <https://books.google.co.id/books?id=YGQJAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>, diakses tanggal 1 Februari 2025.

<sup>82</sup> O.K. Nizami Jamil *et al.*, *op. cit.*, hlm. 125.

memberi sedikit gambaran bagaimana Kesultanan Siak memberikan “pelayanan” kepada tamu kehormatan secara Melayu.

Pada 17 Maret 1823, sebelum berangkat ke Siak, John Anderson berlabuh di Bukit Batu, kota pelabuhan utama kerajaan. Ia disambut oleh Tengku Long Putih. Besoknya, ia menelusuri Sungai Siak yang merah dan banyak buih selama dua hari. Rombongannya dihampiri oleh Mali, juru tulis kerajaan, dan menanyakan apakah mereka orang Inggris atau Belanda; Kesultanan Siak akan mengusir setiap orang Belanda yang masuk ke wilayahnya. Tengah malam tanggal 20 Maret, Syekh Muhammad bin Syekh Abdullah menyambut rombongan Anderson, berpakaian sutra putih dengan Serban kuning melilit kepalanya. Syekh Muhammadlah yang mengirim surat dari Anderson kepada sultan Siak beberapa bulan sebelumnya mengenai kunjungannya ini.<sup>83</sup>

Rombongan Anderson sampai di kota Siak pada tanggal 22 Maret; mereka menandai kedatangan dengan sembilan tembakan meriam untuk menghormati sultan. Mereka disambut dengan hadiah dari Tengku Pangeran dan undangan untuk menemuinya sebelum menemui raja, tetapi Anderson ingin menemui sultan terlebih dahulu, terutama karena mengetahui sebelumnya bahwa hubungan sultan dengan Tengku Pangeran sedang tidak baik. Saat menghadap sultan di istananya, tembakan meriam sebanyak sembilan kali menyambut kedatangan mereka, dan petinggi kerajaan menyambut di depan istana yang dihiasi kain emas dan perak. Anderson mempersembahkan surat dan berbagai hadiah kepada sultan di istananya, sembilan

---

<sup>83</sup> John Anderson, *Mission to the East Coast of Sumatra, in 1823* (London: Cadell, 1826), hlm. 160-164.

tembakan meriam dilepaskan lagi. Anderson menyampaikan maksud kedatangannya, untuk memperbarui perjanjian Siak dengan Inggris sebagaimana dimulai oleh William Farquhar pada tahun 1818. Sang sultan menjawab “mana boleh buang janji dengan Inggris” dan menjelaskan bahwa ia menolak kerja sama dengan Belanda yang datang tiga bulan silam.<sup>84</sup>

Pada pukul tiga sore, Tengku Pangeran mendatangi kapal Anderson untuk sebuah percakapan pribadi. Tengku Pangeran datang berpakaian sutra dengan benang emas, diiringi oleh seorang putranya; ia disambut dengan tujuh tembakan meriam. Percakapan pribadi itu tidak jadi, karena kemudian datanglah Syekh Muhammad beserta anak dan rombongannya pula, sehingga kapalnya ramai. Rombongan penuh itu berada di kapal selama satu jam, dengan berbagai pertanyaan yang dijejalkan kepada Anderson.<sup>85</sup> Menjelang malam, para datuk mengundangnya ke rumah datuk kepala untuk membahas beberapa hal. Dalam kesempatan itu, mereka menunjukkan sebuah keris yang pernah dipakai dalam peristiwa Pulau Guntung dan terwarisi oleh keturunannya. Mereka sangat kesal dengan kelakuan Belanda dan sangat berharap bahwa Melaka dikuasai oleh Inggris agar perdagangan selat semakin mudah.<sup>86</sup>

Pada tanggal 23 Maret, ia diundang oleh Tengku Panglima Besar untuk sebuah jamuan. rumahnya dihiasi kain kuning gantung, dan ia serta saudaranya berpakaian kebesaran dengan benang emas dan perak dari kepala hingga kaki. Para

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 164-166

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 167

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 168

datuk dan kepala suku juga berkumpul untuk menemui Anderson. Pada pukul tiga sore, ia diundang ke dalam musyawarah kerajaan yang dihadiri para pembesar. Sang sultan mengenakan pakaian dengan benang emas dan bersematkan permata besar, yang berbeda dari hari sebelumnya. Hamba-hamba raja membawa benda pusaka seperti keris, pedang, tombak, tameng dan tepak. Pada pukul tujuh, ia berkunjung lagi ke rumah Tengku Pangeran dan disugahi jamuan teh ala Inggris, disambung dengan makan malam besar, diiringi dengan nyanyian dengan musik biola dan gendang.<sup>87</sup>

Tengku Pangeran digambarkan sebagai orang yang cukup ambisius dan berwawasan luas mengenai apa yang terjadi di luar Siak, termasuk sejarah peperangan Eropa sezamannya dan keberadaan Inggris di India. Anderson bahkan terkejut dengan pengetahuannya mengenai Napoleon. Tengku Pangeran telah banyak berhubungan dengan Inggris di Malaya, sampai-sampai Farquhar memberikan cicinnya sendiri kepadanya. Ia percaya bahwa kehadiran Inggris merupakan satu-satunya cara mempertahankan Siak.<sup>88</sup> Anderson mendapati bahwa Tengku Pangeran dapat menjadi sahabat Inggris dan sangat menentang setiap pejabat kerajaan yang mendukung kerja sama dengan Belanda. Ia sendiri berbual dapat menjadikan dirinya raja dalam satu hari dengan mudah.<sup>89</sup>

Pada tanggal 24 Maret, Anderson didatangi oleh beberapa kepala suku yang memberikan banyak hadiah kepadanya. Keesokan harinya ia juga didatangi oleh

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 172-175

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 171

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 176

para kepala suku lainnya dan juga memberi hadiah. Siangnya, ia mengunjungi rumah datuk kepala, yang bersama datuk-datuk lainnya kemudian berangkat menghadap sultan. Sang sultan memberikan surat perjanjian secara resmi kepada Anderson. Setelah itu, semua yang hadir, termasuk masyarakat setempat sekitar seribu orang, berkumpul di depan lapangan istana untuk melihat pertunjukan “pedang dan tarian” (mungkin tarian pedang dan silat). Selesai pertunjukan, tamu kehormatan kembali ke istana untuk menyantap jamuan manis.<sup>90</sup>

Semua pejabat tinggi hadir pada hari kepulangan Anderson keesokan paginya di tempatnya berlabuh. Ketika Datuk Empat Suku datang dan turun dari perahu, meriam ditembakkan sebanyak lima kali. Sultan datang dengan lebih mewah lagi: ia menaiki perahu dengan empat belas dayung, tenda sutra, panji-panji kuning dan beberapa payung menghiasi perahu itu. Anderson takjub dengan penampilan sultan yang lebih mewah lagi dari sebelumnya. Selain sultan, ada empat orang pendamping berpakaian merah tua, empat orang berselempang kuning yang membawakan pedang kebesaran, tepak emas, dan tameng emas berhiaskan permata. Ketika sultan turun, meriam ditembakkan sebanyak sembilan kali. Semua ‘pertunjukan’ akbar ini.

Sambutan itu sangat membekas bagi Anderson, yang menulis:

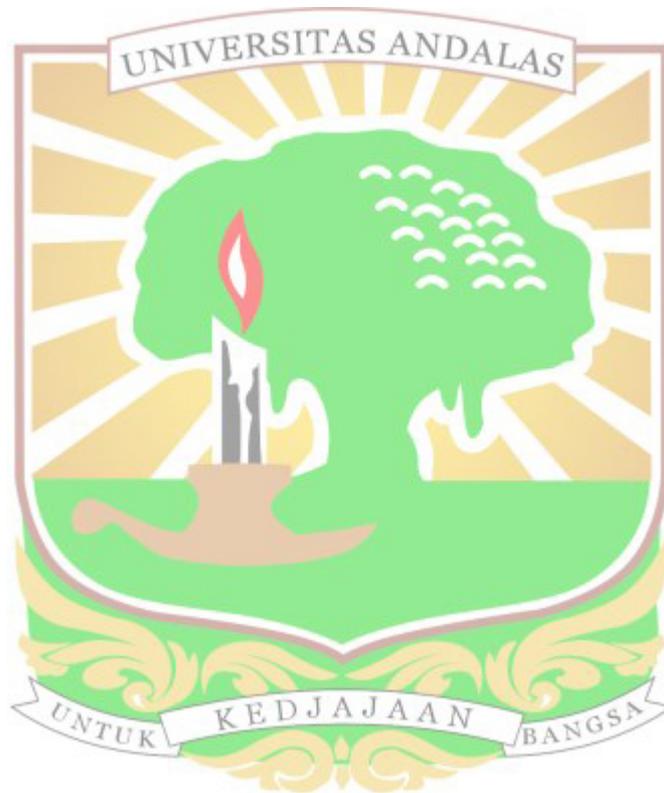
*The reception I met with at this place has made an impression upon my mind which will not easily be effaced. I never met anywhere with a more hearty welcome, all the people vying with each other in their kindly offices. How different was the treatment I actually experienced, compared with what I anticipated. I expected to meet with a savage race of pirates, who would*

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 178-182

2 *receive me with jealousy and distrust. I must describe them, however, as I found them, hospitable and generous.*<sup>91</sup>

(Sambutan yang saya dapati di tempat ini telah membuat kesan dalam pikiran saya yang tidak akan mudah dihapus. Saya tidak pernah menemui tempat lain dengan sambutan yang lebih hangat, yang semua orang berlomba-lomba satu sama lain menjamu di tempatnya yang ramah. Betapa beda perlakuan yang saya alami, dibandingkan dengan apa yang saya antisipasi. Saya kira akan menemui ras lanun yang barbar, yang menerima saya dengan iri dan kecurigaan. Namun, saya harus menjabarkan mereka, sebagaimana yang saya temukan, orang yang ramah dan murah hati.)



---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 185

### BAB III

## IDENTITAS KESULTANAN SIAK DARI *ZELBESTUUR* HINGGA PEMERINTAH INDONESIA (1858-1968)

Kesultanan Siak Sri Indrapura berada di dalam kekuasaan Hindia Belanda dalam bentuk *zelfbestuur* sejak tahun 1858. Kekuasaan seorang ‘raja’ di bawah kolonial merupakan hal umum dalam kolonialisme dan imperialisme. Penulis Barat—terutama Inggris—sering menyebutnya sebagai *Princely State* (“Negara Kepangeranan”), meskipun istilah itu sering dipakai secara eksklusif untuk kasus India.<sup>1</sup> Untuk kasus Hindia Belanda, status *zelfbestuur* terbagi dua menurut kontrak yang ditandatangani, yakni *lange contract* dan *korte verklaring*. Ketika seorang pemimpin *zelfbestuur* menandatangani *lange contract*, atau kontrak panjang, ia dapat menikmati beberapa kekuasaan di wilayahnya yang diatur oleh kolonial Belanda. Sementara itu, *korte verklaring* hanyalah sebuah pernyataan bahwa pemimpin *zelfbestuur* menaati seluruh peraturan kolonial, sehingga mereka yang menandatangani pernyataan ini sebenarnya tidak mempunyai arti politik.<sup>2</sup>

Pemerintahan-pemerintahan pribumi (termasuk *zelfbestuur*) pada dasarnya memiliki kekuasaan terbatas. Meski demikian, selalu ada jalan untuk menampakkan

---

<sup>1</sup> Lihat misalnya dalam Waltraud Ernst & Biswamoy Pati, *India's Princely States: People, Princes and Colonialism* (London & New York: Routledge, 2007). Penguasa pribumi ini juga kadang dibandingkan dengan fenomena *princely state* India sebagaimana dalam Richard H. Hopper, *Seribu Tahun Sumatera Tengah: Sejarah Manusia, Rempah, Timah dan Emas Hitam* (Depok: Komunitas Bambu, 2016), hlm. 142.

<sup>2</sup> Usep Ranawidjaja, *Swapradja Sekarang dan Dihari Kemudian* (Jakarta: Penerbit Djembatan, 1955), hlm. 6.

bahwa mereka adalah pemimpin berpengaruh. Surakarta dan Yogyakarta selalu menyelenggarakan Sekaten, upacara memperingati hari-hari besar Islam, sekaligus berkumpulnya penguasa bawahan sultan masing-masing.<sup>3</sup> Geertz malah menyebut kerajaan-kerajaan di Bali dalam kuasa kolonial sebagai “Negara Teater”, yang tidak punya kekuasaan lagi selain istananya, sehingga mereka menunjukkan kekuasaannya pada hal-hal yang bersifat seremonial seperti Pelebon (kremasi raja). Bagi Geertz, “negara...adalah wadah pelaksanaan ritual massal”.<sup>4</sup>

Kesultanan Siak Sri Indrapura masih mempunyai kekuasaan di bidang-bidang tertentu. Dari segi politik, sejak di bawah naungan Belanda, ranah kekuasaan sultan Siak memang dipersempit berkali-kali melalui pembaharuan kontrak. Namun, sultan dapat menetapkan hukumnya sendiri di wilayahnya, dan pejabat istana tetap merupakan orang yang berpengaruh bagi pemerintahan, meskipun semua itu menurut kadar tertentu yang tidak melewati wewenang Hindia Belanda. Selain itu, sultan-sultan Siak mengikut arus modernisasi, juga dalam kadar tertentu, yang merombak banyak hal dalam kerajaan dan wilayahnya. Atraksi seremonial Kesultanan Siak juga banyak berubah. Upacara-upacara yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan dikemas dengan fusi gaya Barat dan Melayu, sementara upacara-upacara pribadi, terutama siklus kehidupan seperti pernikahan dan pemakaman, masih diselenggarakan secara tradisional Melayu.

---

<sup>3</sup> Tradisi ini masih terlihat pada sekaten masa sekarang, sekalipun pemimpin-pemimpin yang dimaksud adalah orang-orang istana. Soepanto, Suratmin dan Bambang Sularto, *Upacara Tradisional Sekaten Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya), hlm. 50-52.

<sup>4</sup> Clifford Geertz, *Negara: The Theatre State in Nineteenth-century Bali* (West Sussex: Princeton University Press, 1980), hlm. 13.

### 3.1. Awal *zelfbestuur* Belanda hingga Syarif Kasim I

Siak Sri Indrapura telah lama diincar oleh Belanda, dan mereka sangat khawatir ketika Siak menjalin hubungan dengan Inggris. Hal ini terjadi dua kali. Pertama, pada tahun 1823, Siak sempat menjalin hubungan dengan Inggris melalui William Anderson, sebagaimana diceritakan dalam bab sebelumnya, untuk melanjutkan hubungan Siak dengan William Farquhar yang tampaknya tidak jadi. Setahun kemudian, Traktat London disetujui agar Inggris menguasai Semenanjung Melayu sepenuhnya dan Belanda menguasai Sumatera sepenuhnya. Kedua, kedatangan Wilson ke Siak pada tahun 1857. Hal ini memicu Belanda untuk menguasai Siak secara langsung.

Syarif Ismail adalah faktor yang membuat Belanda dapat menguasai Siak. Dalam musyawarah yang dihadiri Datuk Empat Suku dan Sultan Syarif Hasyim (Sultan Pelalawan dari Wangsa Syahabuddin), Syarif Ismail yang merupakan kemenakan Syarif Ibrahim diangkat sebagai sultan pada tahun 1827. Pada tahun 1857 Tengku Putra, salah satu saudaranya, menghimpun kekuatan untuk memberontak.<sup>5</sup> Hal ini membuat Syarif Ismail lari ke Singapura, berharap bahwa Inggris dapat membantunya. Inggris yang terikat dengan Traktat London 1824 tidak ingin berurusan dengan Syarif Ismail, tetapi ia kemudian bertemu dengan seorang pelaut bernama Wilson. Wilson membantu dengan penyediaan senjata dan kapal, serta bantuan lainnya.<sup>6</sup> Bahkan, Wilson diberikan gelar Maharaja Muda Steer Raja

---

<sup>5</sup> O.K. Nizami Jamil, *op. cit.*, 124-125.

<sup>6</sup> Richard H. Hopper, *op. cit.*, hlm. 94.

Negeri Siak oleh Syarif Ismail. Hal ini mengakibatkan ketakutan Belanda, yang selain tanda pengaruh Inggris di Siak, juga kekhawatiran terjadi kasus yang sama dengan Sir James Brook, Rajah Putih yang mendirikan Kerajaan Sarawak.<sup>7</sup>

Syarif Ismail malah kelabakan dengan permintaan yang dituntut Wilson dan pasukannya, sehingga ia lari lagi, kali ini untuk menemui residen Riouw. Belanda mengirimkan bala tentaranya sendiri untuk mengusir Wilson, yang waktu itu berada di Bengkalis dan mengibarkan bendera Inggris. Saat melihat kapal-kapal Belanda, Wilson melarikan diri.<sup>8</sup> Residen Riouw juga menengahi perselisihan antara Syarif Ismail dengan Raja Muda. Pada tanggal 13 Juni 1857, keduanya akhirnya berdamai, disaksikan Residen Riouw dan para bangsawan Siak, sementara kapal-kapal perang Wilson dibiarkan begitu saja sehingga diambil oleh sultan.<sup>9</sup> Pada tanggal 29 November 1858, Syarif Ismail menandatangani kontrak 39 pasal dengan Pemerintah Hindia Belanda, diwakili oleh Residen Riau.<sup>10</sup>

Gambaran kondisi Syarif Ismail diparalelkan dengan Sultan Ismail oleh Goudie. Sultan Ismail menghadapi perlawanan dari pamannya sendiri, Raja Alam, manakala Syarif Ismail menghadapi pemberontakan kemenakannya sendiri, Tengku Putra. Sultan Ismail terancam oleh kekuatan asing yang dibawa Raja Alam, manakala Syarif Ismail terancam oleh kekuatan asing yang ia bawa sendiri, pertama

<sup>7</sup> “Amsterdam, Vrijdag 19 Junij”, *Algemeen Handelsblad*, 20 Juni 1857, “s Hertogenbosch, 19 Junij”, *De Noord-Brabanter*, 23 Juni 1857.

<sup>8</sup> Richard H. Hopper, *op. cit.*, hlm. 94-95.

<sup>9</sup> *Javaasche Courant*, 22 Juli 1857.

<sup>10</sup> Mengenai isi Kontrak Siak 1858 lihat “Contract met den Sulthan van Siak en onderhoorigheden”, *Tweede Kamer, Bijlagen, 59ste vel.*, tanpa tahun, hlm. 233-236.

dari Wilson dan kemudian dari Belanda, yang akhirnya menamatkan kedaulatan politik Kesultanan Siak Sri Indrapura.<sup>11</sup> Ia wafat pada tahun 1864 dan dimakamkan di Koto Tinggi dengan gelar Marhum Indrapura.<sup>12</sup> Sementara itu, dewan kerajaan bermufakat untuk mengangkat Tengku Syarif Kesuma, adiknya yang lain, sebagai sultan berikutnya dengan gelar Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin.<sup>13</sup> Syarif Kasim dilantik pada tanggal 18 Maret 1865 di Siak.<sup>14</sup>

Penaklukan Siak terbukti krusial bagi penaklukan pantai timur Sumatra. Dengan menaklukkan Siak, maka Belanda dengan mudah dapat menguasai wilayah-wilayah tersebut. Ketika Siak telah takluk kepada Hindia Belanda, wilayah Deli, Serdang, Asahan, dan Langkat dilepas ke Belanda pada tahun 1888.<sup>15</sup> Meski demikian, Siak tetap disegani dan dihormati sepanjang pantai timur Sumatera. Saat penabalan Sultan Deli, Sultan Siak diundang sebagai tamu kehormatan. Demikian juga, ketika sultan Siak mau menandatangani kontrak baru, maka sultan-sultan lainnya tersebut akan dengan mudah menerima kontrak serupa.<sup>16</sup> Siak dipisahkan dari Keresidenan Riouw pada tahun 1873 dengan pembentukan Keresidenan Oostkust van Sumatra.<sup>17</sup>

---

<sup>11</sup> Donald J. Goudie, *op. cit.*, hlm. 34-35.

<sup>12</sup> O.K. Nizami Jamil, *op. cit.*, hlm. 132.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>14</sup> "Riouw", *Java Bode*, 12 April 1865.

<sup>15</sup> Barbara W. Andaya, "Recreating a Vision: Daratan and Kepulauan in Historical Context", dalam Cynthia Chou and Will Derks (editor), *Riau in Transition* (Leiden: KITLV, 1997), hlm. 487.

<sup>16</sup> "De Sultan van Siak †", *De Sumatra Post*, 2 April 1908

<sup>17</sup> *Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië*, 1874, hlm. 127.

Pada masa seperti ini, Syarif Kasim I memerintah Siak Sri Indrapura. Ia dianggap memulai modernisasi di dalam wilayahnya. Tradisi-tradisi lama yang dianggap tidak manusiawi seperti perbudakan menghilang, sementara beberapa masih bertahan.<sup>18</sup> Ia juga dianggap mengembangkan Koto Tinggi sebagai ibukota Siak Sri Indrapura, membangun masjid kerajaan, membuat mahkota, dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Ia merupakan sultan Siak pertama yang mendapatkan Bintang Singa Belanda (Orde van den Nederlandschen Leeuw) dengan pangkat Ksatria (ridder).<sup>20</sup> Penghargaan ini tentu diberikan atas kemajuan kota Siak yang dibina sang sultan.

### 3.2. Syarif Hasyim (1890-1908)

Syarif Hasyim di sini harus dibincangkan dalam satu subbab khusus ini, karena penulis menemui bahwa sebagai sultan Siak yang dinaungi Belanda ia menggunakan kesempatan yang ada untuk menjunjung identitas monarkinya. Hal ini dapat dilihat dari dua segi. Dari segi regional, beberapa kerajaan Melayu telah mengalami modernisasi, tetapi yang paling mencolok adalah Kesultanan Johor, yang merupakan wilayah silang dagang di Selat Malaka. Sultan Abu Bakar mereorganisasi struktur pemerintahan, birokrasi, pendidikan, serta membentuk konstitusi sendiri, sehingga mirip dengan 'sekutunya', Inggris.<sup>21</sup> Hal ini menginspirasi beberapa negeri Melayu lainnya, tetapi yang pertama-tama

---

<sup>18</sup> H.A. Hijmans van Anrooij, *op. cit.*, hlm. 32

<sup>19</sup> O.K. Nizami Jamil *et al.*, *op. cit.*, hlm. 136.

<sup>20</sup> "Proclamatie", *Algemeen Handelsblad*, 14 Mei 1874. "Bintang" adalah terjemahan untuk "Order" sebagaimana ditulis dalam surat Syarif Hasyim kepada Ratu Wilhelmina yang mengabarkan kepulangannya, terlampir.

<sup>21</sup> Rahmat Abdul Aziz, *Pembaratan Johor: Suatu Analisis Sosiologi Sejarah (1800-1945)* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997), hlm. 227-230.

mengikuti jejak “modernisasi” ini di bagian Hindia Belanda adalah Kesultanan Riau Lingga. Sejalan dengan pengembangannya menjadi semacam negeri Islam modern, percetakan yang dipelopori kerajaan cukup berkembang dan menyebarkan pengetahuan di wilayah Riau sejak 1880-an.<sup>22</sup> Kesultanan Riau Lingga juga membuat beberapa peraturan dan hukum untuk diterapkan di wilayahnya, seperti Undang-undang Polisi yang Terpakai dalam Kerajaan Riau Lingga.<sup>23</sup>

Dibandingkan masa lalu, masa-masa akhir abad ke-19 di Siak merupakan tantangan yang terlambat dijawab, terutama ketika meningkatnya aktivitas agrikultural. Ketika perkebunan telah marak di Hindia Belanda, Siak menjadi tempat yang berkembang paling akhir. Meskipun Siak masih dikenal dengan jalur perdagangannya, rupanya aspek perkebunan lebih unggul dan diminati pasar. Hal ini terbukti di Medan dan sekitarnya, dengan perkebunan karet dan tembakau, menjadikannya kota yang lebih maju daripada Siak. Sementara itu pertanian di Siak, seperti digambarkan oleh Belanda pada tahun 1890, “*even akelig is als in vroegere jaren*” (sama buruknya seperti tahun-tahun sebelumnya).<sup>24</sup> Perkebunan Tembakau juga pernah berkembang di Siak, tetapi dengan cepat merosot.<sup>25</sup> Hanya setelah ditemukannya minyak sejak tahun 1901, harapan ekonomi baru bagi Siak muncul kembali.

---

<sup>22</sup> Jan van der Putten, “Printing in Riau: Two Steps Toward Modernity”, dalam Cynthia Chou and Will Derks (editor), *op. cit.*, hlm. 729-730

<sup>23</sup> Timothy P. Barnard, “Rules for Rulers: Obscure Texts, Authority, and Policing in Two Malay States”, *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 32 No. 2, 2001, hlm. 216.

<sup>24</sup> “Blocknotes”, *Deli Courant*, 2 Agustus 1890.

<sup>25</sup> “De Sultan van Siak in Amsterdam”, *Het Nieuws van den dag*, 16 Juni 1898

Kepribadian Syarif Hasyim sendiri dikenal sebagai orang yang cukup terbuka, dan seorang ‘negosiator’ sebagaimana digambarkan oleh orang Eropa yang dekat dengannya. Saat masih menjadi pangeran, ia dapat menyewakan tanah kepada beberapa orang Belanda dan mampu menegosiasi pejabat-pejabat kerajaan lainnya untuk mendapatkan persetujuan kontrak. Ketika Syarif Kasim I hendak membagikan tanah-tanah kerajaan untuk dikelola keempat puteranya, mereka memilih tanah-tanah paling bagus, tetapi Tengku Ngah memilih sebuah tanah tandus di Bagansiapiapi. Pada awalnya ia dicemooh karena tanah itu sendiri dianggap tidak ada harganya. Namun, Tengku Ngah kemudian berangkat ke Singapura dan meyakinkan banyak nelayan dan penebang kayu Tionghoa untuk bekerja di tanahnya tersebut, karena banyak ikan dan kayu yang bagus di sana. Beberapa tahun kemudian, tempat itu berkembang menjadi sebuah kota yang menghasilkan keuntungan tinggi. Ia juga pandai bergaul dan berurusan dengan orang Eropa. Sifat-sifat ini mengantarkannya menjadi sosok yang disukai.<sup>26</sup>

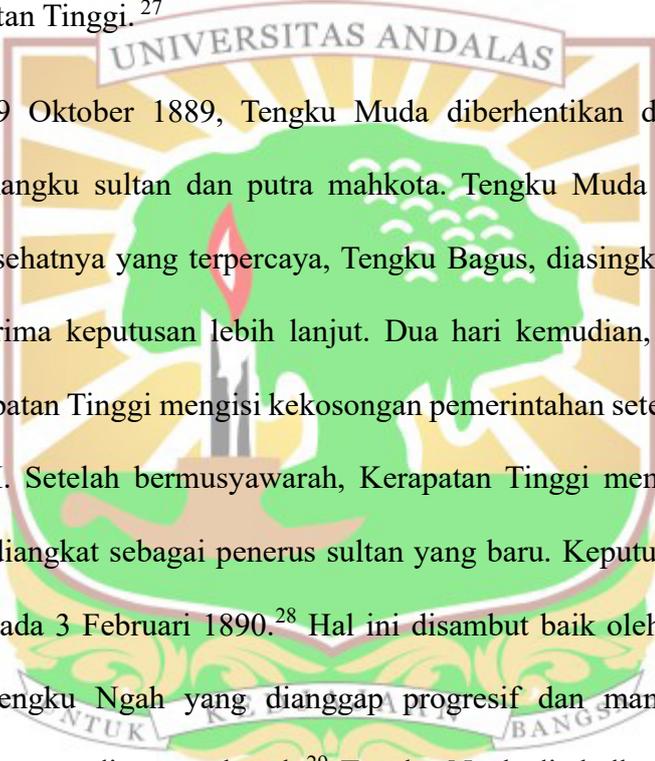
### 3.2.1. Kenaikan Takhta dan Awal Pemerintahan

Sebenarnya, penerus kekuasaan ditetapkan berada pada anak sulung Syarif Kasim, Tengku Muda. Namun, Tengku Muda merupakan orang yang kurang disukai berbagai kalangan. Orang Belanda menilainya tidak mapan dalam memerintah, dan berencana memberhentikannya dari jabatan pemangku sultan pada bulan Januari 1889, ketika Syarif Kasim I sakit-sakitan. Ia juga tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Mangkubumi, pamannya yang merupakan petinggi

---

<sup>26</sup> “De Sultan van Siak”, *De Sumatra Post*, 3 Januari 1899.

kerajaan, serta para Datuk Empat Suku. Hubungan dengan pamannya semakin buruk, sehingga ia meminta Kerapatan Tinggi untuk menanggihkan Mangkubumi dari jabatannya; Residen Bengkalis mengabulkan permintaan ini pada 5 Oktober 1889. Hal ini tidak mengubah sikap Tengku Muda, yang dinilai keras kepala dan memaksakan pandangannya. Ia pun kemudian tidak dapat menjaga hubungan baik dengan Kerapatan Tinggi.<sup>27</sup>



Pada 19 Oktober 1889, Tengku Muda diberhentikan dari dua jabatan sekaligus: pemangku sultan dan putra mahkota. Tengku Muda beserta saudara sekaligus penasehatnya yang terpercaya, Tengku Bagus, diasingkan ke Bengkalis sebelum menerima keputusan lebih lanjut. Dua hari kemudian, Syarif Kasim I mangkat. Kerapatan Tinggi mengisi kekosongan pemerintahan setelah mangkatnya Syarif Kasim I. Setelah bermusyawarah, Kerapatan Tinggi memutuskan bahwa Tengku Ngah diangkat sebagai penerus sultan yang baru. Keputusan ini disetujui oleh Residen pada 3 Februari 1890.<sup>28</sup> Hal ini disambut baik oleh pengamat luar, karena sifat Tengku Ngah yang dianggap progresif dan mampu menghapus kebiasaan lama yang dianggap buruk.<sup>29</sup> Tengku Ngah ditabalkan sebagai Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin pada 25 Oktober 1890. Pertabalan ini dihadiri oleh Residen Bengkalis dan komandan militer, pejabat kerajaan Siak dan Eropa, serta masyarakat yang hadir di luar. Residen dalam sambutannya berkata pemerintah Hindia Belanda sangat mengandalkan kesetiaan Syarif Hasyim, sementara sang

---

<sup>27</sup> “Uit het Koloniaal Verslag van 1890”, *De Locomotief*, 25 Oktober 1890.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> “The Sultan of Siak”, *Pinang Gazette and Straits Chronicle*, 25 Februari 1890

sultan menjawab bahwa ia sangat menghargai kepercayaan tersebut dan tidak perlu khawatir akan permasalahan internal yang telah terjadi.<sup>30</sup>

### Gambar 3

#### Suasana Setelah Penabalan Sultan Syarif Hasyim



Keterangan : Syarif Hasyim, Residen Michielsen serta pejabat Belanda dan kerajaan Siak berfoto bersama setelah penabalan sang sultan pada 25 Oktober 1890

Sumber : Wereldmuseum, [https://collectie.wereldmuseum.nl/?query=search=\\*=TM-60001334#/query/b1b39679-3fe9-450982c9-db8f3195f95e](https://collectie.wereldmuseum.nl/?query=search=*=TM-60001334#/query/b1b39679-3fe9-450982c9-db8f3195f95e), diakses tanggal 25 Oktober 2024.

Syarif Hasyim melanjutkan modernisasi yang telah dicapai ayahnya. Salah satu terobosan baru yang dilakukan—mengikuti jejak Johor dan Riau Lingga—adalah penyusunan *Ingat Jabatan*. Karena Siak belum mempunyai percetakan sendiri, *Ingat Jabatan* dicetak di Singapura pada tahun 1897, sepanjang 33 halaman. Naskah hukum ini merupakan panduan untuk mereka yang bekerja di lingkungan istana dan balairung kerajaan. Jika *Undang-undang Polisi Riau Lingga* mengatur pekerjaan polisi di dalam lingkungan Kesultanan Riau Lingga, *Ingat*

---

<sup>30</sup> *Java Bode*, 10 November 1890.

*Jabatan* mengatur lebih detail hierarki jabatan dan peran-peran mereka. Selain itu, berbagai aturan dan hukuman bagi beberapa pelanggaran juga diatur di dalamnya.<sup>31</sup>

Untuk mengimbangi “modernisasi” Johor dan Riau-Lingga, Kesultanan Siak juga ikut membangun berbagai bangunan kerajaan. Bangunan yang paling terkenal adalah Istana Asserayah al-Hasyimiyah<sup>32</sup> dan Balai Kerapatan Tinggi. Kedua bangunan ini dibangun sekitar tahun 1890 hingga sebelum keberangkatan Syarif Hasyim ke Belanda pada tahun 1898.<sup>33</sup> Istana Asserayah al-Hasyimiyah, dikenal juga dengan Istana Siak, adalah sebuah istana kerajaan berarsitektur campuran antara Eropa dan Melayu; dalam gambaran Capitaine Bernard, seorang Prancis yang berkelana ke Sumatera, bangunan itu adalah “sebuah istana Rococo dengan gaya Moor.”<sup>34</sup> Balai Kerapatan Tinggi, di sisi lain, adalah bangunan balairung tempat diadakannya berbagai upacara kerajaan sekaligus majelis penghakiman di Siak. arsitekturnya lebih cenderung ke Melayu, tetapi dengan sedikit fusi Eropa, seolah-olah bangunan bertingkat dua ini menciptakan ilusi rumah panggung.

---

<sup>31</sup> Timothy P. Barnard, *op. cit.*, hlm. 219-224.

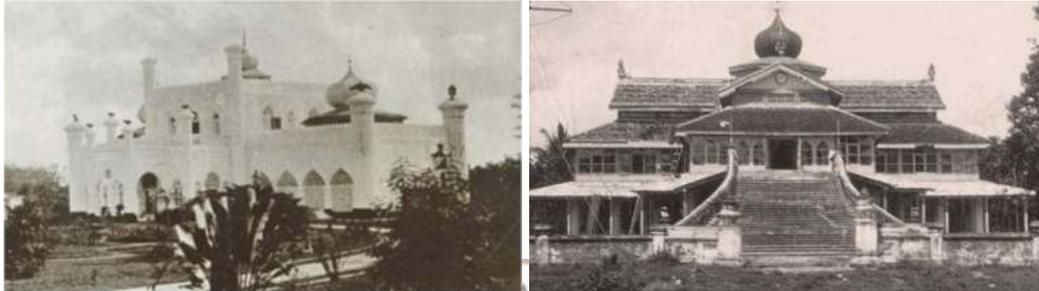
<sup>32</sup> Berdasarkan surat wasiat Syarif Hasyim, *Kemudian Hendaklah Mengetahui*, nama bangunan ini adalah Istana Asserayah al-Hasyimiyah (إستان السرية الهاشميه) Salinannya dan transkripsinya dapat ditemukan di istana tersebut.

<sup>33</sup> Penulis tidak dapat memastikan tahun berapa istana ini dibangun, karena belum menemukan sumber primer mengenai hal itu, dan sumber sekunder tentang Istana Siak tidak memberikan sumber pasti, bahkan beberapa di antaranya memberikan interpretasi yang bertentangan, misalnya dalam *Istana Kerajaa Siak Sri Indrapura* terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebut bahwa istana ini dibuat tahun 1889 setelah Syarif Hasyim mengunjungi Belanda (hlm. 4), yang tentu bertentangan dengan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya. Yang jelas, Istana Siak dan Balai Kerapatan Tinggi dibangun sebelum Syarif Hasyim mengunjungi Belanda, karena ia berbelanja di sana untuk mengisi koleksi istana sebagaimana yang akan diterangkan kemudian.

<sup>34</sup> Capitaine Bernard, *A travers Sumatra de Batavia à Atjeh* (Paris: Hachette, 1904), hlm. 168.

#### Gambar 4

##### Istana Siak (kiri) dan Balai Kerapatan Tinggi (kanan)



Keterangan : Kiri: Istana Asserayah al-Hasyimiyyah dalam konstruksi awal; kanan: Balai Kerapatan Tinggi; keduanya dibangun pada paruh akhir dekade 1890-an.

Sumber : kiri: Paleis van de sultan Sjarif Kasim Abdul Djalil Saifoedin van Siak te Siak Sri Indrapoera, [https://digitalcollections.universiteit.leiden.nl/view/item/771804?solr\\_nav%5Bid%5D=47fb479cd09bef04cf7e&solr\\_nav%5Bpage%5D=0&solr\\_nav%5Boffset%5D=11](https://digitalcollections.universiteit.leiden.nl/view/item/771804?solr_nav%5Bid%5D=47fb479cd09bef04cf7e&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=11); kanan: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak.

#### 3.2.2. Kunjungan ke Belanda 1898

Belanda dan segenap daerah takluk jajahannya bersiap-siap menyambut pemimpin baru. Wilhelmina, anak tunggal Raja William III yang meninggal tahun 1890, akan dilantik menjadi ratu Belanda setelah diwakilkan oleh Ratu Emma selama delapan tahun. Dari Hindia Belanda, *Soerabaiasch Handelsblad* memunculkan sebuah gagasan agar para bangsawan Hindia Belanda diundang untuk pelantikan sang ratu, akhirnya surat-surat kabar Hindia Belanda beramai-ramai menggaungkan gagasan ini. *Insulinde*, sembari menyebut penobatan Tsar Nikolai II dari Rusia pada 1896 yang mengundang semua vassalnya dari seluruh Rusia, menyatakan bahwa

11 “Apabila Hindia hendak ambil bagian dalam pesta penobatan yang khidmat itu, hal itu harus terjadi dengan cara yang pantas”.<sup>35</sup>

Pada bulan Desember 1897, Tweede Kamer (Majelis Rendah) Belanda berhimpun untuk membahas masalah ini. Dua puluh dua anggota parlemen tersebut mengajukan anggaran dana sebanyak £ 75.000 demi mengundang “pembesar Pribumi dan tokoh-tokoh lain dari Hindia Belanda” dalam pelantikan Wilhelmina. Cremer, Menteri jajahan saat itu, menolak gagasan dari parlemen. Mewakili eksekutif pemerintah Belanda, ia mengatakan bahwa baik Kabinet maupun pemerintah Hindia-Belanda tidak bermaksud mengundang ataupun mendesak para bangsawan Hindia Belanda untuk datang ke pelantikan sang ratu; walaupun mereka datang, maka harus dengan kehendak dan biaya sendiri. Pemerintah Belanda berpendapat bahwa dana yang diusulkan saja tidak mencukupi, karena mereka memperkirakan tamu-tamu istimewa itu akan datang dengan kemegahan dan pengiringnya.<sup>36</sup>

Karena hanya sepuluh anggota parlemen yang mendukung penolakan Cremer, Tweed Kamer memutuskan bahwa usulan mengundang bangsawan Hindia Belanda untuk pelantikan Wilhelmina tetap disetujui, tetapi dengan delegasi yang jauh lebih sedikit dari yang dibayangkan dan kurang representatif. Para bangsawan yang diundang adalah Pangeran Amidin Notonegoro dan Hasanuddin Sosronegoro dari Kutai, Pangeran Ario Mataram dari Surakarta, dan Sultan Syarif Hasyim dari

---

<sup>35</sup> Harry Poeze, Cornelis Dijk, dan Inge van der Meulen, *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda, 1600-1950* (Jakarta: Gramedia, 2008), 26-27.

<sup>36</sup> *Ibid.*

Siak.<sup>37</sup> Bangsawan Hindia Belanda lainnya merayakan pelantikan sang ratu di Batavia atau di tempat masing-masing.

Perwakilan Surakarta, Pangeran Aryo Mataram, tiba terlebih dahulu pada 10 Mei 1898 dan disambut di kantor Kemeterian Jajahan oleh sang Menteri, Cremer. Keduanya saling bercakap-cakap dengan Ingeluijff, seorang mantan residen di Hindia Belanda, sebagai penerjemahnya. Sebagai persembahan, Pangeran Aryo memberikan lukisan potret Susuhunan Pakubuwono X dan Ratu Wilhelmina kepada sang Menteri.<sup>38</sup> Dua putra sultan Kutai, Pangeran Mangkunegoro dan Sosronegoro, tiba di Belanda pada tanggal 6 Juli,<sup>39</sup> sementara sang sultan yang merayakan pelantikan Wilhelmina di Batavia mengirimkan hadiah berupa diadem emas yang ditempa oleh perusahaan van Arcken.<sup>40</sup>

Syarif Hasyim tiba di Amsterdam pada 15 Juni 1898. Perjalanannya melewati jalur Terusan Suez dan melintasi negara-negara Eropa dari darat, karena ia datang dari Paris menggunakan kereta api.<sup>41</sup> Begitu tiba, mereka langsung menginap di Hotel de l'Europe, ditemani oleh G.A. Schouten, mantan asisten residen pada awal pemerintahan Syarif Hasyim. Setelah tiba di Amsterdam, sultan pergi mengunjungi berbagai tempat seperti pabrik kaca Atlas Works untuk

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> "Laatste berichten", *Nieuwe Groninger courant*, 10 Mei 1898.

<sup>39</sup> "De Prinsen van Kutei", *De Locomotief*, 1 Juni 1898.

<sup>40</sup> *Bataviaasch Nieuwsblad*, 21 Juli 1898.

<sup>41</sup> Sebelum tiba di Belanda, Syarif Hasyim dan rombongan sempat menginap di Paris pada tanggal 30 Mei 1898, "Provinciale Staten", *Het Vaderland*, 31 Mei 1898.

memesan cermin, kebun binatang Artis untuk menghadiahkan seekor gajah dan tapir,<sup>42</sup> Koninklijke Tapijtfabriek untuk memesan karpet,<sup>43</sup> dan lain sebagainya.

Ketibaan seorang 'sultan' menarik perhatian wartawan, meskipun pada umumnya mereka sangat tertarik dengan kedatangan bangsawan Hindia Belanda di sana. Saat tiba di Amsterdam, misalnya, ia diwawancarai oleh wartawan *Het Nieuws van den dag* sore hari setelah kunjungan ke berbagai tempat tadi. Dari wawancara tersebut diketahui bahwa Syarif Hasyim masih akan berencana mengunjungi tempat-tempat seperti pabrik berlian, galangan kapal, Rijksmuseum dan sebagainya. Bahkan, ia juga berencana ke London, tetapi menunggu jadwal sultan menghadap Putri Mahkota Wilhelmina. Syarif Kasim menegaskan bahwa ia tidak ingin melakukan "urusan" apapun, untuk menghilangkan kecurigaan yang tidak diinginkan.<sup>44</sup>

Keesokan harinya, 16 Juni, Syarif Hasyim diwawancarai oleh wartawan *Insulinde*. Dari wawancara itu juga diketahui bahwa ia terpesona dengan infrastruktur jembatan yang besar begitu juga gedung-gedungnya. Ia juga berencana mengunjungi tempat-tempat industri, tetapi yang menarik perhatiannya adalah kerajinan perak Van Kempen, karena selain memproduksi kerajinan perak yang sangat indah, pengerjaannya juga cepat. Wartawan ini cukup memperhatikan hal-hal yang mencolok selama berada di sana, di antaranya simbol yang

---

<sup>42</sup> "Amsterdam", *De Grondwet*, 28 Juni 1898. Gajah tersebut, yang dinamai Betsy, mati pada tahun 1907, "Gemengd Nieuws uit Binnen- en Buitenland" *Arnhemsche Courant*, 31 Juli 1907

<sup>43</sup> "De Sultan van Siak", *Te Tijd*, 15 Juni 1898

<sup>44</sup> "De Sultan van Siak in Amsterdam", *Het Nieuws van den dag*, 16 Juni 1898

ditampilkan seperti panji-panji Sultan Syarif Hasyim yang dipasang di Hotel l'Europe. Tercatat bahwa:

*“Op het Hotel de l'Europe wapperde, behalve de Nederlandsche vlag, een zeer eigenaardige vlag, die een geel veld vertoont. In den bevenhoek, aan de zijde van den vlaggestok, is een cirkel, waarin een bruinroode figuur. Deze bestaat uit een horizontalen balk, aan welks uitende vertikale dwarsbalken, terwijl aan het midden naar boven toe eveneens twee uitteekeels zijn aangebracht. Daaronder is een ringetje. Onder dit figuur als een meer gecompliceerd teeken, dat er uitziet als een soort slee, waarbinnen twee halve maantjes met de bolle zyde naar beneden.*

*Die vlag waa het eerste onderwerp van het gesprek, dat in het Maleisch gevoerd werd.*

— *„Ik heb in de couranten gelezen, dat dit de vlag en het wapen van Siak is; dat is toch niet zoo.”*

Z. H. — *„Dit is niet juist; het is mijn vlag, en het is mijn wapen. Ik alleen heb het recht dit wapen te voeren; het is een recht, dat uitsluitend toekomt aan da afstammelingen van den grooten profet Mohammed.”<sup>45</sup>*

(Di Hotel de L'Europe, selain bendera Belanda, ada bendera yang sangat unik berkibar, yang menampilkan latar kuning. Di sudut atas, di sebelah tiang bendera, ada sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat gambar berwarna merah kecokelatan. Gambar ini terdiri dari balok horizontal, dengan balok vertikal di ujungnya, sementara di tengahnya terdapat dua cabang yang menjulur ke atas. Di bawahnya terdapat sebuah cincin kecil. Di bawah gambar ini ada simbol yang lebih kompleks yang terlihat seperti kereta luncur, di dalamnya terdapat dua bulan sabit dengan sisi cembung menghadap ke bawah.

Bendera tersebut menjadi topik pertama dalam percakapan yang dilakukan dalam bahasa Melayu.

— "Saya membaca di surat kabar bahwa ini adalah bendera dan lambang Siak; apakah itu benar?"

Y.M. — "Itu tidak benar; ini adalah bendera saya, dan ini adalah lambang saya. Saya sendiri yang memiliki hak untuk menggunakan lambang ini; itu adalah hak yang secara eksklusif dimiliki oleh keturunan Nabi Muhammad yang agung.")

---

<sup>45</sup> "Een bezoek bij den Sultan van Siak", *Insulinde*, 21 Juni 1898

Meskipun cukup detail, bagi penulis deskripsi tersebut sebenarnya menggambarkan Muhammad Bertangkup, tetapi orang Eropa kurang familiar dengan lambang seperti ini, apalagi dipakai khusus oleh Kesultanan Siak di Nusantara. Hal ini semakin diperkuat oleh banyak objek yang merepresentasikan Muhammad Bertangkup yang penulis amati pada benda-benda bersejarah Kesultanan Siak. Muhammad Bertangkup dipakai sebagai lencana di kopiah dan tanjak sultan Siak, ukiran singgasana, motif piring istana, hingga pajangan foto. Satu objek yang lebih dekat dengan rekonstruksi ini adalah sebuah *fanion*<sup>46</sup> yang dipajang di Istana Siak. Muhammad Bertangkup lama kelamaan telah identik dengan lambang Kesultanan Siak Wangsa Syahabuddin.

**Gambar 5**  
**Rekonstruksi Bendera Kesultanan Siak**



**Keterangan** : Rekonstruksi bendera Kesultanan Siak berdasarkan deskripsi wawancara *Insulinde* dengan Syarif Hasyim dan komparasi lambang Muhammad Bertangkup (kiri), serta dengan komparasi *fanion* yang dipajang di Istana Siak (kanan).

**Sumber** : deskripsi dari *Insulinde*, 21 Juni 1898, direkonstruksi tanggal 7 November 2024

---

<sup>46</sup> *Fanion* adalah sebuah bendera kecil yang dipasang di bagian bayonet sebuah senjata untuk menandai unit tertentu. *Fanion* tentara Siak terlampir di lampiran 4.

Perusahaan Van Kempen terbukti memproduksi kerajinan perak yang indah dalam waktu cepat. Dalam hal ini, Syarif Kasim memesan sebuah karya kerajinan perak dengan gading gajahnya sebagai *masterpiece* untuk dihadiahkan kepada Putri Mahkota Wilhelmina. Gading merupakan hak sultan ketika seseorang berburu gajah dan gadingnya di wilayah Siak Sri Indrapura, dengan demikian Syarif Hasyim mempersembahkan salah satu harta terbaiknya. Van Kempen yang industrinya diberi predikat “Kerajaan” oleh Belanda sejak 1885<sup>47</sup> mengemas gading tersebut dengan unik dan indah. Dari ketibaan Syarif Hasyim tanggal 17 Juni dan jadwal menghadap Wilhelmina pada tanggal 25 Juni, kerajinan perak tersebut selesai dalam waktu tidak sampai seminggu.

Hasilnya adalah sebuah gading berukir dengan lilitan tumbuhan dan bunga tropis serta buah-buahan khas Nusantara, termasuk durian dan manggis di pucuknya. Di bawah gading terdapat miniatur rusa, kelapa, dan tumbuhan lainnya. Semua ukiran tersebut terbuat dari perak. Gading tersebut beralaskan batu dan tatakan dengan plat di depan tertulis “Aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Huldeblijk van Jang di Pertoean besar Sharif Hasjim Abdul Djalil Sjaifoedin, Sulthan van Siak Sri Indrapoera. 25 Juni 1898” (Untuk Yang Mulia Ratu Wilhelmina. Hadiah dari Yang dipertuan Besar Sharif Hasjim Abdul Djalil Sjaifoedin, Sultan Siak Sri Indrapoera, 25 Juni 1898).

---

<sup>47</sup> Penulis tidak menemukan dokumen penganugerahan gelar Koninklijk (“kerajaan”) kepada perusahaan Van Kempen, tetapi dalam website resmi mereka menampilkan sejarah perusahaan ini, termasuk penganugerahan gelar Koninklijk pada tahun 1855 oleh Raja William III, <https://www.kempen-begeer.nl/>, diakses tanggal 17 Januari 2025. Penganugerahan gelar “kerajaan” (Koninklijk/Royal dll.) kepada suatu perusahaan menandai bahwa pihak kerajaan secara resmi berlangganan kepada perusahaan itu.

### Gambar 6

#### Hadiah Gading Berukir dari Syarif Hasyim kepada Wilhelmina



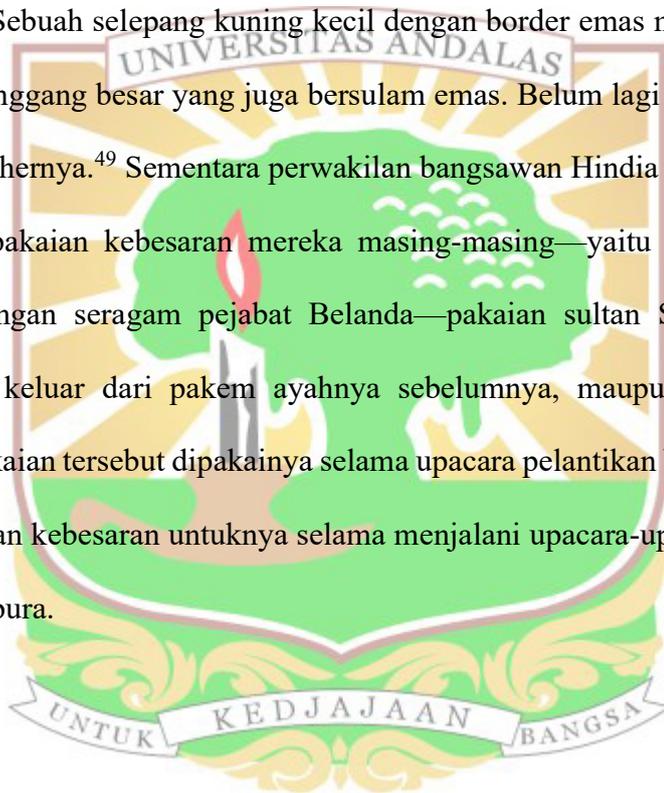
Keterangan : Hadiah Syarif Hasyim kepada Ratu Wilhelmina, berupa gading berukir berhiaskan ornamen perak yang menggambarkan kekayaan alam Siak Sri Indrapura

Sumber : Budi Rahmat Ramadhan, sekretaris MKA LAMR Siak, diperoleh tanggal 4 Desember 2024

Pada hari sabtu, 25 Juni, Syarif Hasyim menghadap Wilhelmina di Istana Soestdijk, Utrecht. Saat tiba di stasiun Baarn, kereta kencana dengan empat ekor kuda telah menunggu sang sultan, dan rombongan berangkat ke istana. Sesampainya di istana dan beristirahat sejenak, Syarif Hasyim diperkenankan menghadap Putri Mahkota Wilhelmina. Setelah perkenalan dan salam, Syarif Hasyim duduk di kursi yang berdekatan dengan Wilhelmina sembari berbincang dengan Schouten sebagai penerjemah. Pertemuan tersebut berlangsung selama 15 menit. Saat menghadap tersebut, Syarif Kasim memberikan hadiah gading berukir

kepada Wilhelmina. Setelah pertemuan selesai, sang sultan diantar ke stasiun Baarn ke Nijmegen, dengan cara yang sama seperti keberangkatannya.<sup>48</sup>

Pakaian yang dikenakan Syarif Hasyim saat menghadap tersebut juga menarik perhatian. Ia mengenakan seragam biru bersulam emas, dengan kerah tegak keemasan dan pangkat bahu (epaulette) berwarna emas berhiaskan berlian-berlian kecil. Sebuah selepang kuning kecil dengan border emas melilit tubuhnya, beserta ikat pinggang besar yang juga bersulam emas. Belum lagi topi berhias dan perhiasan di lehernya.<sup>49</sup> Sementara perwakilan bangsawan Hindia Belanda lainnya mengenakan pakaian kebesaran mereka masing-masing—yaitu paduan pakaian tradisional dengan seragam pejabat Belanda—pakaian sultan Siak merupakan inovasi baru, keluar dari pakem ayahnya sebelumnya, maupun Melayu pada umumnya. Pakaian tersebut dipakainya selama upacara pelantikan Wilhelmina, dan menjadi pakaian kebesaran untuknya selama menjalani upacara-upacara penting si Siak Sri Indrapura.



---

<sup>48</sup> “Binnenland”, *Arnhemsche Courant*, 28 Juni 1898

<sup>49</sup> *Ibid.*

### Gambar 7

#### Potret Sultan Syarif Hasyim, 25 Juni 1898



Keterangan : Syarif Hasyim mengenakan baju kebesaran saat upacara pelantikan Ratu Wilhelmina, pakaian ini kemudian selalu dikenakan dalam upacara penting di dalam kerajaannya.

Sumber : Rijksmuseum, <https://www.koninklijkeverzamelingen.nl/mediabank/detail/98ec25ad-cc91-5d79-b93c-103f535ed4d4/media/593e5a66-7404-c10f-44d6-22b9b207b4c3>, diakses tanggal 17 Desember 2024.

Pelantikan dijadwalkan pada tanggal 6 September 1898 di Nieuwe Kerk, Amsterdam, sebagaimana tradisi pelantikan raja-ratu Belanda. Keberangkatan Wilhelmina dimulai dari stasiun Weesperplein, dari sana ia dan Ibu Suri Emma menaiki kereta kencana berwarna gading yang ditarik delapan ekor kuda. Kereta kencana tersebut berada pada urutan ke 30 dari 34 rombongan yang berjalan dari Stasiun Weesperplein menuju Nieuwe Kerk. Tepat di belakang kereta kencana

tersebut adalah ajudan ratu, Sultan Syarif Hasyim, Pangeran Ario Mataram, dan dua pangeran Kutai, serta ajudan-ajudan lainnya.<sup>50</sup>

Sesuai rencana, rute yang dilewati adalah Sarpathistraat, Hooge Sluis, Frederiksplein, Utrechtsche straat, Heerengracht, Thorbeckplein, Vijzelstraat, Heerengracht, Leidschestraat, Keizersgracht, Raadhuisstraat, Nieuwezijds Voorburgwal, Paleisstraat, dan akhirnya di Istana Amsterdam.<sup>51</sup> Perjalanan ini diperkirakan sejauh lebih dari 5 km. Baru sampai di Sarpathistraat, terjadi sebuah insiden. Kuda yang ditunggangi Syarif Hasyim tiba-tiba tidak terkendali sehingga ia terjatuh. Sang sultan melanjutkan perjalanan dengan kereta kencana,<sup>52</sup> sementara berita lainnya menyebutkan bahwa ia berjalan kaki hingga akhir rute.<sup>53</sup> Sesampainya di tujuan, Wilhelmina bersiap mengenakan jubah kebesaran berwarna merah untuk berjalan di bawah kanopi dari Istana Amsterdam menuju Nieuwe Kerk. Semua tamu telah menunggu, termasuk para bangsawan Hindia Belanda, dan Syarif Hasyim berdiri di podium tingkat dua di bagian depan.<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> “De Inhuldigingsplechtigheid” *Het vaderland*, 10 Agustus 1898

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *The Noord Brabanter*, 7 September 1898; 1898-09-09, *Nieuwe Groninger Courant*, 9 September 1898

<sup>53</sup> *De Morgenpost*, 6 September 1898; *Leeuwarder Courant*, 7 September 1898;

<sup>54</sup> Urutan tamu kehormatan dalam pelantikan Wilhelmina terlampir.

**Gambar 8**  
**Syarif Hasyim Menghadiri Pelantikan Ratu Wilhelmina**



Keterangan : Upacara pelantikan Ratu Wilhelmina di Nieuwe Kerk, Amsterdam, pada 6 September 1898. Syarif Hasyim berada di pojok kiri gambar.

Sumber : Oneindig Noord-Holland, <http://www.oneindignoordholland.nl/public/nl-NL/verhaal/8744/een-koninklijke-inhuldiging-door-de-ogen-van-een-dame-du-palais>, diakses tanggal 22 September 2024

Setelah pelantikan, Wilhelmina berjalan ke Istana Amsterdam sebagaimana ia berjalan ke Nieuwe Kerk, kemudian menampilkan diri di atas balkon di hadapan rakyat Belanda, sementara bangsawan Hindia Belanda melihat dari jendela istana, termasuk Syarif Hasyim yang melihat dari dekat pintu balkon.<sup>55</sup> Setelah acara selesai, Wilhelmina kembali ke stasiun Weesperplein dan para bangsawan Hindia Belanda diantar dengan kereta kencana menuju penginapan masing-masing. Dengan demikian selesailah tugas para bangsawan Hindia Belanda untuk menghadiri pelantikan Wilhelmina, dan setelah beberapa acara lainnya, masing-masing mereka memiliki agenda tersendiri sebelum pulang.

---

<sup>55</sup> *Delftsche Courant*, 9 September 1898.

Saat pulang, Syarif Hasyim menyempatkan diri untuk mengunjungi beberapa kota besar Eropa, seperti Wina, Budapest, dan Istanbul. Budapest adalah kota paling dikenang dalam ingatan Syarif Hasyim, sementara itu perjalanannya ke Istanbul adalah sesuatu yang dianggap “berbahaya” bagi kolonial Belanda. Pada masa itu, Pan-Islamisme sedang bergejolak dan didukung oleh Sultan Utsmaniyah, Abdul Hamid II. Agar tidak menarik perhatian publik, ia menyamar sebagai “Syekh Syarif Hasyim”. Bahkan, pakaian-pakaian kebesarannya dikirim langsung dari Belanda ke Port Said untuk menutup kecurigaan seandainya diinterogasi.<sup>56</sup> Tentu saja, Syarif Hasyim yang merupakan seorang Ba’alawi—dibandingkan Khalifah Utsmaniyah yang berdarah Turki—dapat menjadi sasaran empuk bagi penyokong Pan-Islamisme untuk mendapat dukungan dan menyebarkan paham itu ke dunia Islam, khususnya di Hindia Belanda.

Sesampainya di Istanbul, rombongan Syekh Syarif Hasyim menginap di Hôtel de Londres di Beyoğlu. Ia sempat mengunjungi tempat bersejarah seperti Istana Topkapi, Bazaar, hingga Hagia Sophia. Rombongan tersebut sangat menjaga identitas mereka dan menghindari bertemu siapapun selain orang-orang tertentu, termasuk beberapa wartawan Belanda yang secara eksklusif meliput kunjungannya ke Istanbul;<sup>57</sup> berita itu saja tidak terbit sampai beberapa hari sebelum Syarif Hasyim hampir tiba di Siak. Syarif Hasyim sangat menyadari ketakutan Belanda terhadap gerakan Pan-Islamisme, sehingga ia memilih untuk menyembunyikan

---

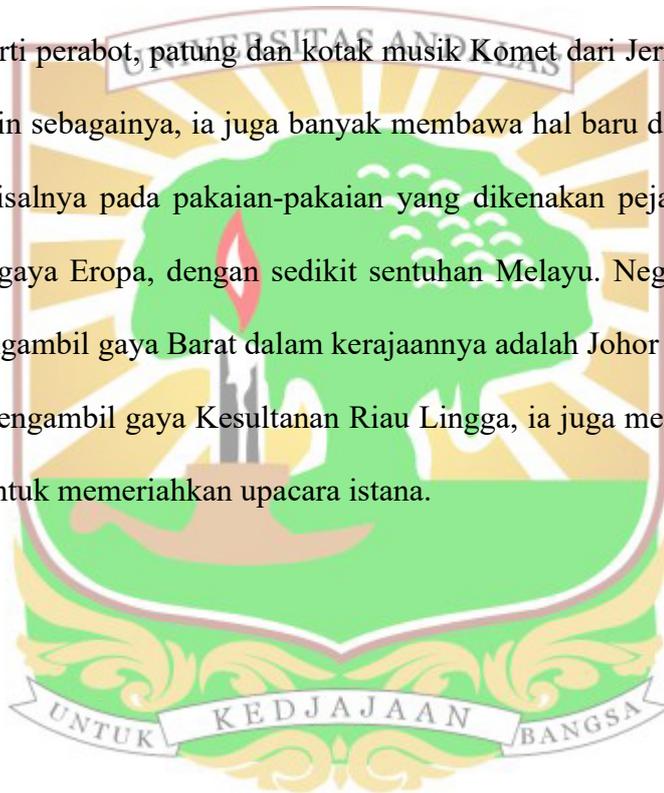
<sup>56</sup> *Bataviaasch Nieuwsblad*, 16 November 1898.

<sup>57</sup> *Ibid.*

identitasnya selama perjalanan pulang. Kekhawatiran Belanda bahwa Syarif Hasyim akan menjadi biang keladi Pan-Islamisme tidak pernah terbukti.

### 3.2.3. Kekuasaan Berikutnya

Kunjungan Syarif Hasyim ke Belanda tidak mungkin tanpa meninggalkan kesan mendalam, apalagi sebagai satu-satunya tamu Hindia Belanda dengan gelar sultan dan dapat bertemu secara pribadi dengan Ratu Wilhelmina. Selain membawa oleh-oleh seperti perabot, patung dan kotak musik Komet dari Jerman, kursi-kursi berlian, dan lain sebagainya, ia juga banyak membawa hal baru dalam istana. Hal ini terlihat, misalnya pada pakaian-pakaian yang dikenakan pejabat istana yang cenderung bergaya Eropa, dengan sedikit sentuhan Melayu. Negeri paling dekat yang juga mengambil gaya Barat dalam kerajaannya adalah Johor di bawah Sultan Abu Bakar. Mengambil gaya Kesultanan Riau Lingga, ia juga membentuk sebuah Pancaragam untuk memeriahkan upacara istana.



## Gambar 9

### Salah Satu Sesi Majelis Kerajaan Siak Sri Indrapura



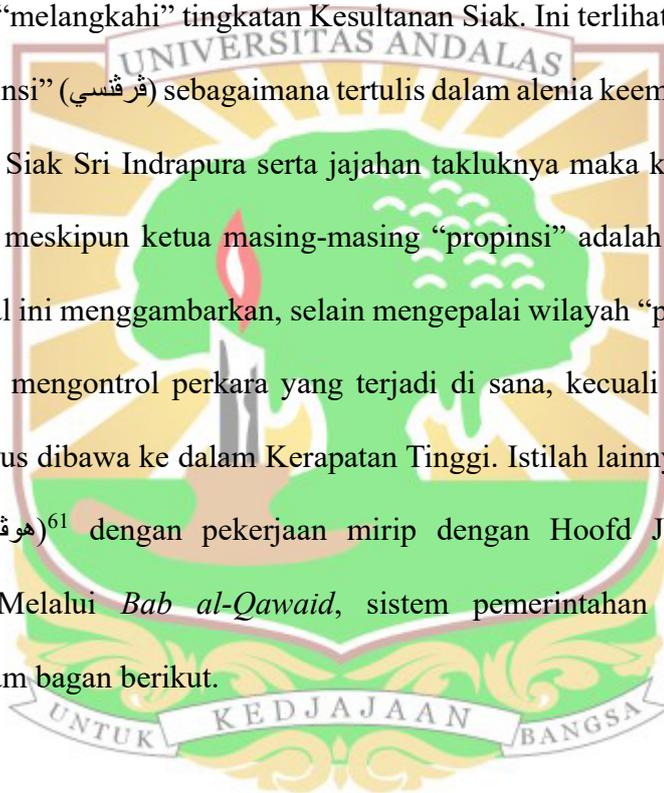
Keterangan : Syarif Hasyim, mengenakan pakaian kebesarannya saat pelantikan Ratu Wilhelmina, beserta petinggi dan petugas kerajaan dalam sebuah majelis kerajaan di Balai Kerapatan Tinggi, Siak Sri Indrapura

Sumber : KITLV, <http://hdl.handle.net/1887.1/item:773417>, diakses tanggal 15 Januari 2023.

Di bidang pemerintahan, perombakan struktur dijalankan oleh Syarif Hasyim. Sebagai kelanjutan dari Ingat Jabatan, Kesultanan Siak menyusun *Bab al-Qawaid*. *Bab al-Qawaid* bagi penulis merupakan hasil inspirasi dari berbagai pengalaman dan pengetahuan Syarif Hasyim mengenai kondisi “modernisasi”. Setidaknya, hal ini terinspirasi dari Johor yang memang sudah mempunyai konstitusi sendiri. Bab al Qawaid disusun segera setelah sang sultan kembali dari Belanda. *Bab al-Qawaid* disahkan pada 1 Desember 1898 dengan meterai Sultan Siak beserta Datuk Empat Suku di hadapan asisten residen Bengkalis, kemudian

dicetak pada tahun 1901.<sup>58</sup> Kali ini, Siak sudah mempunyai mesin cetaknya sendiri, meskipun untuk kalangan istana saja.<sup>59</sup>

Hal yang unik dalam *Bab al-Qawaid*, mengingat kedudukan *zelfbestuur* di antara pemerintah Hindia Belanda, terletak pada pemakaian istilah administrasi yang terkesan “melangkahi” tingkatan Kesultanan Siak. Ini terlihat dari pembagian wilayah “propinsi” (فرقتسي) sebagaimana tertulis dalam alenia keempat “Sebermula, adapun negeri Siak Sri Indrapura serta jajahan takluknya maka kita bagi sepuluh propinsi...”,<sup>60</sup> meskipun ketua masing-masing “propinsi” adalah “Hakim Polisi” (هکیم پولیس). Hal ini menggambarkan, selain mengepalai wilayah “propinsi”, Hakim Polisi ini juga mengontrol perkara yang terjadi di sana, kecuali perkara-perkara besar yang harus dibawa ke dalam Kerapatan Tinggi. Istilah lainnya adalah Hoofd Jaksa (هوف جقس)<sup>61</sup> dengan pekerjaan mirip dengan Hoofd Jaksa di sebuah keresidenan. Melalui *Bab al-Qawaid*, sistem pemerintahan Syarif Hasyim tergambar dalam bagan berikut.



---

<sup>58</sup> Untuk lebih detail lihat O.K. Nizami Jamil *et al.*, *Bab al-Qawaid: Transliterasi dan Analisis* (Siak Sri Indrapura: Bappeda Kabupaten Siak, 2002). Catatan kaki *Bab al-Qawaid* merujuk kepada sumber ini.

<sup>59</sup> “Van Tempo Doeloe”, *De Sumatera Post*, 9 Desember 1911.

<sup>60</sup> *Bab al-Qawaid*, hlm. 23.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

**Bagan 4**  
**Sistem Pemerintahan Kesultanan Siak masa Syarif Hasyim**



Sumber : Ellyya Roza, *Kerajaan Siak 1723-1908: Perspektif Sejarah dan Sosiobudaya* (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 132.

Di luar pengetahuan Residen Bengkalis dan pejabat Kesultanan Siak Sri Indrapura, *Bab al-Qawaid* yang hanya berlaku hingga tahun 1915 itu hampir tidak diketahui oleh orang luar. Hal ini sebagaimana dalam sebuah berita mengenai kondisi zelfbesturen di Oostkust van Sumatra:

*“... Er is eens een Sultan van Siak geweest, die aan den resident mededeelde, dat hij voor zijn gebied een regeerings-reglement wilde vaststellen, dat dan als grondwet voor zijn rijk zou dienen, maar het is bij een voornemen gebleven. Een eenigszins complete wetgeving heeft geen der zelfbesturen. Zij hebben in den loop der tijden wel te hooi en te gras enkele ver- ordeningen gemaakt, doch zelfs een behoorlijke afkondiging hiervan heeft niet plaats gehad.”<sup>62</sup>*

(... Pernah ada seorang Sultan Siak yang menyampaikan kepada residen bahwa ia berniat menetapkan peraturan pemerintahan untuk wilayahnya, yang akan berfungsi sebagai konstitusi bagi kerajaannya, tetapi niat itu tidak pernah terwujud. Tidak ada satu pun pemerintahan zelfbestuur yang memiliki sistem hukum yang lengkap. Sepanjang waktu, mereka memang telah membuat beberapa peraturan secara sporadis, tetapi bahkan

<sup>62</sup> *De Sumatra post*, 7 November 1918.

pengumuman yang layak tentang peraturan-peraturan tersebut tidak pernah dilakukan.)

Residen J. Ballot yang sering berurusan dengan Syarif Hasyim menganggap berbagai “modernisasi” yang dilakukan Syarif Hasyim sebagai “*operette bouffe* (opera komik)”:

*“De Sultan ... had zijn rijk verdeeld in provinciën, aan het hoofd waarvan waardigheidsbe kleeders met allerkeurigste uniform. Verder had hij ingesteld departementen van algemeen bestuur, de directeurs gekleed in gala uniform als onze departements-chefs. Elk departement was ondergebracht in een hokje onder de vergaderzaal van den raad van landsgrooten ... Dan stond aan het hoofd van zijn vloot, bestaande uit een steamlaunch en een roe boot, een Admirzal, mede in groot uniform. En aan het hoofd van een paar tientallen knulligepolitiedienaren, die een soort lakeidiensten verrichtten, stond een Leger-Commandant, de uniform dragende van Luitenant-Generaal.*

*Zelf liet de Sultan zich een pak maken matjam Keizer GERMANY, waarbij hij als model nam het bekende portret van den Keizer staande op de brug van de Hohenzollern... ”<sup>63</sup>*

(Sang Sultan ... telah membagi kerajaannya menjadi provinsi-provinsi, di mana setiap provinsi dipimpin oleh pejabat berpangkat tinggi yang mengenakan seragam yang sangat beragam. Selain itu, ia mendirikan departemen-departemen pemerintahan umum, dengan para direktur yang mengenakan seragam gala seperti kepala departemen kami. Setiap departemen ditempatkan di sebuah ruangan kecil di bawah aula rapat dewan para pembesar kerajaan [Balai Kerapatan Tinggi, pen.] ... Kemudian di pucuk pimpinan armadanya, yang terdiri dari sebuah kapal uap dan sebuah perahu dayung, terdapat seorang Laksamana yang juga mengenakan seragam kebesaran. Sementara itu, di kepala sekelompok kecil polisi kikuk yang menjalankan tugas seperti pelayan, berdiri seorang Komandan Angkatan Darat yang mengenakan seragam seorang Letnan Jenderal.

Sultan sendiri memerintahkan untuk dibuatkan setelan pakaian “matjam Keizer GERMANY”, dengan mengambil model dari potret terkenal sang Kaisar yang berdiri di jembatan Hohenzollern...)

Pada tahun 1906, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk memperbaharui kontrak bagi semua *zelfbestuur* di Hindia Belanda, untuk

---

<sup>63</sup> “Van Tempo Doeloe”, *De Sumatera Post*, 9 Desember 1911.

menyesuaikan “prinsip-prinsip” politik pemerintah kolonial. Peraturan ini menetapkan bahwa pajak, hak sewa, impor-ekspor, dan lain-lain akan diambil alih kepada pemerintah Hindia Belanda.<sup>64</sup> Anggaran kerajaan dan pemerintah kolonial akan dipisah. Selain itu, status kependudukan Hindia Belanda diperluas menjadi warga Timur Asing, Eropa, dan pribumi yang bekerja di bawah pemerintah.<sup>65</sup> Kesultanan Siak Sri Indrapura dalam kontrak itu dinyatakan sebagai sebuah “pinjaman” Hindia Belanda kepada penguasanya, Syarif Hasyim.<sup>66</sup>

Sultan Syarif Hasyim sangat keberatan dengan beberapa pasal rancangan kontrak baru ini, sehingga melayangkan keluhan secara tertulis kepada pemerintah, tetapi ditolak dan menyuruh Residen Ballot untuk menemui sultan. Syarif Hasyim, satu-satunya sultan di Hindia Belanda yang diundang untuk menghadiri pelantikan Ratu Wilhelmina, merasa dapat ‘melobi’ kontrak yang dirasa akan menghilangkan kedaulatannya yang tersisa. Dengan demikian, ia menghindari pertemuan dengan residen dalih sedang sakit dan perlu dirawat di Singapura. Ternyata, ia berencana untuk pergi ke Belanda dan menyampaikan keluhannya langsung kepada pemerintah pusat.<sup>67</sup>

Mendengar hal itu, pemerintah Hindia Belanda seperti kebakaran jenggot. Bagi mereka, tentu tidak layak bagi seorang penguasa pribumi sekelas asisten residen untuk menemui langsung pemerintah pusat, karena hal ini dapat mencoreng

---

<sup>64</sup> “Een Conflict in Siak?”, *Bataviaasch nieuwsblad*, 22 Agustus 1906.

<sup>65</sup> “De nieuw politiek contracten”, *De Sumatera Post*, 28 Agustus 1907.

<sup>66</sup> *De Sumatra Post*, 13 Januari 1912.

<sup>67</sup> “Een Conflict in Siak?”, *Bataviaasch nieuwsblad*, 22 Agustus 1906.

pemerintah kolonial. Sementara sang sultan berkemas, gubernur jenderal Hindia Belanda mengirim telegram kepada Residen Ballot agar segera menghampiri Syarif Hasyim. Residen memasuki Istana Siak sementara sang sultan masih berkemas. “Beliau adalah sekutu saya (*mijn boondgenoote*). Beliau tidak akan membiarkan mereka mencabut penghasilan saya. Sang ratu adalah agung dan adil. Bagaimana menurut Anda, *tuan opziener?*”. Maka sang Residen mengingatkan bahwa melangkahi Gubernur Jenderal adalah tindakan yang akan sangat dipermasalahkan oleh Ratu, yang akan menganggapnya “tidak beradab”.<sup>68</sup>

Setelah diskusi yang lama, akhirnya Residen menyatakan bahwa bea impor dan tiga perempat pajak konsensi tetap dipertahankan. “Boleh tuan, bikin saja tuan”, kata Syarif Hasyim. Pernyataan kontrak bahwa Kesultanan Siak adalah “pinjaman” kepada Syarif Hasyim memang sangat menyinggungkannya, tetapi Residen menyebut bahwa hubungannya dengan Ratu Wilhelmina itu setara dengan hubungan Sunan Surakarta (yang terkenal sejahtera di masa pemerintahannya) dengan sang ratu. Pada akhirnya, Syarif Hasyim menyetujui kontrak 1906 tersebut pada bulan Desember.<sup>69</sup>

Pada akhir hayatnya, Syarif Hasyim menderita demam malaria. Sakit itu tidak tertahankan lagi, sehingga ia memutuskan untuk berobat ke Singapura pada tanggal 31 Maret. Ternyata, sakitnya tidak kunjung sembuh, dan pada tanggal 2

---

<sup>68</sup> *De Sumatra Post*, 13 Januari 1912.

<sup>69</sup> *Ibid.*

April ia mangkat di Singapura.<sup>70</sup> Jenazahnya diantar ke Siak menggunakan kapal uap Glanggi yang biayanya ditanggung oleh Syed Omar bin Mohammad Assegaf, salah seorang kerabatnya di Singapura.<sup>71</sup> Ia dimakamkan bersama leluhurnya di Koto Tinggi, tidak jauh dari Istana Siak.

### 3.3. Syarif Kasim II (1908-1968)

Setelah Syarif Hasyim meninggal dan dimakamkan, Tengku Sulung Sayid Kasim masih remaja dan menuntut ilmu di Batavia. Oleh sebab itu Kerapatan dan Pemerintah Hindia Belanda menunjuk *regent* (wali) sultan sebanyak dua orang. Mereka adalah Tengku Besar Sayyid Sagoff bin Tengku Sulung Muda Sayyid Alwi, cucu dari Syarif Kasim I, dan Datuk Sri Bijuangsa, Datuk Lima Puluh saat itu. Mereka dilantik pada bulan Juni 1908.<sup>72</sup>

Perkembangan kota Siak Sri Indrapura tidaklah sepesat kota pesisir timur Sumatera lainnya seperti Medan. Sampai tahun 1920-an pun, belum ada jalur darat untuk mencapai Siak, sekalipun Pekanbaru telah berkembang, Tetapi ada indikasi bahwa pemerintah memang menghalang perkembangan Siak itu sendiri. Salah seorang kontrolir pernah membeli peralatan komunikasi dengan dana daerahnya untuk memudahkan setidaknya komunikasi pekerjaannya. Sebelum sempat

---

<sup>70</sup> "Death of Sultan of Siak", *The Strait Times*, 2 April 1908; "Siak", *De Nieuwe Courant*, 1 Agustus 1908.

<sup>71</sup> *The Straits Times*, 4 April 1908.

<sup>72</sup> "New Sultan of Siak: Youthful Crown Prince Proclaimed Ruler", *The Straits Budget*, 9 Juli 1908

dipasang, kontrolir tersebut dipindahtugaskan.<sup>73</sup> Dengan kondisi demikian, Syarif Kasim II memulai pemerintahannya pada tahun 1915.

### 3.3.1. Syarif Kasim II di bawah Belanda dan Jepang

Pada hari rabu, 3 Maret 1915, Syarif Kasim II dinobatkan sebagai sultan Siak oleh Belanda. Penobatan ini dilaksanakan di “rumah kontrolir” pukul 9 pagi. Semua pejabat dan tamu undangan tiba di lokasi sebelum sang sultan datang kemudian dan bersama-sama menunggu tuan Residen. Setelah Residen tiba di tempat, seluruh hadirin berkumpul melingkar. Residen membacakan surat keputusan pengangkatan sultan beserta kontrak politik, kemudian surat-surat itu ditandatangani oleh sultan. Residen kemudian memahkotai Syarif Kasim II, dilanjutkan kata sambutan oleh residen. Setelah itu, sang sultan diberi ucapan selamat dan jabat tangan oleh residen, asisten residen, kontrolir, serta hadirin lainnya. Hal itu mengakhiri upacara penobatan Syarif Kasim II. Setelah itu, residen meninggalkan tempat, manakala sultan beserta rombongan menuju istana untuk menerima sembah rakyat dan ucapan selamat.<sup>74</sup>

Syarif Kasim II terlihat citranya sebagai seorang yang mendukung pendidikan dan seni dengan gaya hidup yang lebih sederhana dibandingkan

---

<sup>73</sup> *Deli Courant*, 10 Juni 1920.

<sup>74</sup> “De Troonsopvolging in Siak”, *Deli Courant*, 30 Maret 1915. Gedung kontrolir yang dimaksud bukanlah gedung yang dikenal sekarang sebagai cagar budaya di Kelurahan Benteng Hilir, karena bangunan tersebut baru dibangun pada tahun 1937. Menurut penulis, besar kemungkinan gedung kontrolir tersebut terletak di Kampung Dalam atau sekitarnya, dekat dengan Istana Siak atau Balai Kerapatan Tinggi, meskipun wujudnya tidak ada lagi. Besar kemungkinan gedung yang sama digunakan untuk pelantikan Syarif Hasyim, sebagaimana dalam gambar 3. Opsi lain yang penulis berikan adalah bahwa penulis berita ini menganggap Balai Kerapatan Tinggi sebagai “gedung kontrolir”. Namun sejauh pengamatan penulis, dua gedung tersebut mempunyai perbedaan, baik ukuran maupun proporsinya, meskipun sekilas mirip.

ayahnya. Begitu menjadi sultan, Syarif Kasim II mendirikan sekolah yang terbuka bagi masyarakat Siak, HIS Siak, pada tanggal 15 September 1915. Selang dua tahun kemudian, ia juga mendirikan sekolah berbasis lokal Melayu, Madrasah Taufiqiyah Hasyimiyah. Istrinya, Tengku Agung Syarifah Lathifah, mendirikan sekolahnya sendiri, Latifah School, pada tahun 1926, begitu juga Tengku Mahratu, istri kedua sultan setelah Syarifah Lathifah meninggal, mendirikan Madrasah an-Nisa' pada tahun 1929. Murid-murid Siak yang belajar di sana sering diberikan beasiswa untuk menuntut ilmu di luar.<sup>75</sup> Inilah salah satu ranah kekuasaan sultan yang masih dapat dikembangkan dibandingkan ranah-ranah lainnya yang dikuasai dan dikekang oleh Belanda. Syarif Kasim sangat memedulikan pendidikan murid-murid sekolah yang dinaunginya, sehingga apabila mereka bolos untuk memanen karet, orang tuanya akan dinasehati oleh sultan.<sup>76</sup>

Di samping itu, Syarif Kasim merupakan orang yang luwes, sama seperti ayahnya. Dalam sebuah wawancara, Syarif Kasim sadar akan pergerakan nasionalisme Indonesia serta memasukkan semangat itu, bersama dengan agama, ke dalam pendidikannya. Sekolah kesultanan juga ditujukan untuk pendidikan kaum ibu. Seandainya ada tuntutan perubahan dalam sistem *zelfbestuur* dan pengadilan kerajaan, ia bersedia untuk mengikutinya.<sup>77</sup>

Tradisi kerajaan pada masa Syarif Kasim II dipertahankan melalui berbagai upacara yang telah ditetapkan oleh ayahnya, Syarif Hasyim. Namun, mengingat

---

<sup>75</sup> Muchtar Lutfi, *Sejarah Riau* (Pekanbaru: Universitas Riau, 1977), hlm. 349.

<sup>76</sup> "Journalist Mengembara: Siak". *Bintang Hindia*, 4 Mei 1929.

<sup>77</sup> *Ibid.*

kekuatan politik tidaklah sebesar dan sepenting zaman ayahnya tersebut, ia menvariasikan tradisi kerajaan dengan adat. Berbagai dokumentasi yang penulis kumpulkan menunjukkan bahwa di samping tradisi kerajaan, ia juga sering menyelenggarakan tradisi-tradisi bertemakan adat, ditandai oleh pakaian Melayu yang mereka kenakan. Peralihan ini menunjukkan, di samping bahwa sultan berkuasa di bidang adat, Syarif Kasim juga cukup peduli dengan adat. Selain itu, ia sering mengunjungi berbagai daerahnya dan bertemu dengan rakyat jelata.

**Gambar 10**  
**Salah Satu Aktivitas Syarif Kasim II**



Keterangan : Syarif Kasim II dalam sebuah upacara adat di Istana Siak, terlihat semua peserta mengenakan pakaian Melayu (kiri), serta kunjungannya ke sebuah daerah wilayahnya (kanan)

Sumber : koleksi Istana Siak, diperoleh tanggal 24 September 2024

Satu dari sekian kekuasaan sultan Siak yang masih dapat dipertahankan dan dapat membawa keuntungan besar adalah penganugerahan izin kilang minyak di wilayahnya. Meskipun keberadaan minyak bumi di Siak telah diketahui pada akhir abad ke-19, baru dieksplorasi pada awal abad ke-20. Pada tanggal 18 Juli 1901, sebuah zat minyak bumi ditemukan di Siak.<sup>78</sup> Eksplorasi dan studi semakin gencar

<sup>78</sup> "Petroleum in Siak", *Het Vaterland*, 28 Agustus 1901

dilakukan di wilayah Siak dengan melibatkan berbagai ilmuwan; sebagai rasa terima kasih dan duka cita, dua di antaranya, Baron von der Brüggén and Oscar John, meletakkan karangan bunga dari perak di pusara Syarif Hasyim pada bulan September 1908.<sup>79</sup> Kilang minyak pertama dibuka di Bangkinang, dan pembukaannya dihadiri oleh segenap pejabat Oostkust van Sumatra, termasuk Sultan Syarif Kasim II dan istri.<sup>80</sup> Sejak saat itu, Syarif Hasyim II sering memberikan surat izin tambang minyak ke berbagai perusahaan di Siak. Namun, pada tahun 1938, pemerintah kolonial menghilangkan hak ini, sehingga hanya Hindia Belanda yang dapat memberi izin kilang minyak. Pada tahun 1940, Afdeeling Bengkalis, termasuk wilayah Siak, dimasukkan kembali ke dalam Keresidenan Riouw.<sup>81</sup>

Saksi hidup yang menyaksikan kehidupan Syarif Kasim II berpendapat bahwa ia bukanlah orang yang terlalu mendukung Belanda. Hal ini terlihat dilihat ketika Belanda sangat rapat hubungannya dengan para sultan di Deli dan sekitarnya, selaras dengan kemajuan wilayah itu, manakala Siak hanyalah sebuah daerah pelosok yang bahkan tidak sepesat Pekanbaru; bahkan Siak digambarkan sebagai “kota mati”.<sup>82</sup> Terkadang, ada perselisihan antara Belanda dan Syarif Kasim II. O.K. Muhammad Jamil, seorang sekretaris pribadi sultan, menyaksikan persengketaan pengganti Wak Entol, *districthoofd* Pekanbaru yang ditarik ke Siak, sang sultan

---

<sup>79</sup> The Strait Times, 2 September 1908; “Een piëteitsdaad”, *De Preanger-bode*, 7 September 1908.

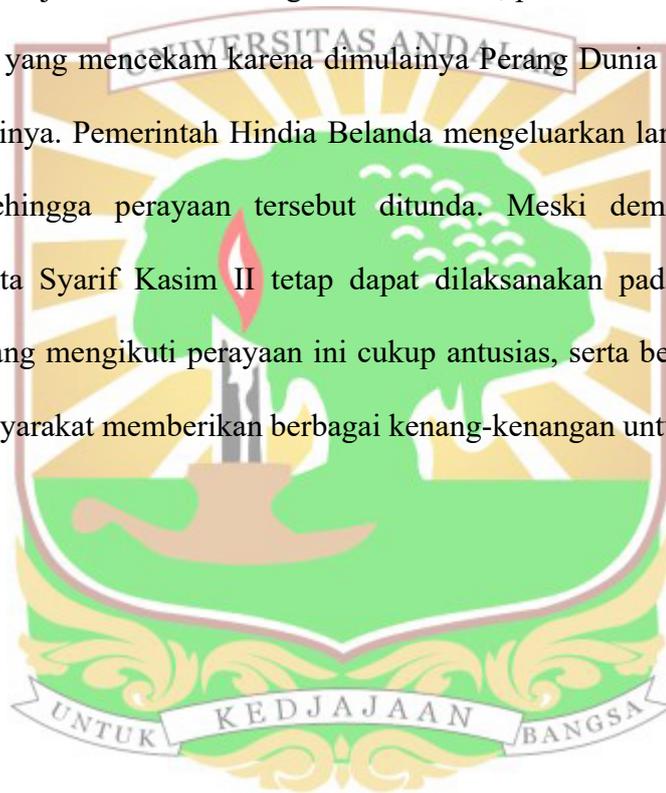
<sup>80</sup> “De Mijnbouw Mij. Stannum”, *Sumatra-bode*, 27 Juli 1926.

<sup>81</sup> Richard H. Hopper, *op. cit.*, hlm. 100.

<sup>82</sup> *Deli Courant*, 30 Juli 1926.

menghendaki Wan Abdurrahman sebagai pengganti sementara Belanda menginginkan yang lain Setelah masalah ini dibawa ke Gubernur Sumatra, Wan Abdurrahman tetap ditunjuk sebagai penggantinya.<sup>83</sup>

Upacara peringatan 25 tahun kenaikan Syarif Kasim sebagai sultan Siak telah disiapkan sejak 1939 oleh orang istana. Namun, pada bulan September 1939 kondisi Eropa yang mencekam karena dimulainya Perang Dunia II memengaruhi wilayah koloninya. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan larangan membuat keramaian, sehingga perayaan tersebut ditunda. Meski demikian, perayaan kenaikan takhta Syarif Kasim II tetap dapat dilaksanakan pada tahun 1940.<sup>84</sup> Masyarakat yang mengikuti perayaan ini cukup antusias, serta berbagai kalangan dan tokoh masyarakat memberikan berbagai kenang-kenangan untuk sang sultan.<sup>85</sup>



---

<sup>83</sup> O.K. Nizami Jamil, *Siak Negeri Pengabdianku: Biografi Orang Kaya Muhamad Djamil, Sekretaris Pribadi Sultan Syarif Kasim II* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2016), hlm. 33-34.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 34-35

<sup>85</sup> Beberapa benda kenangan tersebut masih dipajang di Istana Siak hingga sekarang.

**Gambar 11**  
**Perayaan Kenaikan Takhta Syarif Hasyim Tahun 1940**



Keterangan : Salah satu bentuk perayaan kenaikan takhta Syarif Kasim II pada tahun 1940.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, diperoleh tanggal 18 Oktober 2024

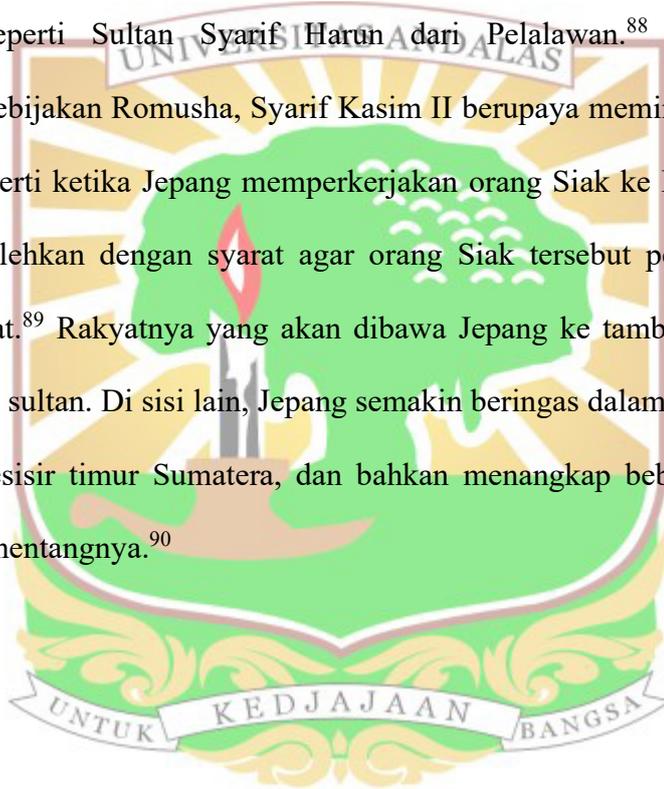
Momen pendudukan Jepang menunjukkan kharisma Syarif Kasim II. Pada bulan April 1942, saat sang sultan berada di Masjid Syahabuddin untuk memperingati Maulid Nabi, kapal berbendera Jepang mulai memasuki Siak. OK Muhammad Jamil sebagai sekretaris pribadi sultan langsung melapor ke Syarif Kasim II, yang ditanggapi dengan tenang dan memesan orang Jepang untuk menunggu di istana sampai peringatan Maulud selesai.<sup>86</sup> Sepertinya Syarif Kasim telah mengetahui bagaimana berhadapan dengan Jepang, dengan pengalamannya berinteraksi dengan mereka yang berinvestasi karet wilayahnya. Sang sultan bertemu panglima Jepang, sementara pejabat Belanda berbaris di depan istana.

---

<sup>86</sup> O.K. Nizami Jamil, *op. cit.*, hlm. 37-38.

Jepang sepakat bahwa Kesultanan Siak menjalankan pemerintahan seperti biasanya, sementara Jepang mengambil alih pemerintahan Belanda.<sup>87</sup>

Syarif Kasim II mengambil langkah kooperatif dengan Jepang dan berpartisipasi dalam majelis Sultan Kaigi yang juga melibatkan beberapa penguasa zelfbestuur seperti Sultan Syarif Harun dari Pelalawan.<sup>88</sup> Ketika Jepang menerapkan kebijakan Romusha, Syarif Kasim II berupaya meminimalisasi derita rakyatnya, seperti ketika Jepang memperkerjakan orang Siak ke Pekanbaru, sang sultan membolehkan dengan syarat agar orang Siak tersebut pergi dan pulang dengan selamat.<sup>89</sup> Rakyatnya yang akan dibawa Jepang ke tambang Logan juga dapat dihalang sultan. Di sisi lain, Jepang semakin beringas dalam mengeksploitasi masyarakat pesisir timur Sumatera, dan bahkan menangkap beberapa penguasa lokal yang menentangnya.<sup>90</sup>



---

<sup>87</sup> O.K. Nizami Jamil, *op. cit.*, hlm. 170-171; Abel Tasman, *Wan Ghalib untuk Riau: Seutas Biografi* (Pekanbaru: Yayasan Pustaka, 2001), hlm. 45.

<sup>88</sup> Ahmad Yusuf *et al.*, *Sejarah Perjuangan Rakyat Riau 1942-1958* (Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau, 2004), hlm. 106-107

<sup>89</sup> O.K. Nizami Jamil, *op. cit.*, hlm 39.

<sup>90</sup> Tenas Effendy dan Nahar Effendy, *Lintasan Sejarah Siak Sri Indrapura* (Pekanbaru: Badan Pembina Kesenian Daerah Propinsi Riau, 1973), hlm. 52.

## Gambar 12

### Syarif Kasim II Bekerja Sama dengan Jepang



Keterangan : Syarif Kasim II dan Tengku Mahratu dalam sebuah acara propaganda Jepang

Sumber : Koleksi Istana Peraduan Siak, diperoleh tanggal 20 Februari 2020

### 3.3.2. Syarif Kasim II saat Kemerdekaan Indonesia

Posisi Syarif Kasim II terhadap kemerdekaan Indonesia sering ditulis oleh sejarawan sebagai seorang pro-Republik, mengesampingkan opsi-opsi lain yang mungkin diambil oleh sang sultan. Hal ini disebabkan ia telah berada di sisi Republikan selama Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Hal ini berbeda dengan sultan-sultan lain di pesisir timur Sumatera, yang sebagian besarnya berharap kedatangan Belanda agar monarki mereka dapat bertahan. Ketimpangan ini tidak dapat dijawab kecuali dengan memperhatikan berbagai faktor, sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya. Pertama, kondisi Siak tidaklah semaju kota pesisir timur lainnya seperti Medan dan sekitarnya. Kedua, pada dasarnya sultan tidak terlalu pro-Belanda dan ia juga menyadari berbagai pergerakan yang berkembang di Hindia Belanda, termasuk nasionalisme Indonesia. Alasan lainnya

akan dijelaskan di bawah, dan inilah yang mungkin menentukan sikap Syarif Kasim II antara memihak Belanda atau Indonesia.

Bagi sebagian orang, sikap Syarif Kasim II yang mendukung republik merupakan suatu misteri, tetapi ini dapat dipermudah ketika kita melihat situasi dan kondisi Afdeeling Bengkalis masa itu. Bagi Anthony Reid, wilayahnya yang terisolasi dapat menghalangi sang sultan untuk berharap bahwa Belanda akan memberikan bantuan padanya.<sup>91</sup> Richard Hopper malah memberikan fakta gamblang: menurut beberapa orang Belanda yang ditahan di Bangkinang, Syarif Kasim II sempat berangkat ke kota itu untuk menemui van Breckel, Residen Riouw yang ditahan selama pendudukan Jepang. Van Breckel menolak kunjungan dengan sang sultan.<sup>92</sup> Dengan demikian, Syarif Kasim II kembali ke istananya. Bila kisah ini benar, maka hal ini adalah sebuah kerugian bagi Belanda, karena dukungan dari penguasa wilayah terbesar di Residen Riouw tersebut sirna.

Berita kemerdekaan Indonesia telah menyebar di berbagai wilayah di Riau. Di Siak, berita itu sekadar desas desus dan belum resmi, sehingga Syarif Kasim II mengutus O.K. Muhammad Jamil untuk mencari kabar di Pekanbaru, berangkat dengan kapal uap Kato kepunyaan sultan. Ternyata, bendera Merah Putih telah terpasang di sebagian besar Kota Pekanbaru. Ia memastikan berita kemerdekaan Indonesia melalui ketua KNI Pekanbaru Raden Yusuf, yang menyarankan

---

<sup>91</sup> Anthony Reid, *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1979), hlm. 221.

<sup>92</sup> Richard H. Hopper, *op. cit.*, hlm. 178.

pembentukan KNI Siak. setelah memastikan kabar, Muhammad Jamil kembali lagi ke Siak dan mengabarkan sultan.<sup>93</sup>

31 Kira-kira tanggal 1 November 1945, Syarif Kasim II mengadakan upacara bendera di depan Istana Siak yang menandakan dukungan Kesultanan Siak terhadap Republik Indonesia. Dalam upacara tersebut, Tengku Mahratu mengikat pita merah putih di lengan sang sultan, diikuti peserta lainnya. Upacara tersebut juga menandai peresmian TKR yang dipimpin oleh Tengku Juned.<sup>94</sup> Pada tanggal 25 November, Syarif Kasim II menyumbangkan harta kerajaannya sebesar ¥ 20.000 kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berjanji akan menyerahkan hartanya lagi apabila diperlukan.<sup>95</sup>

Syarif Kasim II berangkat ke Medan dan tiba pada tanggal 25 Januari 1946 dan disambut langsung oleh Gubernur Sumatera, Tengku Mohammad Hasan. Sang sultan sangat berperan dalam mengajak sultan-sultan lain di pesisir timur Sumatera untuk mendukung Republik. Syarif Kasim II sendiri menawarkan kebijakan mempertahankan kerajaan dengan memodifikasinya sesuai dengan zaman. Pada tanggal 3 Februari, diadakanlah pertemuan sultan-sultan wilayah keresidenan Sumatera Timur, yakni Deli, Asahan, Langkat, Kota Pinang, Bilah, Panai, enam raja Simalungun, serta hampir semua sebayak (pemimpin) etnis Karo, dan tentu saja Sultan Siak. Rapat itu menghasilkan keputusan bahwa hadirin untuk mendukung

---

<sup>93</sup> O.K. Nizami Jamil, *op. cit.*, hlm. 61-62.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 62-63; Richard H. Hopper, *op. cit.*, hlm. 178. Cukup aneh bahwa saksi-saksi hidup yang menghadiri upacara tidak menyebut tanggal bersejarah tersebut, sehingga rata-rata penulis sejarah Riau menyebut bahwa upacara itu terjadi pada awal bulan Oktober. Meskipun demikian, satu-satunya berita yang mencatat kejadian ini adalah di *Suluh Merdeka*, 7 November 1945.

<sup>95</sup> Akhirnya, perhitungan final dan menjadi narasi resmi adalah 13 juta gulden.

kemerdekaan Indonesia, dengan memperhatikan daerah Istimewa agar dapat diterapkan di wilayah mereka.<sup>96</sup>

Agresi Militer Belanda menyebabkan Syarif Kasim II, beserta Tengku Mohammad Hasan dan pihak republikan keluar dari Medan ke Kutaraja. Sementara itu, Belanda yang telah menguasai Siak mencoba ‘mengambil hati’ rakyat Siak dengan membentuk yang disebut dengan Dewan Kesultanan Siak pada 1 Maret 1949<sup>97</sup> dan Siak Raad pada 1 Agustus 1949.<sup>98</sup> Besar kemungkinan pembentukan lembaga ini adalah untuk membentuk pecahan wilayah Indonesia, sama seperti Negara Sumatera Timur yang telah dibentuk Belanda sebelum menguasai Siak. Sementara itu, beberapa orang republikan memanfaatkan lembaga-lembaga tersebut dengan tetap memegang prinsip mereka.<sup>99</sup> Pembentukan Siak Raad dan Dewan Kesultanan Siak diketahui oleh Syarif Kasim II dari Kutaraja, sehingga ia menyiarkan pidato melalui radio yang menyatakan agar jangan mau diperalat Belanda untuk melangkahi kedaulatannya di Siak; ia juga menegaskan bahwa kedaulatan Siak “diserahkan sementara kepada Republik Indonesia”<sup>100</sup>

---

<sup>96</sup> Anthony Reid, *op. cit.*, hlm. 221-222

<sup>97</sup> Djawatan Kepolisian Negara Bagian DPKN Jakarta, “Kegiatan ‘Panitya Swapradja Siak’”, Jakarta, 30 Januari 1953, hlm. 1. Menurut penulis sejarah Siak, lembaga ini bernama Sultan Raad, manakala dalam laporan pemerintah lembaga ini disebut Panitia Penyelenggara Dewan Sementara Kerajaan Siak. Dewan Kesultanan dipakai seterusnya dalam tulisan ini.

<sup>98</sup> Ahmad Yusuf *et al.*, *op. cit.*, hlm. 339.

<sup>99</sup> Salah seorang pejabat istana, yang merupakan ayah Wan Ghalib, seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, mengikuti Siak Raad setelah meminta pendapat keluarganya. Abel Tasman, *op. cit.*, hlm. 87.

<sup>100</sup> Ahmad Yusuf *et al.*, *op. cit.*, hlm. 338-339.

Masyarakat Bengkalis segera mengadakan rapat pada pertengahan September 1949 untuk menentukan sikap tentang Siak Raad dan Dewan Kesultanan.<sup>101</sup> Hal ini penting, karena Bengkalis merupakan bekas ibukota keresidenan Riouw dan Oostkust van Sumatra sekaligus, sehingga pengaruhnya dianggap cukup besar bagi Belanda. Rapat tersebut juga dihadiri oleh G.J.A. Veling, kontrolir pembantu Residen Riouw, dan Datuk Ahmad, perwakilan Dewan Kesultanan. Rapat itu hanya menghasilkan pembentukan panitia berjumlah 6 orang, dan pada akhir bulan mereka mengirimkan pernyataan bahwa rakyat Bengkalis tidak dapat memutuskan bergabung dengan Siak Raad apabila perundingan antara Indonesia dan Belanda belum menghasilkan keputusan. Saat Datuk Kasim Aris, anggota Dewan Kesultanan, diminta Belanda berpartisipasi dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Siak Raad mengeluarkan pernyataan tidak mengakui perwakilannya. Akhirnya, sidang pleno Siak Raad pada tanggal 28-31 Oktober 1949 menyatakan bahwa Siak bergabung ke dalam negara bagian Indonesia.<sup>102</sup>

#### 3.4. Gerakan Swapraja Siak

Seperti yang telah dijelaskan di atas, para sultan di pesisir timur Sumatera berharap dengan bergabungnya mereka ke dalam Republik Indonesia, kesultanan dapat bertahan melalui daerah istimewa, sebagaimana yang dinikmati oleh Yogyakarta. Sultan Syarif Kasim bukanlah pengecualian. Dewan Kesultanan, kemudian menjadi, bergerak aktif untuk mewujudkan Swapraja Siak, sebuah daerah

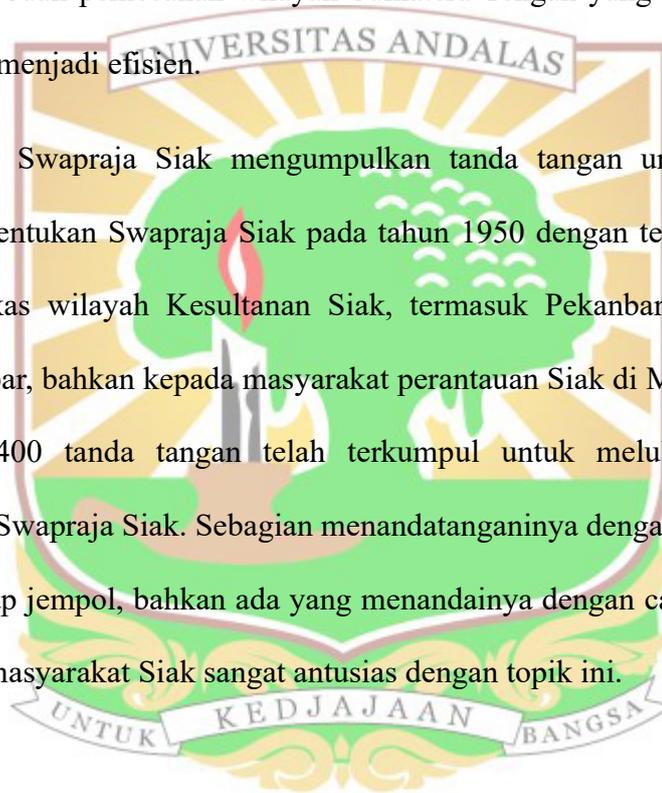
---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 339.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 339-341.

istimewa setingkat kabupaten. Meskipun tuntutan mereka adalah menegakkan kembali Kesultanan Siak dalam bentuk swapraja, “Panitya Swapradja Siak tidak berkeberatan sesuatu apa apabila daerah Swapradja Siak diberi Status Kabupaten sebagai sjarat minimum.”<sup>103</sup> Sehingga, tidak salah bagi para pengusung Swapraja Siak maupun tokoh-tokoh Riau lainnya untuk menyatakan bahwa gerakan Swapraja Siak adalah sebuah pemecahan wilayah Sumatera Tengah yang terlalu luas agar pemerintahan menjadi efisien.

Panitia Swapraja Siak mengumpulkan tanda tangan untuk menyetujui resolusi pembentukan Swapraja Siak pada tahun 1950 dengan terjun ke berbagai daerah di bekas wilayah Kesultanan Siak, termasuk Pekanbaru dan beberapa wilayah Kampar, bahkan kepada masyarakat perantauan Siak di Medan. Sebanyak lebih dari 2.400 tanda tangan telah terkumpul untuk meluluskan proposal pembentukan Swapraja Siak. Sebagian menandatangani dengan pena, sebagian lagi dengan cap jempol, bahkan ada yang menandainya dengan cap darah. Hal ini menandakan masyarakat Siak sangat antusias dengan topik ini.



---

<sup>103</sup> Djawatan Kepolisian Negara, *Perihal Panitya Swapradja Siak*, Nomor A.13/3/18-53, 30 Januari 1953. (Jakarta: Djawatan Kepolisian Negara bagian DPKN), hlm. 2

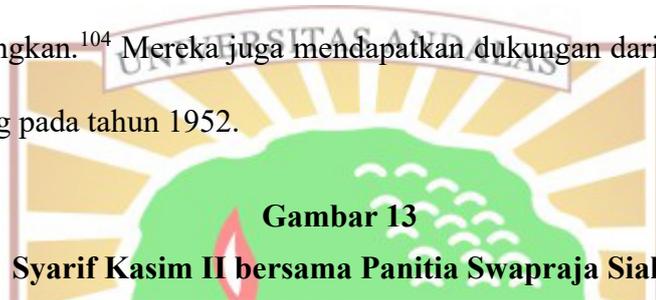
**Tabel 1. Jumlah penandatanganan resolusi pembentukan Swapraja Siak**

No	Kampung	Kecamatan	Jumlah tanda tangan
1.	Baran Melintang	Bengkalis	69
3.	Kp. Terubuk	Bengkalis	78
4.	Penasa	Bengkalis	60
6.	Buruk Bakul	Bukit Batu	30
7.	Mandau	Mandau	30
8.	Melibur	Mandau	31
9.	Pekalar	Mandau	17
10.	Mengkopot	Merbau	140
11.	Pelantai (Teluk Ketapang)	Merbau	110
12.	Renak Dungun	Merbau	90
13.	Teluk Belitung	Merbau	170
14.	Kp. Bukit	Pekanbaru	104
15.	Kp. Dalam	Pekanbaru	34
16.	Kp. Dalam	Pekanbaru	52
17.	Benteng Hilir	Siak	70
18.	Beringin	Siak	16
19.	Buatan	Siak	51
20.	Kp. Dalam (organisasi Sekuntum)	Siak	70
21.	Kp. Dalam 1-2	Siak	137
22.	Kp. Tualang	Siak	24
23.	Mempura	Siak	40
24.	Meredan	Siak	20
25.	Merempan	Siak	128
26.	Pangkalan Pisang	Siak	6
27.	Pematang Tumang	Siak	71
28.	Pinang Sebatang	Siak	7
29.	Pusaka	Siak	39
30.	Selat Panjang	Siak	69
31.	Semukut	Siak	90
32.	Suak Lanjut	Siak	46
33.	Sungai Apit	Siak	100
34.	Teluk Rimba	Siak	26
35.	Perantau Siak di Medan		48
36.	Tidak teridentifikasi		353
<b>Total</b>			<b>2.426</b>

Sumber : diolah dari Departemen Kepolisian Negara, *Perihal Gerakan Swapradja Siak*. Nomor B.2923/31/18-53, 5 Desember 1953 (Jakarta: Kepolisian Negara)

Setelah diangkat sebagai penasihat presiden di Jakarta, Syarif Kasim II meminta perwakilan Panitia Penyelenggara Dewan Sementara Kerajaan Siak, sebanyak dua orang untuk menemuinya. Untuk memenuhi panggilan ini, anggota

panitia bersepakat untuk mengutus Datuk Adham dan Wan Sulung. Setelah berkonsultasi dengan Datuk Achmad sebagai walikota Pekanbaru dan Wan Abdul Rachman sebagai bupati Kampar, mereka berangkat pada 19 Juli 1951 ke Jakarta. Sang sultan berpesan kepada panitia agar giat berkampanye dan mengusung anggota-anggota dewan yang mau mendukung Swapraja Siak agar mereka dapat duduk di kursi parlemen daerah, bahkan parlemen pusat, sehingga aspirasi swapraja dapat diperjuangkan.<sup>104</sup> Mereka juga mendapatkan dukungan dari buruh Caltex di Sungai Pakning pada tahun 1952.



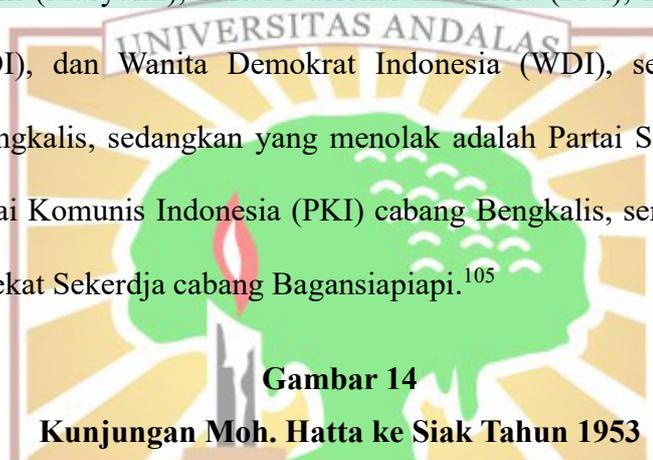
Keterangan : Sultan Siak sedang berdiskusi dengan anggota Swapraja Siak di Jakarta

Sumber : Abel Tasman, *Wan Ghalib untuk Riau: Seutas Biografi* (Pekanbaru: Yayasan Pustaka, 2001), hlm. 91.

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2

23 Isu Swapraja Siak yang hangat tersebut menyebabkan wakil presiden Mohammad Hatta mengunjungi Siak pada tanggal 10 April 1953 sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat Siak di depan Istana Siak. Sementara itu, berbagai organisasi masyarakat dan partai politik di Siak juga mengemukakan pendapat mereka. Organisasi yang menyetujui Swapraja Siak adalah Partai Majelis Syuro Muslimin (Masyumi), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Wanita Demokrat Indonesia (WDI), semuanya cabang Kabupaten Bengkalis, sedangkan yang menolak adalah Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) cabang Bengkalis, serta Masyumi dan Gabungan Sarekat Sekerdja cabang Bagansiapiapi.<sup>105</sup>



**Gambar 14**  
**Kunjungan Moh. Hatta ke Siak Tahun 1953**



Keterangan : Wakil Presiden Mohammad Hatta mengunjungi Istana Siak (kiri) dan unjuk rasa mendukung pembentukan Swapraja Siak di depan istana (kanan)

Sumber : Arsip Negara Republik Indonesia

<sup>105</sup> Departemen Kepolisian Negara. *Perihal Gerakan Swapradja Siak*. Nomor B.2923/31/18-53, 5 Desember 1953. Jakarta: Kepolisian Negara. Di dalamnya terlampir resolusi masing-masing partai dan organisasi, baik pro maupun kontra.

Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia telah membuat laporan mengenai aktivitas Swapraja Siak ini. Laporan ini mewakili pandangan pemerintah pusat. Dari segi kekuatan pengurus, beberapa di antaranya mempunyai kedudukan dalam pemerintahan tingkat kabupaten/kota, termasuk walikota Pekanbaru, Datuk Achmad, dan Djawatan Penerangan (Dinas Informasi) Bengkalis, Nahar Effendy. Syarif Kasim II juga menyarankan untuk berusaha memenangkan pemilu 1955, dengan menyokong anggota parlemen daerah, bahkan kalau bisa di tingkat pusat, yang mendukung pembentukan Swapraja Siak. Pemerintah curiga bahwa perusahaan-perusahaan asing seperti Caltex turut membantu kampanye-kampanye politik, mempengaruhi buruh, memberi sokongan finansial dan lain sebagainya. Pandangan sinis dan tidak mendukung ini sangat kentara, termasuk panggilan tim panitia Swapraja Siak sebagai “gembong” serta mengungkit-ungkit Siak Raad sebagai bentukan Belanda.<sup>106</sup>

Sikap pemerintah kepada gerakan Swapraja Siak juga mewakili sikap terhadap swapraja secara umum. Sebenarnya, pada tahun 1953 daerah-daerah swapraja telah banyak dibentuk di Kalimantan dan beberapa tempat di Indonesia.<sup>107</sup> Namun, situasi Kalimantan berbeda dengan Sumatera. Sementara Sumatera saat Revolusi Kemerdekaan dan Republik Indonesia Serikat adalah bagian dari Indonesia, Kalimantan merupakan daerah yang terpisah sebagai negara bagian RIS. Bagi pemerintah, sistem swapraja yang merupakan turunan dari zelfbestuur

---

<sup>106</sup> Djawatan Kepolisian Negara, *Perihal Panitia Swapradja Siak*, *op. cit.*, hlm. 1-4.

<sup>107</sup> Berdasarkan UU Darurat no. 3 tahun 1953, pemerintah pusat membentuk 15 swapraja dan 3 neo-swapraja sepanjang Kalimantan.

merupakan transisi agar wilayah itu bisa mengintegrasikan diri ke dalam sifat republik dan demokrasi.<sup>108</sup> Sebab, hampir semua kekuasaan politik kepala Swapraja diserahkan kepada rakyat, manakala “urusan adat” masih dipegangnya.<sup>109</sup> Karena hampir semua wilayah Sumatera, termasuk Siak, merupakan bagian Republik Indonesia, maka penerapan Swapraja Siak seharusnya tidak diperlukan. Selain itu, penghidupan kembali sifat feodalisme menjadi senjata bagi pihak yang menentang swapraja, baik secara umum maupun Swapraja Siak.<sup>110</sup>

Meskipun aktivitasnya sangat gencar dan tidak terlihat gerakan tandingan anti-swapraja, gerakan Swapraja Siak menghilang begitu saja. Kita bisa melihat bahwa pemerintah pusat mengacuhkan begitu saja tuntutan masyarakat Siak, bahkan terhadap tuntutan minimalnya yakni pembentukan Kabupaten Siak. Pemerintah daerah Sumatera Tengah sadar akan gerakan Swapraja Siak, tetapi membiarkan begitu saja dan menganggapnya sebagai kehendak segolongan kecil,

<sup>108</sup> Setelah mengalami pemerintahan swapraja dalam demokrasi Indonesia, Sukarno menghapus semua swapraja melalui Undang-undang no. 18 tahun 1965, dan menyatakan bahwa “sifat istimewa bagi Daerah-daerah lain tidak akan diadakan lagi pada saatnya diharapkan bahwa status atau sifat istimewa bagi Yogyakarta dan Aceh akan hapus” (penjelasan ayat 1 dan 2).

<sup>109</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, penjelasan umum 16.

<sup>110</sup> Contoh yang dapat dibandingkan adalah dalam buku *Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai* yang dirilis oleh pemerintah. Sebuah kongres pada tanggal 27-29 Oktober 1950 bernama “Kongres Rakyat Kalimantan Timur” diselenggarakan oleh tujuh perwakilan organisasi, dengan hasil setuju dengan penghapusan Swapraja Kalimantan Timur, sementara 11 organisasi tidak mendukung kongres tersebut (hlm. 114). Namun, narasi dukungan anti-swapraja dipaksakan, sehingga Sebagian besar rakyat terlihat mendukung anti-swapraja. *Tiga Tungku Sejarah: Sejarah Kesultanan Indragiri sampai Peristiwa 5 Januari 1949* menggambarkan para penguasa *zelfbestuur*, terutama Sultan Mahmud dari Indragiri yang menjadi objek pembicaraannya, sebagai penguasa feodal. Dalam salah satu resolusi yang menentang Swapraja Siak, para pendukungnya disebut “manusia feodal”.

sehingga dengan sendirinya cita-cita itu tidak terwujud.<sup>111</sup> Keberadaan Syarif Kasim II sebagai penasehat presiden juga tidak kuat dalam melobi gerakan ini.

Faktor lain yang dapat dipertimbangkan adalah kurangnya anggota parlemen daerah apalagi pusat yang mendukung Swapraja Siak. dalam 29 anggota DPR Sumatera Tengah, hanya 5 orang yang berasal dari Riau, dan 4 orang dari Jambi.<sup>112</sup> Faktanya, mereka mendukung aspirasi masyarakat yang lebih luas: Provinsi Riau. Dukungan lintas daerah Riau dan Jambi ini disebabkan telah terjadi kesenjangan pembangunan antara wilayah pusat (Minangkabau) dengan wilayah lainnya (Jambi dan Riau).<sup>113</sup> Setelah beberapa kongres sporadis selama tahun 1954-1955, Kongres Rakyat Riau diadakan pada tanggal 31 Januari sampai 2 Februari 1956 di Pekanbaru.<sup>114</sup> Syarif Kasim II sendiri mendukung pembentukan Provinsi Riau<sup>115</sup> dan hadir pada perayaannya, Malam Riau, di Jakarta.<sup>116</sup>

### 3.5. Akhir Cerita Syarif Kasim II

Syarif Kasim II menghabiskan banyak waktunya di Menteng, Jakarta, sebagai salah seorang penasehat presiden Sukarno. Kemungkinan besar, jabatan itu

---

<sup>111</sup> Kementerian Penerangan, *Propinsi Sumatera Tengah* (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 309.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 297-298.

<sup>113</sup> Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 228

<sup>114</sup> Ahmad Yusuf, *op. cit.*, hlm. 386-395. Selengkapnya lihat *Pendjelasan atas usul untuk membentuk wilajah Kabupaten2 Kampar; Bengkalis, Indragiri dan Kepulauan Riau mendjadi daerah Swantantra (Otonomi) tingkat pertama.*

<sup>115</sup> Gusti Asnan, *loc. cit.*

<sup>116</sup> Abel Tasman, *op. cit.*, hlm. 175-176.

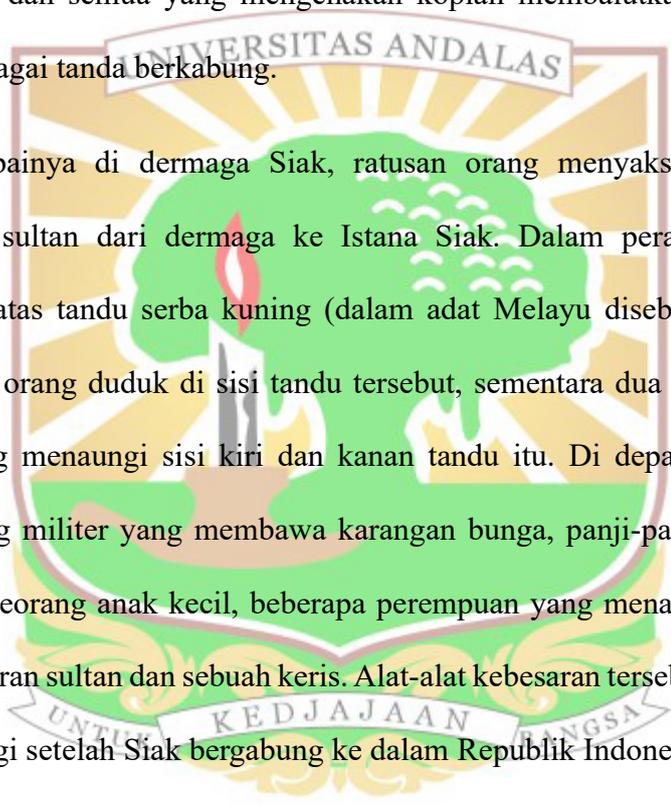
dipegangnya hingga tahun 1954.<sup>117</sup> Sesekali ia mengunjungi Singapura untuk bertemu saudaranya, Tengku Long Putih. Terakhir ia mengunjunginya ialah pada tahun 1963, lalu pulang ke Siak melalui Pulau Belakang Padang, Riau, karena Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Kedatangannya disambut camat Dumai, Tengku Sulaiman, yang mengantarnya ke dalam Istana Siak. Syarif Kasim II kemudian menempati Istana Peraduan, sebuah bangunan di sebelah Istana Siak, dan diberikan uang pension sebesar Rp 3.000,-. Masa ini seolah-olah merupakan penutup Kesultanan Siak Sri Indrapura. Seorang sultan yang tidak memerintah lagi, tinggal di sebuah rumah di sebelah istana yang pernah ditinggalinya, Sementara beberapa isinya mulai hilang. Puncaknya pada bulan Agustus 1967, singgasana kerajaan raup dicuri dari istana. Kursi berbahan tembaga tersebut ditemukan polisi di sebuah pasar gelap di Kepulauan Riau dalam keadaan sudah terbelah di dalam karung goni. Singgasana tersebut dijual seharga Rp 35,- per kilogram. Padahal, nilainya diperkirakan mencapai Rp 50 juta.<sup>118</sup>

Sejak 1967 Syarif Kasim II mulai sakit-sakitan, sehingga ia berobat ke Rumbai, Pekanbaru, karena terdapat rumah sakit yang lebih lengkap fasilitas kesehatannya daripada Siak, yakni RS Caltex. Pemerintah juga menambah tunjangan pension menjadi Rp 15.000,-. Pada akhirnya, Syarif Kasim II meninggal di Rumbai, Pekanbaru, pada tanggal 23 April 1968. Jenazahnya diantar ke Gedung Daerah Provinsi Riau untuk disemayamkan, dengan balutan bendera merah putih

<sup>117</sup> Dokumen penetapan gaji Syarif Kasim II terhenti sampai tahun 1954.

<sup>118</sup> “In a sack for sale, a Sultan’s throne”, *The Straits Times*, 26 September 1967; “Takhta Sultan Siak di Pasar”, *Berita Harian*, 26 September 1967.

menutupi jasadnya. Dari sana, jenazah diantar, dalam peti yang diselubungi kain kuning kemudian bendera merah putih di atasnya, melalui upacara pelepasan secara kenegaraan. Pelepasan dipimpin oleh gubernur Riau Arifin Ahmad. Jenazah Syarif Kasim II diantar ke pelabuhan untuk diberangkatkan ke Siak.<sup>119</sup> Sebagian adat pemakaman raja Melayu keluar: jasad Syarif Kasim II diiringi payung kuning delapan buah, dan semua yang mengenakan kopiah membalutkan pita putih di kopiahnya sebagai tanda berkabung.



Sesampainya di dermaga Siak, ratusan orang menyaksikan perarakan jenazah sang sultan dari dermaga ke Istana Siak. Dalam perarakan itu, peti dinaikkan ke atas tandu serba kuning (dalam adat Melayu disebut Raja Diraja) dengan empat orang duduk di sisi tandu tersebut, sementara dua belas pembawa payung kuning menaungi sisi kiri dan kanan tandu itu. Di depan tandu adalah beberapa orang militer yang membawa karangan bunga, panji-panji tentara Siak yang dibawa seorang anak kecil, beberapa perempuan yang menabur beras, serta payung kebesaran sultan dan sebuah keris. Alat-alat kebesaran tersebut tidak pernah dikeluarkan lagi setelah Siak bergabung ke dalam Republik Indonesia.

---

<sup>119</sup> O.K. Nizami Jamil, *et al.*, *Sejarah Kerajaan Siak* (Pekanbaru: Sukabina, 2011), hlm. 192-193.

### Gambar 15

#### Pemakaman Syarif Kasim II



Keterangan : Suasana pemakaman Syarif Kasim II. Jenazah ditandu dengan Raja Diraja dan diselenggarakan dengan adat Melayu, sekaligus diberikan penghormatan militer

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak.

Sesampainya di Istana Siak, jenazah disemayamkan di aula tengah, menjadi kali terakhir sang sultan berada di istana tersebut. Upacara pelepasan jenazah Syarif Kasim II diselenggarakan, dengan kehadiran Tengku Long Putih. Secara simbolis, Tengku Long Putih menyerahkan kunci istana kepada pemerintah melalui camat Siak.<sup>120</sup> Dengan demikian, Tengku Long Putih menyerahkan segala hal yang berkaitan dengan Kesultanan Siak Sri Indrapura kepada Indonesia. Setelah upacara pelepasan, peti jenazah sultan dibawa lagi dengan perarakan sebagaimana sebelumnya, menuju tempat peristirahatan terakhir, di depan Masjid Syahabuddin. Syarif Kasim II dikuburkan di sebelah istri pertamanya, Tengku Agung Syarifah

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 193-194.

Latifah. Upacara pemakaman ditutup dengan tahlil. Tahun itu menjadi kala terakhir disaksikannya prosesi Kesultanan Siak Sri Indrapura.



## BAB IV

### IDENTITAS KESULTANAN SIAK PASCA SYARIF KASIM II (1968-2023)

Meninggalnya Syarif Kasim II mengakhiri sejarah Kesultanan Siak dan kemungkinannya untuk direstorasi secara mulus. Meskipun Tengku Long Putih merupakan adik Syarif Kasim II—dengan demikian calon sultan yang potensial—pernikahannya dengan orang Eropa yang beragama Kristen menyebabkan ia tidak dipandang lagi sebagai calon penerus sultan, sedangkan ia juga telah menyerahkan kepemilikan harta benda sultan kepada pemerintah. Dengan warisan sejarah yang ada, identitas Kesultanan Siak dieksplorasi dan dimanfaatkan dalam membentuk identitas yang terwujud dalam pendirian Kabupaten Siak 1999 dan seterusnya. Sementara itu, pamor Siak sebagai wilayah tenggelam dalam Kabupaten Bengkalis, demikian juga dengan kotanya. Hal ini tidak menutup peluang bagi masyarakat Siak untuk

#### 4.1. Menggali dan Menjaga Identitas Siak (1968-1999)

Pada masa Orde Baru yang kondusif, masing-masing daerah di Indonesia mulai menyusun sejarah daerahnya, demikian pula dengan Riau. Pembentukan identitas Kesultanan Siak pada periode ini dapat dilihat dari upaya penyusunan Sejarah Kesultanan Siak sebagai bagian dari Provinsi Riau, eksplorasi peristiwa dan tokoh yang dapat diambil nilai kepahlawanannya sebagai bagian dari perjuangan bangsa Indonesia, serta identifikasi adat istiadat yang ada di bekas wilayah Kesultanan Siak.

Pada Seminar Sejarah Nasional II di Yogyakarta, 26–29 Agustus 1970, tim penulis sejarah dari Riau beberapa materi untuk diseminarkan, termasuk mengenai Kesultanan Siak. Makalah yang diseminarkan mengenai Siak adalah “Peranan Keradjaan ‘Siak’ dalam Sedjarah Indonesia”, disusun oleh tim Universitas Riau. Tulisan tersebut kebanyakan merupakan hasil wawancara dengan saksi sejarah yang masih hidup, beberapa literatur, serta hasil analisis tim penulis. Misalnya, lembaga-lembaga Kesultanan Siak sepadan dengan institusi politik seperti negara modern: Sultan sebagai pemegang kuasa eksekutif, Dewan Kerajaan sebagai legislatif, dan Kerapatan Tinggi sebagai yudikatif.<sup>1</sup> Upaya ini dapat dilihat sebagai cara sejarawan Riau meningkatkan pamor Kesultanan Siak. Makalah ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah buku *Sejarah Riau*.

Hal yang menarik dalam *Sejarah Riau* mengenai Siak adalah penamaan daerah tersebut. Beberapa pendapat dikemukakan dalam menjelaskan etimologi Siak yaitu:<sup>2</sup>

1. Kata “SIAK” adalah berasal dari bahasa daerah Tapanuli Selatan yang berarti “PEDAS”.
2. Kata “SIAK” adalah berasal dari nama tumbuhan yaitu pohon Siak-Siak. Adapun pohon tersebut terdapat dalam daerah Siak
3. Kata “SIAK” adalah berasal dari nama “SUAK”.

---

<sup>1</sup> Suwardi Moh. Samin, Nur Muhammad, dan Said Mahmud Umar, “Peranan Keradjaan Siak dalam Sedjarah Indonesia”, Makalah Seminar Nasional Sejarah II di Yogyakarta, 26-29 Agustus 1970, hlm. 11.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 3.

4. Kata “SIAK” adalah suatu nama panggilan yang diberikan kepada orang yang mendjaga Mesdjid.

Untuk hipotesis pertama, kata “Siak” dihubungkan dengan “sifat penduduknya yang pantang tersinggung dan pedas” lalu dihubungkan padanannya dengan bahasa lain, “lasiak” dari bahasa “Tapanuli Selatan” menjadi penjelasannya.<sup>3</sup> Lasiak menurut pengusungnya artinya “pedas”, walau arti sebenarnya dalam bahasa Batak Toba dan Angkola adalah cabai. Argumen ini kemudian dikembangkan lebih lanjut: tepian sungai Siak dahulunya banyak tumbuh pohon lada, dan ketika orang Batak melakukan ekspedisi ke sana maka mereka menamai pohon-pohon itu “lasiak”.<sup>4</sup>

“Siak” sebagai panggilan kepada orang alim telah umum dalam masyarakat Melayu dan Minangkabau,<sup>5</sup> tetapi asal mula nama Siak dalam konteks ini masih belum jelas. Penulis *Peranan Keradjaan Siak* dan turunannya cenderung memilih pendapat bahwa nama Siak berasal dari “siak” sebagai orang alim. Argumen ini kemudian berkembang lagi dalam tulisan Amir Luthfi yang secara ekstensif membedah hukum dan kekuasaan Kesultanan Siak. Ia menggabungkan sejarah Gasib dengan kisah raja Siak di *Sulalatus Salatin*. Baginya, Megat Kudu raja Gasib

---

<sup>3</sup> Ibid, 4 dan 6.

<sup>4</sup> Sejarah Riau (1970), 13.

<sup>5</sup> Kata “siak” masuk ke dalam kata baku di Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus Dewan Bahasa (Malaysia).

masuk Islam dengan nama Sultan Ibrahim, dan dengan mengambil pola Islamisasi dari Sulalatus Salatin, sang sultan menyebarkan Islam di wilayah Siak.<sup>6</sup>

Penelitian-penelitian yang terkait dengan Kesultanan Siak cukup diperhatikan secara intens, baik dari penulis dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, meskipun sejarah Kesultanan Siak telah ditulis oleh beberapa orang, seperti OK Nizami Jamil dalam *Sedjarah Ringkas Keradjaan Siak*, pada periode ini penelitian tentang kesultanan tersebut dilakukan menyeluruh dan dipublikasikan secara nasional, yang digunakan untuk menyusun sejarah daerah, baik Riau maupun Siak. Penulis luar negeri juga turut menyumbang banyak kajian mengenai Kesultanan Siak, di antaranya Donald J. Goudie yang menganalisis *Syair Perang Siak*,<sup>7</sup> Mohd. Yusoff Hashim yang menganalisis *Hikayat Siak*.<sup>8</sup> Tenas Effendy “dengan memberanikan diri” menyusun ulang *Syair Perang Siak* berdasarkan wawancara dari berbagai orang yang menyaksikan, mengingat, dan menghapal naskah tersebut.<sup>9</sup>

Ada dua corak penyusunan identitas Kesultanan Siak pada masa ini. Corak pertama adalah sejarah yang dibalut nasionalisme. Hal ini selaras dengan tuntutan penulisan sejarah Indonesia yang cenderung Indonesia sentris. Sehingga, peristiwa-

---

<sup>6</sup> Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak 1901-1942* (Pekanbaru: Suska Press, 1991), hlm. 66-67.

<sup>7</sup> Lihat Donald J. Goudie, *A Critical Edition of The Syair Perang Siak, With a Consideration of its Literary and Historical Significance* (tesis Universitas London).

<sup>8</sup> Lihat Mohammad Yusoff Hashim, “Tradisi persejaraahan di dalam Hikayat Siak atau Sejarah Raja-Raja Melayu: di antara fakta dan mitos”, *Sejarah: jurnal Jabatan Sejarah*, no. 1 (1988), hlm. 63-139

<sup>9</sup> Lihat Tenas Effendy, *Syair Perang Siak* (Pekanbaru: Badan Pembina Kesenian Daerah Propinsi Riau, 1969).

peristiwa yang dapat dihubungkan dengan nasionalisme Indonesia dikembangkan. Misalnya, Pada tahun 1988, Keluarga Besar Masyarakat Riau se-Sumatera Utara bekerja sama dengan Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara untuk menyelenggarakan Seminar Sejarah Kepahlawanan Bangsa Indonesia di Riau. Tokoh-tokoh yang dibahas adalah Raja Ali Haji, Tuanku Tambusai dan Syarif Kasim II. Dalam seminar tersebut, ada 3 makalah yang membahas Syarif Kasim II: “Sultan Syarif Qasim Hijrah Ke Tanah Aceh, Karena Tidak Bersedia Menjadi Sultan Boneka’ di Siak Indrapura” oleh Ali Hasjmy, “Sultan Syarif Qasim II Dengan Rela Meletakkan Mahkota Kerajaan Siak Demi Perjuangan Bangsa Indonesia” oleh OK Nizami Jamil, dan “Segi Kepahlawanan Sultan Syarif Qasim II Siak Indrapura” oleh Amir Luthfi.<sup>10</sup>

Kasus Si Koyan pada tahun 1931 dimaknai sebagai sebuah pemberontakan terhadap Belanda yang menjalankan kerja rodi di Siak dan dibantu diam-diam oleh sang sultan.<sup>11</sup> Vonis penjara 20 tahun, alih-alih hukuman mati, kepada Si Koyan oleh Kerapatan Tinggi dimaknai sebagai upaya sultan meringankan hukumannya. Si Koyan sendiri memberikan kesaksian kepada Amir Luthfi pada tahun 1986 mengenai perlawanannya terhadap Belanda dan proses pengadilannya oleh Kerapatan Tinggi.<sup>12</sup> Bagi Si Koyan, semua yang dilakukannya adalah demi

---

<sup>10</sup> Resume dan Hasil Rumusan Seminar Sejarah Kepahlawanan Bangsa Indonesia di Riau (Medan, 30-31 Mei 1988), hlm. 28.

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 29.

<sup>12</sup> Amir Luthfi, “Segi Kepahlawanan Sultan Syarif Kasim Siak Sri Indrapura”, dalam Resume dan Hasil Rumusan Seminar Sejarah Kepahlawanan Bangsa Indonesia di Riau (Medan, 30-31 Mei 1988), hlm. 40.

melawan Belanda dan ia tidak ingin patuh kecuali kepada sultan.<sup>13</sup> Kisah Si Koyan memberikan aspek perlawanan Syarif Kasim II secara politik terhadap Belanda.

Corak kedua adalah mengenai penjelasan sifat etnis Kesultanan Siak Sri Indrapura. Telah dijelaskan bahwa Siak adalah wilayah persimpangan budaya antara perantau Minang, masyarakat Melayu, serta penduduk asli. Dengan demikian, penulis sejarah Siak dengan latar belakang yang berbeda akan menghasikan tafsiran yang berbeda pula. Misalnya Amir Luthfi, seorang sejarawan dari Kuantan, membahas sistem hukum dan kekuasaan secara intens dalam karyanya *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak*. Menurut Amir Luthfi, untuk melihat adat Melayu Siak maka perlu melihat adat Minangkabau, sebab antara keduanya terdapat hubungan historis.<sup>14</sup> Namun, ia juga memadukan konsep Adat Perpatih dan Adat Temenggung dalam menganalisis sistem sosial dan budaya Siak. Adat yang dijalankan oleh masyarakat Siak dijelaskan dalam klasifikasi Adat Perpatih dan Adat Temenggung yang dipinjam dari Malaysia.<sup>15</sup> Menurut Amir Luthfi:

*“... Sebagai penerus Kesultanan Johor, perkembangan hukum di Kesultanan Siak dalam awal perkembangannya diwarnai oleh corak*

---

<sup>13</sup> *Ibid.*; Elly Roza (editor), *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI Di Kabupaten Kepulauan Meranti* (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Pekanbaru, 2013), hlm. 99.

<sup>14</sup> Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak* (Pekanbaru: Susqa Press, 1990), hlm. 106.

<sup>15</sup> Klasifikasi ini dibuat oleh R. Winstedt untuk menjelaskan keunikan adat Negeri Sembilan terhadap adat-adat lainnya sepanjang Semenanjung Malaya, kemudian diadopsi sebagai sebuah teori oleh penulis-penulis Melayu Malaysia. Sejauh penelusuran penulis, klasifikasi Adat Perpatih dan Adat Temenggung awalnya tidak dikenal pada masyarakat Melayu Indonesia, tetapi ikut diadopsi oleh penulis kebudayaan Melayu Indonesia (dalam hal ini Riau) yang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia atau kenal dan bersimpat dengan “perkembangan pesat” Melayu Malaysia. Dalam *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan* Amir Luthfi menyamakan saja Adat Perpatih dan Adat Temenggung dengan Lareh Bodi Caniago (Datuk Parpatih nan Sabatang) dan Koto Piliang (Datuk Katumanggungan) (hlm. 121-122).

*kehidupan hukum yang berlaku di Johor, yaitu bentuk hukum yang didasarkan pada Adat Temenggong dengan kombinasi hukum Islam. Namun demikian, pengendali kekuasaan di Kesultanan Siak memberikan otonomi yang luas kepada kepala-kepala suku untuk memberlakukan adat mereka. Dengan demikian, di daerah yang telah tertanam pengaruh adat Minangkabau berlaku Adat Perpatih dengan kombinasi hukum Islam.”<sup>16</sup>*

Amir Luthfi melihat bertahannya Adat Perpatih dan Temenggong di Siak dengan keberadaan suku-suku yang hak tradisi mereka diakui dan dijaga oleh sultan Siak pada masa Kolonial, manakala para sultan memegang Adat Temenggong melalui adat raja-raja Melayu. Pandangan yang condong ke Minangkabau ini akan berubah setelah era Reformasi.

Aspek pariwisata belum berkembang pada masa sebelum berdirinya Kabupaten Siak, tetapi Pada dekade 1980 pula, potensi wisata Siak mulai dieksplorasi. Pada tahun 1970-an, Istana Siak tidak dibuka untuk umum dan kuncinya disimpan oleh camat Siak; istana tersebut dilaporkan dibiarkan dalam keadaan kotor dan dokumen-dokumennya berserakan.<sup>17</sup> memasuki tahun 1980, istana tersebut mulai dibuka sebagai objek wisata<sup>18</sup> dan menarik perhatian asing, termasuk Rombongan Sejarawan Johor pada tahun 1984.<sup>19</sup> *Berita Harian* dari Singapura malah mencoba menghangatkan diskusi mengenai perhatian terhadap peninggalan Datuk Laksamana, salah seorang petinggi sederajat dengan Datuk Empat Suku, karena sementara Istana Siak di tempat ‘pelosok’ mendapat perhatian penuh, rumah Datuk Laksamana lebih ‘terpelosok’ tidak begitu diperhatikan,

---

<sup>16</sup> Amir Luthfi, *op. cit.*, hlm. 184.

<sup>17</sup> “Nasib Peninggalan Para Sultan”, *Tempo*, 31 Juli 1971, hlm. 49.

<sup>18</sup> “Istana Siak di Riau”, *Waspada*, 18 Oktober 1987.

<sup>19</sup> *Berita Yuda*, 8 Mei 1984.

padahal sejarah antara Sultan Siak dan Datuk Laksamana begitu penting.<sup>20</sup> Bersama dengan objek wisata Riau lainnya, pariwisata provinsi ini dikatakan “ibarat memetik durian runtuh”.<sup>21</sup>

#### 4.2. Identitas Siak sebagai Kabupaten (1999-2023)

Kabupaten Siak secara resmi berdiri pada 12 Oktober 1999 sebagai pecahan dari Kabupaten Bengkalis. Identitas Kesultanan Siak berkembang dalam dua bentuk: sebagai identitas Kabupaten Siak dan pemanfaatannya di bidang pariwisata, serta upaya-upaya restorasi Kesultanan Siak Sri Indrapura yang dimulai dengan Kekerabatan Resam.

Seminar Sejarah Kepahlawanan Bangsa Indonesia di Riau membawa dampak bagi pembentukan Kabupaten Siak. pada tanggal 6 November 1998, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Syarif Kasim II sekaligus Bintang Mahaputra Adipradana.<sup>22</sup> Penyerahan gelar dan Bintang tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 November di Istana Negara Jakarta oleh presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dan diterima oleh Tengku Makmun al-Rasyid, seorang mantan sekretaris sultan, didampingi oleh Fadlan Sulaiman sebagai bupati Bengkalis, dan OK Nizami Jamil sebagai tokoh Siak. Keesokan harinya, tanda-tanda kebesaran tersebut dibawa ke Siak, dan masyarakat sekitar menyambut

---

<sup>20</sup> “Antara Dua Istana”, *Berita Harian*, 13 April 1992.

<sup>21</sup> “Kepariwisataan Provinsi Riau Tinggal Petik Durian Runtuh”, *Harian Neraca*, 31 Maret 1989.

<sup>22</sup> Kementerian Sekretaris Negara, Daftar Warganegara Republik Indonesia yang Mendapat Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Tahun 1959 s.d. 2003 (laporan Sekretariat Negara Republik Indonesia), hlm. 129

dengan antusias dengan menyelenggarakan Tepung Tawar, tradisi menyambut tamu dalam adat Melayu, sebelum disemayamkan di Istana Siak secara permanen.<sup>23</sup>

Dengan semangat otonomi daerah, upaya pembentukan Kabupaten Siak dimulai pada tahun 1999. Rencana wilayah dan batas-batas Kabupaten Siak adalah seluas bekas Kewedanaan Siak, kurang sedikit dari wilayah rencana Swapraja Kabupaten Siak dan bekas wilayah Kesultanan Siak. Pembicaraan telah dimulai sejak tanggal 5 Mei, ketika beberapa tokoh Siak berbincang-bincang di Pekanbaru. Pada tanggal 23 Mei Khairuddin Yunus, salah seorang tokoh tersebut, menghimpun Ikatan Warga Siak dan Sekitarnya yang ia pimpin, untuk mempersiapkan dan membentuk panitia pembentukan Kabupaten Siak.<sup>24</sup>

Musyawahar Besar Masyarakat wilayah Eks Kewedanaan Siak diselenggarakan pada hari Jumat, 11 Juni 1999 di Kota Siak Sri Indrapura. Setelah salat Jumat dan ziarah kubur Syarif Kasim II, peserta musyawarah sebanyak 300 orang berkumpul di Gedung Mahratu, dekat Istana Siak, dipimpin Wan Ghalib. Syarwan Hamid, Menteri Dalam Negeri kelahiran Siak, datang satu jam kemudian, menggunakan helikopter yang mendarat di lapangan depan Istana Siak. Rapat tersebut berlanjut hingga pukul delapan malam.<sup>25</sup> Musyawarah besar itu menghasilkan sebuah resolusi yang menuntut MPR untuk menetapkan Kabupaten

<sup>23</sup> OK Nizami Jamil, *Negeri Siak Tanah Kelahiranku: Sebuah Autobiografi Anak Kampung Dalam* (Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 2008), hlm 155-156.

<sup>24</sup> Tuah Hasrun Saily, *Sejarah Pembentukan Kabupaten Siak* (Siak: Komite Perjuangan Pembentukan Kabupaten Siak, 2011), hlm. 18-19.

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 22-24.

Siak dengan wilayah Kecamatan Siak, Mandau, Minas dan Sungai Apit.<sup>26</sup> Akhirnya, Kabupaten Siak diresmikan pada tanggal 12 September 1998 oleh DPR RI, dengan Tengku Rafian sebagai pejabat sementara bupati.<sup>27</sup> Untuk sementara, berbagai gedung peninggalan Kesultanan Siak (selain Istana Siak) dipakai untuk menyelenggarakan pemerintahan kabupaten.

**Gambar 16**  
**Balai Kerapatan Tinggi sebagai DPRD Kabupaten Siak**



**Keterangan** : Balai Kerapatan Tinggi dipakai sebagai gedung DPRD Kabupaten Siak (kiri) dan suasana rapat parlemen di dalam lantai dua Balai Kerapatan Tinggi (kanan)

**Sumber** : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Siak

Perkembangan Kabupaten Siak terus berlanjut dengan ditemukannya sumber daya minyak dan gas di berbagai tempat di Siak. Berbagai pembangunan infrastruktur dijalankan, termasuk jembatan besar yang diresmikan pada 11 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jembatan tersebut dinamai Jembatan Tengku Agung Syarifah Latifah, istri pertama Syarif Kasim II.<sup>28</sup> Berbagai

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 83.

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 29-30.

<sup>28</sup> “Presiden Resmikan Beroperasinya Jembatan Siak”, <https://www.antaraneews.com/berita/73437/presiden-resmikan-beroperasinya-jembatan-siak>, diakses tanggal 17 Februari 2025.

taman dinamai dengan tokoh-tokoh kerajaan seperti Taman Tengku Mahratu, Taman Sri Bijuangsa, dan lain sebagainya. Perkembangan infrastruktur selanjutnya dilakukan pada tepi sungai Siak dengan membangun turap dan mengemasnya dalam bentuk *waterfront*. Proyek ini telah dirancang sejak 2013 dan selesai tiga tahun kemudian dengan nama Tepian Bandar Sungai Jantan. Dalam area *waterfront*, garis lurus dengan Istana Siak, berdiri sebuah tugu lambang Kesultanan Siak berukuran besar berbahan tembaga, dengan relief sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura.

Tidak hanya itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak juga menata Kota Siak dengan banyak hal yang berbau kesultanan, mulai dari penamaan taman dan gedung seperti Taman Tengku Mahratu dan Masjid Agung Sultan Syarif Hasyim, hingga meramu paket jamuan makan di depan Istana Peraduan.<sup>29</sup> Bahkan, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Siak memasang lambang kesultanan alih-alih lambang kabupaten. Seolah-olah, pemerintah kabupaten adalah warisan penerus kesultanan itu sendiri, terlebih karena perannya sebagai kontributor utama dalam melestarikan peninggalan kesultanan.

---

<sup>29</sup> “Wabup Husni Gelar Jamuan Makan di Istana Peraduan” <https://riaupos.jawapos.com/siak/2253553914/wabup-husni-gelar-jamuan-makan-di-istana-peraduan>, diakses tanggal 28 Agustus 2025.

### Gambar 17

#### Tampilan Lambang Kesultanan Siak di Ruang Publik



Keterangan : Lambang Kesultanan Siak Sri Indrapura sebagai sebuah monument di taman Tengku Mahratu, seberang Istana Siak (kiri) dan terpajang di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Siak, dekat Jembatan Siak (kanan). Letaknya yang strategis memudahkan wisatawan mengidentifikasi lambang tersebut sebagai salah satu identitas Siak

Sumber : Dokumentasi pribadi

Sementara itu, pengembangan wisata Kabupaten Siak secara serius mulai dikembangkan sejak tahun 2006. Selama 5 tahun, pemerintah masih memelihara peninggalan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Ketika memasuki periode selanjutnya (2011-2016), pemerintah kabupaten secara masif merevitalisasi peninggalan tersebut, menegaskannya sebagai objek cagar budaya melengkapi fasilitas yang menunjang pariwisata, serta menyusun atraksi wisata di sekitar cagar budaya. Objek-objek cagar budaya tersebut kemudian ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Kesultanan Siak Sri Indrapura. Basis pengembangan pariwisata di kawasan tersebut adalah sejarah Kesultanan Siak dan Kebudayaan Melayu, dengan Istana Siak sebagai *centerpiece* objek wisata Kabupaten Siak.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Abdul Harits Ritonga dan Siti Fatimah, *op. cit.*, hlm. 122-126.

Identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura ini berdampingan dengan identitas Melayu yang ada di Kabupaten Siak. Dalam kajian Melayu Riau kontemporer, beberapa unsur Kesultanan Siak Sri Indrapura ditafsirkan ulang ke dalam makna budaya. Muhammad Bertangkep sebagai simbol sultan Siak keturunan Ba'alawi ditafsirkan menurut makna Islam, lagipula lambang tersebut didasari oleh kaligrafi nama Muhammad.<sup>31</sup> *Bab al-Qawaid* yang merupakan produk hukum Siak dimaknai sebagai hasil produk Islam di bumi Melayu.<sup>32</sup>

Meskipun demikian, terdapat pembeda yang cukup jelas mana yang merupakan identitas kesultanan dengan identitas Melayu secara umum. Hal ini dapat dilihat dalam simbolisme yang dimunculkan. mereka yang merasa merupakan keturunan sultan akan sering mengusung simbolismenya, seperti memakai pakaian kuning (warna khusus raja atau keturunannya), memasang lambang Muhammad Bertangkep di kopiah atau sebagai pin, dan lain sebagainya.

#### 4.3. Kekerabatan Resam Kesultanan Siak Sri Indrapura

Sebelum membahas Kekerabatan Resam Kesultanan Siak Sri Indrapura (disingkat Kekerabatan Resam) dan para pengklaim sultan Siak, terlebih dahulu penulis menjelaskan konteks munculnya, yang dapat dikaitkan dengan fenomena restorasi kesultanan di Indonesia. Restorasi kesultanan, atau dalam bahasa Gerry van Klinken “Kembalinya para sultan”, adalah sebuah fenomena yang marak terjadi setelah Reformasi 1998. Gerakan ini adalah salah satu contoh simbol paling baik

---

<sup>31</sup> Dede Burhanudin, “The Religious Meaning of Islamic Inscription in Kota Tinggi Cemetery, Siak, Riau Province”, *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, vol. 6 no. 1, Juni 2017.

<sup>32</sup> Bab al Qawaid, hlm. 93

untuk sebuah identitas daerah Indonesia.<sup>33</sup> Sultan-sultan tersebut hadir kembali bukan sebagai penguasa definitif, atau “diktator”, melainkan sebagai representasi adat dan identitas komunitas lokal.<sup>34</sup>

Restorasi kesultanan telah mengembalikan dan mengembangkan identitas berbagai daerah di Kalimantan. Banyak istana-istana kesultanan yang telah direnovasi menjadi museum, sebagian kecil lainnya ditempati oleh keluarga kesultanan yang masih ada.<sup>35</sup> Di Kalimantan Barat, berbagai kesultanan menjadi simbol penting bagi orang Melayu di tengah konflik antaretnis pada tahun 1999 dan setelahnya.<sup>36</sup> Kasus paling sukses adalah Kesultanan Kutai Kartanegara, yang bersama dengan pemerintah Kabupaten Kutai, membangun istana kesultanan yang baru dan mengangkat tradisi Erau sebagai event utama kabupaten.<sup>37</sup> Sejak tahun 2007, pemerintah telah memasukkan institusi monarki di Indonesia sebagai sarana untuk pelestarian budaya daerah.<sup>38</sup>

Untuk Sumatera, selain beberapa kesultanan Melayu yang masih bertahan di Sumatera Utara, ada juga beberapa kesultanan yang dihidupkan kembali. Kesultanan Serdang dihidupkan kembali melalui restorasi institusi Wazir Berempat

---

<sup>33</sup> Gerry van Klinken, *op. cit.*, hlm. 166

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 182

<sup>35</sup> Bernard Sellato, *loc. cit.*

<sup>36</sup> Gerry van Klinken, *op. cit.*, hlm. 165 dan 173-175

<sup>37</sup> Fadli Afriandi dan Fachriza Ariyadi, “Efek Domino Pasca Dibangkitkannya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura”, *Reformasi*, Vol. 10 No. 2, tahun 2020, hlm. 132-138.

<sup>38</sup> Lebih lanjut lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.

dan kemudian penabalan Tengku Abunawar Sinar sebagai sultan baru.<sup>39</sup> Meskipun beberapa simbol Kerajaan Pagaruyung telah dibangun sejak Orde Baru, seperti Istana Basa, Raja Pagaruyung tidak direstorasi hingga tahun 2002, ketika Lembaga Pucuk Adat Alam Minangkabau melantik Taufiq Thaib sebagai Rajo Alam Pagaruyung yang baru.<sup>40</sup> Beberapa restorasi kesultanan menyusul kemudian, seperti Jambi dan Palembang.

Sejauh pengamatan penulis, para aktor Kekerabatan Resam, yang dapat dianggap sebagai perwakilan kelompok kesultanan,<sup>41</sup> bukanlah tokoh-tokoh yang begitu dikenal di Provinsi Riau maupun Kabupaten Siak sendiri. Saat pembentukan Kabupaten Siak, keberadaan mereka juga tidak begitu disorot. Untuk menganggap mereka sebagai golongan elit kerajaan, peran mereka begitu kecil dan tidak semencolok tokoh adat Siak. Hal ini disebabkan lembaga kesultanan telah tidak ada, putra dari sultan Syarif Kasim II juga tidak ada, Tengku Long Putih sebagai penerus potensial juga telah “menyerahkan” klaimnya kepada pemerintah, sehingga pada dasarnya lembaga itu kosong dan tidak dianggap lagi. Jadi, usaha untuk membentuk kembali kelompok kesultanan dapat dianggap sebagai suatu hal yang baru dan dimulai dari awal kembali, tidak seperti Kesultanan Pelalawan yang masih memiliki putra sultan terakhirnya dan dengan mudah merestorasi kesultanan tersebut.

---

<sup>39</sup> Tengku Mira Sinar, *Tengku Luckman Sinar, Melayu Nusantara dan Strategi Kebudayaan* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2016), hlm. 104-105.

<sup>40</sup> Nopriyasman, “Politik Representasi Istana *Basa* Pagaruyung sebagai Identitas Minangkabau di Sumatera Barat”, *Disertasi* Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2011, hlm. 221-227

<sup>41</sup> Tokoh-tokoh Melayu Siak atau Riau yang mempunyai gelar keturunan raja (Tengku, Wan dsb.) tidak bisa secara langsung dianggap sebagai kelompok elit kesultanan, karena gelar tersebut sifatnya adalah diwariskan, selama generasinya mempunyai gelar yang bersangkutan, meskipun tingkat generasinya dengan seorang raja begitu jauh sehingga tidak dapat terlacak dengan jelas.

Meskipun demikian, seiring dengan pengembangan identitas Kabupaten Siak dalam hal wisata sejarah kesultanan dan budaya Melayu, pemerintah daerah juga perlu untuk mengetahui dan mengembangkan identitas Kesultanan Siak dan memadukannya dengan kebudayaan Melayu. Dengan demikian, kerja sama, atau minimal pelibatan, antara pemerintah daerah dengan tokoh budaya dan kerajaan menjadi penting di sini. Perpaduan ini tampak, misalnya pada desain gedung Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak yang mirip dengan Istana Siak, atau partisipasi kelompok kesultanan dalam beberapa acara adat Melayu Siak. Dari sinilah berkembang pemahaman bahwa warisan Kesultanan Siak berkaitan dengan kebudayaan Melayu, atau tepatnya Kesultanan Siak adalah kebudayaan Melayu Siak.

Kekerabatan Resam Kesultanan Siak Sri Indrapura dicetuskan oleh beberapa kerabat sultan Siak yang merupakan keturunan Syarif Kasim I. Upaya ini mulai dibicarakan sejak tahun 2001. Pada tahun 2002, Kekerabatan Resam didirikan dengan Tengku Muhammad Toha sebagai aktor utama. Untuk mengepalai lembaga ini, dipilihlah Tengku Muchtar bin Tengku Anum. Tengku Muchtar Anum merupakan keturunan dari Syarif Ismail dan istri pertamanya. Meskipun berasal dari keturunan jauh Syarif Ismail, ia dianggap seorang yang mapan dan dituakan.<sup>42</sup> Tengku Muchtar mewakili Kesultanan Siak setiap kali ada acara yang melibatkan keraton-keraton Nusantara, tetapi tidak pernah mengklaim sebagai sultan Siak, melainkan digelar Mangkubumi Mangkudiraja.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Tengku Sufyan Tsauri, 5 Desember 2024.

Penulisan sejarah Kesultanan Siak secara ‘resmi’ diterbitkan pada tahun 2011 dengan judul *Sejarah Kerajaan Siak*. Buku ini disusun oleh tim penulis yang diketuai oleh OK Nizami Jamil. Penulis dari berbagai latar belakang, termasuk anggota Kekerabatan Resam, menegaskan bahwa pada saat pemakaman Syarif Kasim II, Tengku Long Putih sebagai adik sultan sekaligus calon paling potensial untuk melanjutkan kesultanan, menyerahkan kunci istana secara simbolis kepada camat Siak sebagai tanda bahwa peninggalan Kesultanan Siak telah diserahkan dari keluarga kepada pemerintah. Hal yang juga perlu disorot di sini adalah mengenai Syarif Hasyim yang disusun oleh pihak kerabat kesultanan Siak. Syarif Hasyim, terutama dalam narasi kenaikan takhtanya, ditulis menurut sudut pandang kerabat keturunan Tengku Bagus, saudara Tengku Muda yang merupakan calon penerus Syarif Kasim I. Dalam hal ini, Syarif Hasyim digambarkan berkonspirasi dengan Belanda untuk membatalkan kedudukan Tengku Muda sebagai putra mahkota, sehingga mengucilkan Tengku Muda dan Tengku Bagus keluar dari wilayah Siak. Semua ini didasarkan pada sebuah teks yang ditulis oleh Tengku Bagus sendiri, yang dipegang oleh keturunannya, sementara tidak ada keturunan Syarif Hasyim yang tersisa, atau setidaknya terlibat dalam penyusunan buku ini.<sup>43</sup>

Pertemuan antara Kekerabatan Resam diadakan pada bulan Mei 2018 untuk mendirikan lembaga itu secara resmi. Pada tanggal 24 Agustus 2019, Kekerabatan Resam dan LAMR Siak mengundang Yang Dipertua Negeri Melaka, Mohammad Khalil Yaakob dan mendirikan Kekerabatan Resam secara resmi. Tengku Muchtar

---

<sup>43</sup> O.K. Nizami Jamil *et al.*, *op. cit.*, hlm. 197.

Anum sebagai ketua, serta Tengku Muhammad Toha dan Syed Mohammad Yusuf bin Syed Nasir sebagai timbalan (wakil). Yang Dipertua Negeri Melaka juga diberi gelar Orang Kaya Maharaja Siak oleh Kekerabatan Resam, demikian juga dengan beberapa tokoh Siak lainnya.

**Gambar 18**  
**Peresmian Kekerabatan Resam**



Keterangan : Lembaga Kekerabatan Resam Kesultanan Siak Sri Indrapura dibentuk pada tahun 2019. Tampak Tengku Muchtar Anum (tengah), bersama dengan Syed Mohammad Yusuf bin Syed Nasir (kanan), dan Alfredi, Bupati Siak (kiri).

Sumber : infosiak.com, <https://infosiak.com/majelis-kerapatan-adat-kukuh-kan-lembaga-kesultanan-siak>

Sejalan dengan itu, terdapat usaha-usaha menelusuri keturunan sultan agar dapat ditabalkan menjadi sultan baru. Usaha ini tidak pernah diklaim dilakukan oleh Kekerabatan Resam. Contohnya, terdapat upaya orang-orang yang mengklaim sebagai ahli waris Kesultanan Siak (selain dari keluarga Syarifah Fadlun, istri terakhir Syarif Kasim II, yang menempati Istana Peraduan) yang mencoba

mengklaimnya. Pada tahun 2009, beberapa orang semacam ini mendatangi kantor Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Siak yang bertujuan untuk memfasilitasi ahli waris “untuk ditabalkan sebagai pewaris Sultan Siak. Karena mereka menilai bekas kerajaan Siak ini seperti tidak bertuan.” Mereka sendiri telah tiga kali mendatangi LAMR Siak, tetapi belum ada tanggapan pasti dari kantor tersebut.<sup>44</sup> Harian *Metro Riau* pada tanggal 3 Januari 2016 menerbitkan dua artikel koran yang membahas secara khusus mengenai pentingnya Kesultanan Siak ditegakkan kembali. Pertama, “Kembalinya Kesultanan di Bumi Melayu”, mengharapkan kembalinya Kesultanan Siak Sri Indrapura sebagaimana kesultanan Melayu lainnya di Indonesia sebagai pemangku adat dan pengayom masyarakat, sedangkan “Ada Sultan Adat Berdiri, Tiada Sultan Adat Mati” menjelaskan kemungkinan menelusur keturunan Syarif Kasim I untuk menentukan calon sultan Siak yang baru, beserta syarat-syarat lainnya.<sup>45</sup>

Klaim-klaim sultan Siak maupun ahli warisnya bahkan pernah dibawa sampai ke meja hijau. Pada tahun 2020, empat pemohon mengajukan klaim ahli waris Syarif Kasim II. Mereka mengaku keturunan Tengku Sayid Abdullah bin Tengku Sayid Abbas Alidrus, yang beristrikan Syarifah Zahra Tengku Long Jiwa binti Tengku Besar Syarif Sagoff bin Tengku Sulung Muda Syarif Alwi bin Syarif Kasim I. Pengadilan Agama Pekanbaru memutuskan bahwa bukti-bukti nasab yang diajukan pemohon tidak menguatkan klaim ahli waris, apalagi kalau diperpanjang masih banyak keturunan Syarif Kasim I selain Tengku Sulung Muda, dan tidak

---

<sup>44</sup> “Ahli Waris Kerajaan Siak Kecewa”, *Dumai Pos*, 18 Maret 2009.

<sup>45</sup> *Metro Riau*, 3 Januari 2016, hlm. 2-3.

dijelaskan rinci bagaimana nasib keturunan Tengku Long Putih, yang seharusnya lebih berhak karena merupakan saudara Syarif Kasim II.<sup>46</sup>

#### 4.4. Para pengklaim Sultan Siak

Penulis telah menemukan sebanyak tiga orang pengklaim sultan Siak yang ketiga belas. Mereka Tengku Syatir (Syarif Syatir Abdul Jalil Syaifuddin), Tengku Ridwan (Syarif Ridwan Abdul Jalil Syaifuddin), dan Tengku Nazir (Syarif Nazir Abdul Jalil Syaifuddin). Sementara perwakilan Kekerabatan Resam Kesultanan Siak yang diresmikan pemerintah Kabupaten Siak tidak mengklaim ketuanya, Tengku Muchtar Anum, sebagai seorang sultan.

##### 4.4.1. Tengku Syatir

Tengku Syatir, dengan nama Syarif Muhammad Syatir Abdul Jalil Syaifuddin adalah salah seorang keturunan Tengku Bagus bin Syarif Kasim I. Ia sendiri mengklaim bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 beberapa kerabat sultan Siak melakukan rapat untuk membentuk kembali Kesultanan Siak dan dengan bertahap berupaya memperhatikan kesultanan dan mempersatukan kesejahteraan keluarga kesultanan tersebut. Dalam rapat tersebut, ia diminta untuk menjadi calon sultan. Meskipun pada awalnya ia mengaku keberatan karena masih ada orang yang lebih tua darinya, mereka tetap menyuruhnya untuk memegang tampuk kesultanan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Lihat Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru no. 169/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

<sup>47</sup> “Kronologis Sultan Syarif Kasim Siak Ke XIII”, [https://www.youtube.com/watch?v=e\\_C0RHa2Kdg](https://www.youtube.com/watch?v=e_C0RHa2Kdg), diakses pada 15 Januari 2025.

Tengku Syatir berencana “melantik” diri sebagai sultan Siak yang resmi pada tahun 2017 di “Istana Kerajaan Siak” dengan mengundang sultan dan raja-raja se-Nusantara.<sup>48</sup> Namun, sebelum hal itu dilaksanakan, ia telah menggelar sebuah acara penganugerahan gelar pada tanggal 5 November 2016 di Istana Hinggap Pekanbaru. Dengan berpakaian kesultanan lengkap mirip dengan Syarif Kasim II, Penganugerahan gelar itu diberikan kepada Syarif Kamaruddin Yusof Sani dengan gelar Raja Tua Agung Siak Sri Indrapura, beserta surat keputusan tiga halaman yang diberi materai Rp 5.000,- setiap lembarnya.<sup>49</sup>



**Keterangan** : Syarif Kamaruddin Yusof Sani (kiri) bersalaman dengan Syarif Syatir (kanan) saat penganugerahan gelar di Istana Hinggap Pekanbaru.

**Sumber** : Majelis Kesultanan Siak Sri Indrapura, Riau, Indonesia (Facebook)

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Dokumentasi acara tersebut dapat dilihat pada pranala Facebook “MAJLIS PENGISTIHRAN KETURUNAN DAN BAIHAH TAAT SETIA” <https://www.facebook.com/media/set/?vanity=546890032074782&set=a.1113059972124449>, diakses pada 15 Januari 2025.

Syarif Kamaruddin Yusof Sani adalah seorang keturunan Tengku Muda, putra Syarif Kasim I, yang menetap di Malaysia.<sup>50</sup> Ia telah membentuk Majelis Kesultanan Siak Sri Indrapura yang dengan tujuan menghimpun beberapa keturunan-keturunan sultan Siak di sana.<sup>51</sup> Dalam akun Facebook resminya, ia juga menjelaskan nasib leluhurnya, Tengku Muda, yang diasingkan bersama dengan Tengku Bagus oleh Belanda, dengan narasi yang mirip dengan *Sejarah Kerajaan Siak*.<sup>52</sup> Syarif Kamaruddin Yusof Sani mengunjungi Siak pada tahun 2015<sup>53</sup> dan berziarah ke makam para sultan Siak setahun kemudian.<sup>54</sup> Frekuensi kegiatannya yang cukup intens dan relasinya dengan Tengku Syatir mengantarnya kepada penganugerahan gelar Raja Tua Agung.

Penganugerahan gelar tersebut cukup membuat heboh, setidaknya bagi beberapa instansi pemerintahan Provinsi Riau dan Kabupaten Siak. Banyak tokoh-tokoh Riau dan Siak tidak tahu menahu dengan sosok Syarif

---

<sup>50</sup> Silsilah Syarif Kamaruddin Yusof Sani dapat dilihat di lampiran.

<sup>51</sup> Semua informasi mengenai Syarif Kamaruddin Yusof Sani hanya didapat dari akun Facebook resminya, Majelis Kesultanan Siak Sri Indrapura, Riau, Indonesia, dan tidak ada informasi lebih lanjut selain itu. Dokumentasi yang dipublikasikan di sana justru penting dalam melacak aktivitas Tengku Syatir, karena selain pranala YouTube di atas hanya ini dokumentasi mengenai dirinya. Akun ini terakhir membuat posting tanggal 23 April 2018.

<sup>52</sup> “Fakta Sejarah”, <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=815341881896261&id=546890032074782&set=a.570616086368843>, diakses tanggal 15 Januari 2025.

<sup>53</sup>

<sup>54</sup> “Ziarah Makam-Makam Sultan Siak Sri Indrapura Dan Kerabat-Kerabat”, <https://www.facebook.com/media/set/?set=a.926858344077947&type=3>, diakses tanggal 15 Januari 2025.

Syatir, mulai dari anggota DPRD Siak<sup>55</sup> hingga Lembaga Adat Melayu Riau.<sup>56</sup> Namun, setelah kejadian itu tidak banyak, atau tepatnya tidak ada, aktivitasnya yang dapat dilacak lagi; berdasarkan wawancara beberapa tokoh di Siak, Syarif Syatir mengalami stroke hingga tesis ini ditulis.

#### 4.4.2. Tengku Ridwan

Tengku Ridwan mengaku sebagai salah satu keturunan sultan Siak. Ia mendirikan Kekerabatan Kesultanan Siak Sri Indrapura (KKSSI) pada tanggal 30 Oktober 2018. Tengku Ridwan menabalkan dirinya di Istana Hinggap Pekanbaru, pada tanggal 31 Maret 2019 sebagai “pemangku kesultanan” dengan nama Sri Peduka Yang Maha Mulia yang Dipertuan Besar dan Agung Asy-Syarif Ridwan Abdul Jalil Abdurrahman. Setelah lantunan ayat Al-Quran, kesepakatan resmi diadakan oleh empat datuk pemangku adat dari Siak, Dumai, Minas dan Kampar, kemudian datuk batin Sakai Minas membacakan surat penetapannya. Setelah itu, Tengku Ridwan dan istri duduk di atas ‘singgasana’ untuk diberikan adat Tepung Tawar oleh para datuk dan tamu penting, termasuk camat Senapelan, Fabila Sandi. Sebelum penutupan dan doa, sebuah keris pusaka disematkan oleh panglima Tengku Ibrahim.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> “Sultan ke XIII? Ini kata Komisi II DPRD Siak” <https://redaksiriau.co.id/berita/cetak/8599/sultan-ke-xiii?-ini-kata-komisi-ii-dprd-siak.html>, diakses tanggal 18 Januari 2025.

<sup>56</sup> “Sultan Siak ke XIII, Ketua LAM Riau: Enggak Tahu”, <https://redaksiriau.co.id/berita/detail/8624/sultan-siak-ke-xiii,-ketua-lam-riau:-enggak-tahu.html>, diakses tanggal 18 Januari 2025.

<sup>57</sup> “Tengku Ridwan Syah Dinobatkan Sebagai Pemangku Kesultanan Siak”, <https://www.berazam.com/read-10664-tengku-ridwan-syah-dinobatkan-sebagai--pemangku->

**Gambar 20**  
**Sosok Syarif Ridwan**



Keterangan : Syarif Ridwan (lima dari kiri), setelah penabalannya pada 31 Maret 2019

Sumber : medialokal.co., <https://medialokal.co/news/detail/7588/daerah/sebanyak-29-datuk--memberi-tengku-ridwan-gelar-sebagai--assyarif-ridwan-abdul-jalil--abdurrahman>, diakses tanggal 18 Januari 2025

Dibandingkan pengklaim sultan lainnya, Syarif Ridwan cukup aktif dalam mengembangkan kegiatan melalui organisasinya. Kepengurusan KKSSI se-Provinsi Riau “ditabalkan” pada tanggal 12 Januari 2020, dengan menghadirkan Komandan Distrik Militer 0301 Pekanbaru<sup>58</sup> cukup rajin “menabalkan” (meresmikan) cabang-cabangnya di berbagai kabupaten/kota

---

[kesultanan-siak.html#sthash.dhEY8UHR.dpbs](https://kesultanan-siak.html#sthash.dhEY8UHR.dpbs), diakses tanggal 18 Januari 2025; “Sebanyak 29 Datuk Memberi Tengku Ridwan Gelar Sebagai As-Syarif Ridwan Abdul Jalil Abdurrahman”, <https://medialokal.co/news/detail/7588/daerah/sebanyak-29-datuk--memberi-tengku-ridwan-gelar-sebagai--assyarif-ridwan-abdul-jalil--abdurrahman>, diakses tanggal 18 Januari 2025.

<sup>58</sup> “Bersama Kepengurusan KKSSI, Korem 031/WB Akan Tetap Menjaga Budaya Melayu Di Riau”, <https://pilarbangsanews.com/2020/01/12/bersama-kepengurusan-kkssi-korem-031-wb-akan-tetap-menjaga-budaya-melayu-di-riau/>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

di Riau seperti Indragiri Hilir,<sup>59</sup> Kecamatan Bukit Batu,<sup>60</sup> Kota Dumai,<sup>61</sup> Minas<sup>62</sup>. Beberapa kegiatan KKSSI yang terlacak adalah kunjungan kepada Ketua DPRD Riau,<sup>63</sup> silaturahmi antar pimpinan cabang,<sup>64</sup> hingga penelusuran sebuah situs makam tua<sup>65</sup> serta pembagian takjil dan masker gratis.<sup>66</sup>

Pemikiran-pemikiran Syarif Ridwan mengenai Kesultanan Siak tidak terlalu banyak dan ambisius. Pada 26 April 2021, Syarif Ridwan mendeklarasikan beberapa hal, diantaranya ia dan lembaganya tidak akan terlibat dalam persengketaan harta sultan Siak dan mendukung penegakan

---

<sup>59</sup> “As-Syarif Ridwan Abdul Jalil Abdurrahmansyah Tabalkan Pengurus KKSSI Inhil”, <https://www.indragirione.com/2020/01/assyarif-ridwan-abdul-jalil-abdurrahmansyah-tabalkan-pengurus-kkssi-inhil>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

<sup>60</sup> “Penguksuhan Penabalan KKSSI Kecamatan Bukit Batu” [https://www.youtube.com/watch?v=T72S55WUXbA&list=PL3LEgU\\_NaAxJC-hj5HKHdVtfnqDkVXRl3&index=14](https://www.youtube.com/watch?v=T72S55WUXbA&list=PL3LEgU_NaAxJC-hj5HKHdVtfnqDkVXRl3&index=14), diakses tanggal 19 Januari 2025.

<sup>61</sup> “Penabalan Kekerabatan Kesultanan Siak Sri Indra Pura Kota Dumai Riau”, <https://www.mediahumaspolri.com/penabalan-kekerabatan-kesultanan-siak-sri-indra-pura-kota-dumai-riau.html>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

<sup>62</sup> “Kekerabatan Kesultanan Siak Sri Indrapura Wilayah Kecamatan Minas Resmi Dikukuhkan”, <https://web.archive.org/web/20240421021044/https://catatanriau.com/news/detail/10379/daerah/siak/kekerabatan-kesultanan-siak-sri-indrapura-wilayah-kecamatan-minas-resmi-dikukuhkan>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

<sup>63</sup> “Ketua DPRD Riau Terima Kunjungan Silaturahmi Pengurus Kekerabatan Kesultanan Siak Sri Indrapura”, <https://www.transriau.com/read-501-15400-2019-11-19-ketua-dprd-riau-terima-kunjungan-silahturahmi-pengurus-kekerabatan-kesultanan-siak-sri-indrapura.html>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

<sup>64</sup> “KKSSI: Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Modal Penting Wujudkan Indonesia Damai”, <https://pelitariu.com/berita/detail/21203/1>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

<sup>65</sup> “KKSSI Rapat dan Bengkalis Telusuri Keberadaan Situs Makam Tua di Terkul Laut”, <https://www.riautrust.com/read-166490-kkssi-rapat-dan-bengkalis-telusuri-keberadaan-situs-makam-tua-di-terkul-laut.html>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

<sup>66</sup> “Kekerabatan Kesultanan Siak Sri Indrapura dan Rumah Aspirasi, Berbagi dan Peduli”, <https://centroriau.id/2021/05/08/kekerabatan-kesultanan-siak-sri-indrapura-dan-rumah-aspirasi-berbagi-dan-peduli/>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

hukum terhadap pelaku perusakan cagar budaya Siak.<sup>67</sup> Ia juga ikut berkomentar saat ‘peninjauan’ pemugaran Istana Peraduan di Siak, dengan menyayangkan barang-barang peninggalan istana yang tidak dijaga, serta tidak melibatkan berbagai pihak-pihak terkait, termasuk ‘kekerabatan kesultanan’.<sup>68</sup>

#### 4.4.3. Tengku Nazir

Klaim ketiga dan cukup kontroversial dilahirkan oleh Tengku Nazir. Setelah ditelusuri, Tengku Nazir merupakan adik dari Syarif Syatir.<sup>69</sup> Tengku Nazir sempat menyuarakan keberatan atas peresmian Kekerabatan Resam dan pengangkatan ketuanya sebagai klaim pewaris kesultanan yang ilegal, begitu juga dengan penobatan Syarif Ridwan. Ia mengaku sebagai pewaris yang sah dan telah mendapat surat keputusan pengadilan agama Kabupaten Siak mengenai ahli waris Tengku Bagus. Ia mengaku sudah sejak tahun 2000 berjuang menjadi sultan, bahkan mengklaim bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 ia telah dilantik sebagai sultan Siak ke-13.

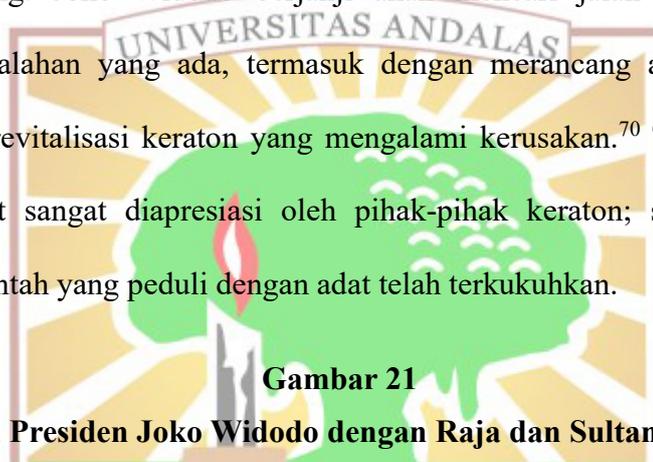
Konteks klaim Tengku Nazir sebagai sultan Siak cukup berbeda jika dibandingkan dengan pengklaim-pengklaim lainnya. Pemicu utama yang

<sup>67</sup> “KKSSI Deklarasikan Sembilan Poin Ikrar Kebulatan Tekad, Siap Bersinergi dengan Pemerintah”, <https://lamanriau.com/2021/04/26/kkssi-deklarasikan-9-poin-ikrar-kebulatan-tekad/>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

<sup>68</sup> “Tengku Ridwan: Pemugaran Istana Peraduan Tanpa Melibatkan Kekerabatan Kesultanan Siak”, <https://www.lintas10.com/tengku-ridwan-pemugaran-istana-peraduan-tanpa-melibatkan-kekerabatan-kesultanan-siak.html>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Iskandar, pegawai Istana Siak, 24 September 2024; Wawancara dengan Budi Rahmad, Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAMR Siak, 4 Desember 2024; Wawancara dengan Tengku Sufyan Tsauri, anggota Kekerabatan Resam, 5 Desember 2024.

penulis lihat adalah adanya “angin segar” yang dihembuskan pemerintah pusat bagi lembaga keraton di Indonesia. Pada 4 Januari 2018, Presiden Joko Widodo mengundang 88 “raja dan sultan dari seluruh Indonesia” ke Istana Bogor. Pertemuan tersebut berisi diskusi mengenai masalah-masalah yang ada di keraton serta masukan-masukan dari raja dan sultan yang diundang. Joko Widodo berjanji akan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang ada, termasuk dengan merancang anggaran khusus untuk revitalisasi keraton yang mengalami kerusakan.<sup>70</sup> Tentu pertemuan tersebut sangat diapresiasi oleh pihak-pihak keraton; setidaknya, citra pemerintah yang peduli dengan adat telah terkukuhkan.



**Gambar 21**

**Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Raja dan Sultan se-Indonesia**



**Keterangan** : Presiden Joko Widodo bersama perwakilan raja dan sultan se-Indonesia setelah pertemuan di Istana Bogor tanggal 4 Januari 2018.

**Sumber** : Kementerian Sekretaris Negara, [https://www.setneg.go.id/baca/index/merawat\\_adat\\_leluhur\\_presiden\\_mendukung\\_pelestarian\\_kerajaan\\_dan\\_kesultanan\\_nusantara](https://www.setneg.go.id/baca/index/merawat_adat_leluhur_presiden_mendukung_pelestarian_kerajaan_dan_kesultanan_nusantara), diakses tanggal 17 Februari 2025

---

<sup>70</sup> “Merawat Adat Leluhur, Presiden Mendukung Pelestarian Kerajaan dan Kesultanan Nusantara”, [https://www.setneg.go.id/baca/index/merawat\\_adat\\_leluhur\\_presiden\\_mendukung\\_pelestarian\\_kerajaan\\_dan\\_kesultanan\\_nusantara](https://www.setneg.go.id/baca/index/merawat_adat_leluhur_presiden_mendukung_pelestarian_kerajaan_dan_kesultanan_nusantara), diakses tanggal 17 Februari 2024.

Berangkat dari citra tersebut, berdirilah sebuah lembaga “keraton”, atau tepatnya lembaga hukum adat, yang bernama Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia (LKPASI). LKPASI) adalah sebuah lembaga yang didirikan pada 24 Februari 2020. Organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan tanah ulayat agar dapat diberdayakan oleh masyarakat adat seluruh Indonesia. Berbeda dengan lembaga-lembaga penghimpun keraton lainnya, LKPASI menghimpun bentuk lembaga adat apapun, termasuk penglingsir, kepala marga, dan kepala persekutuan masyarakat hukum adat. Dengan memperluas cakupannya itu, lembaga kerajaan yang mungkin tidak tidak terhimpun dalam lembaga keraton seperti FSKN dapat bergabung di sini.<sup>71</sup>

Salah satu celah yang dimanfaatkan sebagai tuntutan LKPASI sebagai tuntutan mereka adalah Swapraja. Dalam tiga simposium yang dihimpun LKPASI sejak tahun 2022, mereka membahas tanah ulayat secara hukum, menggali kembali dalil-dalil legal yang sudah ditinggalkan, serta berupaya mencari celah melalui dalil hukum baru. Dalam hal ini, mereka memasukkan swapraja sebagai salah satu bentuk hak ulayat. Mereka menegaskan bahwa penghapusan swapraja yang ditetapkan dalam UU

---

<sup>71</sup> Deskripsi resmi LKPASI terdapat dalam website lkpati.or.id—akses alternatif melalui <https://web.archive.org/web/20240725023641/https://lkpasi.or.id/>, diakses tanggal 18 Februari 2025. LKPASI tidak pernah menyebutkan asal keanggotaan lembaganya, yakni siapa dan dari lembaga adat mana. Namun, berdasarkan observasi penulis, cakupan lembaga tersebut amat luas, mulai dari lembaga adat kerajaan kecil seperti Raja Gunung Sahilan di Kampar dan Raja Huristak di Padang Lawas, hingga lembaga kerajaan baru seperti Praja Mangkualaman—pecahan dari Praja Pakualam, yang kepala prajanya menjabat sebagai wakil gubernur Yogyakarta—dan Diradja Air Tiris—mendeklarasikan diri tahun 2020.

nomor 5 tahun 1960 adalah bentuk ketidakadilan pemerintah terhadap masyarakat adat, dan dengan dibukanya celah pengelolaan tanah swapraja melalui PP no. 18 tahun 2021—implementasi pertemuan raja dan sultan seluruh Indonesia tadi—maka kepala masyarakat hukum adat—termasuk raja dan sultan—dapat mengklaim tanah-tanah bekas swapraja untuk dikelola demi kesejahteraan masyarakat adat.<sup>72</sup>

Pada 14 Mei 2022, Syarif Nazir menabalkan diri sebagai sultan Siak yang baru. Penabalan Syarif Nazir dilakukan di rumah makan Pondok Patin H.M. Yunus. Dengan pakaian kebesaran hitam dan dinaungi payung kuning, Syarif Nazir diambil sumpahnya di hadapan (keturunan) Datuk Empat Suku, kemudian duduk di sebuah “singgasana” sementara tamu yang lain duduk di lantai. Rekaman Nobat Terengganu mengiringi acara tersebut. Setelah itu, ia memberi sepatah kata mengenai upacara ini, lalu ditutup dengan doa dan makan bersama.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Simposium LKPASI terbaru dilaksanakan pada 3-6 September 2024 di Balikpapan, lihat <https://www.youtube.com/live/2yIsulBuYM4?si=VqV4LcLjsPMIOoFM>, diakses tanggal 17 Februari 2024.

<sup>73</sup> Prosesi penobatan Syarif Nazir di Rumah Makan Pondok Patin H.M. Yunus dapat dilihat pada pranala berikut, “Bukan Main Gagahnya Sultan Siak ke 13, inilah Acara Prosesi Penabalan Sultan Siak yg ke-13”, [https://www.youtube.com/watch?v=sewpjMwPvLc&list=PL3LEgU\\_NaAxJC-hj5HKHdVtfnqDkVXRl3&index=12&t=2481s](https://www.youtube.com/watch?v=sewpjMwPvLc&list=PL3LEgU_NaAxJC-hj5HKHdVtfnqDkVXRl3&index=12&t=2481s), diakses tanggal 29 Juli 2023.

**Gambar 22**  
**Proses Penabalan Syarif Nazir**



Keterangan : Kiri atas, proses penabalan Syarif Nazir, dengan membaca ikrar; kanan atas, perwakilan Datuk Empat Suku menyentuhkan keris ke pundak sultan; bawah kiri, sultan duduk di singgasana dan bersiap menerima “benda pusaka”; kanan bawah, “titah” oleh Syarif Nazir.

Sumber : YouTube, Bukan Main Gagahnya Sultan Siak ke 13, inilah Acara Prosesi Penabalan Sultan Siak yg ke-13, <https://www.youtube.com/watch?v=sewpjMwPvLc&t=1961s>, diakses tanggal 17 Februari 2024.

Pada 13 Juni, Syarif Nazir mengunjungi Selatpanjang dan disambut dengan meriah oleh Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil. Setelah arak-arakan sultan yang menaiki becak, bupati menyambut sang sultan di depan kantor bupati Kepulauan Meranti, dilanjutkan dengan kata sambutan dan Tepung Tawar. Syarif Nazir menganugerahkan gelar Datuk Tuah Amanah Jasa Negeri<sup>74</sup> dan sebilah keris kepada bupati tersebut. Muhammad

<sup>74</sup> “Bupati Adil Terima Gelar Datuk Tuah Amanah Jasa Negeri dari Sultan Siak Sri Indrapura”, <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/640431/bupati-adil-terima-gelar-datuk-tuah-amanah-jasa-negeri-dari-sultan-siak-sri-indrapura>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

9

Adil menyatakan, “Sebagai orang Meranti, kita harus bersyukur putra asli Meranti telah ditetapkan menjadi Sultan Siak ke XIII yang ditabalkan di Pekanbaru”.<sup>75</sup> Syarif Nazir bahkan diundang menghadiri Sidang Paripurna HUT Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 19 Desember.<sup>76</sup>

### Gambar 23

#### Kunjungan Syarif Nazir ke Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti



Keterangan : Kiri: Syarif Nazir disambut oleh Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, kanan: Syarif Nazir dan Muhammad Adil beserta rombongan menziarahi makam salah seorang keturunan sultan Siak.

Sumber : targetriau.com, <https://www.targetriau.com/2022/06/kembali-ke-tanah-kelahiran-bupati-adil-sambut-sultan-siak-ke-xiii.html>, diakses tanggal 17 Februari 2025.

28

Syarif Nazir bergabung ke dalam Lembaga Komunikasi Perangkat

Adat Seluruh Indonesia (LKPASI), satu dari sekian banyak lembaga tandingan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN). LKPASI saat ini sedang memperjuangkan tanah ulayat agar dapat dikelola oleh “perangkat adat”, termasuk sultan, raja, datuk, penglingsir, dan sebagainya. Setiap tahun LKPASI menyelenggarakan semacam “workshop” untuk membahas

<sup>75</sup> “” <https://riaupos.jawapos.com/kepulauan-meranti/2253557081/sultan-siak-xiii-serahkan-sebilah-keris-kepada-bupati-meranti-h-adil>

<sup>76</sup> “Hadiri HUT Ke-14 Kabupaten Kepulauan Meranti, Bupati Ucapkan Selamat”, <https://prokopim.bengkaliskab.go.id/web/cetakberita/14091>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

hal ini. Syarif Nazir pada tahun 2023 mengikuti “workshop” yang diadakan di Jakarta. Ia juga bersuara agar Swapraja Siak ditegakkan kembali dan Istana Siak dikembalikan kepada “yang punya”, yakni pewaris kesultanan Siak.

### Gambar 24

#### Syarif Nazir dalam Simposium LKPASI 2023



Keterangan : Syarif Nazir (paling tengah) dalam simposium LKPASI 2023, dihadiri oleh staf presiden Ali Mochtar Ngabalin

Sumber : Tinta Riau, <https://www.tintariau.com/hut-lkpasi-ketiga-di-jakarta-tengku-nazir-tampil-sebagai-narasumber-seminar.html>, diakses tanggal 17 Februari 2025

#### 4.5. Kontroversi Klaim Sultan Siak

Ada beberapa faktor yang menimbulkan kontroversi dalam kemunculan sultan Siak yang baru. Pertama, calon penerus yang jelas sudah tidak bisa dipastikan lagi. Seandainya ada seorang putra kandung dari Syarif Kasim II, atau pihak kerabat sultan Siak dan lembaga adat di Siak menerima Tengku Long Putih dan keturunannya sebagai penerus takhta, hal ini mungkin tidak akan terjadi. Di sisi lain, keturunan yang potensial (dari Tengku Bagus atau lainnya) terlalu banyak dan

menyebarkan di berbagai tempat di Riau. Pihak LAMR (Provinsi Riau dan Kabupaten Siak) dan Kekerabatan Resam menyatakan bahwa semua Tengku dari keturunan Syarif Kasim I mempunyai potensi (dengan kata lain, berhak) menjadi sultan Siak.<sup>77</sup> Namun, dalam kasus Kekerabatan Resam, pemilihan Tengku Muchtar Anum yang merupakan keturunan Syarif Ismail malah menambah kemungkinan potensi dari keturunan sultan lainnya, meskipun dapat juga dilihat bahwa pilihan tersebut dianggap netral dibandingkan memilih keturunan Tengku Bagus atau yang lain.

Kedua, lembaga yang ada dan dapat bertanggung jawab untuk mendirikan kembali Kesultanan Siak Sri Indrapura tidak kuat. Syarif Nazir tidak membentuk lembaga apapun dan bertindak atas namanya sendiri. Kalaupun ia dapat membuat acara dengan seorang bupati, yang demikian menampakkan dukungan pemerintah, hal ini kandas karena Muhammad Adil kemudian ditangkap atas tindak pidana korupsi.<sup>78</sup> KKSSI bentukan Syarif Ridwan sejauh ini hanyalah sebuah lembaga dengan sedikit program yang tampak, dan memiliki lobi yang kurang kuat. Meski mereka dapat mengundang pejabat seperti komandan militer, seolah-olah ini adalah sebuah lobi, nyatanya tidak tampak aksi lebih lanjut. Kekerabatan Resam yang merupakan lembaga resmi dan diakui oleh pemerintah Kabupaten Siak sebagai perwakilan resmi Kesultanan Siak ternyata juga tidak memiliki lobi yang kuat. Terakhir Kekerabatan Resam menunjukkan “aksi” kekuatannya adalah ketika pemerintah pusat berencana mengelola tambang minyak Blok Rokan yang

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Budi Rahmad, 4 Desember 2024; Wawancara dengan Tengku Sufyan Tsauri, 5 Desember 2024.

<sup>78</sup> “KPK Tetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil Tersangka TPPU” <https://www.antaraneews.com/berita/4031718/kpk-tetapkan-bupati-kepulauan-meranti-muhammad-adil-tersangka-tppu>, diakses tanggal 18 Februari 2025.

sebelumnya dikelola Chevron. Kekerabatan Resam menganggap bahwa wilayah itu dulunya termasuk bagian dari Kesultanan Siak, sehingga mereka melakukan jajak pendapat dengan DPR di Jakarta pada 9 Februari 2021.<sup>79</sup> Tidak ada tindak lanjut setelahnya.

Ketiga, baik dari Kekerabatan Resam maupun pengklaim sultan Siak tidak terlalu mengetahui seluk beluk Kesultanan Siak, baik secara umum maupun detail. Banyak pihak menunjukkan bahwa *Bab al-Qawaid* menyediakan prosedur pengangkatan seorang sultan, meskipun tidak ada satu katapun yang menyinggung suksesi takhta dalam kitab tersebut. Bahkan, sejarah Siak menunjukkan keragaman suksesi takhta, mulai dari jalan damai dengan penunjukan Raja Muda hingga pertikaian antar pangeran dengan dukungan pembesar kerajaan. Namun, sebagian besar suksesi takhta Siak dicapai dengan kesepakatan Datuk Empat Suku. Inilah yang diingat-ingat oleh pengklaim sultan baru, sehingga masing-masing mereka memiliki Datuk Empat Suku sendiri. Datuk-datuk tersebut juga mengklaim dirinya berasal dari keturunan Datuk Empat Suku yang lama, tetapi sebenarnya hal ini lebih sulit dilacak lagi, kecuali ada silsilah resmi dan cara penentuan Datuk Empat Suku. Prosedur inipun tidak pernah tercatat dalam sejarah Siak, dan organisasi yang menghimpun keturunan Datuk Empat Suku tidak pernah dibentuk.

Para pengklaim sultan Siak seringkali mengabaikan aspek lain dari sejarah Kesultanan Siak sendiri. Dalam hal simbolisme dan adat, misalnya, mereka

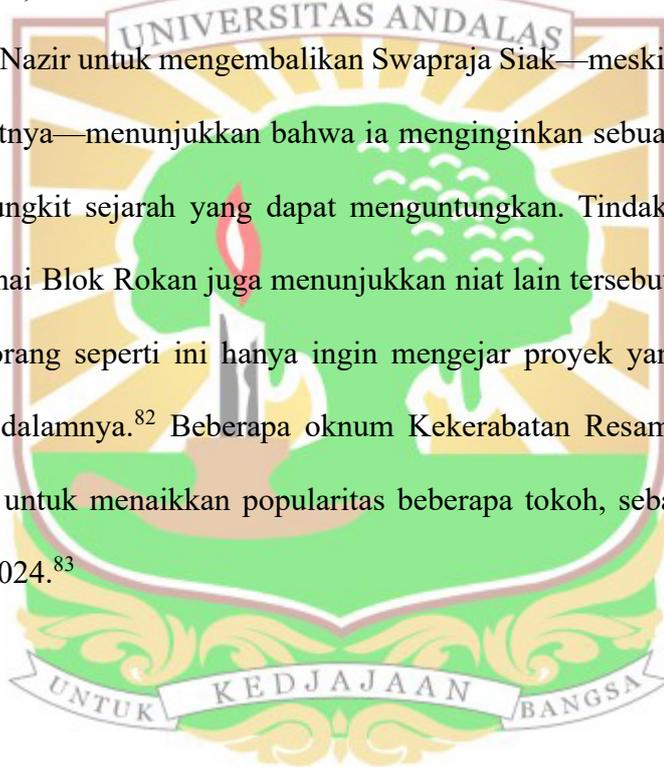
<sup>79</sup> “Keluarga Kesultanan Siak Sri Indrapura Utus Perwakilan Rapat Blok Rokan di DPR RI”, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/64967/2021/02/08/keluarga-kesultanan-siak-sri-indrapura-utus-perwakilan-rapat-blok-rokan-di-dpr-ri#sthash.q12Q5wsg.dpbs>, diakses tanggal 18 Februari 2025.

menyesuaikan tradisi masyarakat Melayu ke dalam adat penabalan, atau terjatuh dalam inovasi. Dalam penobatan Syarif Ridwan, adat khusus yang dipakai adalah Tepung Tawar, tradisi yang biasa dilakukan ketika menyambut tamu atau dalam pernikahan. Alih-alih menghadirkan Datuk Empat Suku yang dahulu biasa terlibat dalam penentuan penerus takhta Siak, ia mengundang banyak datuk dari berbagai tempat yang ternaung dalam KKSSI. Penabalan Syarif Nazir lebih fatal: meskipun mungkin mengetahui bahwa musik Nobat mengesahkan pertabalan raja, ia memakai rekaman suara Nobat Terengganu sebagaimana penabalan Tuanku Abdullah dari Pahang sebagai Yang Dipertuan Agong 2019; penabalnya sendiri dilaksanakan di sebuah rumah makan, yang tidak ada sangkut pautnya dengan warisan Kesultanan Siak.

Kalaupun aspek-aspek seperti itu telah diketahui, pengklaim sultan belum bisa merumuskan apa yang akan dilakukan seorang sultan dalam kapasitasnya. Misalnya, apabila kapasitasnya sebagai pelestari adat dan budaya, peran tersebut telah diambil LAMR Siak, sedangkan sebagai pelestari sejarah, peran itu juga telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Siak. Bagi Syarif Nazir, perannya saat ini adalah memperjuangkan Swapraja Siak, tetapi masyarakat adat untuk mewujudkan swapraja tersebut tidak ada. Mencampurkan swapraja dengan tanah ulayat sendiri sudah rancu. Menurut undang-undang dan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, swapraja adalah sebuah daerah yang sifatnya demokratis, kecuali bahwa kepala daerahnya adalah raja atau sejenisnya yang kekuasaannya hanya

6 terletak pada istana dan tradisinya,<sup>80</sup> sedangkan tanah ulayat adalah tanah yang dikelola oleh masyarakat hukum adat yang masih ada, dan pengelolaannya tidak boleh bertentangan dengan hukum negara.<sup>81</sup>

Keempat, ada niat lain di balik restorasi Kesultanan Siak Sri Indrapura. Ambisi Syarif Nazir untuk mengembalikan Swapraja Siak—meskipun tidak terlalu paham hakekatnya—menunjukkan bahwa ia menginginkan sebuah kuasa tertentu dengan mengungkit sejarah yang dapat menguntungkan. Tindakan Kekerabatan Resam mengenai Blok Rokan juga menunjukkan niat lain tersebut. Bagi beberapa pihak, orang-orang seperti ini hanya ingin mengejar proyek yang mungkin ada pendanaan di dalamnya.<sup>82</sup> Beberapa oknum Kekerabatan Resam memanfaatkan posisi mereka untuk menaikkan popularitas beberapa tokoh, sebagaimana dalam Pilkada Siak 2024.<sup>83</sup>



---

<sup>80</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 1957, penjelasan pasal 2.

<sup>81</sup> Undang-undang nomor 5 tahun 1960, penjelasan umum II.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Budi Rahmad, 4 Desember 2024; Wawancara dengan Tengku Sufyan Tsauri, 5 Desember 2024.

<sup>83</sup> “Bagi Kekerabatan Resam Kesultanan Siak Alfredri Sudah Banyak Berbuat”, <https://riaupos.jawapos.com/siak/2255189933/bagi-kekerabatan-resam-kesultanan-siak-alfedri-sudah-banyak-berbuat>, diakses tanggal 19 Januari 2024; “Kekerabatan Resam Kesultanan Siak Akui Alfredri Sudah Banyak Berbuat Untuk Daerah”, <https://riaubernas.com/news/detail/13493/kekerabatan-resam-kesultanan-siak-akui-alfedri-sudah-banyak-berbuat-untuk-daerah>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

## BAB V

### KESIMPULAN

Kesultanan Siak Sri Indrapura, yang berdiri sejak tahun 1723 hingga 1858, memiliki identitas unik yang mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan politik di wilayahnya selama masa kemerdekaan. Kesultanan ini didirikan oleh Raja Kecil, seorang tokoh yang berasal dari Minangkabau dan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan tatanan politik serta kebudayaan di Siak.

Pemerintahan Kesultanan Siak secara umum menunjukkan dua corak utama yang mencerminkan latar belakang para sultan yang memerintah. Pertama, corak pemerintahan Melayu terlihat pada masa kekuasaan Sultan Mahmud Syah, Sultan Ismail, dan Sultan Yahya. Pada periode ini, nilai-nilai dan tradisi Melayu sangat menonjol dalam tata kelola pemerintahan, simbolisme adat, serta hubungan masyarakat. Kedua, corak perantauan Minangkabau atau Kacu terlihat selama pemerintahan Sultan Alamuddin dan Sultan Muhammad Ali. Pengaruh budaya dan jaringan perantauan Minangkabau membawa dinamika baru dalam sistem politik serta interaksi ekonomi di wilayah Kesultanan Siak.

Dinasti Syahabuddin yang memerintah di kemudian hari tetap mempertahankan sistem pemerintahan yang sudah ada, sekaligus menjaga kesinambungan dengan tradisi politik dan budaya yang diwariskan para pendahulunya. Hal ini menunjukkan upaya konsisten untuk menjaga stabilitas politik serta identitas budaya Kesultanan Siak di tengah berbagai tantangan.

Dari sisi sosial, masyarakat Siak terbagi ke dalam beberapa kelompok utama. Selain masyarakat lokal Siak, terdapat pula komunitas perantauan Minangkabau dan Johor yang memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Di samping itu, terdapat kelompok Timur Asing serta komunitas lain yang turut mewarnai keberagaman masyarakat di wilayah ini.

Secara simbolis, Kesultanan Siak cenderung kuat mempertahankan nilai-nilai adat Melayu. Symbolisme adat Melayu ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upacara kenegaraan, tradisi hukum, serta praktik sosial masyarakat. Identitas Melayu yang kuat ini menjadi salah satu elemen penting yang menjaga persatuan dan kesinambungan Kesultanan Siak selama masa pemerintahannya.

Ketika Kesultanan Siak berada di bawah pengaruh Belanda, terjadi perubahan signifikan dalam corak pemerintahan dan simbolisme budaya. Sistem pemerintahan yang sebelumnya berkembang mulai menerima intervensi dari Belanda, meskipun Kesultanan tetap berupaya mempertahankan beberapa elemen otonomi. Sempitnya ruang kekuasaan membuat para sultan mencari cara untuk tetap menunjukkan eksistensinya.

Salah satu contoh terbaik adalah Sultan Syarif Hasyim, yang melakukan modernisasi kerajaan dengan terinspirasi dari kondisi negeri-negeri Melayu seperti Johor serta pengalamannya selama berada di Belanda. Dalam upaya memperkuat legitimasi dan status kerajaan, Syarif Hasyim mengembangkan simbolisme yang merupakan campuran antara tradisi Eropa dan Melayu. Hal ini menjadikannya

tampil sebagai sosok raja modern yang seolah-olah setara dengan pemerintah kolonial Belanda. Salah satu pencapaian pentingnya adalah pembangunan Bab al-Qawaid, sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa Siak memiliki konstitusi sendiri.

Di sisi lain, Sultan Syarif Kasim II lebih fokus pada pengembangan pendidikan dan tidak menunjukkan sikap pro-Belanda yang kuat. Beliau cermat dalam membaca setiap situasi politik yang dihadapinya, dengan tetap menjaga keseimbangan antara menjaga hubungan dengan Belanda dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Siak. Termasuk di antara kecermatannya adalah mengambil sikap kooperatif ketika Jepang menduduki wilayahnya serta mendukung Republik Indonesia saat Revolusi Kemerdekaan.

Sultan Syarif Kasim II sempat berupaya mengembalikan kekuasaannya melalui gagasan Swapraja Siak, yang diperjuangkannya sejak pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Meskipun telah berhasil mengumpulkan banyak tanda tangan dukungan, respons pemerintah pusat dan daerah tetap acuh tak acuh. Akibatnya, gerakan Swapraja Siak meredup, serupa dengan nasib swapraja-swapraja lainnya di Indonesia belasan tahun kemudian. Meskipun upaya tersebut gagal, identitas Siak sebagai wilayah dan kesultanan tidak pudar. Hal ini terlihat dari banyaknya kajian akademik mengenai Siak serta perkembangan signifikan ketika Kabupaten Siak terbentuk pada tahun 1998. Identitas sejarah Kesultanan Siak dimanfaatkan sebagai potensi untuk pengembangan pariwisata yang kaya akan nilai budaya dan sejarah.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura mengalami perubahan, baik dari segi bentuk maupun maknanya. Dari bentuk, Kesultanan Siak pada awalnya merupakan sebuah entitas monarki campuran Minang-Melayu di pesisir timur Sumatera, kemudian identitas kesultanan di masa kekuasaan Belanda telah dialihkan kepada simbolisme-simbolisme tertentu, karena kekuasaan sultan semakin terbatas. Ketika Kesultanan Siak tidak ada lagi, sisa-sisa peninggalannya menjadi modal bagi penyusunan identitas Kesultanan Siak, dengan interpretasi sesuai zaman penyusunannya. Pada awalnya, identitas Kesultanan Siak digunakan sebagai penunjang nasionalisme Indonesia di daerah Riau, kemudian berkembang lagi menjadi modal pariwisata sejarah dan budaya Kabupaten Siak.

Fenomena baru kemudian muncul dalam bentuk klaim-klaim terkait Kesultanan Siak. Hal ini dimulai begitu Kabupaten Siak mengembangkan pariwisata sejarah dan budaya, sekaligus membentuk citra Siak menggunakan peninggalan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Meskipun Lembaga Kekerabatan Resam Kesultanan Siak Sri Indrapura dibentuk secara tidak resmi pada tahun 2003, lembaga ini tidak pernah mengklaim kesultanan dan berusaha membuat kesan legitimasi peninggalan kesultanan untuk pemerintah daerah Kabupaten Siak. Sementara itu, beberapa orang yang mengaku keturunan sultan Siak mulai mengklaim dan membicarakan peninggalan kesultanan. Awalnya, klaim tersebut hanya berkaitan dengan pewarisan harta kesultanan. Namun, seiring waktu, klaim ini berkembang menjadi perebutan gelar sultan. Faktor-faktor seperti garis suksesi yang tidak jelas, ketidaksetujuan di antara keturunan yang bercabang, serta motivasi

tertentu menyebabkan upaya pendirian kembali Kesultanan Siak menimbulkan kontroversi.

Klaim pewaris dan perebutan gelar tersebut menunjukkan adanya dinamika yang kompleks di sekitar identitas Kesultanan Siak pada masa modern. Beberapa pihak melihat upaya ini sebagai bentuk pelestarian sejarah dan budaya, sementara pihak lain memandangnya sebagai ambisi politik atau upaya pribadi yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Klaim tentang sultan Siak ke-13 sampai tesis ini ditulis masih merupakan perkara kontroversial dan belum selesai. Terlepas dari berbagai kontroversi yang muncul, fenomena tersebut mencerminkan betapa kuatnya nilai simbolis dan sejarah Kesultanan Siak dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun demikian, fenomena sultan Siak baru ini harus dianggap sebagai efek samping alih-alih sebuah konsekuensi dari otonomi daerah pasca Reformasi. Hal ini disebabkan para aktor, yang belum pernah atau jarang terdengar oleh publik, baru muncul ke permukaan takkala Kabupaten Siak telah memapankan dan melestarikan identitas Kesultanan Siak yang telah diarahkan kepada aspek budaya Melayu kabupaten tersebut.